WALIKOTA SUBULUSSALAM

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tengtang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur yang digunakan pada tahapan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disajikan kedalam sistem informasi (SIPD);

d. bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tengtang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur belum memuat Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, maka perlu menunggu aturan lebih lanjut;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

20. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019-2024**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah

Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
19. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
27. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

28. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
29. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
30. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
31. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
32. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
33. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
34. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
35. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
36. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
37. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
38. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
39. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
40. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
41. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
42. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

43. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
44. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
45. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
46. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
47. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.
48. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
49. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
50. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
51. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
52. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 2

1) RPJMD dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima)tahun yang menjabarkan:
   a. visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas

Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Aceh serta memperhatikan RPJMD Kabupaten tetangga.

3) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

1) Sistematika RPJMD meliputi:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah;
   e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
   f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah;
   g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
   h. BAB VIII : Kinrja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
   i. BAB IX : Penutup.

2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan perencanaan RPJMD;
   b. pelaksanaan RPJMD; dan
   c. hasil RPJMD.

3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala BAPPEDA.

4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan

rencana pembangunan Daerah yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 04 November 2019

WALIKOTA SUBULUSSALAM

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
Pada Tanggal, 04 November 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SUBULUSSALAM

TAUFIT HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2019 NOMOR 38

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ---------- i
DAFTAR TABEL ---------- vii
DAFTAR GAMBAR ---------- xiii

BAB I PENDAHULUAN ---------- I - 1
1.1. Latar Belakang ---------- I - 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ---------- I - 2
1.3. Hubungan Antar Dokumen ---------- I - 4
1.4. Maksud dan Tujuan ---------- I - 9
1.4.1. Maksud ---------- I - 9
1.4.2. Tujuan ---------- I - 10
1.5. Sistematika Penulisan ---------- I – 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM ---------- II - 1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi ---------- II - 1
2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah ---------- II - 1
2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi - II - 1
2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis ---------- II - 2
2.1.1.3. Topografi ---------- II - 2
2.1.1.4. Geologi dan Jenis Tanah ---------- II - 3
2.1.1.5. Hidrologi ---------- II - 5
2.1.1.6. Klimatologi ---------- II - 8
2.1.1.7. Penggunaan lahan ---------- II - 8
2.1.2. Potensi Pengembangan wilayah ---------- II - 9
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana ---------- II - 11
2.1.4. Demografi ---------- II - 14
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ---------- II - 14
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II - 14
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ---------- II - 14
2.2.1.2. Laju Inflasi ---------- II - 16
2.2.1.3. PDRB Per Kapita ---------- II - 17
2.1.1.1. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) II - 18
2.2.1.4. Kemiskinan ---------- II - 19
2.2.1.5. Pengangguran ---------- II - 21
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ---------- II - 22
2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH) ---------- II - 22
2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah -------- II - 23
2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup ---------- II - 24
2.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia --------- II - 25
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ---------- II - 26
2.2.3.1. Seni Budaya ---------- II - 26
2.2.3.2. Cagar Budaya ---------- II - 26
2.2.3.3. Olahraga ---------- II – 26
2.3. Aspek Pelayanan Umum ---------- II - 26
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh ----- II - 26

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar ---------- II - 27
2.3.2.1. Pendidikan ---------- II - 27
A. Angka Partisipasi Murni (APM) ----- II - 27
B. Angka Partisipasi Sekolah (APS) --- II - 28
C. Angka Partisipasi Kasar (APK) ------ II - 29
D. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah - II - 30
E. Rasio Guru terhadap Murid/Siswa II - 31
F. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV ---------- II - 33
2.3.2.2. Kesehatan ---------- II - 33
A. Angka Kematian Ibu (AKI) ---------- II - 34
B. Angka Kematian Bayi (AKB)--------- II - 35
C. Angka Kematian Balita (AKABA) --- II - 36
D. Rasio Posyandu Per Satuan Balita - II - 36
E. Rasio Puskesmas, Klinik, Poskesdes dan Rumah Sakit Per Satuan Penduduk ---------- II - 36
F. Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk ---------- II - 38
G. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) ---------- II - 41
H. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan---------- II - 41
I. Prevalensi Balita Stunting---------- II - 42
J. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (TBC)---------- II - 44
K. Angka Kejadian Demam Berdarah - II - 45
L. Jumlah Penderita Diare ---------- II - 45
M. Penderita HIV/AIDS---------- II - 46
N. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 II - 47
2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II - 48
A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik ---------- II - 48
B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi---------- II - 48
C. Persentase Penduduk Berakses Air Minum---------- II - 49
D. Persentase Areal Kawasan Kumuh II - 50
E. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni ---------- II - 51
2.3.2.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat---------- II - 51
A. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) ---------- II - 51
B. Cakupan Peayanan Bencana Kebakaran ---------- II - 52
2.3.2.5. Sosial---------- II - 52
2.3.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar---------- II - 53

2.3.3.1. Tenaga Kerja ---------- II - 53
2.3.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ---------- II - 54
2.3.3.3. Pangan ---------- II - 55
2.3.3.4. Pertanahan ---------- II - 56
2.3.3.5. Lingkungan Hidup ---------- II - 57
A. Tersusunnya RPPLH Kota Subulussalam ---------- II - 57
B. Tersedianya Dokumen KLHS Kota Subulussalam ---------- II - 57
C. Indeks Kualitas Air ---------- II - 57
D. Indeks Kualitas Udara ---------- II - 58
E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan --- II - 59
2.3.3.6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil ---------- II - 59
A. Persentase Penduduk Ber E KTP -- II - 59
B. Rasio bayi Berakte Kelahiran ------- II - 60
C. Rasio Pasangan Berakte Nikah ---- II - 60
2.3.3.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa -- II - 62
2.3.3.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ---------- II - 62
2.3.3.9. Perhubungan ---------- II - 64
A. Izin Trayek ---------- II - 64
B. Jumlah Terminal Bis ---------- II - 65
C. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan ---------- II - 64
2.3.3.10. Komunikasi dan Informatika ---------- II - 65
2.3.3.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - II - 66
A. Jumlah Koperasi ---------- II - 66
B. Jumlah Usaha Kecil Menengah ---- II - 66
2.3.3.12. Penanaman Modal ---------- II - 67
2.3.3.13. Kepemudaan dan Olah raga ---------- II - 68
A. Jumlah Organisasi Pemuda -------- II - 68
B. Jumlah Organisasi Olah Raga ----- II - 68
C. Jumlah Kegiatan Kepemudaan ---- II - 68
2.3.3.14. Kebudayaan ---------- II - 69
2.3.3.15. Perpustakaan ---------- II - 69
A. Jumlah Perpustakaan ---------- II - 69
B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun ---------- II - 70
C. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan ---------- II - 70
D. Kearsipan ---------- II - 71
2.3.4. Fokus layanan Urusan Pilihan ---------- II - 71
2.3.4.1. Pariwisata ---------- II - 71
A. Kunjungan Wisata ---------- II - 71
B. Tempat Wisata dan Cagar Budaya II - 71
2.3.4.2. Pertanian ---------- II - 72
A. Tanaman Pangan ---------- II - 72

B. Perkebunan ---------- II - 74
C. Peternakan ---------- II - 75
D. Perikanan ---------- II - 76
2.3.4.3. Kehutanan ---------- II - 77
2.3.4.4. Energi dan Sumberdaya Mineral -------- II - 78
2.3.4.5. Pertambangan dan Penggalian ---------- II - 78
2.3.4.6. Perdagangan ---------- II - 79
A. Jumlah Pedagang ---------- II - 79
B. Jumlah Sarana Perdagangan ------- II - 79
2.3.4.7. Perindustrian ---------- II - 80
2.3.4.8. Transmigrasi ---------- II - 81
2.3.5. Penunjang Urusan ---------- II - 81
2.3.5.1. Perencanaan Pembangunan ---------- II - 81
2.3.5.2. Keuangan ---------- II - 82
2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ---------- II - 82
2.3.5.4. Pengawasan ---------- II - 84
2.3.5.5. Sekretariat Dewan ---------- II - 85
2.4. Aspek Daya Saing ---------- II - 85
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ---------- II - 85
2.4.1.1. Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan Non Pangan ---------- II - 85
2.4.1.2. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank ---------- II - 87
2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ---------- II - 88
2.4.2.1. Ketersediaan Daya Listrik ---------- II - 88
2.4.2.2. Rasio ketergantungan ---------- II - 89

BAB III GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM ---------- III - 1
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Masa Lalu Periode Tahun 2015-2019 ---------- III - 2
3.1.1. kinerja Pelaksanaan APBK ---------- III - 3
A. Analisa Realisasi Pendapatan Daerah -------- III - 3
B. Analisis Realisasi Belanja Daerah ---------- III - 10
C. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2015-2019 ---------- III - 11
D. Pembiayaan Daerah ---------- III - 17
E. Neraca Daerah. ---------- III - 19
3.1.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu. ---- III - 25
3.1.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran --------- III - 26
A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah ---------- III - 26
B. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam ---------- III - 27

C. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam ---------- III - 30
3.1.2.2. Analisis Pembiayaan---------- III - 30
A. Analisis Penutup Defisit Riil -------- III - 31
B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran---------- III - 32
3.2. Kerangka Pendanaan ---------- III - 34
3.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja ---------- III - 34
A. Proyeksi Pendapatan Daerah ---------- III - 35
A1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ---------- III - 35
A2. Dana Perimbangan ---------- III - 37
A3. Lain-lain Pendapatan yang Sah--------- III - 38
B. Proyeksi Belanja Daerah ---------- III - 42
C. Proyeksi Pembiayaan Daerah---------- III - 47
D. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama ---------- III - 49
3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan ---------- III - 51

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM ---------- IV - 1
4.1. Permasalahan Pembangunan ---------- IV - 1
4.2. Lingkungan Strategis ---------- IV - 6
4.2.1. Analisis Lingkungan Internal---------- IV - 6
4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal ---------- IV - 7
4.3. Isu Strategis Pembangunan ---------- IV - 18
4.3.1. Peningkatan sumber Penerimaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah ---------- IV - 18
4.3.2. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik; ---------- IV - 18
4.3.3. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan serta Penguatan perdamaian secara berkelanjutan; ---------- IV - 19
4.3.4. Kemandirian pangan;---------- IV - 19
4.3.5. Pengembangan pertanian ; ---------- IV - 19
4.3.6. Pengembangan industri, pariwisata, Ketenagakerjaan dan koperasi dan UMKM;------ IV - 19
4.3.7. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah;---------- IV - 20
4.3.8. Peningkatan kualitas, pelayanan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia; ---------- IV - 20
4.3.9. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;---------- IV - 21
4.3.10. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanggulangan bencana,

pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup. ---------- IV - 21

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA SUBULUSSALAM --- V - 1
5.1. Visi ---------- V - 1
5.2. Misi ---------- V - 2
5.3. Tujuan dan Sasaran ---------- V – 5

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM ---------- VI - 1

BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Kota Subulussalam ---------- VII – 1

BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Subulussalam --- VIII - 1

BAB IX Penutup ---------- IX - 1
9.1. Pedoman Transisi ---------- IX - 1
9.2. Kaidah Pelaksanaan ---------- IX - 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2019---------- II - 1

Tabel 2.2. Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2014---------- II - 9

Tabel 2.3. Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017---------- II - 14

Tabel 2.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam, Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)---------- II - 15

Tabel 2.5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 ---------- II - 16

Tabel 2.6. Laju Inflasi di Aceh Tahun 2010 – 2018 ---------- II - 17

Tabel 2.7. Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ---------- II - 18

Tabel 2.8. Indeks Gini Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 ---------- II - 18

Tabel 2.9. Persentase Penduduk Miskin Di Kota Subulussalam dan Persentase Penduduk Miskin Di Aceh Selatan Dan Aceh Singkil Tahun 2013 - 2017---------- II - 19

Tabel 2.10. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017---------- II - 20

Tabel 2.11. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017 ---------- II - 21

Tabel 2.12. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017 ---------- II - 23

Tabel 2.13. Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017 --------- II - 28

Tabel 2.14. Angka Partisipasi Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2018 ---------- II - 28

Tabel 2.15. Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017 ---------- II - 29

Tabel 2.16. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2014- 2017 ---------- II - 30

Tabel 2.17. Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid/Siswa Tahun 2013-2018---------- II - 32

Tabel 2.18. Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017 ---------- II - 33

Tabel 2.19. Angka Kematian Ibu di Kota Subulussalam Tahun 2013- 2017 II - 34

Tabel 2.20. Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017---------- II - 34

Tabel 2.21. Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017---------- II - 35

Tabel 2.22. Rasio posyandu per satuan balita tahun 2013-2017 Kota Subulussalam ---------- II - 36

Tabel 2.23. Rasio puskesmas, klinik, poskesdes dan Rumah sakit per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2018 -- II - 37

Tabel 2.24. Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017 ---------- II - 39

Tabel 2.25. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017---------- II - 41

Tabel 2.26. Cakupan Balita Gizi Buruk Tahun 2015 – 2017 di Kota Subulussalam ---------- II - 42

Tabel 2.27. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam ---------- II - 44

Tabel 2.28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam ---------- II - 45

Tabel 2.29. Jumlah Penderita Diare Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam ---------- II - 46

Tabel 2.30. Penderita HIV/AIDS Tahun 2015 – 2017 di Kota Subulussalam---------- II - 46

Tabel 2.31. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013 – 2017 di Kota Subulussalam ---------- II - 47

Tabel 2.32. Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017---------- II - 48

Tabel 2.33. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2017---------- II - 49

Tabel 2.34. Persentase Penduduk Berakses Air Minum di Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2018---------- II - 50

Tabel 2.35. Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017---------- II - 51

Tabel 2.36. Jumlah pencari Kerja Yang Terdaftar Menurut Tingkat PendidikanTahun 2017---------- II - 53

Tabel 2.37. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017---------- II - 54

Tabel 2.38. Proporsi kursi DPRD yang diduduki Perempuan di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017 ---------- II - 54

Tabel 2.39. Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarakan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 ----- II - 56

Tabel 2.40. Data Kualitas Udara di Kota Subulussalam---------- II - 59

Tabel 2.41. Data Kualitas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2017 ---------- II - 59

Tabel 2.42. Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2018 ---------- II - 59

Tabel 2.43. Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2017 ---------- II - 60

Tabel 2.44. Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2017---------- II - 61

Tabel 2.45. Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam Tahun 2016-2018 ---------- II - 61

Tabel 2.46. Jumlah Posyandu Aktif di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017 ---------- II - 62

Tabel 2.47. Rasio Akseptor KB dan Jumlah pasangan usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2014-2019.... ---------- II - 63

Tabel 2.48. Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017 II - 63

Tabel 2.49. Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017---------- II - 65

Tabel 2.50. Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2015– 2017 --- II - 66

Tabel 2.51. Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017---------- II - 67

Tabel 2.52. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2016 ---------- II - 69

Tabel 2.53. Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2014-2016---------- II - 71

Tabel 2.54. Nama dan Lokasi Objek Wisata Yang ada di Kota Subulussalam Tahun 2017 ---------- II - 72

Tabel 2.55. Jumlah luas Panen, luas tanam, produksi dan Pruktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017---------- II - 73

Tabel 2.56. Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Unggulan Perkebunan di Kota Subulussalam tahun 2015-2017---------- II - 74

Tabel 2.57. Populasi Ternak di Kota Subulussalam Pada Tahun 2014-2017---------- II - 75

Tabel 2.58. Produksi Ikan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017 -------- II - 76

Tabel 2.59. Luas Kawasan Hutan di Kota Subulussalam ---------- II - 77

Tabel 2.60. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Subulussalam ---------- II - 78

Tabel 2.61. Perusahaan Pertambangan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2016---------- II - 78

Tabel 2.62. Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2017---------- II - 79

Tabel 2.63. Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2017---------- II - 80

Tabel 2.64. Banyaknya Industri Menurut Jenisnya Diperinci Per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017---------- II - 80

Tabel 2.65. Beberapa Dokumen Perencanaan Daerah Kota Subulussalam - II - 82

Tabel 2.66. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Golongan Di Kota Subulussalam Tahun 2017 II - 83

Tabel 2.67. Tingkat Pendidikan Aparat PNS Menurut Jenis Kelamin di Kota Subulussalam Tahun 2017---------- II - 84

Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam ---------- III - 6

Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam ---------- III - 12

Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 ---------- III - 18

Tabel 3.4. Neraca Pemerintah Kota Subulussalam per 31 Desember Tahun 2015 s/d 2019 ---------- III - 20

Tabel 3.5. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 ---------- III - 27

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam ---------- III - 28

Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam ---------- III - 30

Tabel 3.8. Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 ---------- III - 31

Tabel 3.9. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam - III - 32

Tabel 3.10. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2016-2018 ---------- III - 33

Tabel 3.11. Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2019 s/d Tahun 2023 ---------- III - 41

Tabel 3.12. Proyeksi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2023 (dalam rupiah) ---------- III - 46

Tabel 3.13. Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2019-2023 -- III - 48

Tabel 3.14. Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Subulussalam Tahun 2019-2023 --------- III - 50

Tabel 3.15. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Subulussalam ---------- III - 52

Tabel 3.16. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Subulussalam ---------- III - 54

Tabel 4.1. Identifikasi Isu-Isu Strategis ---------- VI - 13

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 Berdasarkan Misi ---------- V – 6

Tabel 6.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2019-2024 ---------- VI - 2

Tabel 6.2. Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam, 2019-2024-------- VI - 7

Tabel 6.1. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif, 2020-2024---------- VI - 8

Tabel 7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024---------- VII – 1

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2020-2024 ---------- VII - 1

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2020-2024---------- VIII - 2

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan---------- VIII - 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan --- I - 7

Gambar 1.2. Peran dan Fungsi DPRK Dalam Penyusunan RPJMD -------- I – 8

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Subulussalam ---------- II - 1

Gambar 2.2. Peta Geologi di Kota Subulussalam---------- II - 4

Gambar 2.3. Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam---------- II - 4

Gambar 2.4. Peta Hidrologi di Kota Subulussalam---------- II - 6

Gambar 2.5. Peta CAT di Kota Subulussalam ---------- II - 7

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam ---------- II - 13

Gambar 2.7. Persentase Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun keatas di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017---------- II - 22

Gambar 2.8. Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Banda Aceh 2013-2017---------- II - 24

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017 ---------- II - 25

Gambar 2.10. Prevalensi status Gizi Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Tahun 2018 ---------- II - 43

Gambar 2.11. Masalah Status Gizi Balita Aceh (PSG 2015-2017)---------- II - 43

Gambar 2.12. kelompok barang makanan yang dikonsumsi rata-rata perkapita dalam sebulan. ---------- II - 86

Gambar 2.13. kelompok barang non makanan yang digunakan rata-rata perkapita dalam sebulan. ---------- II - 87

Gambar 3.1. Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%) III - 4

Gambar 3.2. Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (%) ---------- III - 5

Gambar 3.3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 ------ III - 8

Gambar 3.4. Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019---------- III - 9

Gambar 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 ---------- III - 9

Gambar 3.6. Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019---------- III - 10

Gambar 3.7. Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019 ---------- III - 13

Gambar 3.8. Persentase Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2019 ---------- III - 14

Gambar 3.9. Proporsi Komponen Belanja Langsung Terhadap total Belanja Langsung Tahun 2015-2019 ---------- III - 14

Gambar 3.10. Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015-2019 ---------- III - 15

Gambar 3.11. Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019---------- III - 16

Gambar 3.12. Persentase Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung teradap Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-20119 ---------- III - 16

Gambar 3.13. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah --- III - 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berisikan penjabaran secara rinci dari tujuan dan cita-cita dibentuknya Kota Subulussalam untuk masa lima tahun yang akan datang sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Subulussalam. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahunan yang berisikan penjabaran visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan, agar masing-masing daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerahnya untuk masa lima tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa "Pemerintah Daerah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, disusun suatu perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan sinergi dengan perencanaan pemerintah yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai kekhasan setiap daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun secara sistematis dan berkelanjutan sesuai rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Proses pemilihan kepala daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 yang telah menghasilkan kepala daerah terpilih dan telah dilantik tanggal 14 Mei 2019, maka Kepala Daerah terpilih harus menyusun RPJM Kota Subulussalam Periode 2019 - 2024. RPJM Kota Subulussalam ini mencakup Agenda Pembangunan periode 2019 - 2024 dengan mempertimbangkan arahan kebijakan RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035, hasil evaluasi RPJM Kota Subulussalam periode 2014-2019 dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk akademisi dan masyarakat perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan juga mempertimbangkan dinamika geostrategic dan analisis atas berbagai tantangan utama yang akan dihadapi dalam pembangunan Tahun 2019 - 2024.

Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam didasarkan pada aspirasi dan keinginan masyarakat daerah yang dijaring melalui beberapa kali lokakarya di daerah dengan melibatkan pihak eksekutif, legislatif, ilmuwan serta tokoh agama, dunia usaha dan pemuka masyarakat. Proses penyusunan RPJMD Kota Subulussalam dilakukan melalui 4 tahapan yaitu : (a) Penjaringan aspirasi masyarakat tentang visi dan misi daerah, (b) Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Subulussalam, (c) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD dan (d) Penetapan RPJMD Kota Subulussalam 2019 – 2024 oleh DPR Kota Subulussalam.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 dilandasi oleh peraturan perundang - undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuat dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9; Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tatacara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
20. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;
21. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2034. (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);
22. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Prangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam tahun 2015 – 2035.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RPJM Kota Subulussalam sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan, dimana penyusunannya harus berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional. Selanjutnya, RPJM Kota Subulussalam dijabarkan menjadi Renstra Perangkat daerah sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan RKPK dan Rencana Kerja Perangkat Kota Subulussalam.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 15 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan atau evaluasi RTRW Daerah beserta rencana rincinya, RPJPD dan RPJMD. Lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 260 mengamanatkan bahwa daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adapun teknis pembuatan dan pelaksanaan KLHS sudah diintegrasikan dalam RPJM Kota Subulussalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada Permendagri ini mengamanatkan bahwa KLHS RPJM Kota Subulussalam dikerjakan bersama dengan penyusunan RPJM Kota Subulussalam, dikerjakan bersama dengan dokumen perencanaan disusun untuk memperkaya dokumen perencanaan, dan bertujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJP, RTRW, RPJM, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

1. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RPJMN (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019); Visi dan Misi dalam RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 selaras dengan Visi, Misi, dan Sembilan agenda Prioritas yang disebut Program Nawacita yang dijabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini.

2. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RPJM Aceh; Visi dan Misi dalam RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 selaras dengan Visi dan Misi yang dijabarkan dalam RPJM Aceh yang berlaku saat ini.

3. Hubungan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 dengan RPJP Kota Subulussalam (Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035); RPJM Kota Subulussalam berpedoman pada RPJP Kota Subulussalam. RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 menjabarkan prioritas pembangunan Tahap II pada RPJP Kota Subulussalam (Tahun 2020-2024).

4. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RTRW Kota Subulussalam (Qanun Nomor 3 Tahun 14 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam

Tahun 2014 – 2024); Pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek keruangan (spasial) menjadi penting dilakukan agar ruang dan sumber daya yang ada dapat memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat berpedoman pada kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2024.

5. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan RKPK; RPJM Kota Subulussalam dijabarkan ke dalam RKPK sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPK sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana tersebut mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBK maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJM Kota Subulussalam pada tahun yang direncanakan. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBK, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBK untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, RKPK yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJM Kota Subulussalam.

6. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Rencana Strategis SKPK (Renstra-SKPK); RPJM Kota Subulussalam menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPK dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-SKPK merupakan penjabaran teknis RPJM Kota Subulussalam yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPK di bawah koordinasi Bappeda.

7. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Rencana Pembangunan Sektoral; Penyusunan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan

provinsi, Pokok-Pokok Pikiran DPRK untuk RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 serta Rekomendasi Musrenbang RPJM Kota Subulussalam Tahun 2020-2024. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan Provinsi Aceh antara lain: Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang tertuang dalam Sustainable Development Goals (SDG's), Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

8. Hubungan RPJM Kota Subulussalam dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); Untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) di RPJM Kota Subulussalam "lebih hijau" dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup, diperlukan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Dalam hal ini, KLHS juga menerapkan prinsip precautionary principles, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

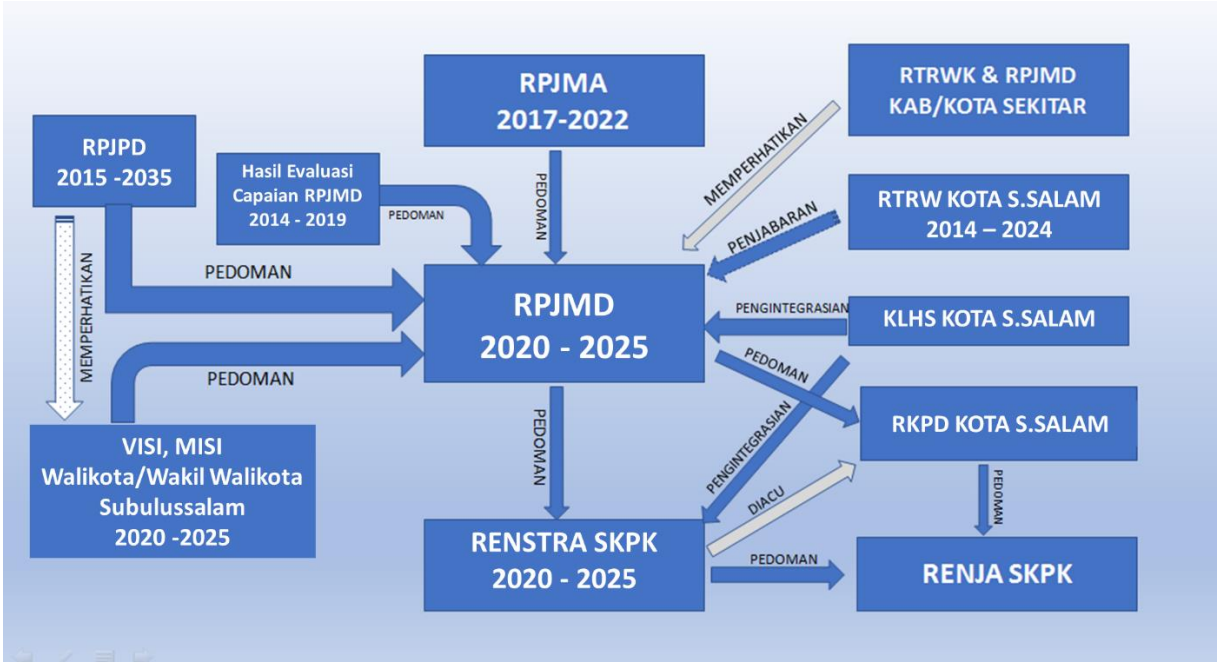

Gambar 1.1. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Hubungan antara RPJMD Kota Subulussalam dengan dokumen perencanaan lainnya secara sistematis dapat dilihat sebagai berikut :

1. Penyusunan dokumen RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan kerangka dasar bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan memperhatikan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta menelaah dokumen Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) Kota Subulussalam.

2. Dokumen RPJMD dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Subulussalam yang dilakukan setiap tahun dan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Selanjutnya kita melihat peran dan fungsi yang dimiliki DPRK Subulussalam sebagaimana ditunjukkan gambar berikut :

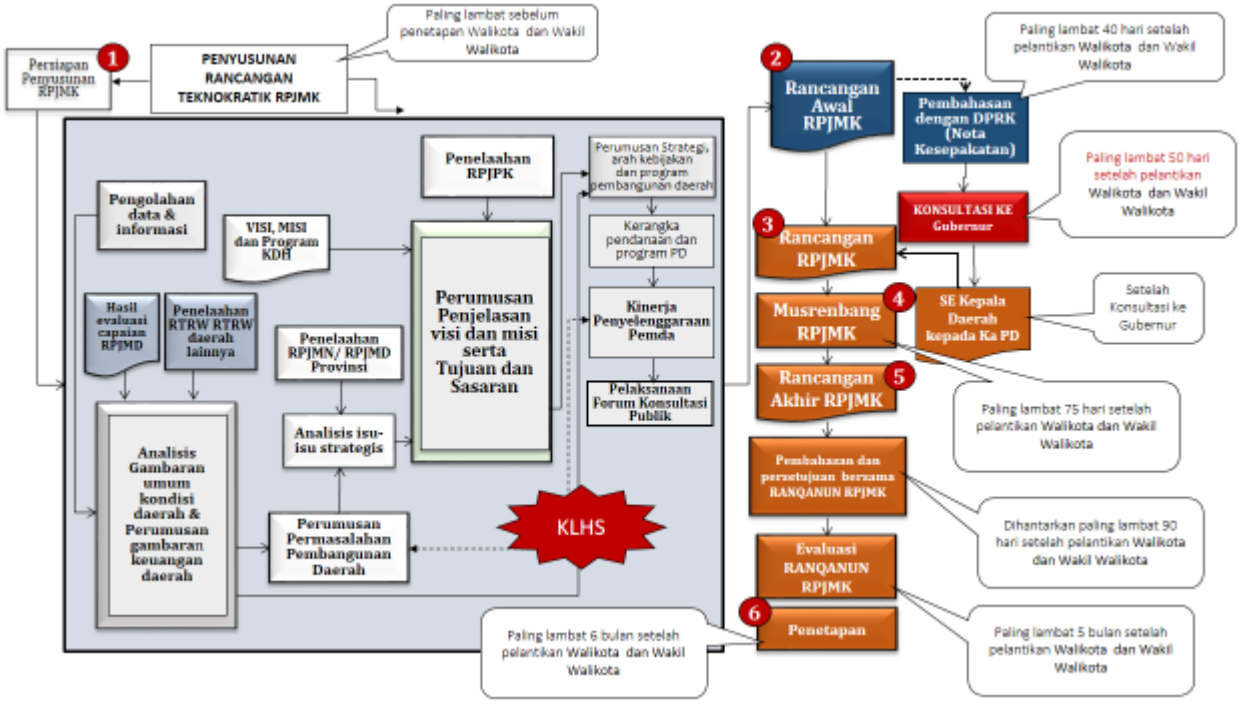

Sumber : Permendagri 86, 2017

Gambar 1.2. Peran dan Fungsi DPRK Dalam Penyusunan RPJMD

Dari Gambar di atas dapat dilihat bahwa sebelum disahkan menjadi Qanun Kota Subulussalam tentang RPJMD, maka terlebih dahulu dilakukan pembahasan dengan DPRK. Pembahasan tersebut akan merumuskan kebijakan umum dan program pembangunan daerah 5 (lima) tahunan, kemudian ditentukan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pagu perprogram setiap SKPK selama 5 (lima) tahun dan hasilnya akan menetapkan indikator kinerja daerah selama periode 2020–2025.

RPJMK Kota Subulussalam sebagai terjemahan dari visi dan misi Walikota periode 2019 - 2024, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMA Tahun 2017-2022, dimana Visi Pembangunan Pemerintah Aceh pada periode tahun 2017-2022

adalah "*Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani*". Selanjutnya RPJM Kota Subulussalam 2019 - 2024 berpedoman pada RPJP Kota Subulussalam Tahun 2015-2035. Adapun penekanan pada RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 adalah: (1) Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas; (2) Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas; (3) Mewujudkan Pembangunan Insfrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat; (4) Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Yang Memiliki Nilai Ekonomi dan Prospek Pasar Yang Baik; (5) Mewujudkan Pemerintahan Baru, Profesional dan Transparan; (6) Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Penguatan Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat.

RPJMK Kota Subulussalam selanjutnya dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2020 – 2024 ikut memperhatikan keterkaitan RPJM Kabupaten tetangga. Kabupaten Aceh Selatan dan Kabuapaten Singkil yang merupakan wilayah yang paling berdekatan dengan Kota Subulussalam. Visi RPJMK Aceh Selatan 2018-2023 adalah "*Terwujudnya Aceh Selatan Yang Berkeadilan Secara Sosial Dan Ekonomi*". Berdasarkan pada visi tersebut dapat di tarik beberapa keyword utama, yaitu 'Berkeadilan', dan "Sosial serta Ekonomi". Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, RPJMK Kota Subulussalam Tahun 2019 -2024 juga mempedomani dokumen RTRWK Kota Subulussalam dan mengarah pada terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 disusun dengan maksud:

1. Untuk menyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam untuk periode lima tahun, yang memuat visi, misi Kepala Daerah, arah kebijakan, strategi dan program pembangunan. Kemudian menjadi pedoman jangka menengah bagi Pemerintah Kota Subulusalam dalam menentukan strategi dan arah pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas sesuai dengan potensi dan kondisi riil yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;

2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah (SKPK) dalam lingkup Pemerintah Kota Subulussalam.

1.4.2. Tujuan

RPJM Kota Subulussalam 2019 - 2024 ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi dalam bentuk strategi, arah kebijakan, dan menetapkan program pembangunan daerah;
2. Untuk menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mencapai masyarakat yang Islami dan tangguh;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Kota Subulussalam, dan perencanaan serta penganggaran;
6. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkeadilan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJM yang memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM

Dalam bab ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah sebagai dasar utama penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Menjelaskan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM

Bab ini memuat penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah pada akhir periode masa jabatan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA SUBULUSSALAM

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik lokasi dan wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Subulussalam memiliki luas wilayah 1.391 Km^2 yang terbagi kedalam 5 (lima) Kecamatan, yaitu Simpang Kiri, Penanggalan, Runding, Sultan Daulat dan Longkib. Pada Tahun 2017 Kampong (Desa) di Kota Subulussalam seluruhnya berjumlah 82 kampong, yang terdiri dari 17 Kampong di Kecamatan Simpang Kiri, 13 Kampong di Kecamatan Penanggalan, 23 Kampong di Kecamatan Runding, 19 Kampong di Kecamatan Sultan daulat, 10 Kampong di Keacamatan Longkib. Berikut disajikan peta adminstrasi Kota Subulussalam dan rincian luas wilayah kecamatan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.1.

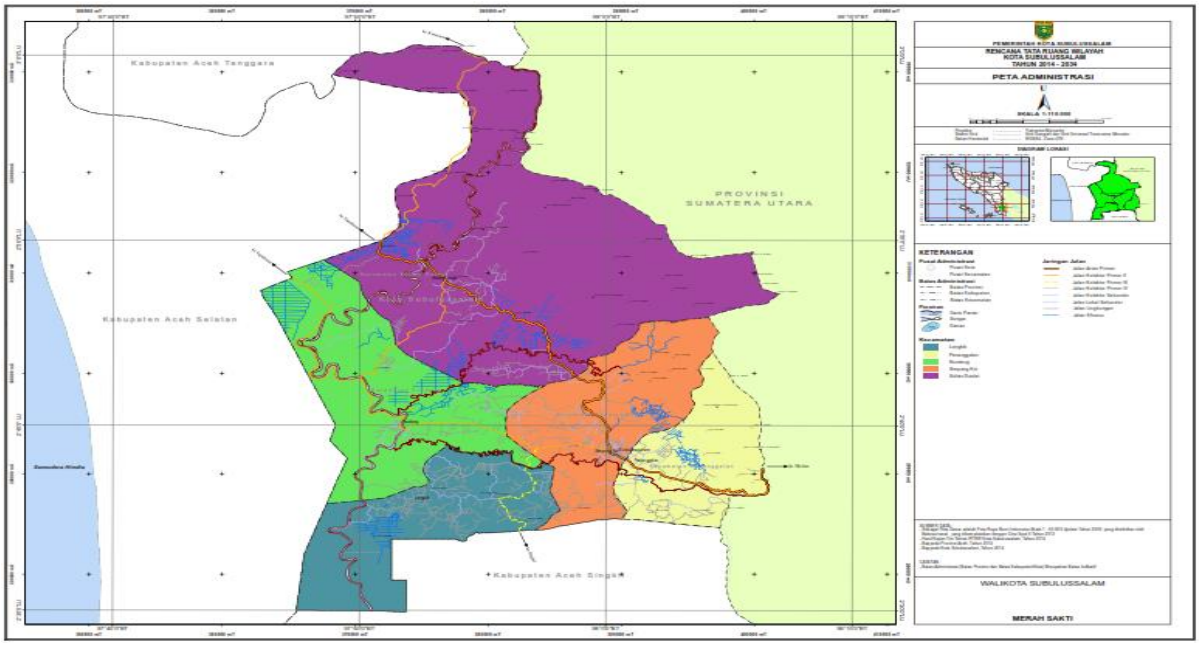

Sumber: RTRWKota Subulussalam 2014 - 2034

Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Subulussalam

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Masing-Masing Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2019

No.	Nama Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Kampong
1	Simpang Kiri	70,56	17
2	Penanggalan	45,82	13
3	Runding	229,88	23
4	Sultann Daulat	162,11	19
5	Longkib	107,84	20

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kota Subulussalam terletak pada posisi 2° 27' 30" - 3° 00' 00" LU dan 97° 45' 00' - 98° 10' 00" BT dengan luas wilayah 118.404,48 Ha (RTRW Kota Subulussalam 2014-2034). Secara administratif, wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada dibagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara	:	berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
Sebelah timur	:	berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara.
Sebelah selatan	:	berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
Sebelah barat	:	berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

2.1.1.3. Topografi

Kondisi topografi dan jarak kampong/desa pada masing – masing kecamatan bervariasi, seperti dijelaskan berikut:

1. Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri

Keadaan topografi di kecamatan Simpang Kiri pada umumnya datar, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sekelondang dan Desa Subulussalam Barat. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri (Desa Subulussalam) adalah Desa Makmur Jaya sejauh 11,40 Km dan desa yang terdekat adalah Desa SubulussalamTimur sejauh 0,17 km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk dijangkau dengan semua jenis kendaraan.

2. Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan

Pada umumnya berbukit-bukit, hanya lima desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Lae Motong, Desa Cepu, Desa Penanggalan, Desa Dasan Raja dan Desa Penanggalan Timur. Ketinggian rata-rata antara 70-221 mdpl. Desa yang terjauh dari ibukota Kecamatan Penanggalan (Desa Penanggalan) adalah Desa Lae Ikan sejauh 8,06 Km. Desa Lae Ikan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pak-Pak Barat (Provinsi Sumatera Utara).Desa yang terdekat dengan ibukota Kecamatan adalah Desa Dasan Raja dan Penanggalan Barat sejauh 0,5 Km. Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang masuk ke provinsi Aceh wilayah barat.

3. Keadaan topografi Kecamatan Rundeng

Pada umumnya datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 mdpl dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggiran sungai. Geruguh merupakan desa yang paling jauh dari ibukota kecamatan (Desa Pasar Rundeng) yang berjarak 29,04 km. Transportasi yang digunakan untuk menjangkau setiap desa di Kecamatan Rundeng umumnya menggunakan transportasi air berupa sampan, kapal boat atau sejenisnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi jalan yang belum baik atau sebahagian besar badan jalan belum beraspal (jalan tanah).

4. Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat

Pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 mdpl. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 23,10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Gunung Bakti yaitu sejauh 1,16 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak di pinggiran sungai.

5. Keadaan topografi Kecamatan Longkib

Pada umumnya berbukit, hanya tiga desa yang topografinya datar yaitu Desa Longkib, Panji dan Sepang.Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 16,97 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Lae Saga sejauh 5,30 Km dari Darul Aman (Ibukota Kecamatan).

2.1.1.4. Geologi dan Jenis Tanah

Ditinjau dari struktur geologis, Kota Subulussalam memiliki struktur geologi yang terdiri atas arrenite sandstone, boulder-sandstone, conglomerate, sandstone, tuff, volcanic rock. Dari beragamnya struktur geologis tersebut, Kota Subulussalam didominasi oleh struktur geologi conglomerate. Sedangkan struktur geologi yang memiliki komposisi terkecil adalah tuff.

Struktur arrenite sandstone mendominasi di wilayah perbukitan di bagian timur Kota Subulussalam beserta dengan struktur sandstone, yaitu di Kecamatan Penanggalan. Struktur conglomerate yang mendominasi struktur geologi Kota Subulussalam tersebar di seluruh kecamatan, dengan dominasi pada Kecamatan Simpang Kiri. Komposisi tuff dan volcanic rock mendominasi di bagian utara pada areal hutan yakni di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara komposisi boulder-sandstone mendominasi areal di samping sungai-sungai yang melintasi Kota Subulussalam, terutama sungai Lae Kombih, Lae Soraya, Lae Belegen, dan Lae Batu – batu. Selanjutnya peta geologi Kota Subulussalam dapat dilihat pada Gambar 2.2.

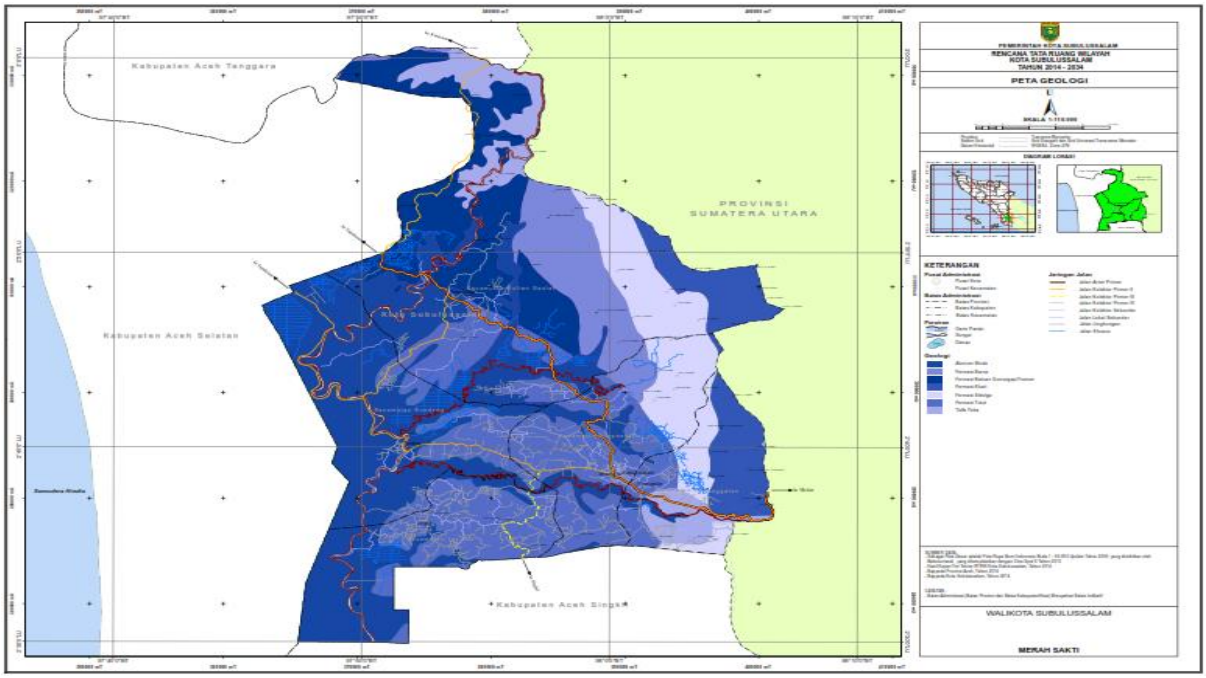

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.2. Peta Geologi di Kota Subulussalam

Kota Subulussalam memiliki berbagai jenis tanah yang didominasi oleh *komplek podsolik coklat dan podsolik Merah Kuning (PMK*) seluas 31.572,39 Ha(26,66 %)dari luas total wilayah Kota Subulussalam (118.404,48 Ha). Selanjutnya wilayah ini didominasi oleh komplek podsolik coklat, latosol dan PMK seluas 28.390,72 Ha (23,97 %) dan komplek aluvial, grumosol dan aluvial seluas 13.462,84 Ha (11,37 %). Distribusi jenis tanah di Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Gambar 2.3**.

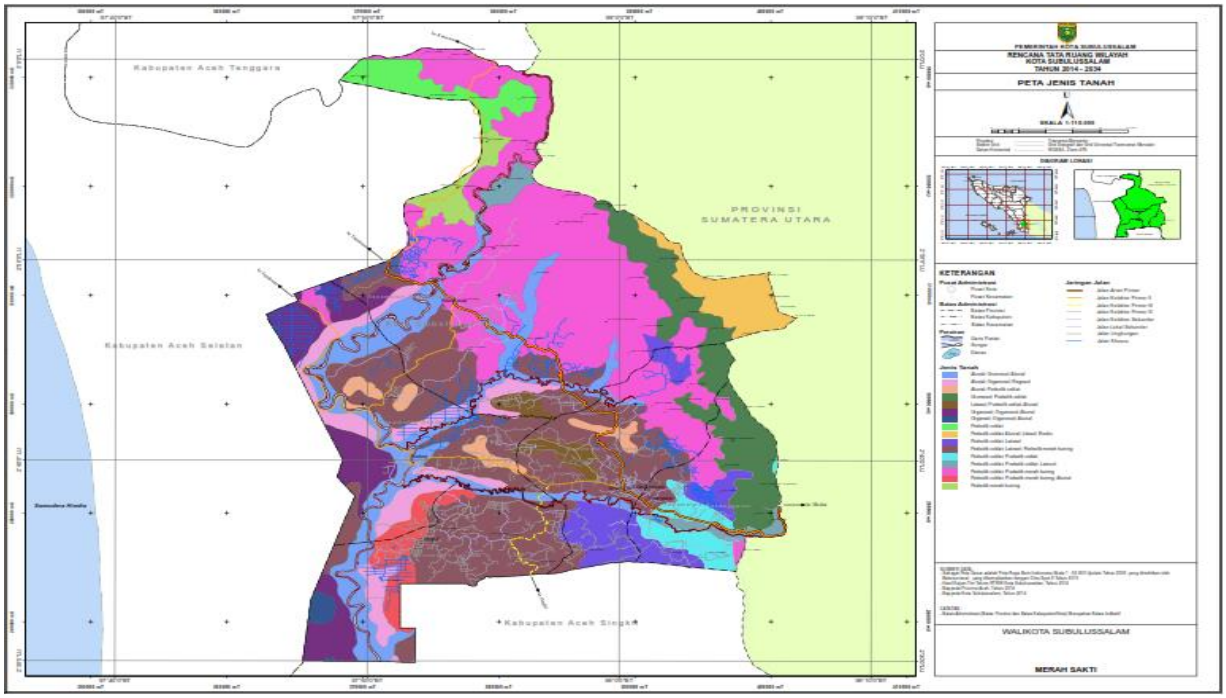

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.3. Peta Sebaran Jenis Tanah di Kota Subulussalam

Jenis tanah PMK mendominasi pada wilayah utara dan timur Kota Subulussalam, sementara jenis tanah Organosol dan Glei Humus mendominasi jenis tanah di wilayah selatan dan barat Kota Subulussalam. Adapun karakteristik khas jenis tanah di Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

a. Podsolik Merah Kuning (PMK) memiliki karakteristik tekstur tanah liat, porositas jelek dan mudah larut. Kandungan bahan organik dan unsur hara pada jenis tanah ini umumnya rendah. Permeabilitas tanah sedang hingga agak lambat, serta memiliki daya menahan air yang kurang baik serta peka terhadap erosi.
b. Organosol tersusun dari bahan organik atau campuran bahan mineral dengan bahan organik. Ketebalan minimum 40 cm dan paling sedikit mengandung 30% bahan organik atau lebih 20% bila berpasir. Warna tanah gelap, pH rendah, drainase terhambat sampai sangat terhambat. Bila hendak digunakan untuk pertanian memerlukan drainase/irigasi.
c. Latosol merupakan tanah yang miskin akan zat hara terutama zat Pospat, Kalium dan Nitrogen dan rendah kadar humusnya, struktur tanah teguh dan mantap, tidak plastis (lembut) serta tahan terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat diolah untuk pertanian sepanjang tahun.

2.1.1.5. Hidrologi

a. Air Permukaan

Potensi hidrologi cukup penting untuk menunjang pembangunan, baik untuk kepentingan irigasi, air minum, transportasi maupun untuk kepentingan lainnya. Sumber daya air di Kota Subulussalam meliputi air permukaan (sungai, rawa, danau dan mata air) dan air tanah yang bersumber dari air artesis. Potensi sumber daya air permukaan Kota Subulussalam bersumber dari sungai Lae Soraya yang memiliki hulu di Lae Alas Aceh Tenggara. Selain Lae Soraya, terdapat beberapa sungai lainnya dengan kapasitas yang lebih kecil serta anak - anak sungai yang tersebar di Kota Subulussalam.

Dalam hal pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang melintasi Kota Subulussalam termasuk ke dalam Wilayah Sungai Alas - Singkil yang kewenangan pengelolaanya di bawah koordinasi pemerintah pusat karena sungai tersebut melintasi dua provinsi (Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara).Terdapat 4 (empat) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melintasi Kota Subulussalam, yaitu DAS Lawe Alas, DAS Trumon, DAS Simpang Kanan dan DAS Simpang Kiri. Aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Subulussalam berjumlah 8 (delapan) adalah:

1. Sungai Lae Soraya yang merupakan sungai besar yang melintasi Kota Subulussalam di batas barat kota, mengalir dari utara ke selatan melalui Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib hingga

Kabupaten Aceh Singkil. Hulu sungai Lae Soraya di Kabupaten Aceh Tenggara dan bermuara di Kabupaten Aceh Singkil.

2. Sungai Lae Kombih yang membentang dari timur ke barat kota, mengalir dari Provinsi Sumatera Utara melintasi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng, bermuara pada Sungai Lae Soraya di Kecamatan Rundeng.
3. Sungai Lae Batu - batu mengalir melintasi Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng, memiliki hulu di Kecamatan Sultan Daulat dan bermuara di Lae Belegen menuju Lae Soraya.
4. Sungai Lae Biski yang merupakan hulu dari sungai Lae Batu - batu di Kecamatan Sultan Daulat.
5. Sungai Lae Belegen yang mengalir dari Kecamatan Simpang Kiri menuju Kecamatan Rundeng dan bermuara di Sungai Lae Soraya.
6. Sungai Lae Sarkea yang merupakan daerah hulu, mengalir dari Kecamatan Penanggalan menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
7. Sungai Lae Sireprep yang merupakan daerah hulu di Kecamatan Penanggalan, mengalir menuju Kecamatan Simpang Kiri dan bermuara di Sungai Lae Belegen.
8. Sungai Lae Penuntungan di Kecamatan Penanggalan, bermuara di Sungai Lae Sireprep.

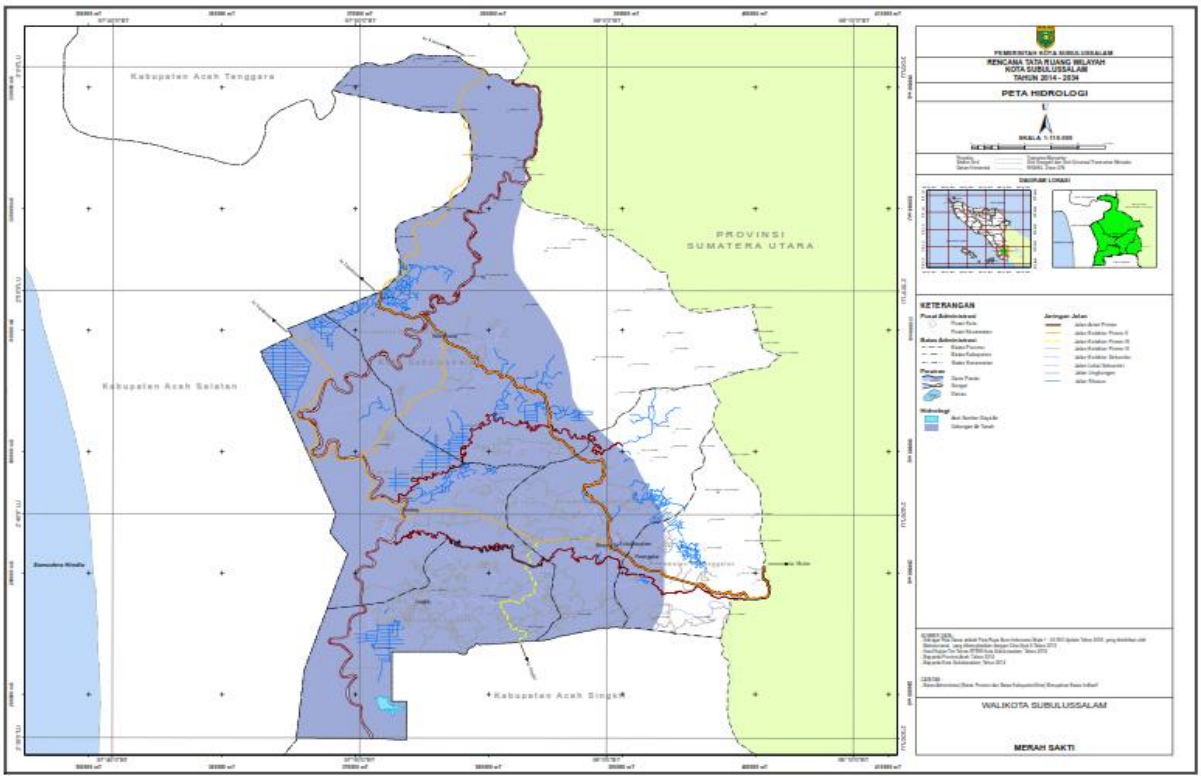

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.4. Peta Hidrologi di Kota Subulussalam

Gambar 2.4, merupakan Peta Hidrologi Kota Subulussalam yang secara umum karakteristik sungai dan anak sungai yang melintasi Kota Subulussalam merupakan sungai di daerah pegunungan yang alirannya berkelok-kelok. Kerusakan hutan di hulu sungai menyebabkantingginya tingkat sedimentasi yang terjadi pada beberapa anak sungai. Hal inimengakibatkan daya tampung sungai menjadi berkurang dan terjadi genangan di beberapa lokasi. Fenomena banjir sering terjadi pada kondisi curah hujan yang tinggi pada beberapa desa yang berdekatan dengan bantaran sungai di Kota Subulussalam. Di samping itu, kondisi sungai di Kota Subulussalam pada umumnya belum bertanggul juga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir. Di sisi lain, keberadaan sungai - sungai di Kota Subulussalam memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi, air minum dan perhubungan (transportasi sungai).

b. Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Selanjutnya peta CAT dapat dilihat pada **Gambar 2.5**.

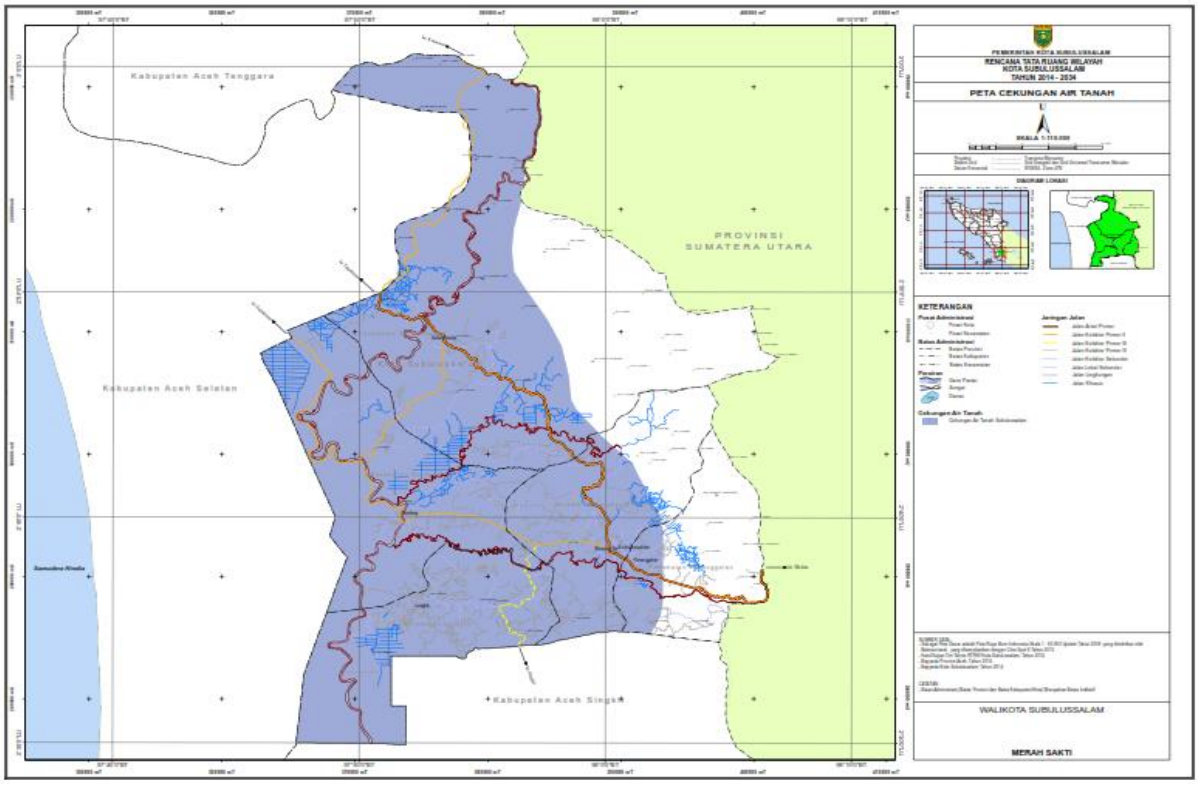

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.5. Peta CAT di Kota Subulussalam

RTRW Kota Subulussalam 2014-2034 memberikan informasi CAT di Kota Subulussalam seluas 86.079,88 Ha meliputi kecamatan rundeng seluas 22.011,25 Ha, Kecamatan Penanggalan seluas 2.473,83 Ha, Kecamatan Longkib seluas 12.815,29 Ha, Kecamatan Sultan Daulat seluas 34.629,66 Ha, Kecamatan Simpang Kiri seluas 11.149, 85 Ha.

2.1.1.6. Klimatologi

Informasi tentang iklim di daerah Kota Subulussalam masih sangat terbatas karena belum tersedianya stasion BMKG dan untuk mendapatkan gambaran tentang iklim di wilayah Kota Subulussalam menggunakan data sekunder dari stasiun Klimatologi Kampung Mesjid Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat Tahun 2004. Berdasarkan pengamatan yang tercatat, temperatur bulanan disetiap bulannya dengan perbedaan tidak begitu menyolok, yaitu berkisar antara 29,6 - 33,2 °C dengan temperatur udara maksimum mencapai 33,2°C. Kelembaban udara relatif berkisar antara 97 – 100 persen dengan kelembaban maksimum terjadi pada bulan Juli – September dan November – Desember. Kecepatan angin bulanan berkisar antara 50,3 km/hari – 79,1 km/hari serta penyinaran matahari rata-rata bulanan berkisar antara 3 – 6 jam/hari 36 – 73%.

Keadaan iklim Kota Subulussalam sangat dipengaruhi oleh angin musim yang bertiup dengan kecepatan rendah sampai sedang yang datang dari arah barat laut dan barat daya, dan biasanya akan dimulai pada bulan November sampai bulan Mei, maka iklim yang ditandai dengan keadaan suhu yang relatif tinggi, kelembaban udara tinggi disertai dengan intensitas hujan yang tinggi pula.

2.1.1.7. Penggunaan lahan

Berdasarkan Qanun RTRW Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034, luas kawasan lindung ditetapkan seluas 25.926,93 Ha (21,90%) dan Kawasan Budidaya seluas 92.477,50 Ha (78,10%).

Dari data jenis penggunaan lahan sebagaimana pada Tabel 2.7, menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kota Subulussalam untuk hutan lindung seluas 19.275 Ha berada kecamatan Sultan Daulat dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.713,21 Ha. Tahura Plasma Nutfah Kapur ini direncanakan menjadi pusat penelitian plasma nutfah pohon kapur di provinsi Aceh. Selanjutnya kawasan budidaya didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 32.252,47 Ha, perkebunan besar (HGU) seluas 19.690,45 Ha dan perkebunan rakyat seluas 13.539,76 Ha. Secara lebih rinci penggunaan lahan di Kota Subulussalam disajikan dalam **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2.
Jenis Penggunaan Lahan Per-Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2019

Penggunaan Lahan	Luas/Area (Ha)					Jumlah
	Longkib	Penanggalan	Rundeng	Simpang Kiri	Sultan Daulat	
KAWASAN LINDUNG:						**25.926,93**
Hutan Lindung					19.275,00	19.275,00
Suaka Marga Satwa Rawa Singkil	2.447,28		697,60			3.144,88
Tahura Plasma Nutfah Kapur		1.713,21				1.713,21
Danau	123,02					123,02
Tubuh Air	223,95	57,14	700,60	62,96	626,17	1.670,82
KAWASAN BUDIDAYA:						**92.477,50**
Hutan Produksi		4.369,58		1.534,54	3.687,64	9.591,76
Hutan Produksi Konversi		905,11	137,37	1.599,84	537,99	3.180,31
Perkebunan / HGU	1.478,09	376,36	4.556,29	2.300,48	10.979,23	19.690,45
Perkebunan Rakyat	2.298,52	756,39	4.328,32	3.163,17	2.993,36	13.539,76
Pertanian Lahan kering	4.139,50	2.578,51	8.234,51	6.033,16	11.266,79	32.252,47
Industri (PPKS)		53,67	80,34	19,98	23,52	177,51
Pertambangan Galian C	1,04	1,74	0,30	28,59	1,67	33,34
Sawah	8,54	28,53	15,02	72,98	88,19	213,26
Permukiman	93,98	120,42	208,85	474,65	137,03	1.034,93
Transmigrasi	5.001,36	651,54	3.052,03	1.305,65	2.753,13	12.763,71
Total	**15.815,28**	**11.612,20**	**22.011,23**	**16.596,00**	**52.369,72**	**118.404,43**

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

2.1.2. Potensi Pengembangan wilayah

Pengembangan kota subulussalam harus mengadopsi rencana tata ruang nasional, rencana tata ruang provinsi demikian juga dengan rencana tata ruang Subulussalam. Karena kota Subulussalam terletak pada lokasi yang sangat strategis dengan berbatasan langsung provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. (infrastruktur- infrastruktur yang direncanakan oleh nasional seperti jalan kereta api, pelabuhan laut, terminal barang dan penumpang, merupakan potensi yang harus perhatian pemerintah dalam waktu pendek maupun jangka panjang).

1. Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, Wilayah Kota Subulussalam terbagi menjadi 4 kawasan yaitu:
   - Kawasan dataran tinggi yang dimulai dari pada ketinggian 50-1000 mdpl. Pola spasial yang terlihat dari peta ketinggian dan kemiringan lahan Kota Subulussalam adalah bahwa ketinggian semakin meningkat dari sisi barat menuju sisi timur. Wilayah dengan ketinggian terbesar terkonsentrasi pada timur kota, khususnya pada Desa Penanggalan dan Sultan Daulat. Morfologi lahan berpegunungan di sebelah timur, kemudian lahan datar sampai dengan bergelombang pada sisi tengah sampai barat wilayah kota.

- Kawasan timur meliputi Kecamatan Penanggalan. Wilayah ini merupakan daerah wisata (air terjun) dan daerah hutan lindung dan perkebunan daerah ini sebagian besar wilayahnya ialah berbukit-bukit.
- Kawasan tengah meliputi Ibukota Subulussalam itu sendiri dan Kecamatan Simpang Kiri. Wilayah ini merupakan pusat ibukota Kota Subulussalam, pusat pendidikan, pusat perdagangan dan jasa serta semua fasilitas pemerintah lainnya.
- Kawasan barat meliputi Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Longkip, dan merupakan daerah perkebunan dan pertanian yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industry CPO serta daerah yang masuk kedalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL).

2. Berdasarkan lintas antar daerah, kondisi wilayah Kota Subulussalam merupakan pintu gerbang keluar masuk dari Aceh bagian barat selatan juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Subulussalam dengan Kabupaten Aceh Singkil sebagai kota perkebunan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Selatan sebagai kota perkebunan, penghasil perikanan dan pelabuhan, Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai kota perdagangan dan jasa serta pertanian, Kabupaten Nagan Raya sebagai kota perkebunan, Kabupaten Aceh Barat sebagai kota perdagangan dan jasa, perkebunan serta industri, Kabupaten Simeulue sebagai kota perkebunan dan pelabuhan serta Kabupaten Aceh Jaya sebagai kota perkebunan. Kota Subulussalam berkembang secara ilmiah akibat potensi wilayahnya dan Kota Subulussalam berkembang karena lokasi yang berada dijalur regional antara Medan, Sumatera Utara/ke kota di pesisir barat Provinsi Aceh yang mana permintaan akan kegiatan jasa pelayanan dan perdagangan berkembang dengan sendirinya.

3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, Wilayah Kota Subulussalam merupakan termasuk di dalam Kawasan Andalan Meulaboh dan sekitarnya, dengan arah pengembangan dan peningkatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perkebunan serta peningkatan pemanfaatan lahan yang kurang produktif dan marginal. Berdasarkan letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat tersebut, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :
   - Wilayah Aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu) merupakan perkembangan Kota Subulussalam, maka Kota Subulussalam yang terletak pada perbatasan langsung antara Pemerintah Aceh dan Provinsi Sumatera Utara khususnya Kecamatan Penanggalan merupakan wilayah aglomerasi Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh.

- Wilayah Sub-urban (wilayah perbatasan antara desa dan kota) meliputi kota Kecamatan Simpang Kiri, Kota Kecamatan Penanggalan dan Kota Kecamatan Rundeng, Kota Kecamatan Sultan Daulat dan Kota Kecamatan Longkip terletak agak jauh dari kota Subulussalam dan berkembang menjadi tujuan kegiatan masyarakat di wilayah kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan.
- Wilayah fungsi khusus atau wilayah penyangga (buffer zone) meliputi Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Rundeng yang merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Kebencanaan di Kota Subulussalam tidak dapat terlepas dari sistem kebencanaan Indonesia bahkan dunia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng/kulit bumi aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, Lempeng Euro-Asia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian Timur. Ketiga lempengan tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Euro-Asia dan menimbulkan gempa bumi, jalur gunungapi, dan sesar atau patahan.Penunjaman di Indonesia juga banyak terdapat patahan aktif seperti Patahan Semangko di Sumatera, Cimandiri di Jawa dan banyak patahan dan sub patahan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karenanya kejadian gempa beserta dampak yang ditimbulkannya yang dapat terjadi secara tiba-tiba harus dapat diantisipasi secara dini kejadiannya, misalkan melalui *hazard warning system* dan optimalisasi upaya mitigasi bencana.

Sebagian besar wilayah Sumatera merupakan wilayah rawan gempa karena dilalui patahan aktif sesar Semangko yang memanjang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga Selat Sunda. Kota Banda Aceh, Padang, termasuk regional Kota Subulussalam merupakan daerah yang dilalui sesar Semangko. Berdasarkan informasi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), wilayah-wilayah tersebut tengah terjadi penumpukan energi yang siap dilepaskan kapan saja. Berdasarkan catatan yang ada selama ini, besar gempa bervariasi antara 5 hingga di atas 7 skala Richter (SR).

Rangkaian gempa di Banda Aceh, Mandailing Natal, Padang, Kepulauan Mentawai dan termasuk yang terjadi di Kota Subulussalam dalam beberapa waktu lalu (6-9-2011) dengan besar gempa sekitar 6,7 SR, juga merupakan akibat akumulasi energi yang terjadi di sepanjang patahan Sumatera yang sangat aktif dengan tingkat pergeseran sekitar 1 centimeter setiap tahun. Ketika terjadi gempa, bangunan-bangunan akan hancur karena ada turunan patahan atau ordo dari patahan Semangko yang besar.

Bencana kegempaan di sebagian wilayah Sumatera Utara dan Barat dan sekitarnya pada hakikatnya dipicu pula oleh adanya patahan-patahan benua yang berdasarkan tinjauan geologi memberikan dorongan kuat di dasar bumi yang menyebabkan gerakan tanah bahkan gempa. Gempa besar punya kecenderungan berulang di jalur patahan Sumatera sebagai hasil pelepasan energi yang menumpuk di patahan.

Kota Subulussalam yang terletak di wilayah barat Sumatera tentunya memiliki resiko bencana gempa bumi yang cukup besar. Berdasarkan identifikasi kerentanan terhadap bencana gempa bumi, secara regional Kota Subulussalam berada pada resiko gempa bumi skala I-V MMI atau setara dengan < 5 skala richter. Sesuai dengan RTRW Kota Subulussalam kawasan rawan bencana alam terdiri dari: 1) rawan longsor dan gerakan tanah; 2) rawan kebakaran; dan 3) kawasan rawan banjir.

1. Kawasan Rawan Longsor dan Gerakan Tanah

Kawasan rawan longsor dan atau gerakan tanah meliputi seluas 107.150,53 ha yang terdiri dari intensitas menengah dan rendah. Kawasan Intensitas menengah terdapat di Kampong Sikelang, Kampung Baru, Kuta Tengah dan Cepu seluas 4.615,60 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan, Kampong Subulussalam, Subulussalam Barat, Subulussalam Selatan, Pegayo, Suka Makmur, Pasar Panjang dan Mukti Makmur seluas 4.934,09 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri, Kampong Darul Aman seluas 13,45 Ha yang berada di Kecamatan Longkib, Kampong Badar, Harapan Baru dan Teladan Baru seluas 906,37 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng, Kampong Namo Buaya, Singgersing, Darul Makmur Pulo Belen dan Pulo Kedep, Jabi-Jabi, Suka Maju dan Pasir Belo seluas 5.877,48 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

Kawasan denganintensitas rendah terdapat di Kampong Penangggalan, Lae Mbersih, Penuntungan dan Lae Motong seluas 3.057,81 Ha yang berada di Kecamatan Penanggalan. Kampong Subulussalam Utara, Lae Oram, Tangga Besi, Kuta Cepu, Makmur Jaya, Buluh Dori dan Sikelondang seluas 11.585,32 Ha yang berada di Kecamatan Simpang Kiri. Kampong Rantau Panjang, Bukit Alim, Sikerabang, Bangun Sari, Lae Saga, Darussalam, Panji, Longkib dan Sepang seluas 15.588,33 Ha yang berada di Kecamatan Longkib. Kampong Siperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Muara Batu-batu, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Sepadan, Dah, Lae Mate, Mandilam Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 20.513.46 Ha yang berada di Kecamatan Rundeng. Kampong cipar-pari Timur, Cipar-pari, Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jambi Baru, Gunung Bakti, Lae Langge dan Bawan seluas 40.058,92 Ha yang berada di Kecamatan Sultan Daulat.

2. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan kebakaran meliputi: 1) Kecamatan Longkib di Kampong Darul Aman, Kecamatan Penanggalan di Kampong Penanggalan, Penuntungan, Lae Mbersih, Cepu, kuta Tengah, Kampung Baru, Sikelang, Jontor; 2) Kecamatan Rundeng di Kampong Pasar Rundeng, Belukur Makmur; 3) Kecamatan Simpang Kiri di kampong Suka Makmur, Tangga Besi, Subulussalam Selatan, Subulussalam Barat, Subulussalam Utara, Lae Oram, Subulussalam, Pegayo; dan 4) Kecamatan Sultan Daulat di Kampong Gunung Bakti, Jambi Baru, Pulo Belen.

3. Kawasan rawan banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Subulussalam menggenangi areal lahan seluas 28.498,49 ha, meliputi: 1) Kecamatan Longkib berada di Kampong Sepang, Longkib, Panji dan Darul Aman seluas 6.555,27 Ha; 2) Kecamatan Rundengberada di KampongSiperkas, Kuta Beringin, Oboh, Binanga, Belukur Makmur, Pasar Rundeng, Lae Pamualan, Panglima Saman, Sibungke, Sibuasan, Dah, Lae Mate, Sepadan, Mandilam, Tualang, Tanah Tumbuh, Kuala Kepeng, Geruguh dan Suak Jampak seluas 15.653,23 Ha ; dan 3) Kecamatan Sultan Daulat berada di Kampong Lae Simolap, Bunga Tanjung, Jabi-jabi Suka Maju, Sigrun, Pasir Belo, Bawan dan Lae Langge seluas 6.289,99 Ha. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam disajikan pada **Gambar 2.6**.

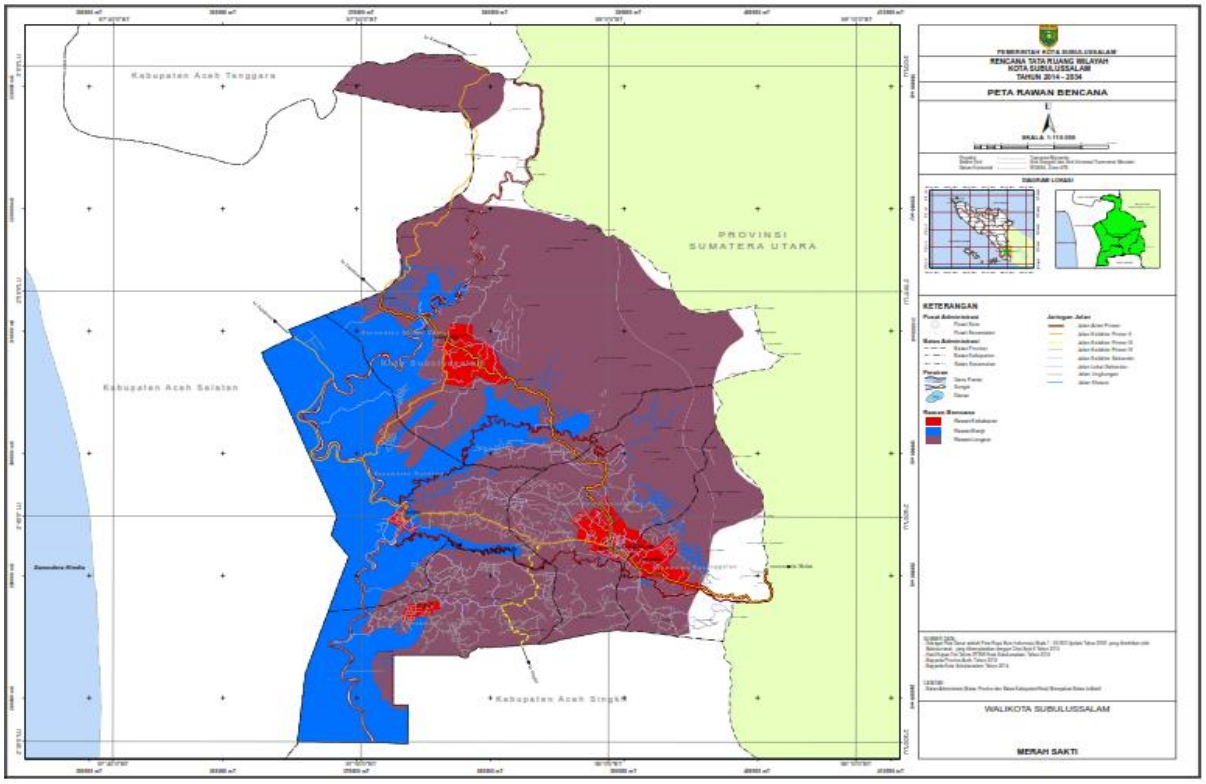

Sumber: RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Kota Subulussalam

2.1.4. Demografi

Kependudukan adalah karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran masalah suatu wilayah, karena penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data Penduduk yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Subulussalam tahun 2019 tercatat bahwa sampai akhir tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 86.769 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3.
Jumlah dan laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)
2014	84.814	
2015	89.147	4,6
2016	92.534	3,6
2017	86.769	-6,6

Sumber: Disdukcappil 2019

Jumlah penduduk Kota Subulussalam terus mengalami dinamisasi laju pertumbuhan, dalam 4 (empat) tahun terakhir. Sampai pada Tahun 2017 terjadi penurunan jumlah pendudu yang sangat signifikan, dimana sejak tahun 2016 terjadi penurunan sekitar 3 (tiga) persen jumlah penduduk.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit-unit produksi dalam suatu daerah selama satu periode tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam suatu periode tertentu.

Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB-ADHK adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pasar pada

tahun bersangkutan.Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam menilai laju pertumbuhan ekonomi dapat menggunakan nilai yang terdapat pada PDRB Atas dasar harga Konstan. Berikut akan disajikan nilai PDRB ADHK sejak tahun 2013-2017. Secara rinci jumlah PDRB ADHK Kota Subulussalam untuk masing-masing lapangan usaha dapat dilihat pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam, Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian. Kehutanan dan perikanan	252.407,76	259.854,61	268.288,70	283.444,50	295.648,00
Pertambangan dan Penggalian	97.948,27	95.072,20	80.682,80	64.362,10	57.604,50
Industri Pengolahan	129.894,04	139.231,40	148.127,30	159.266,70	167.138,60
Pengadaan Listrik dan gas	1.157,70	1.185,39	1.265,70	1.349,40	1.438,00
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	157,09	1.185,39	181,90	199,10	218,90
Konstruksi	129.627,85	142.002,84	153.685,80	166.499,70	178.024,70
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	159.245,59	167.979,48	189.363,90	208.389,80	227.914,70
Transportasi dan pergudangan	55.263,78	58.193,66	58.876,90	60.036,70	60.792,50
Penyediaan akomodasi dan makan minum	7.045,08	7.847,42	8.857,40	9.869,10	10.996,80
Informasi dan komunikasi	34.969,53	37.270,46	37.859,10	38.353,80	39.608,50
Jasa keuangan dan asuransi	12.867,90	15.156,77	18.117,60	20.453,50	23.579,30
Real estate	34.352,30	36.404,93	37.401,40	38.699,60	41.097,90
jasa perusahaan	3.093,62	3.278,27	3.557,00	3.816,70	4.126,50
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	66.772,51	70.941,27	73.773,70	79.504,60	84.235,50
Jasa Pendidikan	21.774,25	23.013,27	24.665,30	26.788,90	28.412,50
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	21.280,20	22.792,08	23.162,70	23.742,10	24.998,60
Jasa Lainnya	5.670,50	5.974,93	6.511,40	6.511,40	7.483,20
Jumlah	1.033.527,97	1.087.384,37	1.134.378,60	1.191.287,70	1.253.318,70

Sumber : BPS Kota Subulussalam

Tabel 2.5.
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016*	2017**
Pertanian. Kehutanan dan perikanan	2,71	2,95	3,25	5,65	4,31
Pertambangan dan Penggalian	(2,69)	- 2,94	- 15,14	-20,23	-10,50
Industri Pengolahan	7,49	7,19	6,39	7,52	4,94
Pengadaan Listrik dan gas	5,66	2,39	6,77	6,61	6,57
pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	6,52	654,59	- 84,65	9,46	9,94
Konstruksi	12,12	9,55	8,23	8,34	6,92
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	5,36	5,48	12,73	10,05	9,37
Transportasi dan pergudangan	7,75	5,30	1,17	1,97	1,26
Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,41	11,39	12,87	11,42	11,43
Informasi dan komunikasi	3,58	6,58	1,58	1,31	3,27
Jasa keuangan dan asuransi	21,48	17,79	19,53	12,89	15,28
Real estate	4,57	5,98	2,74	3,47	6,20
jasa perusahaan	4,98	5,97	8,50	7,30	8,12
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,35	6,24	3,99	7,77	5,95
Jasa Pendidikan	4,00	5,69	7,18	8,61	6,06
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,64	7,10	1,63	2,50	5,29
Jasa Lainnya	5,35	5,37	8,98	8,23	6,19
Jumlah	4,96	5,21	4,32	5,06	5,16

Sumber : BPS Kota Subulussalam

2.2.1.2. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu gejala naiknya harga secara terus - menerus (berkelanjutan) terhadap sejumlah barang. Ada beberapa cara yang dikemukakan untuk menggolongkan jenis - jenis inflasi. Penggolongan pertama didasarkan pada parah atau tidaknya inflasi tersebut. Adapun beberapa macam inflasi yaitu:

- Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun)
- Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun)
- Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun.

Sedangkan dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat dipilah dalam tiga kategori :

- Inflasi Sedang (moderate inflation), yaitu inflasi yang ditandai dengan harga - harga yang meningkat secara lambat dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.
- Inflasi ganas (galloping inflation), yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.

- Hyperinflasi (Hyperinflation), yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun, merupakan jenis yang mematikan.

Jenis inflasi dilihat dari faktor - faktor penyebab timbulnya :

- Inflasi tarikan, permintaan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.
- Inflasi dorongan, biaya inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.
- Inflasi struktural, inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Untuk Kota Subulussalam, penilaian tingkat inflasi masih mengacu kepada Kota Meulaboh, dikarenakan Meulaboh memiliki jarak yang paling dekat dengan Kota Subulussalam. Acuan penilaian ini berdasarkan kepada data yang di keluarkan oleh BPS Aceh, bahwasanya penilaian inflasi di aceh terdapat pada 3 (tiga) daerah yakni Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Meulaboh.

Hasil penilaian inflasi yang terjadi di meulaboh menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih dalam kondisi rendah (0,23). Berikut disajikan secara rinci inflasi yang terjadi di aceh sejak tahun 2014-2018.

Tabel 2.6.
Laju Inflasi di Aceh Tahun 2010 – 2018

Daerah Perhitungan Inflasi	TAHUN				
	2014	2015	2016	2017	2018
Banda Aceh	7,83	1,27	3,13	4,86	
Lhokseumawe	8,53	2,44	5,6	2,87	
Meulaboh	8,2	0,58	3,77	4,76	0,23
Aceh	8,09	1,53	3,95	4,09	

Sumber : BPS Aceh

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang dihitung dari pembagian PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk. Dan ini merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro.

PDRB Perkapita dapat dilihat dari PDRB Perkpiata Atas Dasar harga Berlaku dan PDRB Perkpita Atas dasar Harga Konstan. PDRB per kapita atas harga berlaku berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per-kepala atau satu orang penduduk.

Sedangkan PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. Jumlah PDRB Perkapita disajikan pada **Tabel 2.7** .

Tabel 2.7.
Pendapatan Perkapita Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 Berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
PDRB per kapita ADHK (Juta Rupiah)	14,33	12,81	12,72	12,88	14,44
PDRB per kapita ADHB (Juta Rupiah)	15,46	14,16	14,53	15,17	17,75

Sumber : BPS Kota Subulussalam

PDRB atas harga berlaku dan konstan memperlihatkan bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya. Prospek PDRB perkapita pada masa yang akan datang cenderung meningkat, hal ini dikarenakan perkembangan sektor non migas seperti sektor pertanian, jasa, industri dan perdagangan semakin membaik.

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang, pertumbuhan sektor-sektor non migas di Kota Subulussalam perlu terus didorong agar dapat meningkat, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

2.1.1.1. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan)

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Berikut diuraikan indeks gini Kota Subulussalam tahun 2013-2017.

Tabel 2.8.
Indeks Gini Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Gini	0,31	0,32	0,37	0,33	0,33

Sumber : BPS Kota Subulussalam, 2018

Indeks Gini Kota Subulussalam tahun 2013-2017 cenderung konstan berkisar antara 0,31 sampai dengan 0,33. Hal ini menggambarkan tingkat ketimpangan

pendapatan masyarakat masih dikategorikan sebagai ketimpangan rendah dan juga berarti bahwa pendapatan perkapita penduduk Kota Subulussalam relatif merata.

2.2.1.4. Kemiskinan

Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam sudah merilis tingkat kemiskinan Penduduk Kota Subulussalam sampai tahun 2017. Kriteria BPS dalam menentukan penduduk miskin menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Konsep garis kemiskinan oleh BPS adalah penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan seperti komoditi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan di Kota Subulussalam dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan jumlah. Berikut Disajikan Dalam Bentuk Tabel Tingkat Perkembangan Kemiskinan Di Kota Subulussalam serta perbandingan dengan kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan sebagai daerah tetangga.

Tabel 2.9.
Persentase Penduduk Miskin Di Kota Subulussalam dan Persentase Penduduk Miskin Di Aceh Selatan Dan Aceh Singkil Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk (Jiwa)	72.103	84.814	89.147	92.534	86.769
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	241.189	242.054	244.628	250.408	273.370
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	14.918	16.810	18.079	18.146	17.102
Persentase Penduduk Miskin	20,69	19,82	20,28	19,61	19,71
Persentase Penduduk Miskin Aceh Selatan	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07
Persentase Penduduk Miskin Aceh Singkil	18,73	17,77	21,72	21,60	22,11
Persentase Penduduk Miskin Aceh		16,98	17,08	16,73	16,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2018

Pada Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami peningkatan dan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2017 tingkat kemiskinan sebanyak 19,71 persen dari jumlah penduduk kota subulussalam, jumlah ini meningkat dari tahun 2016 19,61 persen. Persentase Jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam masih berada dibawah nilai dari Kabupaten Aceh singkil, namun masih tinggi jika di bandingkan dengan tingkat persentase penduduk miskin dari Kabupaten Aceh Selatan dan tingkat Aceh.

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Subulussalam periode tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10.
Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Uraian	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Subulussalam	2,39	2,99	3,43	3,61	3,2
Indeks Kedalaman Kemiskinan Aceh	3,2	3,14	3,1	3,06	2,97
Indeks Keparahan kemiskinan Kota Subulussalam	0,42	0,67	0,91	0,98	0,94
Indeks Keparahan kemiskinan Aceh	0,83	0,86	0,84	0,87	0,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2018

Tabel 2.10, menunjukkan bahwa nilai indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 3,43 dan sampai pada tahun 2017 menjadi 3,2. Pada tahun yang sama, indeks kedalaman kemiskinan Aceh sebesar 2,97. Perbandingan kedua indeks pada tahun 2017 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kota Subulussalam jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran penduduk miskin Aceh. Indeks keparahan kemiskinan Kota Subulussalam pada tahun 2017 sebesar 0,94 lebih rendah dari indeks keparahan Aceh sebesar 0,8, kondisi kedua indeks kemiskinan ini mengindikasikan

permasalahan kemiskinan di Kota subulussalam masih dikategorikan rendah jika dibandingkan dengan rata-rata Aceh.

Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi Pemerintah Kota Subulussalam sampai akhir periode RPJMD, dimana pemerintah lebih mengintensifkan kegiatan yang ***pro poor*** dengan mengedepankan prinsip keadilan. merupakan hal yang positif mengingat aspek penentu angka kemiskinan sangatlah kompleks diantaranya adalah prosentase penduduk diatas garis kemiskinan, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, persentase rumah tangga pengguna air bersih serta jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga perbulan.

2.2.1.5. Pengangguran

Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha dan yang sudah mendapatkan namun belum mulai bekerja. Berikut gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2013 – 2017 (Tabel 2.11).

Tabel 2.11.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jlh. Penganggur usia angkatan kerja	2.668	2.503	2.473	N/A	1.433
Jlh. Penduduk angkatan kerja	27.087	29.262	29.580	N/A	29.207
Persentase (%)	**9,85**	**8,45**	**8,36**	N/A	**4,91**

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2018

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur. Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam menyatakan bahwa pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Pada tahun 2017, dari total angkatan kerja sebesar 29.207 jiwa atau sekitar 95,09% dari mereka telah bekerja. Sebagian dari mereka yang bekerja sekitar 38,35% berpendidikan rendah (di bawah SD).

Di sisi lain, dapat pula dianalisa bagian angkatan kerja yang masih mencari pekerjaan atau disebut pengangguran terbuka. Pada keadaan tahun 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Subulussalam sebesar 4,91% atau sekitar 1433jiwa.

Berdasarkan lapangan pekerjaan, dari penduduk yang bekerja, banyak bekerja di sektor pertanian. Sektor-sektor lain yang cukup besar peranannya dalam penyerapan

tenaga kerja diantaranya sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, serta sektor perdagangan, rumah makan dan jasa.

Dari informasi yang diatas Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk menurunkan tingkat pengngguran secara terus menerus dilakukan, seperti: 1) membangun kerja sama dengan pihak perusahaan agar memberikan kesempatan kerja dan membuat ikatan kerja dengan buruh/tenaga kerja harian lepas; 2)mengadakan atau menyediakan lapangan kerja;dan 3) meningkatkan kapasitas lembaga pendidikan vokasional dan Balai Latihan Kerja (BLK).

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf merupakan salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dihitung dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. AMH Kota Subulussalam Tahun 2014 sebesar 97,53%, angka ini mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 96,30%. Penurunan persentase AMH ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang buta huruf dan baca tulis di Kota Subulussalam semakin bertambah.

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan keseluruhan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus sebagaimana disajikan pada **Gambar 2.7.**

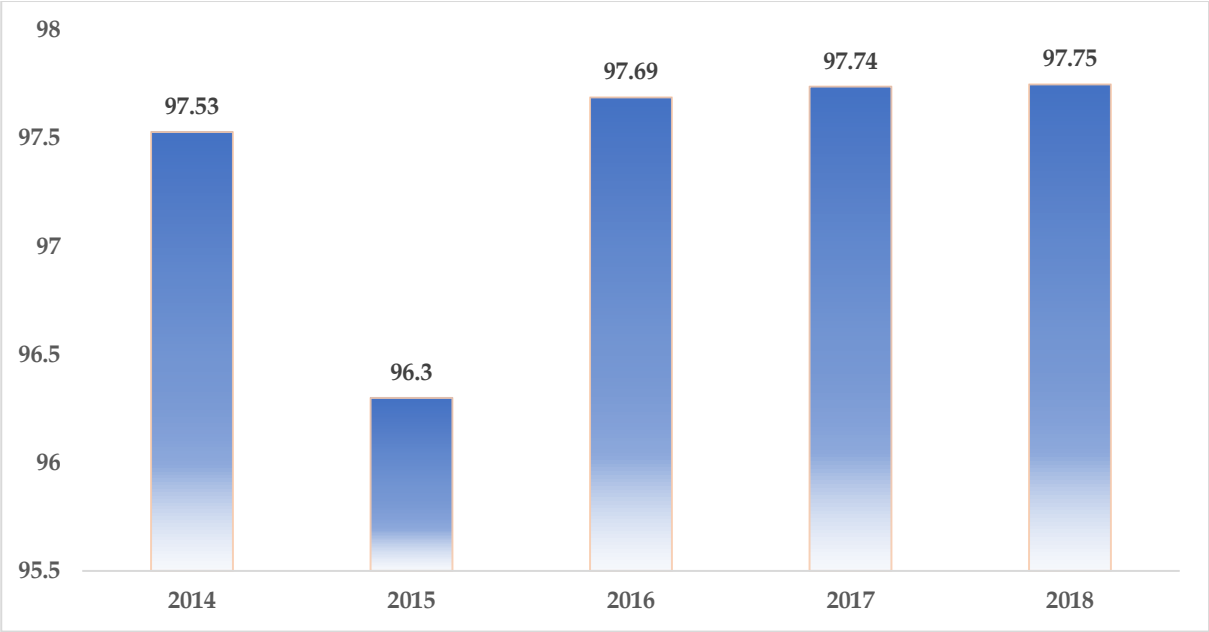

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2019

Gambar 2.7. Persentase Angka Melek Huruf penduduk 15 tahun keatas di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

Gambar 2.7, menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan AMH penduduk Kota Subulussalam. Persentase penduduk (usia 15 tahun ke atas) yang tidak melek huruf atau belum bisa baca tulis pada akhir tahun 2018 sebesar 0,01 persen. Penduduk yang tidak melek huruf atau belum bisa baca tulis didominasi penduduk yang usia lanjut, hal ini disebabkan sebelum pemekaran menjadi Pemerintah Kota daerah ini bisa dikatakan masih terpencil, sehingga untuk mendapatkan akses sarana pendidikan sangat sulit. Pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan pemetaan jumlah penyandang buta aksara secara tepat dan akurat, memperluas informasi dan sosialisasi tentang pentingnya melek huruf, memberdayakan sekolah non formal melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan mengembangkan program pendidikan membaca secara inovatif melalui kegiatan diluar sekolah.

2.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama bersekolah mencerminkan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau sedang dijalani penduduk usia 25 tahun ke atas. Pada usia ini dianggap penduduk sudah menyelesaikan seluruh tingkatan pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam dari tahun 2014 - 2018 disajikan pada **Tabel 2.12.**

Tabel 2.12.
Rata-rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,77	7,80	8,10	8,45	8,75

Sumber: Profil Pembangunan Kota Subulussalam 2017

Dari Tabel 2.12 diatas menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas pada tahun 2018 di Kota Subulussalam hanya mampu menamatkan pendidikan sampai pada kelas 1-2 SLTP. Angka rata-rata lama sekolah di Kota Subulussalam dalam 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, ini menunjukkan bahwa kebijakan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di Kota Subulussalam sudah membaik. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan beberapa kebijakan seperti: 1) memastikan bahwa anak-anak usia sekolah tetap bisa bersekolah; 2) menerapkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun; 3) sarana dan prasarana pendidikan yang layak terus akan ditingkatkan; 4) tenaga pendidik yang berkualitas dan merata diharapkan dapat terwujud dengan baik.

2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup pada suatu umur adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur akhir, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup Di Kota Subulussalam tahun 2013-2017 dan perbandingan dengan beberapa Kabupaten dan Kota di Aceh disajikan pada Gambar 2.8.

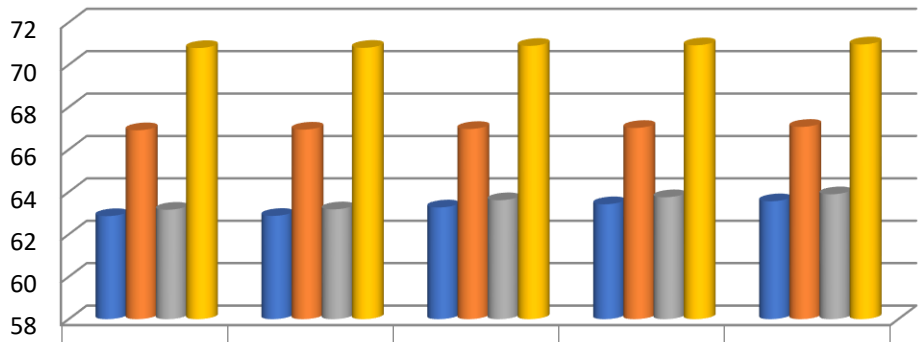

	2013	2014	2015	2016	2017
SUBULUSSALAM	62.86	62.87	63.27	63.42	63.56
ACEH SINGKIL	66.91	66.94	66.97	67.02	67.07
ACEH SELATAN	63.16	63.18	63.61	63.75	63.89
BANDA ACEH	70.79	70.8	70.89	70.92	70.96

Sumber: Profil Pembangunan Kota Subulussalam 2018

Gambar 2.8. Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam, Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Banda Aceh 2013-2017

Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Subulussalam cenderung meningkat dengan rata-rata 63 tahun dari tahun 2013 - 2017. Bila dibandingkan dengan angka harapan hidup Kabupaten Aceh Singkil tingkat harapan hidup Kota Subulussalam masih rendah, lain halnya dengan Kabupaten Aceh Selatan yang hampir sama. Tingkat Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Subulussalam masih berada dibawah Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Banda Aceh yang memberikan arti usia masyarakat Kota Banda Aceh masih lama jika dibandingkan dengan usia masyarakat Kota Subulussalam.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Angka Harapan Hidup masyarakat Kota Subulussalam masih tergolong rendah. Kondisi ini kemungkinan besar disebabkan oleh tingkat kesehatan yang rendah yang dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan pasien di beberapa fasilitas kesehatan, pencegahan penyakit menular yang tidak berjalan baik derta penyuluhan kesehatan kepada masayarakat masih rendah.

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan hidup layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan angka harapan hidup ketika lahir, pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah, angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas dan hidup layak diukur berdasarkan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada *purchasing power parity* (paritas daya beli). Dengan demikian untuk menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah haruslah menggunakan berbagai indikator yang secara resmi sudah digunakan oleh badan dunia, yaitu *The United Nation Development Programe* (UNDP). Program pembangunan yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan peningkatan daya beli masyarakat merupakan program utama yang masuk kedalam misi pembangunan Kota Subulussalam.

Trend Perkembangan IPM Kota Subulussalam dan Pemerintah Aceh tahun 2013-2017 disajikan pada Gambar berikut**.**

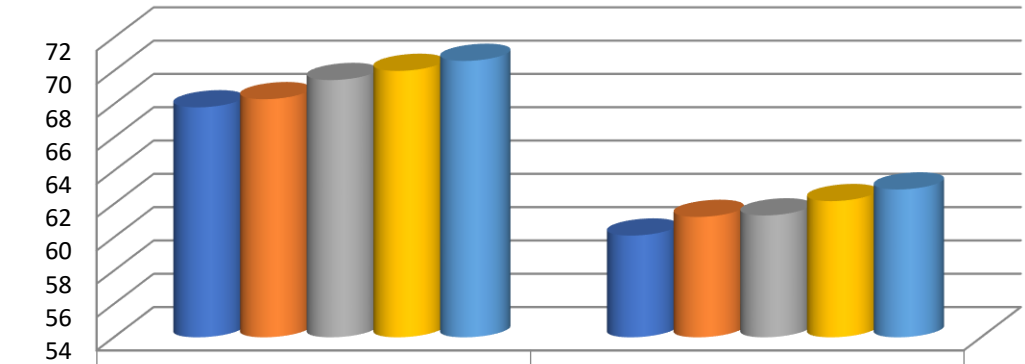

	ACEH	SUBULUSSALAM
2013	67.81	60.11
2014	68.3	61.23
2015	69.45	61.32
2016	70	62.18
2017	70.6	62.88

Sumber: Profil Pembangunan Kota Subulussalam tahun 2018

Gambar 2.9. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh dan Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, terjadinya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2013 sampai dengan 2017 di Kota Subulussalam, yakni 60,11 (2013) menjadi 62,88 (2018). Tingkat Indeks Pembangunan Manusia di Kota Subulussalam memang mengalami peningkatan namun nilai ini masih berada

dibawah tingkat Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Aceh. Tingkat IPM di Kota Subulussalam dapat ditingkatkan melalui perbaikan pelayanan dan fasilitas kesehatan, peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja guna menekan jumlah pengangguran.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1. Seni Budaya

Seni Budaya adalah suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia mengenai cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang mengandung unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari generasi ke generasi. Masyarakat Kota Subulussalam merupakan masyarakat yang heterogen, terdiri dari beragam suku, bahasa dan adat istiadat sehingga menghasilkan seni budaya yang beragam juga. Beberapa seni budaya yang terdapat di Kota Subulussalam diantaranya seperti Tari Dampeng, Tari Piring, Tari Lambe-lambe, Tari Srindayung, Tari siwah, Tari Adok, Tari Sikambang, Tari Ambai-ambai ken, Tari rapai sedok, Tari Mendatar Inai, Tari Biyahat sampai dengan saat ini masih digunakan.

2.2.3.2. Cagar Budaya

Keragaman budaya di Kota Subulussalam juga dapat dilihat dari banyaknya peninggalan budaya yang bersejarah seperti Makam, Tugu, Rumah Tradisional, Monumen dan Benteng.

2.2.3.3. Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.Disdikbudpora melaporkan di Kota Subulussalam sampai saat ini ada 10 *club* olahraga yang mendapatkan pembinaan pemerintah yaitu *club* sepak bola dan bola voli yang berada di setiap kecamatan. Namun club olah raga lainnya seperti; bulu tangkis, tenis meja, footsal, renang, sepeda, tinju, dan panjat tebing belum terdata dengan baik.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh

Dinul Islam merupakan suatu rangkaian dari 3 (tiga) pilar yaitu syari'ah, aqidah dan akhlak. Definisi Syri'ah adalah sistem norma (kaidah) Illahi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya. Aqidah adalah iman (keyakinan) yang ditautkan dengan

Rukun Iman yang merupakan asas seluruh ajaran Islam. Sedangkan kaidah yang mengatur hubungan langsung manusia dengan Allah disebut kaidah ibadah. Selanjutnya akhlak adalah sikap yang menimbulkan prilaku baik dan buruk. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perangai, sikap, perilaku, watak, budi pekerti.

Akhlak masyarakat Kota Subulussalam cenderung menurun yang ditunjukkan semakin banyaknya ditemukan pelanggaran syariat islam terutama jenis pelanggaran khamar, maisir dan khalwat. Hal ini terlihat dari masih terdapat pelanggaran-pelanggaran oleh beberapa orang penduduk di Kota Subulussalam ditambah lagi dengan generasi muda yang mengkonsumsi narkoba dan sejenisnya. Selain masih banyaknya ditemukan kasus-kasus tersebut, di Kota Subulussalam masih banyak berkembang lembaga-lembaga keuangan dan perorangan yang melakukan praktek riba, hal ini berkembang siring dengan pemahaman keislaman masyarakat yang rendah.

Berbagai persoalan umat saat ini, mulai persoalan kemiskinan, pornografi, korupsi, pendangkalan akidah, penyebaran aliran sesat dan juga kerusakan moral lainnya, seolah menegaskan akan pentingnya peran seluruh komponen masyarakat dalam mengatasi akutnya problematika sosial masyarakat tersebut. Dalam mengurai permasalahan ini, Pemerintah Kota Subulussalam melalui instansi terkait harus terus berupaya untuk mendorong suatu usaha peningkatan peran seluruh stakeholder dalam mengatasi dan menegakkan syari'at islam, dengan pelibatan ulama dan kader dakwah lainnya.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.2.1. Pendidikan

A. Angka Partisipasi Murni (APM)

Banyak Faktor yang menyebabkan siswa tidak bersekolah lagi, selain dari beberapa anak usia tersebut banyak bersekolah keluarah daerah dan lainnya berkaitan dengan tuntutan ekonomi, lingkungan sosial, sarana dan prasarana, aksesibilitas, motivasi yang lemah dan komitmen dari keluarga.

Tabel 2.13 diatas menunjukkan bahwa capaian APM Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2018 khusus untuk jenjang pendidikan dasar 9 tahun terus meningkat. Tingkat pendidikan SD/MI sederajat sejak tahun 2015 (97,99%) meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018. Begitu juga dengan tingkat SMP/MTs sederajat mengalami peningkatan jumlah usia 13-15 tahun dari 85,55 persen di tahun 2015 meningkat menjadi 93,20 persen di tahun 2018. Pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA sederajat merupakan penduduk usia 16-19 tahun juga

menunjukkan peningkatan yaitu sebesar 77,24 persen pada tahun 2018 meningkat jika dibandingkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 62,82 persen.

Tabel 2.13.
Angka Partisipasi Murni (APM) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
SD/MI Sederajat	97,63	97,99	98,53	99,29	100,00
SMP/MTs Sederajat	84,71	85,55	92,28	90,53	93,20
SMA/SMK/MA Sederajat	80,60	62,82	79,84	79,42	77,24

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2019

B. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indokator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 persen dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 persen, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. APS di Kota Subulussalam selama periode 2015-2018 disajikan pada Tabel 2.14.

Tabel 2.14.
Angka Partisipasi Sekolah di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2018

Uraian	Angka Partisipasi Sekolah (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
7 Tahun s/d 12 Tahun	99,56	100,00	98,84	99,26	100,00
13 Tahun s/d 15 Tahun	99,36	98,51	99,29	98,93	99,60
16 Tahun s/d 18 Tahun	91,93	79,87	89,37	83,82	89,64
19 Tahun s/d 24 Tahun	28,95	*)	31,13	30,40	

Sumber: BadanPusat Statistik Kota Subulussalam 2019

Tabel 2.14 menunjukkan bahwa, Angka Partisipasi Sekolah ditingkat SD/MI (usia 7 - 12 tahun) telah mencapai angka 100 persen pada tahun 2018. Sedangkan APS di tingkat SMP/MTs (13-15 Tahun) berfluktuasi dan begitu juga dengan APS di tingkat SMA/MA/SMK juga menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa (berapapun usianya) yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah (jumlah siswa) tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka ideal APK adalah nilai 100, yang artinya jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang tertentu sama dengan jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. APK berdasarkan tingkat pendidikan di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2017

Tingkat pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (%)			
	2014	2015	2016	2017
SD/MI Sederajat	109,06	120,77	110,19	115,32
SMP/MTs Sederajat	98,23	90,55	101,79	93,88
SMA/SMK/MA Sederajat	100,94	84,76	89,52	98,71

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa APK tingkat SD/MI sederajat, APK tingkat SMP/MTs Sederajat dan APK tingkat SMA/SMK/MA Sederajat kondisinya berfluktuasi artinya persentasenya naik turun di empat tahun terakhir. APK tingkat SD/MI sederajat pada tahun 2017 sebesar 115,32 persen. Artinya mengalami peningkatan sebesar 5,13 persen dari tahun sebelumnya. APK tingkat SMP/MTs Sederajat pada tahun 2017 sebesar 93,88 persen. Artinya mengalami penurunan sebesar 7,91 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya APK tingkat SMA/SMK/MA Sederajat pada tahun 2017 sebesar 98,71 persen mengalami peningkatan dari tahun 2016 dengan APK 89,52 persen. Artinya ada sekitar 9,19 persen mengalami kenaikan. Masih adanya usia sekolah pada tingkatan SLTP/sederajat yang tidak berpartisipasi kemungkinan besar disebabkan oleh adanya siswa yang sekolah pada suatu tingkatan pendidikan tertentu yang tidak menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studinya. Oleh karena itu, program perbaikan mutu guru dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta perbaikan kualitas manajemen pendidikan pada semua jenjang pendidikan sangat diperlukan.

D. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dihitung dengan cara membandingkan jumlah ketersediaan sekolah pendidikan SMA/SMK/MAdibagi dengan jumlah penduduk usia pendidikan menengah dikali 10.000. mengetahui rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah untuk mengindikasikan ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia penduduk setiap jenjang pendidikan sesuai dengan

Tabel 2.16.
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Tahun 2014- 2017

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar x 10000	75,26	81,69	85,64	86,02	86,99
Rasio ideal per 10.000	52				
Total Sekolah pendidikan dasar (unit)	108	114	121	124	125
Jumlah sekolah (SD) (unit)	74	79	83	83	83
Jumlah sekolah (SMP) (unit)	19	19	22	25	26
Jumlah Sekolah (MI) (unit)	5	5	5	5	5
Jumlah Sekolah (MTs) (unit)	10	11	11	11	11
Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) thn + (13 s.d 15) (orang)	14.350	13.956	14.129	14.415	14.369
Jumlah penduduk usia (7 s.d 12) (orang)	10.159	10.136	10.098	10.317	10.441
Jumlah penduduk usia (13 s.d 15) (orang)	4.191	3.820	4.031	4.098	3.928
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah x 10000	32,69	32,26	37,99	39,46	42,06
Total (unit)	19	19	24	25	26
Jumlah sekolah (SMA) (unit)	8	8	12	12	13
Jumlah sekolah (SMK) (unit)	4	4	4	5	5
Jumlah sekolah (MA) (unit)	7	7	8	8	8
Jumlah penduduk usia (16 s.d 19)thn (orang)	5.813	5.890	6.317	6.335	6.181

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2018 & Disdukcapil Kota Subulussalam

Rasio ketersediaan sekolah dasar pendidikan dasar terhadap penduduk usia pendidikan dasar pada tahun 2018 di Kota Subulussalam adalah sebesar 86,99/10.000 penduduk usia pendidikan dasar. Hal ini bermakna tersedia 86 sekolah melayani 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Jumlah sekolah pendidikan dasar yang tersedia saat ini adalah 125 unit yang melayani 14.639 penduduk usia pendidikan dasar. Jumlah sekolah pendidikan dasar sudah

memadai karena jumlah standar sekolah setiap 10.000 penduduk terdapat 52 unit sekolah.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SMA/SMK/MApada tahun 2018 di Kota Subulussalam adalah sebesar 42/10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Hal ini bermakna tersedia 42 sekolah dapat melayani 10.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah pendidikan SMA/SMK/MA yang tersedia saat ini adalah 26 unit yang melayani 6.181 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Jumlah sekolah sudah memadai karena berdasarkan rasio di atas 17-18 sekolah dapat melayani 5.000 penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA. Namun fasilitas pendukung lainnya seperti laboratorium, perpustakaan dan sarana olah raga masih belum memadai.

E. Rasio Guru terhadap Murid/Siswa

Rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. PP Nomor 74 Tahun 2009 menyebutkan bahwa rasio guru murid adalah 1 : 20 untuk sekolah umum dan 1 : 15 untuk madrasah. Dengan kata lain bahwa setiap satu orang guru minimal mengasuh/mengajar sebanyak 15-20 orang murid. Rasio ketersediaan guru terhadap murid/siswa disajikan pada Tabel 2.17.

Rasio ketersediaan guru SD/MI terhadap Murid SD/MI pada tahun 2018 di Kota Subulussalam adalah sebesar 949/10.000 artinya bahwa 1 guru dapat melayani 10-11. Rasio ideal 1 orang guru pendidikan dasar berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh kementerian adalah 1 orang guru minimal melayani 20 murid. Dapat disimpulkan bahwa secara umum ketersedian guru untuk jenjang pendidikan SD/MI relatif memadai bahkan cenderung kelebihan guru. Begitu juga yang terjadi pada jenjang pendidikan SMP/MTs dimana ketersediaan guru pada tahun 2018 sudah memadai dimana rasio guru sebesar 1 : 12.

Permasalahan yang sering muncul dalam ketersediaan guru di Kota Subulussalam adalah penyebaran guru yang tidak merata, banyak guru berada atau mengajar pada sekolah-sekolah yang tidak jauh dari ibu kota, sehingga sekolah-sekolah yang jauh dari ibu kota bahkan ibu kota kecamatan kekurang guru. Beberapa kebijakan pemerintah dalam lima tahun terakhir adalah melakukan perekrutan guru kontrak, sehingga ketersediaan guru menjadi diminimalisir. Kondisi ini harus segera diselesaikan dengan cara melakukan penerimaan guru tetap yakni adanya penerimaan pegawai ASN yang aru atau mengangkat guru kontrak yang tersedia menjadi guru tetap.

Tabel 2.17.
Rasio Ketersediaan Guru Terhadap Murid/Siswa
Tahun 2013- 2018

Uraian	Tahun					
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Rasio guru terhadap murid SD/MI x10000	1.986	2.122	2.147	1.237	1.104	949
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs x10000	540	850	716	807	737	809
Rasio ideal	500					
Total Guru Pendidikan Dasar	**1.427**	**1.525**	**1.582**	**1.529**	**1.375**	**1.195**
Total Guru SD/MI	**1.051**	**1.092**	**1.130**	**1.052**	**940**	**867**
Jumlah Guru (SD)	1.015	1.039	1.083	1.004	890	867
Jumlah Guru (MI)	36	53	47	48	50	N/A
Total guru SMP/MTs	**376**	**433**	**452**	**477**	**435**	**328**
Jumlah Guru (SMP)	336	336	291	349	319	328
Jumlah Guru (MTs)	40	97	161	128	116	N/A
Total Murid Pendidikan Dasar	**14.144**	**12.281**	**13.680**	**18.270**	**18.358**	**16.645**
Total Murid SD/MI	**7.185**	**7.186**	**7.370**	**12.356**	**12.456**	**12.591**
Jumlah Murid (SD)	6.466	6.426	6.466	11.468	11.502	11.637
Jumlah Murid (MI)	719	760	904	888	954	954
Total Murid SMP/MTs	**6.959**	**5.095**	**6.310**	**5.914**	**5.902**	**4.054**
Jumlah Murid (SMP)	5.541	4.485	4.607	4.277	4.309	4.054
Jumlah Murid (MTs)	1.418	610	1.703	1.637	1.593	
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah x 10.000	1148,89	1797,08	1616,90	830,80	823,57	839,97
Total Guru SLTA	419	604	574	437	436	390
Jumlah Guru (SMA)	292	414	423	234	234	256
Jumlah Guru (SMK)	73	111	59	111	115	134
Jumlah Guru (MA)	54	79	92	92	87	N/A
Total Murid SLTA	3.647	3.361	3.550	5.260	5.294	4.643
Jumlah Murid (SMA)	1.098	1.182	1.244	3.162	3.170	3.249
Jumlah Murid (SMK)	1.850	1.461	1.751	1.385	1.445	1.394
Jumlah Murid (MA)	699	718	555	713	679	N/A

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2018 & Disdukcapil Kota Subulussalam

Rasio ketersediaan guru jenjang SMA/MA pada tahun 2018 juga sudah memadai, dimana rasio sebesar 1 : 11 siswa dan ini sesuai dengan rasio ideal guru terhadap murid yakni 1 guru dapat melayani 20 siswa. Saat ini khusus jenjang pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota Subulussalam, namun dalam hal perkembangannya koordinasi dengan Pemerintah Aceh tetap harus terjalin dengan baik.

F. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Kualifikasi guru adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan guru dengan melalui pendidikan khusus keahlian. Guru yang qualified adalah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Guru profesional harus memenuhi kriteria dari segi kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesional. Artinya guru pada tiap satuan pendidikan harus memenuhi kualifikasi akademik dengan bidang keilmuan yang relevan dengan bidang studi atau mata pelajaran yang mereka ajarkan di sekolahnya sehingga mereka disebut kompeten untuk bidang pekerjaannya. Persoalannya banyak guru pada jenjang pendidikan dasar yang memperoleh kesarjanaannya di luar bidang studi atau mata pelajaran yang diampu. Kualifikasi guru berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2017 disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Kualifikasi Guru berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2017

Uraian	Jumlah Guru (orang)	Kualifikasi S1/D-IV (orang)	Persentase
SD	867	66	7,61
SMP	328	91	27,74
SMA/SMK	390	97	24,87

Sumber: Data Neraca Pendidikan Daerah, Kemendikbud, 2018

Dari tabel 2.18 menunjukkan bahwa jumlah guru yang memiliki kualifikasi hanya mencapai 7,61% untuk guru SD, 27,74% untuk guru SMP dan 24,87% untuk guru SMA/SMK. Jumlah persentase guru yang memiliki kualifikasi jika di bandingkan dengan jumlah guru sangatlah rendah bahkan tidak mencapai 50% dari total jumlah guru. Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

2.3.2.2. Kesehatan

A. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama

kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kota Subulussalam tahun 2013- 2017 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Angka Kematian Ibu di Kota Subulussalam Tahun 2013- 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kematian Ibu melahirkan (org)	1	4	3	4	3
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 LH	68,5	N/A	N/A	N/A	153,85

Sumber: BPS Kota Subulussalam 2018

Selama periode 2013-2017 angka kematian ibu di Kota Subulussalam cenderung fluktuatif, akan tetapi bisa dikatakan hampir setiap tahun terjadi kematian ibu saat melahirkan. Bila dirata-ratakan kematian ibu melahirkan selama periode tersebut sebanyak 3 orang setiap tahun. Pada akhir tahun 2017 angka kematian ibu sebesar 153,85 per seratus ribu kelahiran hidup atau rata-rata 3 orang.

Beberapa penyebab terjadinya kematian ibu melahirkan secara umum adalah pendarahan pada saat akan melahirkan, hipertensi atau naiknya tekanan darah si ibu yang disebabkan oleh rasa ketakutan pada kelahiran pertama dan pada saat proses partus terlalu lama sehingga menyebabkan si ibu kelelahan dan distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

B. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kelangsungan hidup bayi dihitung berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB) dibawah usia satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Kejadian AKB di Kota Subulussalam sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berfluktuasi dimana pada tahun 2015 terjadi penurunan 7 per 1000 kelahiran hidup dari 11 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2013 dan 2014 dan meningkat kembali pada tahun 2017 menjadi 9 per 1000 kelahiran hidup. AKB secara Nasional diperoleh dari hasil Survey Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dilakukan 5 tahun sekali dan terakhir dilakukan pada tahun 2017 yaitu pada posisi 24 per 1000 Kelahiran Hidup, sementara AKB di Aceh sebesar 9 per 1000 Kelahiran Hidup, dimana angka ini jauh lebih baik dari angka nasional. Jumlah AKB di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Angka Kematian Bayi (AKB) Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	11	11	7	8	9

Sumber: Dinas Kesehatan aceh 2018

Angka kematian bayi di Kota Subulussalam masih relatif banyak terjadi di daerah pedesaan, pada keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah. Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami hambatan financial atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya peningkatan kompetensi petugas penolong persalinan, pemerataan pelayanan kesehatan dan fasilitasnya serta perbaikan gizi pada ibu hamil. Hal ini menyebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi yang berdampak pada daya tahan tubuh terhadap infeksi penyakit.

C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Jumlah AKABA di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Angka Kematian Balita (AKABA) Kota Subulussalam
Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	13	16	7	17	9

Sumber: Dinas Kesehatan Aceh 2018

Dari tabel 2.21 diatas menunjukkan bahwa tingkat kematian balita di Kota Subulussalam sejak tahun 2013 sampai tahun 2017 fluktuatif. Pada tahun 2015 AKABA terjadi 7 dari 1000 kelahiran hidup menurun signifikan dari tahun 2013 dan 2014, namun meningkat kembali pada tahun 2016 yakni sebesar 17 AKABA dari 1000 kelahiran hidup dan menurun kembali pada tahun 2017 sebesar 9 AKABA dari 1000 kelahiran hidup, bermakna bahwa diantara 1000 kelahiran hidup ada 9 balita yang meninggal sebelum mencapai usia lima tahun pada tahun 2017. AKABA di Kota subulussalam masih rendah jika di bandingkan dengan tingkat AKABA Nasional dan tingkat Aceh, namun AKABA tersebut tetap menjadi permasalahan dalam peningkatan generasi yang sehat dan berdaya saig sesuai dengan capaian SDGs.

D. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Tabel 2.22.
Rasio posyandu per satuan balita tahun 2013-2017
Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio posyandu per satuan balita x 1000	**10,89**	**10,15**	**10,23**	**10,11**	**10,42**
Jumlah posyandu	106	106	107	107	111
Jumlah balita	9.738	10.440	10.460	10.584	10.656

Sumber : BPS Subulussalam tahun 2018

Hasil perhitungan rasi posyandi terhadap persatuan balita di Kota Subulussalam seperti yang di tampilkan pada Tabel 2.22 diatas bermakna bahwa setiap 1 unit Posyandu telah melayani 100 balita pada Tahun 2017. Jika melihat perkembangan pada tahun sebelumnya sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 perkembangan ketersediaan posyandu tidaklah meningkat secara signifikan. Rasio idel untuk 1 posyandu adalah 1 : 50 balita, jika demikian keberadaan jumlah posyandu di Kota subulussalam masih belum memadai.

Kedepan program posyandu harus terus digalakkan dengan menambah unit posyandi di setiap desa sehingga mencapai rasio ideal yang di tentukan, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

E. Rasio Puskesmas, Klinik, Poskesdes dan Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Keberhasilan dalam pelayanan kesehatan salah satunya harus didukung dengan sarana yang memadai, sehingga penanganan terhadap suatu kejadian

semakin cepat dan tanggap. Kota Subulussalam pada saat ini semakin meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, namun pemanfaatan sarana tersebut masih belum optimal karena belum adanya komitmen yang kuat dari tenaga kesehatan untuk memanfaatkan sarana tersebut sehingga banyak yang tidak terpakai dengan baik. Maka oleh sebab itu, antara sarana dan tenaga kesehatan harus sejalan, karena keduanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Rasio tersebut dapat kita lihat pada rincian tabel dibawah ini:

Tabel 2.23.
Rasio puskesmas, klinik, poskesdes dan Rumah sakit per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2018

Uraian	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk x 1000	**0,97**	**0,86**	**0,83**	**0,96**	**1,03**	**1,03**
Rasio Rumah sakit persatuan penduduk x 1000	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Jumlah puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk	**70**	**73**	**74**	**89**	**89**	**89**
Puskesmas	5	5	5	5	5	5
Klinik	1	1	2	2	2	2
Poskesdes	64	67	67	82	82	82
Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
Jumlah Penduduk	72.103	84.814	89.147	92.534	86.769	86.642

Sumber : BPS Subulussalam tahun 2018

Dilihat pada sajian tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 rasio puskesmas, klinik, poskesdes per satuan penduduk adalah 1 : 970 penduduk. Jika dibandingkan dengan standart Kementerian Kesehatan RI yaitu 1(satu) Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Rasio ini memberikan arti bahwa ketersediaan pusat kesehatan masyarakat tersedia merata setiap kecamatan. Kedepan pemerintah Kota Subulussalam ketersediaan sarana kesehatan ini harus di jaga dan didukung agar bangunan yang ada terjaga dengan baik.

Rasio rumah sakit terhadap per satuan penduduk di kota Subulussalam seperti yang tertera dalam tabel 2.22 menunjukkan bahwa 1 unit Rumah Sakit telah menanmpung lebih kuran 1000 pasien setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan rasio idealnya adalah 1 ; 100000 penduduk, artinya bahwa keberadaan Rumah sakit di Kota Subulussalam masih dapat menampung pasien.

F. Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk

Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2014 pengelompokan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis
- tenaga psikologi klinis ialah psikolog klinis
- tenaga keperawatan terdiri atas berbagai jenis perawat
- tenaga kebidanan ialah bidan
- tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian
- tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
- tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- tenaga gizi terdiri atas nutrisionis dan dietisien.
- tenaga keterapian fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien / optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- tenaga kesehatan lain terdiri atas tenaga kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang membindangi urusan kesehatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, tenaga kesehatan di Kota Subulussalam terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, taknisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat. Berikut disajikan rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk di Kota Subulussalam pada Tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Rasio Tenaga Kesehatan
per satuan penduduk di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk 1000	**5,15**	**4,40**	**3,90**	**5,13**	**3,49**
Jumlah Keseluruhan Tenaga Kesehatan	**371**	**373**	**348**	**475**	**303**
RASIO TENAGA DOKTER PER 1000 PENDUDUK	**0,40**	**0,32**	**0,28**	**0,37**	**0,41**
Jumlah Dokter disetiap kecamatan	**11**	**10**	**8**	**10**	**14**
- Dokter Umum	8	8	6	8	9
- Kecamatan Penanggalan	4	2	1	2	3
- Kecamatan Simpang Kiri	2	2	3	2	4
- Kecamatan Rundeng	1	1	1	1	0
- Kecamatan Longkip		1	1	1	2
- Kecamatan Sultan Daulat	1	2	0	2	0
- Dokter Gigi	3	2	2	2	5
- Kecamatan Penanggalan	2	1	1	1	2
- Kecamatan Simpang Kiri	1	1	1	1	2
- Kecamatan Rundeng	0	0	0	0	1
- Kecamatan Longkip	0	0	0	0	0
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	0	0
TENAGA KESEHATAN DiRUMAH SAKIT	117	176	176	221	22
JUMLAH DOKTER DIRUMAH SAKIT	**18**	**17**	**17**	**24**	**22**
- Dokter Umum	10	9	9	16	15
- Dokter Spesialis	5	5	5	5	5
- Dokter Gigi	3	3	3	3	2
- Perawat	62	70	69	63	
- Bidan	19	54	69	71	
- Farmasi	11	10	11	21	
- Ahli Gizi	4	4	3	7	
- Teknisi Medis	0	17	2	25	
- sanitasi	0	1	3	2	
- Kesehatan Masyarakat	3	3	2	8	
Jumlah Penduduk	72.103	84.814	89.147	92.534	86.769
Jumlah tenaga KESEHATAN selain Dokter	**243**	**187**	**164**	**244**	**267**
- Perawat	79	82	76	63	77
- Kecamatan Penanggalan	21	25	23	24	23
- Kecamatan Simpang Kiri	23	21	24	14	17
- Kecamatan Rundeng	13	12	9	8	15
- Kecamatan Longkip	15	16	12	8	12
- Kecamatan Sultan Daulat	7	8	8	9	10

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- Bidan	137	81	77	157	147
- Kecamatan Penanggalan	29	19	19	33	47
- Kecamatan Simpang Kiri	41	29	27	41	53
- Kecamatan Rundeng	35	13	14	34	14
- Kecamatan Longkip	11	9	7	20	10
- Kecamatan Sultan Daulat	21	11	10	29	23
- Farmasi	12	4	0	5	8
- Kecamatan Penanggalan	4	1	0	3	3
- Kecamatan Simpang Kiri	2	1	0	1	4
- Kecamatan Rundeng	2	0	0	0	0
- Kecamatan Longkip	2	2	0	1	0
- Kecamatan Sultan Daulat	2	0	0	0	1
- Ahli Gizi	7	6	2	4	4
- Kecamatan Penanggalan	2	1	2	0	1
- Kecamatan Simpang Kiri	2	2	0	2	2
- Kecamatan Rundeng	1	0	0	0	0
- Kecamatan Longkip	1	2	0	2	1
- Kecamatan Sultan Daulat	1	1	0	0	0
- Teknisi Medis	0	4	0	4	14
- Kecamatan Penanggalan	0	2	0	2	5
- Kecamatan Simpang Kiri	0	2	0	2	2
- Kecamatan Rundeng	0	0	0	0	3
- Kecamatan Longkip	0	0	0	0	0
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	0	4
- sanitasi	0	3	3	4	5
- Kecamatan Penanggalan	0	1	1	1	1
- Kecamatan Simpang Kiri	0	1	1	1	3
- Kecamatan Rundeng	0	1	1	1	0
- Kecamatan Longkip	0	0	0	1	1
- Kecamatan Sultan Daulat	0	0	0	0	0
- Kesehatan Masyarakat	8	7	6	7	12
- Kecamatan Penanggalan	2	5	1	4	4
- Kecamatan Simpang Kiri	2	1	4	1	4
- Kecamatan Rundeng	2	0	1	1	2
- Kecamatan Longkip	0	0	0	1	0
- Kecamatan Sultan Daulat	2	1	0	0	2

Sumber : BPS Subulussalam tahun 2018

Dari tabel 2.24 diatas menunjukkan bahwa rasio tenaga dokter persatuan penduduk sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2017 rasio dokter terhadap 1000 penduduk Kota Subulussalam adalah 0,41 ini bermakna bahwa setiap 1 dokter dapat melayani 2.439 penduduk. Angka rasio ini telah

mencapai rasio ideal jika dikaitkan dengan standar rasio idela dimana 1 dokter minimal dapat melayani 2.500 penduduk setempat.

Dari tabel diatas menunjukkan juga bahwa jumlah dokter paling banyak berada di kecamatan simpang kiri sebanyak 4 orang, penanggalan sebanyak 3 orang dan longkip 2 orang, namun sampai pada tahun 2017 di kecamatan rundeng dan sultan daulat tidak terdapat dokter. Kedepan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan khususnya dalam hal oemeretaan ketersediaan dokter di setiap kecamatan. Begitu juga dengan tenaga kesehatan selain dari dokter seperti perawat, bidan, farmasi, ahli gizi, tekenisi medis, sanitasi dan kesehatan masyarakat masih banyak terdapat di kecamatan simpang kiri dan penanggalan. Oleh karena itu pemerintah Kota Subulussalam akan melakukan pemerataan tenaga kesehatan di setiap pusat kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

G. Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI)

Desa Universal Child Immunization (UCI) adalah desa yang memiliki jumlah bayi lebih dari 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut yang sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Dilihat pada Tabel 2.25, dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan bahwa pencapaian Desa UCI tidak mencapai 80 persen bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar. Berbeda halnya dengan Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan yang menunjukkan bahwa daerah tersebut dalam lima tahun terakhir sudah pernah mencapai angka 90 persen dari total bayi yang mendapatkan imunisasi dasar. Berikut disajkian dalam bentuk tabel capaian Desa Universal Child Immunization di Kota Subulussalam dan perbandingannya dengan Kabupaten tetangga.

Tabel 2.25.
Cakupan Desa Universal Child Immunization (UCI) di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Subulussalam	24,39	51,22	52,44	68,29	65,38
Aceh Singkil	92,50	84,17	87,50	93,97	79,17
Aceh Selatan	77,82	64,62	82,31	92,31	90,77

Sumber : Dinas kesehatan Aceh 2018

H. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan peraatan medis dibagi jumlah balita gizi buruk yang ada di satu wilayah pada kurun waktu tertentu. Jumlah balita gizi buruk yang terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2015 berjumlah 10 orang, kasus ini menurun menjadi 6

kasus di tahun 2017. Berikut disajikan cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan di Kota Subulussalam pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26.
Cakupan Balita Gizi Buruk Tahun 2015 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan	10	5	6
Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	10	5	6
- Kecamatan Penanggalan	N/A	N/A	0
- Kecamatan Simpang Kiri	N/A	N/A	1
- Kecamatan Rundeng	N/A	N/A	3
- Kecamatan Longkip	N/A	N/A	2
- Kecamatan Sultan Daulat	N/A	N/A	0

Sumber: BPS Aceh 2018

Berdasarkan tabel 2.26 diatas menunjukkan bahwa adanya balita gizi buruk yang terjadi disetiap kecamatan. Pada tahun 2017 kejadian gizi buruk terdapat di rundeng 3 orang, sultan daulat 2 orang dan penanggalan 1 orang. Kasus gizi buruk memang harus menjadi perhatian penting pemerintah, dikarenakan setiap tahun di Kota Subulussalam selalu terjadi kasus gizi buruk. Secara umum kasus gizi buruk berhubungan langsung dengan tingkat kemiskinan keluarga, dimana kemampuan secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan makanan.

Beberapa upaya penanggulangan yang harus dilakukan oleh pemerintah antara lain seperti peningkatan program Posyandu setiap desa lebih diaktifkan lagi, mengingat dengan program ini dapat secara langsung memberikan penanganan asupan gizi kepada balita beserta keluarga.

I. Prevalensi Balita Stunting

Prevalensi balita Stunting di Kota Subulussalam pada tahun 2018 berada ditingkat paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lain. Hal ini menjadi perhatian khusus baik ditingkat pusat maupun provinsi. Balita Stunting di kota Subulussalam pada Tahun 2018 adalah 49,6 persen bila dibandingkan dengan Aceh adalah 37,1 persen pada tahun yang sama. Secara keseluruhan persentase balita stunting di Aceh tergolong dalam masalah yang mengkhawatirkan dan perlu penanganan yang serius dari berbagai pemangku kepentingan.

Stunting dapat dicegah dengan perbaikan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dimulai saat ibu hamil sampai bayi berusia 2 tahun, diiringi dengan perbaikan sanitasi dan peningkatan akses air bersih serta perilaku dan pola asuh yang mendukung kesehatan.

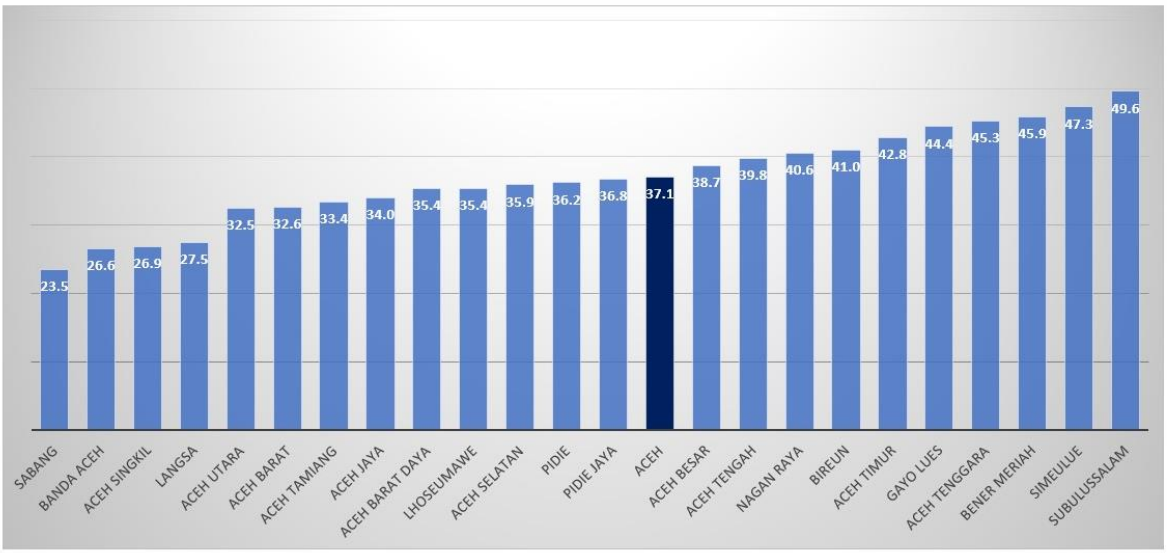

Gambar 2.10. Prevalensi status Gizi Pendek dan Sangat Pendek (Stunting) Tahun 2018

Jika dilihat dari masalah status gizi balita di Aceh (hasil PSG tahun 2015-2017) terhadap Balita Kurus, Balita Bukur, Balita Pendek dan Obesitas memang Aceh masih berada dibawah Nasional. Dari ketiga permasalahan gizi tersebut dapat disimpulkan bahwa prevalensi balita kurus terjadi penurunan secara bertahap, sedangkan terhadap balita gizi buruk/stunting terjadi peningkatan kasus, namun terhadap obesitas hampir semua kabupaten/kota termasuk kategori tidak bermasalah. Persebaran masalah status gizi di kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar berikut.

NO.	KAB/KOTA	KURUS WASTING BB/TB			BUKUR UNDERWEIGHT BB/U			PENDEK STUNTING TB/U			OBESE OBESITAS BB/TB		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1	SIMEULUE	13.3	14.3	14.5	19.0	22.2	26.7	37.7	28.6	35.7	4.3	2.7	2.3
2	SINGKIL	13.3	8.7	10.9	20.3	7.7	15.4	37.0	28.9	38.7	7.0	3.9	7.9
3	ACEH SELATAN	15.7	20.1	9.5	27.0	20.8	24.2	43.7	26.6	44.9	3.3	4.2	3.3
4	ACEH TENGGARA	18.7	18.7	10.2	27.0	6.3	22.1	39.0	21.0	38.2	6.7	6.7	5.1
5	ACEH TIMUR	16.0	13.9	11.2	24.0	25.2	32.5	31.3	32.3	43.6	3.7	2.8	1.0
6	ACEH TENGAH	12.0	9.9	9.7	8.7	13.1	18.5	13.0	27.0	37.2	4.3	2.0	2.7
7	ACEH BARAT	13.7	7.3	8.9	24.0	14.0	19.5	36.3	25.5	33.2	8.0	4.1	5.3
8	ACEH BESAR	22.3	9.1	13.1	26.7	6.7	22.1	25.0	12.2	31.2	3.7	1.8	2.9
9	PIDIE	25.3	21.8	14.3	29.3	25.8	35.0	32.3	27.7	43.7	5.3	1.9	2.3
10	BIREUEN	18.0	9.5	12.1	26.7	20.2	25.2	28.0	36.6	34.4	2.7	3.9	2.9
11	ACEH UTARA	22.0	16.2	15.9	26.0	26.7	31.9	39.0	36.1	35.9	5.7	2.0	1.0
12	ACEH BARAT DAYA	18.7	30.2	15.8	22.3	29.2	26.0	28.7	31.6	31.6	5.3	2.8	3.2
13	GAYO LUES	14.7	12.7	10.8	18.7	2.7	20.2	30.3	15.5	38.5	7.3	1.7	4.7
14	ACEH TAMIANG	8.3	6.8	14.8	11.0	4.8	19.8	25.3	15.1	32.4	5.0	3.2	4.3
15	NAGAN RAYA	14.3	12.2	8.4	25.0	16.8	12.7	40.3	28.6	26.2	6.3	2.0	1.7
16	ACEH JAYA	15.7	4.6	12.0	19.3	9.6	25.2	25.7	22.8	38.3	5.3	1.0	3.0
17	BENER MERIAH	20.3	6.5	10.4	18.3	14.0	21.4	34.3	38.0	37.6	11.3	6.1	4.0
18	PIDIE JAYA	21.3	14.3	17.5	30.3	13.6	27.9	37.0	17.4	34.6	6.7	2.5	2.0
19	BANDA ACEH	20.3	15.4	14.5	18.0	20.3	23.3	24.0	27.1	25.1	7.0	1.7	2.9
20	SABANG	17.0	16.1	13.5	20.3	19.0	23.5	27.3	24.3	29.8	8.3	3.9	6.5
21	LANGSA	22.0	10.5	12.3	23.3	16.7	10.7	25.3	22.2	26.7	5.0	3.8	4.8
22	LHOKSEUMAWE	26.3	12.5	13.0	31.0	23.0	22.2	34.3	27.4	25.2	5.0	1.0	4.7
23	SUBULUSSALAM	16.7	15.4	15.0	22.7	23.4	29.1	31.7	32.9	47.3	4.0	5.7	3.3
	ACEH	17.7	13.3	12.8	22.6	16.7	24.8	31.6	26.4	35,7	5.7	3.1	3.0
	INDONESIA	12.2	12.6	6.9	19.6	17.8	17,8	37.2	21.7	29,6	11.8	4.3	4,6

Gambar 2.11. Masalah Status Gizi Balita Aceh (PSG 2015-2017)

J. Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (TBC)

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Terdapat beberapa spesies Mycobacterium, antara lain: M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis, M. Lepraedsb. Yang juga dikenal sebagai Bakteri Tahan Asam (BTA). Kelompok bakteri Mycobacterium selain Mycobacterium tuberculosis yang bisa menimbulkan gangguan pada saluran nafas dikenal sebagai MOTT(Mycobacterium Other Than Tuberculosis) yang terkadang bisa mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC.

Gejala utama pasien TBC paru yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan. Pada pasien dengan HIV positif, batuk sering kali bukan merupakan gejala TBC yang khas, sehingga gejala batuk tidak harus selalu selama 2 minggu atau lebih.

Tingkat prevalensi tuberkulosis menunjukkan bahwa adanya jumlah penderita TBC yang terdapat pada populasi penduduk tertentu. TBC merupakan salah satu dari beberapa penyakit menular yang menjadi sasaran nasional dalam penanganannya. Dalam Permenkes Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menetapkan target program penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi Tahun 2035 dan Indonesia bebas TBC Tahun 2050. Berikut disajikan secara rinci tingkat prevalensi TBC di Kota Subulussalam sejak tahun 2014-2017.

Tabel 2.27.
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 10.000 penduduk)	16,51	16,38	19,88	11,52
Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) (org)	140	146	184	100
Jumlah penduduk	84.814	89.147	92.534	86.769

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Dari Tabel 2.27 diatas menunjukkan bahwa tingkat prevalensi TBC di Kota subulussalam terus menurun, artinya bahwa sejak tahun 2014 sampai pada tahun 2017 telah terjadi penurunan jumlah penduduk penderita TBC di Kota Subulussalam. Kondisi pada tahun 2017 memperlihatkan bahwa adanya 11-12 orang penderita TBC terdapat pada 10000 penduduk di Kota Subulussalam. Jika

melihat dari tingkat penurunan jumlah penderita pada tabel diatas, pemerintah Kota Subulussalam diperkirakan akan sulit untuk mencapai target nasional.

Berdasarkan pusat data dan informasi kementerian kesehatan RI, menyebutkan bahwa penderita TBC banyak ditemukan pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah.

Menjadi tanggungjawab besar bagi Pemerintah Kota Subulussalam mengingat bahwa tingkat dan jumlah penderita TBC masih tinggi. Penanganan dan pencegahan perlu dilakukan dianatanya dalah; 1) pencegahan dini dengan diagnosa dini kepada seluruh masyarakat, 2) melakukan pengobatan kepada penderita TBC, 3) membudayakan perilaku hidup sehat dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan 4) peningkatan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi dan rutin berolahraga.

K. Angka Kejadian Demam Berdarah

Angka Kejadian Demam Berdarah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Puncaknya adalah pada tahun 2017 ditemukan kasus demam berdarah sebanyak 36 orang, jumlah ini meningkat dari tahun 2016. Angka kejadian demam bedarah di Kota Subulussalam tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah penderita DBD yang ditemukan (orang)	10	8	7	36

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

DBD masih menjadi masalah di Kota Subulussalam. Salah satu penyebabnya adalah tingginya mobilitas penduduk ke daerah - daerah dengan tingkat endemisitas tinggi. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kasus, pengendalian vektor dan upaya pemutusan rantai penularan harus ditingkatkan dan dioptimalkan dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif, yakni dengan cara melakukan sosialisasi kebersihan lingkungan dan tempat tinggal serta upaya pencegahan baik melalui fogging dan 3M (menguras, menutup, mengubur).

L. Jumlah Penderita Diare

Penemuan penyakit diare tampak fluktuatif, hal ini karena adanya swamedikasi oleh masyarakat artnya penderita diare dapat mengobati sendiri. Beberapa faktor penyebab penyakit diare adalah antara lain: (1) Masih belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat; (2)

Rendahnya kualitas lingkungan, diantaranya akibat dari pencemaran air, masih rendahnya kualitas air bersih yang memenuhi syarat, dan penggunaan jamban yang belum optima. Pada Tahun 2017 jumlah penderita diare ditemukan sebanyak 1.081 orang, jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 1.751 orang. Jumlah Penderita Diare yang ditemukan di Kota Subulussalam tahun 2014-2017 disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Jumlah Penderita Diare Tahun 2014 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penderita Diare (org)	814	1.882	1.751	1.081

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Dari jumlah kasus diare diatas pemerintah dengan melibatkan masyarakat dapat melakukan beberapa penanganan dan pencegahan seperti penanggulangan diare yang dititikberatkan pada penanganan penderita untuk mencegah kematian dan promosi kesehatan tentang hiegyne sanitasi dan makanan untuk mencegah penyebarluasan kasus (KLB). Upaya yang dilakukan oleh jajaran kesehatan baik oleh puskesmas maupun dinas kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, kaporitisasi air minum dan peningkatan sanitasi lingkungan.

M. Penderita HIV/AIDS

HIV/AIDs merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus Human Immunodeficiency Virus yang menyerang system kekebalan tubuh penderitanya sehingga penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah terinfeksi berbagai macam penyakit yang lain.

Penyebaran HIV-AIDS tidak mengenal batas daerah maupun wilayah. Perkembangan kasus AIDS dan infeksi HIV yang dilaporkan di Kota Subulussalam mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 7 orang dari 3 otang tahun 2015, dan pada tahun 2017 penderita HIV menurun lagi menjadi 4 orang. Jumlah penderita HIV yang terdata di Kota Subulussalam seperti yang tertera pada Tabel 2.30 dibawah ini.

Tabel 2.30.
Penderita HIV/AIDS Tahun 2015 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja (org)	3	7	4

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Penularan HIV dominan memalui hubungan seks, jarum suntik yang tercemar HIV, ibu hamil yang HIV positif. Berbagai upaya telaah dilakukan untuk menanggulangi penyebaran HIV di Kota Subulussalam, salah satunya adalah melakukan skrining terhadap pendonor darah, melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi ke masyarakat.

N. Cakupan kunjungan Ibu hamil K4

Pada program kesehatan ibu terdapat beberapa capaian indikator antara lain cakupan K4 dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Indikator tersebut juga menggambarkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K4 juga memberikan gambaran ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar dan paling sedikit empat kali kunjungan. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Subulussalam tahun 2013-2017 disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Tahun 2013 – 2017 di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (%)	88,53	89,84	92,60	86,48	85,22
Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	1.574	1.574	2.202	2.072	2.047
Jumlah sasaran ibu hamil	1.778	1.752	2.378	2.396	2.402

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Pada tabel 2.31 diatas menunjukkan bahwa tingkat kunjungan ibu hamil sejak tahun 2013 sampai dengan 2017 mengaalami fluktuasi. Jumlah tertinggi kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan yakni pada tahun 2015 mencapai 92,60%, jumlah ini menurun sampai 85,22% pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan belum juga optimal.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, salah satunya dengan meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Upaya ini

dilakukan antara lain dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan dan upaya kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes dan Posyandu.

2.3.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Berdasarkan Data Base Jalan Tahun 2017 Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Subulussalam bahwa provonsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Subulussalam pada tahun 2016 - 2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2016 proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sepanjang 110,04 km meningkat menjadi sepanjang 162,5 km pada tahun 2018. Perkembangan proporsi panjang jaringan jalan di Kota Subulussalam dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seperti yang disajikan pada Tabel 2.32 berikut.

Tabel 2.32.
Proporsi panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Kondisi Jalan	Tahun		
	2016	2017	2018
Baik	110,04	135,83	162,5
Sedang	111,64	108,86	87,78
Rusak	76,74	76,63	91,51
Rusak Berat	175,25	152,36	131,88
Total Panjang Jalan	473,68	473,68	473,68
Persentase jalan dalam kodisi baik (%)	23,23	28,68	34,31

Sumber: Dinas PUPR Kota Subulussalam

Rendahnya persentase jalan kota dalam kondisi baik ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu dari faktor mutu jalan dimana jalan yang baru dibangun kurang dari 1 tahun sudah kembali rusak atau berlubang. Faktor selanjutnya adalah beban kenderaan yang melewati jalan tersebut melebihi batas beban/tonase dari kelas/mutu jalan sehingga jalan menjadi rusak kemudian faktor kebijakan dan perencanaan jalan yang masih bersifat parsial dan faktor terakhir dikarenakan terbatasnya pendanaan untuk pemeliharaan jalan.

B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Menurut Organisasi Kesehatan dunia (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor- faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Adapun Ruang lingkup sanitasi ini antara lain yaitu Air Limbah, Persampahan, Drainase lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene. Salah satu faktor yang menjadi penilaian rumah layak huni adalah

rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah.

Kota Subulussalam pada tahun 2017 memiliki rumah tinggal bersanitasi sebanyak 13.161 unit atau 67% dari jumlah seluruh rumah tinggal 19744 unit (Data rumah tinggal diasumsikan sama dengan data rumah tanggapengguna listrik).Hal ini menggambarkan capaian rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam masih rendah. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Subulussalam tahun 2016 – 2017 disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Subulussalam
Tahun 2016 – 2017

Uraian	Tahun	
	2016	2017
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi (unit)	13.161	13.161
Jumlah rumah Tinggal (unit)	19.337	19.744
Persentase (%)	68	67

Sumber: Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018 dan Kotaku Kota Subulussalam

Masih rendahnya persentase rumah tinggal yang belum bersanitasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) masyarakat belum menganggap penting untuk memiliki jamban sendiri; 2) masyarakat pada umumnya masih menggunakan jamban cubluk; 3) perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABs) di sungai/pekarangan/selokan masih menjadi kebiasan masyarakat khususnya di daerah pinggiran sungai.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi hal tersebut di atas yaitu dengan meningkatkan sosialisasi pentingnya rumah tinggal bersanitasi, menyediakan MCK/MCK++, membangun IPAL Komunal dan membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM-SANIMAS) peduli sanitasi, penyuluhan dan Kampanye Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABs) serta mengawal dan melaksanakan Program Kotaku yang telah digagas oleh Pemerintah Pusat didaerah.

C. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Menurut Kementerian Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam,

tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Persentase penduduk berakses air minum di Kota Subulussalam tahun 2014 – 2018 disajikan pada Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
di Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Persentase penduduk berakses air minum	11,38	9,21	6,97	7,44	7,45
Penduduk berakses air minum (KKx4)	2.412	2.052	1.613	1.613	1.613
Jumlah penduduk (org)	84.814	89.147	92.534	86.769	86.642

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Tabel 2.34 memberikan informasi persentase penduduk berakses air minum masih sangat rendah. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah penduduk berakses air minum menurun dari 11,38% di tahun 2014 menjadi 7,45% di tahun 2018. Rendahnya persentase akses pengguna air minum disebabkan antara lain: 1) sistem Pelayanan air Minum yang belum memadai; 2) belum lengkap dan terbaharukan perangkat regulasi yang mendukung penyediaan air minum; 3) menurunnya kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air baku air minum; 4)masih terbatasnya penyedia air minum oleh perusahaan daerah air minumyang sehat (kredibel dan profesional); 5) belum optimalnya sistem perencanaan penyediaan air minum; dan 6) terbatasnya pendanaan untuk mendukung keseluruhan aspek penyediaan air minum.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti yang diuraikan diatas, maka Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada: 1) penyediaan perangkat peraturan di daerah untuk mendukung pelayanan air minum; 2) memastikan ketersediaan air baku air minum; 3) meningkatkan prioritas pembangunan prasarana dan sarana air minum; 4) meningkatkan kinerja manajemen penyelenggaraan air minum; 5) meningkatkan sistem perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi melalui penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum (RISSPAM); 6) meningkatkan cakupan pelayanan air minum; dan 7) pengembangan alternatif sumber pendanaan bagi pembangunan air minum.

D. Persentase Areal Kawasan Kumuh

Berdasarkan Surat keputusan Walikota Subulussalam, luas kawasan kumuh di Kota Subulussalam seluas 61,77 Ha. Penanganan kawasan kumuh terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam dengan berkolaborasi program Kotaku pemerintah pusat. Dari tahun 2013 luasan kumuh di Kota

Subulussalam terus menuruan dari 61,77 Ha menjadi 9,63 Ha di tahun 2017. Persentase Areal Kawasan Kumuh di Kota Subulussalam tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Persentase Areal Kawasan Kumuh
di Kota Subulussalam Tahun 2013 - 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase areal kawasan kumuh	4,44	4,44	1,11	1,49	0,69
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	61,77	61,77	15,46	20,66	9,63
Luas Wilayah (Km2)	1.391	1.391	1.391	1.391	1.391

Sumber: Program Kotaku Subulussalam

Penaganan kawasan kumuh serta pembangunan rumah layak huni termasuk didalamnya merupakan program prioritas pembangunan pemerintah baik ditingkat pusat, provinsi sampai ke daerah.

E. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Menurut UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Pencapaian suatu lingkungan perumahan yangbaik adalah suatu rumah tersebut memiliki jaringan air bersih, listrik dan sanitiasi, dan juga seberapa besar proporsi lingkungan kumuh perkotaan. Berikut akan dijelaskan kondisi perumahan sebagai dasar untuk menentukan arah kebijakan di bidang perumahan dalam RPJM Kota Subulussalam 2019-2024.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Kota Subulussalam bahwa sampai pada tahun 2018 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 2.254 unit yang tersebar disetiap desa. Jika dipersentasekan jumlah rumah tidak layak huni seluruh Kota Subulussalam adalah sebesar 11,67% dari total rumah tinggal 19.744 unit. Sesuai dengan program prioritas nasional dan gubernur aceh, pembangunan rumah layak huni ini akan terus ditingkatkan terutama yang diperuntukkan bagi keluarga miskin melalui data rumah tangga miskin (basis data terpadu) yang bisa didanai dari dana otsus dan dana-dana lain yang mendukung pencapaian rumah layak huni semaksimal mungkin.

2.3.2.4. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas.

Rasio jumlah Linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

B. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bencana kebakaran menitikberatkan terhadap 2 (dua) aspek pelayanan yaitu; cakupan pelayanan bencana kebakaran dan tingkat waktu tanggap (*respon time*) penanggulangan kebakaran, yakni 15 menit dari Pos Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). Cakupan pelayanan kebakaran diharapkan mencapai 75 persen dari jumlah luas wilayah.

Kondisi pada saat ini menggambarkan bahwa Wilayah Manajemen Kebakaran di Kota Subulussalam hanya memiliki 3 (tiga) Pos WMK yang terdiri dari WMK Kecamatan Simpang Kiri, WMK Kecamatan sultan Daulat dan WMK kecamatan Rundeng. Khusus untuk Kecamatan Penanggalan tidak memiliki WMK dikarenakan secara *respon time* masih dalam wilayah WMK kecamatan Simpang Kiri.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran antara lain: 1) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipelogi kebakaran (Mitigasi); 2) penyuluhan dan penyebaran informasi tentang pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran;3) simulasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha; 4) pengadaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan kebakaran; dan 5) pemeliharaan peralatan pendukung pemadam kebakaran dan alat evakuasi dan operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran serta penambahan personil pemadam dengan tidak melupakan tingkat kesejahteraannya.

2.3.2.5. Sosial

A. Persentase PMKS yang Tertangani

Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) turut meningkat secara kuantitas maupun kompleksitasnya termasuk bentuk permasalahan kesejahteraan sosial kontemporer. Semakin meningkatnya kondisi kemajuan masyarakat terutama PMKS ini tercermin pada indikator sosial, antara lain meningkatnya jangkauan pelayanan sosial, menurunnya jumlah PMKS, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS, serta semakin tumbuh berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial. Berikut akan disajkikan jumlah PMKS di Kota Subulussalam yang tertangani.

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti: pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Namun demikian, upayaupaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan jika dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilaksanakan. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial dan hambatan tersebut, menimbulkan tantangan ke depan bagi Kota Subulussalam adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS

2.3.3. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.3.1. Tenaga Kerja

A. Pencari Kerja Yang Terdaftar

Berdasarkan data yang tersedia jumlah pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Kota Subulussalam pada tahun 2017 berjumlah 275 orang, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 218 orang di tahun 2016. Pencari kerja yang terdaftar banyak didominasi dari tamatan SMK dan Diploma. Berikut akan ditampilkan lebih jelas jumlah pencari kerja menurut tingkat pendidikan pada Tabel 2.36.

Tabel 2.36.
Jumlah pencari Kerja Yang Terdaftar
Menurut Tingkat PendidikanTahun 2017

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pencari Kerja (orang)	Persentase (%)
1	SD	2	0,73
2	SLTP	6	2,18
3	SMU	37	13,45
4	SMK	117	42,55
5	Bidan	43	15,64
6	Diploma	51	18,55
7	Sarjana	19	6,91
Jumlah		275	100

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Upaya-upaya terus dilakukan selama satu dekade pemerintahan Kota Subulussalam, melalui instansi terkait setiap tahun dilakukan pelatihan-pelatihan bagi angkatan kerja baik yang terdaftar maupun untuk usia angkatan kerja lain.

2.3.3.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. Persentase Partipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi struktual dan fungsional. Secara jelas tercantum pada Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	12,95	-	12,49	14,71
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	1.238	1.224	1.216	1.216
Jumlah pekerja perempuan	9.560	N/A	9.737	8.267

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

B. Proporsi Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan

Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung. Berikut proporsi jumlah kursi di DPRK yang di duduki perempuan di Kota Subulussalam.

Tabel 2.38.
Proporsi kursi DPRD yang diduduki Perempuan di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR (%)	20	15	15	15
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan (org)	4	3	3	3
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD (org)	20	20	20	20

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua permasalahan. *Pertama*, masih mengakar kuatnya paradigma

patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik. *Kedua*, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.

Sebuah tantangan yang berat bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya instansi yang membidangi tugas dan fungsi dalam hal pemberdayaan perempuan. Kedepan selain daripada program dan kegiatan yang sifatnya mendorong keberdayaan perempuan aktif dan berpartisipasi dalam politik, juga beberapa anggota legislator perempuang yang ada harus mampu memberikan dan menunjukkan kerja keras dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.

2.3.3.3. Pangan

A. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar seperti gandum, jagung, beras, kentang, kedelai, dan sebagainya. Menurut kelompok produknya, bahan pangan utama ini termasuk dalam kelompok serelia. Secara umum ketersediaan pangan utama bagi masyarakat Kota Subulussalam adalah beras, dan pada tahun 2017 produksi padi di Kota Subulussalam sebanyak 2.816 ton (padi sawah dan padi ladang). Produksi padi tersebut masih dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) dan jika di proses dalam bentuk beras volumenya akan menurun karna sudah mengalami proses pengeringan, proses angkut dan penggilingan. Hasil beberapa kajian menyebutkan bahwa setiap ton GKP sama dengan 4,87 ton beras. Jika demikian produksi GKP sebanyak 2.816 ton itu akan menjadi 1.408 ton beras.

Dengan asumsi bahwa tingkat konsumsi beras perorang itu 0,54 Kg/hari, maka kebutuhan beras bagi penduduk Kota Subulussalam tahun 2017 adalah sebanyak 17.102 ton/tahun. Tentunya kebutuhan akan pangan utama khususnya beras sangat kurang jika dibandingkan dengan hasil produksi beras sebanyak 1.408 ton yang ada di Kota subulussalam.

Ketersediaan pangan utama khususnya beras tidak hanya bergantung kepada prduksi lokal saja, penyediaan beras dari aspek lain juga memiliki pengaruh yang besar seperti ketersediaan beras di Bulog dan lancarnya arus distribusi pangan dari daerah-daerah yang memproduksi beras ke Kota Subulussalam. Sehingga ketersdiaan beras di Kota Subulussalam selama ini dapat terpenuhi.

2.3.3.4. Pertanahan

A. Luas Tanah Yang Bersertifikat

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan/mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kota Subulussalam sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan menurut jenis hak atas tanah di Kota Subulussalam tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Banyaknya Sertifikat Tanah yang di Keluarakan Menurut Jenis Hak Atas Tanah di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Hak Milik	3.079	2.045	955		925
Hak Guna Bangunan		11			
Hak Guna Usaha					
Hak Pakai	8	5			4
Tanah Wakaf		14			3

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan di Kota Subulussalam antara lain; tingkat pemahaman masyarakat yang rendah, banyaknya status kepemilikan tanah yang tumpang tindih.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain: menyediakan fasilitas dan SDM Kota Subulussalam di Bidang Pertanahan, menyediakan fasilitas bebas biaya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat miskin dengan proda dan prona, melakukan indentifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dari lahan yang diterlantarkan oleh pemegang HPH dan HGU diwilayah Kota Subulussalam.

2.3.3.5. Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Kota Subulussalam

Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sangat penting, sebagaimana amanah UU Nomor 32 tahun 2009, RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Renacana jangka panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (pasal 10, ayat 5). diharapkan jika dokumen RPPLH tersedia maka bisa langsung diimplementasikan ke dalam RPJM Daerah sehingga menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Untuk periode tahun 2019 – 2024, sampai saat ini dokumen RPPLH belum tersedia.

B. Tersedianya Dokumen KLHS Kota Subulussalam

Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, sebagaimana amanah UU No. 32 tahun 2009 (pasal 15, ayat 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Sampai saat ini dokumen KLHS sudah disusun pada tahun 2013 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam, namun isi dari program dan kegiatan yang ada didalam dokumen tersebut belum terintegrasi ke berbagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Subulussalam. Maka dari itu mulai tahun 2018 ini dokumen KLHS sudah mulai disusun sebagai acuan dalam penyusunan dokumen RPJM Kota Subulussalam tahun 2019-2024.

C. Indeks Kualitas Air

Air merupakan salah satu sumber kehidupan, maka dari itu kualitas air tersebut wajib dijaga demi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Secara umum, sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dapat dikatagorikan atas 2 kelompok, yakni:

- Sumber air permukaan, yang dapat diperoleh dari sungai, danau, embung, telaga dan tidak termasuk air laut. Air tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti air minum, MCK, perairan sawah dan perikanan;
- Sumber air tanah, dimanfaatkan melalui proses penggalian atau pengeboran. Pemanfatan air ini biasanya hanya untuk keperluan rumah tangga dan industri

Sumber-sumber air tersebut tentunya wajib dijaga kualitasnya, termasuk juga kualitas air sungai dan mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung sungai-sungai tersebut. Pembangunan yang semakin pesat di berbagai daerah mendorong

banyaknya penggunaan lahan disepanjang sungai. Hal ini bisa dilihat lahan disepanjang sungai, terutama sungai-sungai yang melintasi daerah perkotaan, yang berubah fungsi terutama menjadi pemukiman dan kegiatan industri baik skala kecil maupun besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan rusaknya kualitas air sungai yang mengalir sepanjang sungai tersebut.

Maka dari itu diperlukan sebuah konsep dan metode untuk mengetahui tingkat kualitas air sungai tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menghitung kualitas air sungai dengan cara menghitung Indeks Pencemaran Air (IPA). Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (KLHRI, hal. 7, 2013). Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air dimana pedoman ini juga mengatur tatacara perhitungan IPA.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh tahun 2017 untuk Kota Subulussalam sampai saat ini belum memiliki nilai indeks kualitas air. Penilaian ini sangat perlu bagi daerah Kota Subulussalam mengingat bahwa tingkat laju pertumbuhan penduduk, perlembangan permukiman penduduk dan perkembangan industri yang pesat.

D. Indeks Kualitas Udara

Udara merupakan campuran berbagai macam komponen gas nitrogen 78% dan oksigen 21 persen serta karbondioksida 0,035%. Udara yang mempunyai kandungan tersebut tergolong dalam udara bersih. Sementara udara yang tercemar mempunyai kadar bahan pencemar baik dalam bentuk gas maupun padat melebihi yang terdapat di lingkungan alam.

Dalam rangka pengendalian pencemaran udara, Pemerintah Aceh melakukan Pemantauan kualitas udara yaitu pemantauan kualitas udara ambien yang mengacu pada PP RI 41 tahun 1999. Tahun 2013, Pemantauan ini dilakukan di 15 kota dalam wilayah provinsi Aceh. Data kualitas udara didapatkan dari pemantauan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota dengan menggunakan metode pengujian langsung di lapangan dengan frekwensi pemantauan 1 kali dalam setahun dan passive sampler dengan frekwensi pemantauan 3 kali setahun. Lokus pemantauan dengan menggunakan metode pengujian langsung dilapangan adalah khusus untuk roadside sedangkan metode passive sampler meliputi roadside, kawasan industri, pemukiman dan perkantoran. Lokasi pemantauan yang dipilih adalah daerah perkotaan yang tingkat aktifitasnya tinggi. Data hasil pemantauan untuk Kota Subulussalam adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40.
Data Kualitas Udara di Kota Subulussalam

NO2				SO2				Rerata NO2	Rerata SO2	REFEREN-CEEU		INDEX EU		Indeks udara (indeks Annual Model EU-ieu	Indeks Udara 2017 IKLH
A	B	C1	C2	A	B	C1	C2			NO2	SO2	NO2	SO2		
9,70	1,40	2,50	1,75	2,58	10,53	15,60	8,86	3,84	9,39	40	20	0,10	0,47	0,28	89,85

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh Tahun 2017

Merujuk pada Table 2.40 diatas, maka hasil dari pemantauan kualitas udara di Kota Subulussalam sebesar 89.85 atau dengan kata lain berada dalam kondisi 'sangat baik'

E. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Nilai indeks tutupan lahan/hutan di Kota Subulussalam adalah 40,15 atau berada dalam kondisi kurang baik. Adapun indkes kualitas tutupan lahan di Kota Subulussalam dan perbandingannya dengan kabupaten tetangga.

Tabel 2.41.
Data Kualitas Tutupan Lahan di Kota Subulussalam Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Indeks
Kota Subulussalam	40,15
Kabupaten Aceh Singkil	131,36
Kabupaten Aceh Selatan	89,86
Kabupaten Aceh Tenggara	95,20
Indeks Tutupan Lahan Aceh	65, 18

Sumber : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Aceh Tahun 2017

2.3.3.6. Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Persentase Penduduk Ber E KTP

Indikator ini dapat menggambarkan tertib administrasi kependudukan dan salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Gambaran rinci jumlah penduduk yang telah memiliki kartu tanda penduduk disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Persentase Penduduk Ber-EKTP di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jlh. Penduduk yang memiliki KTP	35.441	37.510	39.844	43.141	47.358
Jlh. Penduduk yang wajib KTP >17 thn					
Persentase (%)					

Sumber: Disdukcapil 2018

Persentase penduduk yang memiliki KTP pada tahun 2009 sebesar 93,47 persen dan persentase ini mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi 92,05 persen atau dengan kata lain masih ada penduduk diatas 17 tahun sebanyak 7-8 persen yang belum memiliki KTP. Masih adanya jumlah penduduk yang wajib KTP kemungkinan disebabkan beberapa faktor yakni penduduk yang baru berusia 17 tahun belum memiliki kemauan atau motivasi dalam mengurus KTP, sisanya adalah masyarakat yang belum melakukan perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan persentase penduduk yang wajib KTP yaitu: 1) Sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah umum pentingnya kepemilikan KTP; dan 2)memfasilitasi percepatan proses perpanjangan KTP yang telah kadaluarsa.

B. Rasio bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Jumlah bayi yang berakte kelahiran di kota Subulussalam pada tahun 2017 mencapai 97,94 persen yaitu 1.991 bayi yang telah memiliki akte kelahiran dari 1.950 bayi yang lahir di tahun 2017.Rasio bayi berakte kelahiran di Kota Subulussalam tahun 2017 disajikan pada **Tabel 2.43.**

Tabel 2.43.
Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kota Subulussalam Tahun 2017

Uraian	Tahun 2017
Jlh. Bayi lahir berakte kelahiran (org)	1.991
Jlh. Keseluruhan Bayi yang Lahir Hidup (org)	1.950
Rasio (%)	**97,94**

Sumber: Disdukcapil Kota Subulussalam, 2018

Rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2017 adalah 97.94% yang mengindikasikan jumlah akte kelaharan yang dikeluarkan hampir mecapai keseluruhan bayi yang lahir. Namun menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota Subulussalam khususnya dinas yang terkait untuk dapat melakukan dan tindakan agar akta kelahiran dengan mudah diperoleh. Hal-hal yang dapat dilakukan misalnya dinas catatan sipil dan kependudukan dapat melakukan kerjasama dengan rumah sakit, bidan, klinik bersalin agar setiap anak yang lahir pihak keluarga bayi dapat secara langsung mendapatkan akta kelahiran.

C. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Rasio pasangan berakte nikah adalah perbandingan jumlah pasangan nikah berakte nikah terhadap jumlah keseluruhan pasangan yang telah menikah.Tabel 2.44 memberikan informasi rasio pasangan berakte nikah di Kota Subulussalam

tahun 2014-2017 mangalami peningkatan yaitu 1,51 di tahun 2014 menjadi 7,57 di tahun 2017. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pasangan nikah di Kota Subulussalam masih banyak yang belum memilki akte nikah. Jumlah persentase peasangan berakte nikah tersebut masih tergolong sangat rendah, masih terdapat jumlah pasangan sebesar 92,53 persen yang belum memiliki akte nikah. Hal ini dapat disebabkan seperti : 1) kurangnya pemahaman pasangan menikah terhadap pentingnya tertib administrasi nikah; 2) banyaknya pasangan nikah yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA); dan 3) rendahnya sosialisasi tentang pentingnya pencatatan administrasi nikah.

Tabel 2.44.
Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jlh. Pasangan yang telah Berakte Nikah	592	565	662	765
Jumlah Keseluruhan pasangan Nikah	391	300	176	101
Rasio	**1,51**	**1,88**	**3,76**	**7,57**

Sumber: Disdukcapil Kota Subulussalam, 2018

2.3.3.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik

Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu indikatornya adalah tersedianya perkantoran pemerintahan desa di setiap desa. Berikut disajikan cakupan kantor pemerintahan desa di Kota Subulussalam pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Cakupan Kantor Pemerintahan Desa di Kota Subulussalam
Tahun 2016-2018

Uraian	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jlh. Kantor Desa	12	19	25	
Jlh. Seluruh Pemerintahan Desa	82	82	82	
Persentase (%)	**14,63**	**23,17**	**30,49**	

Sumber: DPMK Kota Subulussalam 2018

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong memberikan informasi bahwa hingga tahun 2017 Sudah 25 kampong yang memiliki kantor Desa tetap, jumlah ini masih jauh dari harapan dikarenakan jumlah desa di Kota Subulussalam mencapai 82 Desa atau sekitar 30 persen dari total Desa yang memiliki kantor, selebihnya masih dalam status penyewaan.

Pemerintah Kota Subulussalam mengupayakan pembangunan kantor pemerintahan kampong secara bertahap sehingga seluruh desa/kampong memiliki kantor pemerintahan yang tetap.

B. Persentase Posyandu Aktif

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator utama yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi, angka kematian balita, dan angka kematian ibu melahirkan, perkembangan indikator kesehatan tersebut sangat erat kaitannya dengan pos pelayanan terpadu (posyandu). Persentase posyandu aktif di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Jumlah Posyandu Aktif di Kota Subulussalam
Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jlh. Posyandu Aktif	106	106	56	35	N/A
Total Posyandu	106	106	107	107	111
Persentase (%)	100	100	52,34	33	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Subulussalam 2018

Dari Tabel 2.46 diatas menunjukkan bahwa jumlah posyandu aktif terus menurun daro 100 persen ditahun 2015 dan menurun menjadi 33% ditahun 2016, namun jumlah psoyandu terus meningkat jumlahnya dari 106 unit di tahun 2013, 2014 dan meningkat terus jumlahnya menjadi 111 unit di tahun 2017. Menjadi perhatian khusus dalam hal meningkatkan keaktifan posyandu, dikarenkan dengan adanya program ini dapat membantu dan mencegah dari pada beberapa permasalahan dasar kesehatan keluarga.

2.3.3.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 rata-rata laju pertumbuhan penduduk berkisar 4-5% pertahun. Jumlah persentase tersebut merupakan kategori tinggi dalam klasifikasi pertumbuhan penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kota Subulussalam sangat berhubungan dengan letak strategis Kota Subulussalam sebagai jalur lintas Aceh-Sumatera Utara dan memiliki tingkat aktifitas perekonomian yang beragam dan cepat. Daerah ini mejadi daya tarik beberapa investor yang bergerak dibidang perkebunan, industri tambang, perumahan, perbankan, insdutri makanan

dan minimarket/retail waralaba, sehingga banyak penduduk di Kota Subulussalam datang dari luar dan menetap di Kota Subulussalam.

B. Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Subulussalam menyebutkan bahwa rata-rata jumlah anggota keluarga di Kota Subulussalam berkisar 4-5 orang per rumah tangga dalam lima tahun terakhir.

C. Ratio Akseptor KB

Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Data rasio akseptor KB merupakan jumlah akseptor KB yang tediri dari akseptor KB laki-laki dan akseptor KB perempuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Rasio Akseptor KB dan Jumlah pasangan usia Subur di Kota Subulussalam Tahun 2014-2019

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Ratio Akseptor KB	19,15	12,40	21,91	15,88
Jumlah Akseptor KB	2154	1708	3020	2274
Jumlah pasangan usia subur	11246	13779	13784	14322

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Dari data pada Tabel 2.47 diatas menunjukkan bahwa adanya jumlah pasangan usia subur yang menggunakan akseptor KB sejak tahun 2014 sampai dengan 2017. Sejak tahun 2014 rasio akseptor sampaipada tahun 2017 terjadinya fluktuasi jumlah pengguna akseptor KB. Semakin tinggi penggunaan akseptor KB semakin tinggi juga penanganan jumlah penduduk yang meningkat.

D. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah usia 15-49 Tahun

Berikut jumlah pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun sejak tahun 2014-2017 pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Tabel Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 (%)	74,04	62,36	66,56	66,05
Jumlah peserta KB aktif	8.327	8.593	9.174	9.459
Jumlah pasangan usia subur	11.246	13.779	13.784	14.322

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Dari tabel 2.48 diatas menunjukkan bahwa jumlah pemakai kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang menikah sampai pada tahun tahun 2017 mencapai 66,05 persen. Julah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 74,04 persen. Kedepan Pemerintah Kota Subulussalam dapat melakukan sosialisasi dan penyuluhan lebih aktif dan berkelanjutan.

2.3.3.9. Perhubungan

A. Izin Trayek

Dinas Perhubungan Kota Subulussalam menginformasikan bahwa sampai saat ini Kota Subulussalam belum mengeluarkan izin trayek. Hal ini disebabkan sarana dan prasarana yang tersedia belum difungsikan sebagaimana mestinya dan terbatasnya SDM di bidang pengujian kendaraan bermotor.

B. Jumlah Terminal Bis

Kota Subulussalam hanya memiliki 1 terminal Bis tipe B yang sudah tidak berfungsi optimal untuk melayani armada angkutan penumpang. Kondisi saat ini terminal tersebut beralih fungsi sebagai pusat pasar. Hal ini disebabkan kurang tepatnya lokasi terminal yang berada ditengah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

C. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Subulussalam pada tahun 2017 mencapai 5.260 unit yang berarti bahwa setiap panjang jalan sepanjang 1 km dapat diakses kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 sebanyak 9-10 kendaraan. Kondisi ini berbeda dengan kondisi pada tahun sebelumnya, dimana rasio ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan

terus meningkat. Selanjutnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Subulussalam tahun 2013 – 2017 disajikan pada Tabel 2.49

Tabel 2.49.
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Subulussalam Tahun 2013-2017

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Sedan		5		8	12
Jeep	1	1		6	19
Mini Bus	42	42		55	75
Pick Up	23	25		45	95
Truck	2	10	457	445	532
Alat Besar/Berat		2		7	15
Sepeda Motor	1.388	1.573	3.982	4.210	4.512
Jumlah	1.456	1.658	4.439	4.776	5.260
Panjang jalan (Km)	579,59	579,59	579,59	579,59	579,59
Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan	2,51	2,86	7,66	8,24	9,08

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

2.3.3.10. Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi yang tersedia di Kota Subulussalam terdiri dari: akses internet, hotspot, jaringan telepon seluler, media informasi dan radio komunikasi. Pada tahun 2017, jumlah SKPD yang telah memiliki akses internet di Kota Subulussalam sebanyak 100 persen, jumlah titik hotspot sebanyak 95 titik, serta jumlah radio komunikasi yang aktif sebanyak 3 unit. Sarana/prasarana jaringan telepon seluler sudah mencapai keseluruhan kecamatan di Kota Subulussalam, seperti provider telkomsel, indosat dan excelindo dan sudah tersedia layanan 4G. Keberadaan PT. Telkom juga sangat mempengaruhi perkembangan arus informasi digital di Kota Subulussalam, adanya layanan televisi digital, jaringan internet kabel kerumah-rumah, instansi swasta dan usaha bisnis lainnya.

2.3.3.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Jumlah Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Jumlah koperasi di setiap kecamatan di Kota Subulussalam sejak tahun 2011-2013 disajikan pada **Tabel 2.50.**

Tabel 2.50.
Jumlah Koperasi di Kota Subulussalam Tahun 2015– 2017

Kecamatan	Jenis Koperasi (Tahun)								
	2015			2016			2017		
	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN	KUD	KPN	KNPN
Simpang Kiri	2	2	54	2	2	57	2	1	31
Penanggalan	0	1	23	0	1	25	-	-	19
Rundeng	0	0	8	0	0	9	-	-	6
Sultan Daulat	1	0	10	1	0	9	-	-	7
Longkib	1	0	3	1	0	3	-	-	2
Jumlah	4	3	98	4	3	103	2	1	65

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Ket : KUD (Koperasi Unit Desa)
KPN (Koperasi Pegawai Negeri)
KNPN (Koperasi Non Pegawai Negeri)

B. Jumlah Usaha Kecil Menengah

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat." Kriteria usaha kecil dan menengah menurut UU.No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- Usaha menengah memiliki asset 500 juta – 10 Milyar dan penjualan 2,5 Milyar – 50 Milyar/ tahun
- Usaha Kecil memeiliki asset 50 juta-500 juta dan penjualan 300 juta-2,5 Milyar pertahun
- Usaha Mikro memiliki asset dibawah 50 juta dan penjualan dibawah 300 juta/tahun.

Jumlah usaha kecil dan menengah di Kota Subulussalam dikelompokkan kedalam usaha yang bergerak di agro industri dan industri pengolahan. Berikut akan disajkikan jumlah usaha agroindustri dan pengolahan dalam skala usaha kecil menengah sejak tahun 2013 sampai dengan 2017.

Tabel 2.51.
Jumlah usaha agroindustri dan Industri Pengolahan dalam Kategori Kecil dan Menengah di Kota Subulussalam Tahun 2013 – 2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Agro Industri	126	64	27	N/A	727
Industri pengolahan	229	299	72	N/A	790
Jumlah	355	363	99	0	1517

Sumber: BPS Kota Subulussalam tahun 2018

Dari Tabel 2.51 diatas menunjukkan bahwa jumlah usaha kecil menengah di Kota Subulussalam terus meningkat. Beberapa jenis usaha yang di lakukan oleh usaha ini bergerak di usaha makanan, pakaian jadi, furnitur, komputer, logam, perbengkelan dan reparasi elektronik.

Walaupun adanya peningkatan jumlah usaha kecil dan menegah, pemerintah harus terus memberikan dukungan dan akses informasi kepada pengusaha terutama terhadap permodalan, jaminan berusaha dan peningkatan hasil dan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Permodalan dapat ditempuh dengan membangun keaktifan koperasi dan perbankan. Sedangkan jaminan berusaha serta peningkatan mutu hasil produksi dapat dilakukan dengan membuat regulasi yang baik dan pemerintah dapat melakukan pelatihan bagi pengusaha demi pengembangan usaha ke level yang lebih baik lagi.

2.3.3.12. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan Penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Investasi yang ada di Kota Subulussalam secara keseluruhan merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kota Subulussalam masih sangat sedikit jumlahnya. Sampai pada tahun 2017 jumlah investasi sebanyak 19 investor, yang terdiri dari 14 investor bergerak dibidang indistri perkebunan kelapa sawit dan 5 investor bergerak dibidang pertambangan biji besi.

Investasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut, kehadiran investasi dari pihak dalam dan luar negeri sangat diperlukan, dan menjadi salah satu tugas berat Pemerintah Kota Subulussalam kedepan mengingat

ketersediaan Sumberdaya Alam yang melimpah, namun memiliki keterbatasan dana dalam pengelolaannya.

2.3.3.13. Kepemudaan dan Olah raga

A. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Subulussalam Tahun 2017 ada 18 organisasi pemuda yang semuanya terhimpun di bawah koordinasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

B. Jumlah Organisasi Olah Raga

Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Berdasarkan data dari dinas pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga kota Subulussalam terdapat 10 club olahraga yang mendapatkan sentuhan tangan pemeritah yaitu klub sepak bola dan klub bola voli yang berada di setiap kecamatan dalam Kota Subulussalam. Jika dilihat lebih jauh, banyak klub olahraga lainnya dalam berbagai cabang yang berada di Kota Subulussalam seperti: bulu tangkis, tenis meja, footsal, karate, taekwondo, tarung derajat, pencak silat, sepeda, panahan, catur, balab motor, perbakin dan lain-lain.

C. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kreatifitas para pemuda, meningkatkan sumber daya pemuda agar mereka dapat menggali potensi mereka sebagai bekal untuk menjadi masyarakat yang berfikir positif, inovatif dan produktif, serta untuk melatih sikap mandiri, bekerjasama, kebersamaan dan kekeluargaan.

Berdasarkan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Subulussalam, Mulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 baru satu kegiatan kepemudaan yang sudah menjadi agenda tahunan pemerintah Kota Subulussalam yaitu kegiatan Pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan generasi

Muda. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk itu pemerintah kedepan perlu mengupayakan penambahan kegiatan kepemudaan.

2.3.3.14. Kebudayaan

Menurut laporan BP3 (Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala) Aceh, Dari 3 Situs Budaya yang ada di Subulussalam baru satu yang memiliki juru pelihara dan sudah di lakukan pemugaran oleh pemerintah yaitu Kompleks makam Syekh Hamzah Fansyuri di Desa Oboh, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam.

Tabel 2.52.
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan di Kota Subulussalam Tahun 2014 – 2016

Uraian	Tahun		
	2014	2015	2016
Jlh. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	3	3	3
Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah	1	1	1
Persentase	33,33	33,33	33,33

Sumber: Badan Pengelolaan dan Pelestarian Purbakala (BP3) Aceh

Namun juga terdapat dua cagar budaya lainnya yaitu :

1) Makam Sultan Daulat Sambo yang terletak di Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, dan
2) Benteng Kerajaan Batu-batu yang terletak di desa Batu Napal kecamatan Sultan Daulat.

Hingga saat ini belum memiliki juru pelihara dan belum mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kota Subulussalam kedepan perlu melakukan kebijakan-kebijakan seperti; menempatkan masing-masing satu orang juru pelihara pada setiap situs budaya tersebut dan memugar situs budaya tersebut, namun dengan tetap mempertahankan kondisi aslinya sebagai warisan budaya.

2.3.3.15. Perpustakaan

A. Jumlah Perpustakaan

Perpustakaan merupakan wadah dimana didalamnya terdapat berbagai jenis dan kelompok bahan pustaka yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang

disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas berupa bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Selama kurun waktu tahun 2012 – 2016, Kota Subulussalam hanya memiliki 2 (dua) buah perpustakaan milik pemerintah daerah, namun jumlah perpustakaan lain seperti perpustakaan kampong pada tahun 2016 sebanyak 21 unit, yang kesemuanya belum memiliki gedung perpustakaan sendiri.

B. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Arsip dan perpustakaan Kota Subulussalam, Jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Kota Subulussalam tahun 2016 hanya 3.119 orang dengan rata–rata pengunjung 9 orang perharinya. Ini menunjukkan minat baca masyarakat masih sangat rendah. Pemerintah kota Subulussalam kedepan perlu meningkatkan sosialisasi minat baca bagi masyarakat baik melalui media iklan, Poster, baliho, ataupun dengan menggunakan media lainnya yang efektif dapat meningkatkan minat baca masyarakat.

C. Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan

Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Fasilitas yang memadai belum terlihat di Perpustakaan Umum Kota Subulussalam dengan persediaan buku di rak-rak perpustakaan yang tidak banyak serta buku yang disediakan kebanyakan buku-buku tahun tinggi. Hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung ke Perpustakaan Kota Subulussalam.

Sejauh ini buku yang disediakan di perpustakaan Kota Subulussalam sebanyak 13.125 eksemplar. Buku – buku ini dikumpulkan dari sejak kota Subulussalam berdiri hingga saat ini. Buku diperpustakaan Kota Subulussalam berdasarkan bantuan perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional dan pihak ketiga. koleksi

buku yang sebanyak 13.125 eksemplar tersebut sangat jauh dari standar kesediaan buku. Oleh karena itu pemerintah kedepan perlu melengkapi buku-buku koleksi perpustakaan Kota Subulussalam.

D. Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun 2009-2016 di Kota Subulussalam masih sangat rendah, hingga tahun 2016 belum ada 1 (Satu) SKPD pun yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Hal ini disebabkan kelemahan SDM aparatur pengelola arsip pada SKPD Kota Subulussalam, SKPD dalam Lingkup Pemerintah Kota Subulussalam masih sedang berbenah dalam segala aspek pelayanan terhadap masyarakat termasuk tata pengelolaan arsip yang baik dan benar. Disamping itu masih banyak SKPD dalam lingkup Pemerintah kota Subulussalam yang belum memiliki gedung kantor dan prasarana yang memadai sehingga belum dapat menerapkan sistem pengelolaan arsip secara baku.

2.3.4. Fokus layanan Urusan Pilihan

2.3.4.1. Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Jumlah wisatawan di Kota Subulussalam selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, hal ini karena adanya beberapa tempat wisata baru yang mulai tumbuh dan ramai dikunjungi wisatawan asing dan lokal. Berikut disajikan dalam tabel perkembangan jumlah kunjungan wisatawan sejak tahun tahun 2014-2017.

Tabel 2.53.
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Subulussalam Tahun 2014-2016

Uraian	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kunjungan Wisata	18.023	35.113	41.570	43.081
Wisatawan Mancanegara	3.947	5	3	11
Wisatawan Nusantara	14.076	35.108	41.567	43.070

Sumber : ppid.acehprov.go.id

B. Tempat Wisata dan Cagar Budaya

Kota Subulussalam memiliki keragaman objek wisata baik itu wisata alam maupun wisata religi. Beberapa objek wisata di Kota subulussalam diantaranya adalah:

Tabel 2.54.
Nama dan Lokasi Objek Wisata Yang ada di Kota Subulussalam
Tahun 2017

No	Nama Objek Wisata	A l a m a t
1.	Tahura Lae Kombih	Desa Jontor
2.	Arung jeram lae Kombih	Desa Sikelang
3.	Wisata Alam Penuntungan	Desa penuntungan
4.	Air Terjun SKPC	Desa penuntungan
5.	Air Terjun Kedabuhan	Desa lae Ikan
6.	Irigasi Bahorok	Desa Namo Buaya
7.	Air Terjun Silangit-langit	Desa Singgersing
8.	Pemandian Nantampuk Mas	Desa lae Mbersih
9.	Air Terjun Batu Napal	Desa lae Raso
10.	Makan Syech Hamzah fansuri	Desa Oboh

Sumber : Disparpora Kota Subulussalam tahun 2018

Dari beberapa objek wisata seperti yang ditampilkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Subulussalam memiliki jumlah wisata alam yang banyak dan masing-masing lokasi wisata alam tersebut memiliki keunikan dan keunggulan sendiri. Namun sampai pada saat ini lokasi objek wisata tersebut masih belum menjadi perhatian pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana serta promosi destinasinya.

Peuang dalam pengembangan destinasi wisata di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, mengingat bahwa Kota Subulussalam berada di jalur lintas dua kabupaten yang sudah memiliki pengembangan wisata yang sudah lebih baik. Kabupaten Aceh singkil memiliki pulau banyak, dimana rata-rata wisatawan yang datang pasti singgah atau menginap dahulu di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Selatan memiliki wisata pesisir pantai yang banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan lokal. Jadi pemerintah Kota Subulussalam melalui dinas terkait membaca peluang pengembangan objek wisata yang ada.

2.3.4.2. Pertanian

A. Tanaman Pangan

Tabel 2.55 menunjukkan bahwa produksi padi sawah pada tahun 2014 sebesar 3.710 ton meningkat menjadi 4341 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2013 produksi padi sawah menurun menjadi 2.351 ton. Penurunan produksi ini dikarenakan oleh menurunnya jumlah luasan panen sejak tahun 2014 807 Ha menjadi 537 Ha di Tahun 2017. Produktivitas padi sawah perhektar rata-rata berkisar 4 ton/Ha. Demikian juga dengan komoditi padi ladang mengalami peningkatan produktivitas dari 2,56 ton/Ha di tahun 2014 menjadi 4,34 Ton/Ha di tahun 2017.

Sedangkan komoditi jagung mengalami peningkatan luasan tanam dan panen, sehingga mempengaruhi jumlah produksi tiap tahunnya. Produktivitas jagung terus meningkat dari 4,06 Ton/Ha di tahun 2014 menjadi 6,77 ton/Ha di tahun 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa komoditi jagung di Kota Subulussalam sangat menjanjukan untuk dikembangkan. Selanjutnya komoditi kedelai yang merupakan komoditi yang sangat diperlukan sebagai bahan makanan dan industri rumah tangga, dari data menunjukkan bahwa sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami penurunan luasan tanam, panen sampai dengan produktivitasnya. Kedepan komoditi kedelai ini harus dikembangkan secara maksimal mengingat bahwa komoditi ini defisit produksi secara nasional. Berikut disajikan dalam tabel jumlah luas panen, luas tanam, produksi dan produktivitas beberapa komoditi pangan di Kota Subulussalam.

Tabel 2.55.
Jumlah luas Panen, luas tanam, produksi dan Pruktivitas Tanaman Pangan Utama di Kota Subulussalam Tahun 2014-2017

Komiditi Pangan Utama	Satuan	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
Padi Sawah	Luas Panen (Ha)	807	871	1133	537
	Luas Tanam (Ha)	608	N/A	N/A	546
	Produksi (Ton)	3.710	3.658	4.341	2.351
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,60	4,20	3,83	4,38
Padi Ladang	Luas Panen (Ha)	388	668	373	105
	Luas Tanam (Ha)	390	N/A	N/A	195
	Produksi (Ton)	995	2271	1454,7	456
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,56	3,40	3,90	4,34
Jagung	Luas Panen (Ha)	249	870	1.620	1.093
	Luas Tanam (Ha)	N/A	N/A	1.985	1.445
	Produksi (Ton)	1017	4002	9007,2	7398,8
	Produktivitas (Ton/Ha)	4,08	4,60	5,56	6,77
Kedelai	Luas Panen (Ha)	45	42	8	11
	Luas Tanam (Ha)	N/A	N/A	7	61
	Produksi (Ton)	6,6	42	1,2	10
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,15	1,00	0,15	0,91

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Dari penjelasan secara ringkas mengenai keadaan komoditi tanaman pangan utama diatas dengan mempertimbangkan kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat maka Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan antara lain: 1) penerapan anjuran teknologi budidaya dan penggunaan varietas unggul; 2)pengendalian hama dan penyakit tanaman padi;

3) Peningkatan fungsi penyuluh pertanian; 4)peningkatan sarana produksi pertanian; dan 5) peningkatan luas tanam khusus untuk tanaman padi ladang, kedelai dan jagung.

B. Perkebunan

Potensi perkebunan di Kota Subulussalam sangat menjanjikan, khususnya komoditi kelapa sawit, hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah luasan kebun kelapa sawit rakyat dan minat masyarakat dalam berbudidaya sawit. Ketersediaan permintaan akan buah kelapa sawit oleh beberapa perusahaan pabrik kelapa sawit di Kota Subulussalam menjadikan komoditi ini menjadi komoditi unggulan daripada komoditi perkebunan lainnya. Seperti kakao, karet, kelapa dalam, gambir dan lada. Berikut disajikan dalam tabel luas dan produksi beberapa jenis komoditi unggulan perkebunan Kota Subulussalam.

Tabel 2.56.
Luas, Produksi dan Produktivitas Beberapa Jenis Komoditi Unggulan Perkebunan di Kota Subulussalam tahun 2015-2017

Komoditi Perkebunan	Satuan	Tahun			
		2015	2015	2016	2017
Kelapa Sawit	Luas Panen (Ha)	10.768	17.257	11.145	18.377
	Produksi (Ton)	31.435	31.490	31.684	31.648
	Produktivitas (Ton/Ha)	2,91	2,89	2,84	1,72
Karet	Luas Panen (Ha)	3.048	4.061	2.777	3.856
	Produksi (Ton)	2.225	2.100	1.856	1.628
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,73	0,74	0,59	0,42
Kakao	Luas Panen (Ha)	371	822	380	755
	Produksi (Ton)	243	202	211	203
	Produktivitas (Ton/Ha)	0,65	0,58	0,56	0,27

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2017 jumlah luas perkebunan kelapa sawit yang sudah menghasilkan mencapai 18377 Ha dengan produksi panen sebesar 31648 ton. Semua Kecamatan di Kota Subulussalam memiliki potensi perkebunan kelapa sawit. Sementara itu perkebunan karet mengalami perluasan luas panen, pada tahun 2017 mencapai 3856 Ha dengan produksi 1628 ton.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya produksi kelapa sawit, karet dan kakaoantara lain: 1) kurangnya pemeliharaan; 2) berkurangnya Tanaman

Menghasilkan (TM);3) bertambahnya jumlah Tanaman Rusak (TR). Upaya Pemerintah untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit, karet dan kakao antara lain: 1) peningkatan pemeliharaan dan melaksanakan replanting (menanam kembali) untuk semua komoditi perkebunan;2) peningkatan penerapan anjuran teknologi budidaya yangbaik; 3) perluasan areal penanaman; dan 4) peningkatan penyuluhan kepada petani.

C. Peternakan

Populasi ternak (besar dan kecil) secara umum menunjukkan peningkatan, pada periode tahun 2014-2017,. Secara rinci populasi ternak di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.
Populasi Ternak di Kota Subulussalam Pada Tahun 2014-2017

NO	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)			
		2014	2015	2016	2017
1	Sapi Potong	2.196	2.491	2.707	2.622
2	Kambing	7.457	7.784	8.003	
3	Kerbau	115	253	275	280
4	Domba	2.196	1.709	1.877	
5	Ayam Kampung	54.803	68.423	78.800	
6	Ayam Pedaging	56.200	71.100	81.294	
7	Ayam Petelur	24.000	2.000	3.500	
8	Itik	5.480	7.603	7.885	

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Populasi ternak besar terdiri dari sapi perah, sapi potong, kerbau dan kuda. Pada tahun 2016, populasi ternak besar yang terdapat di Kota Subulussalam hanya sapi potong dan kerbaudengan populasi sebesar 2.707 ekor dan 275 ekor. Populasi ternak sapi sebagian besar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 758 ekor, dan kecamatan Rundeng sebanyak 541 ekor.

Populasi ternak kecil terdiri dari kambing, domba dan babi. Pada tahun 2016. Total populasi berturut-turut adalah 8.003 ekor kambing, 1.877 ekor domba, dan 217 ekor babi (Tabel 5.18). Populasi ternak kambing sebagian besar berada di kecamatan Rundeng sebesar 3.167 ekor, dan kecamatan Simpang Kiri 2.132 ekor. Populasi ternak domba terbesar berada di kecamatan rundeng sebanyak 851 ekor dan kecamatan Longkib sebanyak 461 ekor.

Populasi unggas terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging dan itik/itik manila. Pada tahun 2016, populasi unggas di Kota Subulussalam terdiri dari ayam kampung 78.800 ekor, ayam petelor 3.500 ekor, ayam pedaging 81.294 ekor

dan itik 7.885 ekor (Tabel 5.19). Populasi ayam kampung terbesar berada di kecamatan Simpang Kiri sebanyak 40.980 ekor. Populasi ayam pedaging tertinggi berada di kecamatan Sultan Daulat sebesar 33.500 ekor, kecamatan Simpang Kiri 28.907 ekor, dan kecamatan Rundeng sebesar 8.983 ekor.

Usaha peternakan secara umum sampai saat ini merupakan usaha sampingan/usaha rumah tangga, terutama pada ternak besar seperti sapi dan kerbau, sehingga produksi dan produktivitasnya masih dikategorikan rendah. Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak (kecil dan besar) antara lain: 1) peningkatan populasi ternak; dan 2) pengembangan kawasan peternakan terpadu.

D. Perikanan

Potensi sumberdaya ikan di Kota Subulussalam cukup besar, mengingat Kota Subulussalam mempunyai jumlah panjang sungai sekitar 16,72 Km. Lahan budidaya perikanan dapat memanfaatkan lahan daratan basah(sawah), kolam, tambak dan rawa. Secara rinci produksi ikan di Kota Subulussalam tersaji pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Produksi Ikan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun (Ton)		
	2015	2016	2017
Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	298,67	299,17	126,5
Perikanan Budidaya			57,4
- Budidaya Kolam			53,7
- Budidaya Tambak dan keramba			3,7
Jumlah			**183,9**

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Kebutuhan akan konsumsi ikan masyarakat Kota Subulussalam tiap tahunnya terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk mengukur kebutuhan dan ketersediaan akan konsumsi ikan dapat dikaji berdasarkan data pengeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan.

Pada tahun 2017 penegeluaran rata-rata perkapita dalam sebulan belanja ikan sebesar Rp. 55.642, dengan asumsi harga ikan minimal Rp. 15.000/Kg, maka pada tahun 2017 penduduk Kota Subulussalam mengkonsumsi ikan minimal sebanyak 3,7 Kg/perkapita/bulan dan dikalkulasikan setahun mengkonsumsi ikan sebanyak 44,4 Kg/kapita/tahun. Jika dikalkulasikan dengan total jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 86.769 jiwa, maka jumlah konsumsi rata-rata penduduk Kota

Subulussalam adalah berkisar 3.852.543,6 Kg/tahun atau 385 ton/tahun. Kondisi produksi pada tahun 2017 menunjukkan jumlah produksi ikan di Kota Subulussalam sebanyak 183,9 ton sedangkan jumlah rata-rata konsumsi ikan sebanyak 385 ton/tahun, sehingga ketersediaan ikan masih sangat rendah.

Kedepan diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada pengoptimalan pembangunan perikanan terutama dalam sektor budidaya ikan untuk peningkatan produksi, memanfaatkan penerapan dan implementasi teknologi dan informasi perikanan dan mengoptimalkan peran balai benih ikan dalam rangka penyediaan benih ikan unggul.

2.3.4.3. Kehutanan

Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014-2034 menetapkan luas kawasan hutan di Kota Subulussalam pada tahun 2014seperti disajikan Tabel 2.59. Hutan di kawasan lindung seluas 23.781,65 Ha,yang terdiri dari Hutan Lindung 19.046,08 Ha, Suaka Margasatwa Rawa Singkil seluas 3.249,62 Ha dan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.485,95 Ha. Selanjutnya hutan di kawasan budidaya seluas 12.573,54 Ha yang terdiri dari hutan produksi seluas 10.548,47 Ha dan hutan produksi konversi seluas 2.025,07 Ha.

Tabel 2.59.
Luas Kawasan Hutan di Kota Subulussalam

No	Nama Kawasan	Luas (Ha)
I	Hutan di Kawasan Lindung	23.757,24
	Hutan Lindung	18.817,61
	Suaka Margasatwa Rawa Singkil	3.249,61
	Tahura Plasma Nutfah Kapur	1.690,02
II	Hutan di Kawasan Budidaya	12.573,3
	Hutan Produksi	10.548,23
	Hutan Produksi Konversi	2.025,07
Total Luas Kawasan Hutan		36.330,54

Sumber: Qanun RTRW Kota Subulussalam 2014-2034

Berdasarkan kewangan pengelolaannya, pemerintah Kota Subulussalam hanya diberikan tanggungjawab mengelolan kawasan Tahura Plasma Nutfah Kapur seluas 1.690,02 Hektar, kawasan hutan seain hutan plasma nutfah kapur menjadi kewenangan Pemerintah Aceh.

Sampai pada saat ini pengelolaan kawasan Tahura masih belum maksimal, masih banyak terdapat permasalahan dilapangan seperti masih banyaknya masyarakat setempat membuka lahan perkebunan dan penebangan pohon secara

ilegal. Kebijakan Pemerintah Kota Subulussalam sudah mempersiapkan perencanaan bahwa kawasan Tahura tersebut akan dijadikan sebagai kawasan hutan penelitian, pendidikan dan wisata.

2.3.4.4. Energi dan Sumberdaya Mineral

A. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Kebutuhan listrik di Kota Subulussalam dipenuhi oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sampai dengan tahun 2017, semua wilayah di Kota Subulussalam telah tersambung dalam jaringan PLN. secara rinci persentase rumah berlistrik di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Subulussalam

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Persentase rumah tangga pengguna listrik	104,36	109,89	116,38	117,17	117,13
Jumlah rumah tangga pengguna listrik	16.123	17.357	18.735	19.337	19.744
Jumlah Rumah Tangga	15.450	15.795	16.098	16.504	16.856

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

2.3.4.5. Pertambangan dan Penggalian

Kota Subulussalam ternyata tidak hanya memiliki potensi di sektor Perkebunan namun juga memiliki potensi sektor pertambangan. Saat ini tercatat 5 (Lima) perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kota Subulussalam, walaupun hanya 1 (satu) perusahaan yang sudah melakukan izin produksi, sedangkan perusahaan lainnya masih izin eksplorasi. Berikut disajikan dalam Tabel 2.61 jumlah perusahaan tambang yang ada di Kota Subulussalam.

Tabel 2.61.
Perusahaan Pertambangan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2016

Nama Perusahaan	Jenis Galian	Lokasi	Ijin Konsesi (ha)	Status ijin Konsesi
PT. Atjeh Inti	Bijih Besi DMP	Sultan Daulat/ Penanggalan	457,8	Explorasi
PT. Tuah Ranup Lampuan	Bijih Besi DMP	Penanggalan	467	Explorasi
PT. Organik Semesta Subur	Bijih Besi DMP	Sultan Daulat	990	Explorasi
PT. Pilar Emas Indah	Bijih Besi DMP	Penanggalan	153	Explorasi
PT. Estamo Mandiri	Bijih Besi DMP	Penanggalan	600	Produksi

Sumber : DP3UKM Kota Subulussalam 2016

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kota Subulussalam masih mengeksplorasi jenis galian Bijih Besi DMP, Batubara dan Galian DMP yang tersebar di Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Sultan Daulat.

Eksplorasi Batu Bara dilakukan oleh PT. Olaga Prima dengan lokasi eksplorasi di Kecamatan Longkib. Sedangkan PT. Densuko Naniko melakukan eksplorasi Galena DMP yang berlokasi di Kecamatan Sultan Daulat. Sementara itu eksplorasi Bijih Besi DMP dilakukan sebanyak 6 (enam) perusahaan yang semua ijin operasi di Kecamatan Penanggalan. Pada saat ini PT. Estamo Mandiri sudah melakukan ijin produksi Bijih Besi DMP yang berlokasi Kecamatan Penanggalan dengan luas Areal produksi 600 Hektar.

2.3.4.6. Perdagangan

A. Jumlah Pedagang

Peran pedagang dalam upaya mempercepat ekonomi sangat penting dikarenakan pedagang adalah sebagai pelaku utama dalam pembangunan perdagangan disuatu daerah. Semakin banyak dan beragamnya aktifitas perdagangan pada suatu daerah semakin membuka peluang penciptaan lapangan usaha serta kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Berikut disajikan dalam tabel jumlah pedagang besar, menengah dan kecil disetiap Kecamatan di Kota Subuussalam.

Tabel 2.62.
Banyaknya Pedagang di Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Pedagang Besar (org)	Pedagang Menengah (org)	Pedagang Kecil (org)	Jumlah
Simpang Kiri	60	100	300	460
Penanggalan	40	60	100	200
Rundeng	20	40	80	140
Sultan daulat	20	50	120	190
Longkip	2	20	80	102
Jumlah	142	270	680	1092
Persentase (%)	13,00	24,73	62,27	100

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pedagang di Kota Subulussalam didominasi oleh pedagang kecil yakni sebesar 62,27% dari keseluruhan pedagang di Kota Subulussalam dan secara sebarannya berpusat di ibukota Subulussalam.

B. Jumlah Sarana Perdagangan

Perdagangan di Kota Subulussalam di dukung dengan sarana prasarana seperti pasar umum, pasar desa dan pasar modern. Kondisi sarana prasarana perdagangan di Kota Subulussalam dapat dilihat pada Tabel 2.63.

Tabel 2.63.
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya
Di Kota Subulussalam, Tahun 2015-2017

Jenis Sarana Pedagangan	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Pasar Umum	0	1	2
Pasar Desa	1	5	6
Toko	165	170	220
Kios	388	388	500
Warung	280	300	400
Rumah Makan/Restoran	53	60	80

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Dari Tabel 2.63 diatas menunjukkan bahwa adanya peningkatan jumlah sarana perdagangan di Kota Subulussalam sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi di Kota Subulussalam khususnya disektor perdagangan sangat baik perkembangannya, dan ini akan berdampak kepada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menajnjikan.

2.3.4.7. Perindustrian

Potensi industri di Kota Subulussalam secara keseluruhan di tahun 2017 berjumlah 494 unit usaha, yang terdiri dari industri dalam skala kecil sampai besar. Kehadiran industri secara langsung juga dapat menyerap tenaga kerja dan memberikan konstribusi dalam peningkatan ekonom idaerah. Berikut ditampilkan beberapa jenis industri di Kota Subulussalam. Jumlah jenis industri di Kota Subulussalam disajikan pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Banyaknya Industri Menurut Jenisnya Diperinci Per Kecamatan
di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017

Kecamatan	Industri	Inustri Logam	Industri Makanan	Industri Pakaian	Industri Lainnya	Jumlah
Simpang Kiri	84	12	97	33	96	226
Penanggalan	27	3	33	4	30	67
Rundeng	19	13	58	1	57	116
Sultan daulat	36	1	4	1	20	25
Longkip	38	-	9	-	51	60
2017	204	29	201	39	254	494
2016	333	22	172	38	367	577
2015	123	9	81	11	219	448

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Pertumbuhan sektor industri di Kota Subulussalam sangat cepat.Tabel 2.98 menunjukkan bahwa jumlah industri yang beroperasi di Kota Subulussalam terus

bertambah bahkan mencapai dua kali lipat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun. Pertumbuhan ini akan mampu memberikan *multiplier effect* yang tinggi. Upaya pemerintah Kota Subulussalam untuk meningkatkan sektor industri melalui pembinaan para pelaku usaha industri (hulu dan hilir) khususnya industri kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk kelompok – kelompok industri binaan pemerintah.

2.3.4.8. Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Jumlah transmigrasi lokal di Kota Subulussalam sampai pada tahun 2017 berjumlah dua lokasi yakni tranmigrasi suak jampak dan transmigrasi Bukit alim.

2.3.5. Penunjang Urusan

2.3.5.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan pemerintah daerah memberikan tanggungjawab kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dimana BAPPEDA mempunyai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah; menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah; melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD); melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda); melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil musrenbang Kota; mengkoordinasikan perencanaan program/kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran; menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran; meneliti dan mengevaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat Daerah melalui Tim Anggaran; dan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah. Berikut akan

disajikan dalam tabel beberapa dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Subulussalam.

Tabel 2.65.
Beberapa Dokumen Perencanaan Daerah Kota Subulussalam

Dokumen Perencanaan	Ada	Tidak Ada	Ketrangan
Dokumen RPJP	√		Qanun Kota Subulussalam nomor 1 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kota subulussalam tahun 2015-2035
Dokumen RPJMD	√		Qanun Nomor 3 tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD) kota subulusslam tahun 2014-2019
Dokumen Renstra SKPD	√		Peraturan Walikota Subulussalam Nomor:21 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah Kota Subulussalam tahun 2014-2019
Dokumen RKPD	√		Disusun setiap tahun Berdasarkan Qanun Kota Subulussalam beserta perubahannya
Dokumen Renja SKPD	√		Disusun Setiap tahun sebelum pengesahan RKPD di tetapkan
Dokumen RTRW	√		Qanun kota subulussalam nomor 3 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wiayah kota subulussalam tahun 2014-20134

Sumber : Bappeda Kota Subulussalam

2.3.5.2. Keuangan

Gambaran umum pengelolaan keuangan dan aset Kota Subulussalam sudah berjalan secara efektif, efesien, transparan dan akuntabel. Hal in tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan di Kota Subulussalam yang pada masuk kedalam kategori wajar tanpa pengecualian (WTP) tanggal 31 Desember 2013 dan tahun 2012.

2.3.5.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Berjalannya roda pemerintahan secara efektif dan efesien tidak terlepas dari peran sumberdaya manusia dari Aparatur Sipil Negara yang di pakai. Banyaknya jumlah aparatur sipil negara dalam sebuah organisasi pemerintahan tidak bisa menjamin bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di instasi berjalan dengan baik begitu juga sebaliknya. Maka dari itu peningkatan baik itu secara kualitas dan kuantitas perlu di sinergikan untuk mencapai kondisi idela aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kondisi aparatur sipil negara di pemerintahan kota subulussalam dapat digambarkan pada tabel 2.66 dibawah ini

Tabel 2.66.
Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi Pemerintah Dan Golongan Di Kota Subulussalam Tahun 2017

No	Dinas/Instansi Pemerintah	ASN		Jumlah
		Struktural	Fungsional	
1	Sekretariat Dearah	76	0	
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	102	1081	
3	Dinas Kesehatan	56	205	
4	Sekretariat DPRK	21	0	
5	Inspektorat	30	1	
6	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan	79	1	
7	Dinas Syari'at Islam	18		
8	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	35		
9	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	16		
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM	52		
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	37		
12	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	19		
13	Dinas Perhubungan	42		
14	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	50		
15	Dinas Sosial			
16	Komisi Indepneden Pemilihan	12		
17	Badanpemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak & KB	18		
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kampong	13		
19	Dinas Pangan	25		
20	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Kehutanan	20		
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25		
22	Dinas Kesbang Pol & Linmas	12		
23	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & WH	15		
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18		
25	Dina Arsip & Perpustakaan	15		
26	Dinas Pelayanan Izin Terpadu	17		
27	Sekretariat MAA	8		
28	Sekretariat Baitul Mal	9		
29	Sekretariat MPD	5		
30	Sekretariat MPU	8		
31	Sekretariat Korpri	3		
32	Rumah Sakit Umum Daerah	15		
33	Kantor Camat Longkip	15		
34	Kantor Camat Rundeng	37		
35	Kantor Camat Sultan Daulat	22		
36	Kantor Camat Penanggalan	25		
37	Kantor Camat Simpang Kiri	34		

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Tabel 2.66 menunjukkan bahwa pendistribusian tenaga pegawai negeri sipil di masing-masing Dinas/Badan dan Kantor tidak merata. Oleh karena itu, Walikota sebagai kepala Pemerintah Kota Subulussalam perlu melakukan kebijakan khsusus dalam pemerataan aparatur sipil negara yang ditugaskan sesuai dengan keahlliannya dimasing-masing SKPK. Berikut disajikan dalam tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kota Subulussalam berdasarkan tingkat pendidikan formal yang diperoleh.

Secara kuantitas dapat dilakukan dengan menambah jumlah aparatur sipil negara jika memang dibutuhkan demi mancapai kondisi ideal, dan secara kualitas dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur sipil negara. Secara umum ada dua hal pokok yang merupakan pelaksanaan dari fungsi Manajemen ASN yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK meliputi penyusunan dan penetapan formasi/kebutuhan PNS, pengadaan, pemberian kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, pengembangan karier, penetapan sistim pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan terhadap pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Aceh.

Tabel 2.67.
Tingkat Pendidikan Aparat PNS Menurut Jenis Kelamin di Kota Subulussalam Tahun 2017

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	12	0	12
2	SLTP	21	1	22
3	SLTA	175	205	380
4	Diploma I	1	27	28
5	Diploma II	196	255	451
6	Diploma III	94	205	299
7	Diploma IV	5	5	10
8	Sarjana/S1	609	513	1122
9	Pasca Sarjana	46	5	51
Jumlah		**1.159**	**1.216**	**2.375**

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

2.3.5.4. Pengawasan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegwai dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan.

Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Ia memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program.

2.3.5.5. Sekretariat Dewan

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan qanun, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Qanun dan Anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRK.

2.4. Aspek Daya Saing

Aspek Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah dan fasilitas wilayah atau infrastruktur.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi non pangan dan Jumlah rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank.

2.4.1.1. Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan Non Pangan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan rumah tangga. Besaran pengeluaran tersebut pada dasarnya diperuntukkan baik untuk pemenuhan makanan maupun non makanan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Subulussalam sejak tahun 2015-2017 menunjukkan cukup baik dengan rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Jumlah Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga Pangan dan Non Pangan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Persentase pengeluaran konsumsi pangan perkapita	55,22	58,98	59,43
Total Pengeluaran RT Pangan (Rp)	19.936.992	21.061.344	21.331.104
Total Pengeluaran RT (Rp)	36.101.712	35.707.488	35.890.320
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	44,78	41,02	40,57
Total Pengeluaran RT Non Pangan (Rp)	16.164.720	14.646.144	14.559.216
Total Pengeluaran RT (Rp)	36.101.712	35.707.488	35.890.320

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018 (diolah)

Dari Tabel 2.68 diatas menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi pangan dari Rp.19,93 juta tahun 2015 dan terus meningkat mencapai Rp. 21,33 juta pada tahun 2017. Ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan rata-rata daya beli masyarakat terhadap barang makanan seperti beras, ikan, daging, sayur, buah-buahan dan makanan lainnya. Berikut akan ditampilkan kelompok barang makanan yang dikonsumsi rata-rata perkapita dalam sebulan.

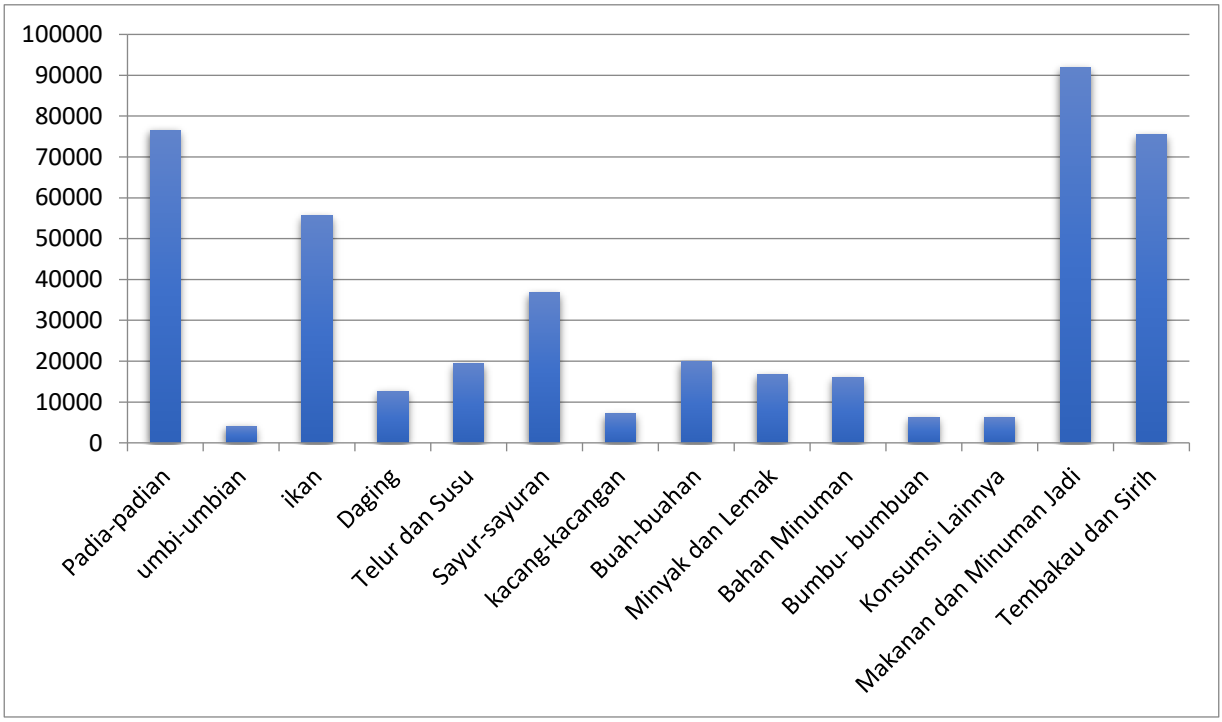

Gambar 2.12. kelompok barang makanan yang dikonsumsi rata-rata perkapita dalam sebulan.

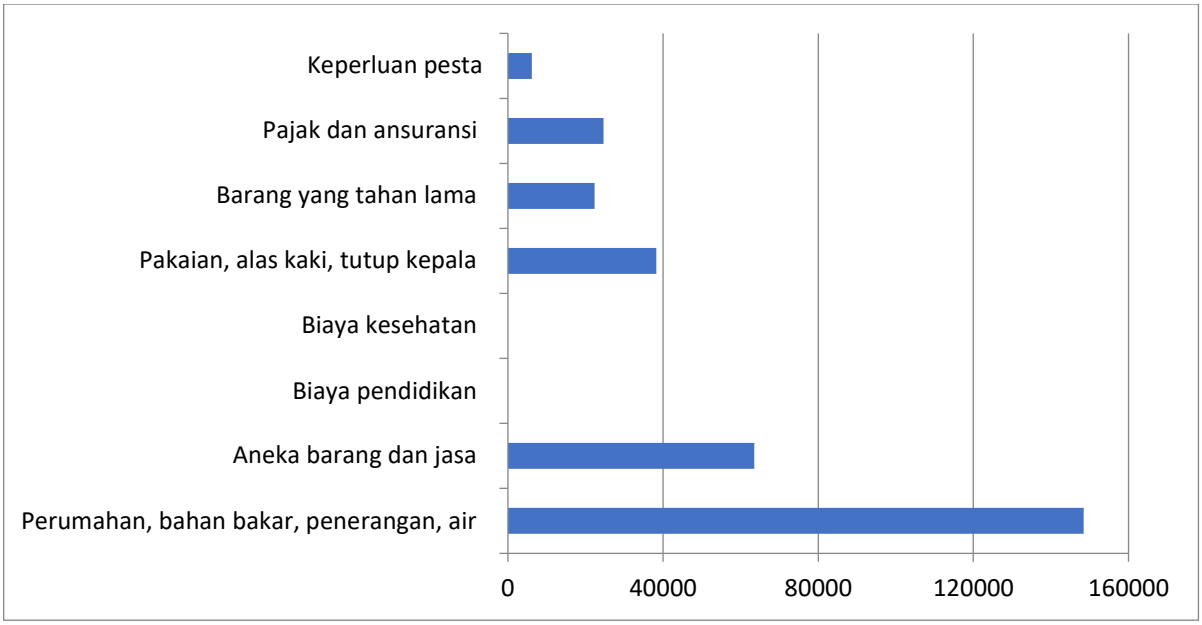

Gambar 2.13. kelompok barang non makanan yang digunakan rata-rata perkapita dalam sebulan.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan rumah tangga juga akan memperlihatkan kecenderungan besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya (Gambar 2.11). Besarnya konsumsi non pangan yang dikeluarkan oleh masyarakat Kota Subulussalam pada umumnya untuk pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air, aneka barang dan jasa dan pakaian. Sedangkan pengeluaran terkecil digunakan untuk pengeluaran barang yang tahan lama, pajak dan keperluan pesta.

2.4.1.2. Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank

Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank atau yang lebih kenal dengan Financing to Deposite Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke DPK, dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank Return of Asset (ROA) akan semakin meningkat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, nilai FDR di kota Subulussalam cenderung mengalami penurunan dari 3,3 persen pada tahun 2015 menjadi 1,58 persen pada tahun 2017. Penurunan tersebut disebabkan penurunan suku bunga sehingga masyarakat lebih memilih untuk mengurus kredit untuk investasi dari pada menabung. Berikut disajikan dalam tabel rasio pinjaman terhadap simpanan di Bank umum.

Tabel 2.69.
Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di Bank Umum di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum	3,36	5,71	1,58
Jumlah pinjaman di bank umum	80.097.295	.135.453.128	64.815.755
Dana pihak ketiga di bank umum	12.993.376	98.856.057	294.544.377

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Beberapa Bank yang ada di Kota Subulussalam diantaranya adalah Bank BRI, Bank BPD Aceh Syari'ah, Bank Mandiri Syari'ah, Bank BTPN, Bank Mandiri dan Bank BNI.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Ketersediaan Daya Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah memadai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Rasio ketersediaan daya listrik di Kota Subulussalam selama tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 2.70**.**

Kebutuhan Energi Listrik Kota Subulussalam setiap tahunnya terus meningkat. Jumlah kebutuhan energi listrik Kota Subulussalam pada Tahun 2015 sebesar 127.404.347 KWH menjadi 32.441.145 KWH di tahun 2017. Penyebab bertambahnya kebutuhan energi listrik ini adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk, pelayanan sosial, bisnis, industri, kantor pemerintah dan Penerangan Jalan Umum (PJU).

Tabel 2.70.
Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Subulussalam Tahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Produksi Listrik (KWH)	30.222.840	33.369.520	34.993.394
Konsumsi Listrik (KWH)	27.404.347	30.637.252	32.441.145
Rasio	**1,10**	**1,09**	**1,08**

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Bila mencermati ketersedian daya listrik yang ada, maka di perkirakan pada tahun-tahun mendatang produksi listrik yang ada sudah tidak mampu lagi memenuhi konsumsi listrik seluruh Kota Subulussalam, dengan asumsi bahwa semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk dan semakin banyaknya tumbuh usaha-usaha industri terbaru yang sangat membutuhkan energi listrik, jadi ini merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi pemerintah Kota Subulussalam Kedepan.

Upaya Pemerintah Kota Subulussalam untuk mengatasi krisis daya listrik antara lain:1) mencari alternatif lain dalam hal pemenuhan ketersedian daya listrik daerah; 2) koordinasi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Subulussalam; 3) mencari investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam pada sektor kelistrikan.

2.4.2.2. Rasio ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kota Subulussalam 2013-2017 pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Rasio Ketergantungan Penduduk Produktif
di Kota SubulussalamTahun 2015-2017

Uraian	Tahun		
	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	28.303	29.096	29.720
Jumlah Penduduk Usia > 64	1.398	1.392	1.452
Jumlah Usia Tidak Produktif <15 tahun + > 64 tahun	29.701	30.488	31.172
Jumlah Penduduk 15 – 64	39.289	40.219	41.242
Rasio Ketergantungan Total	75,60	75,80	75,58
Rasi Ketergantungan Muda	72,04	72,34	72,06
Rasio ketergantungan Tua	3,56	3,46	3,52

Sumber : BPS Subulussalam Tahun 2018

Rasio ketergantungan (*dependency ratio)* dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara atau daerah apakah tergolong maju atau yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak Produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.71 menunjukan bahwa pada tahun 2015 setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 76 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 72,58 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 72,06 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 3,52 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2017 penduduk usia kerja di Kota Subulussalam masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN KOTA SUBULUSSALAM

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang Keuangan Negara diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara khusus pengelolaan keuangan pemerintah Kota Subulussalam diatur dalam Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Subulussalam juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pengelolaan keuangan dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Subulussalam. APBK merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBK Kota Subulussalam terdiri dari: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah. (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan adalah kemampuan keuangan daerah yang memadai/mencukupi dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, tersedianya sumber daya manusia yang handal sebagai pelaksana pembangunan, adanya regulasi yang mengatur, situasi dan kondisi yang kondusif di lapangan agar proses pembangunan dapat diimplementasikan dengan baik dan lancar. Hal penting lainnya adalah mengoptimalkan sumber pendanaan yang ada serta mengalokasikan dana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, waktu dan tempat yang tepat.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan daerah. Gambaran umum capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realiasai Belanja baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung serta capaian pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis atas sumber-sumber penerimaan daerah menjadi sangat penting karena penyelenggaraan pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila tersedia pendanaan yang cukup. Pemerintah Daerah harus dapat memperkirakan seakurat mungkin potensi-potensi penerimaan daerah sehingga sumber penerimaan yang menjadi modal untuk pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah dapat terlaksana dengan baik (*money follow program, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran, tidak lagi harus berdasarkan pada tugas dan fungsi yang utama*).

Tujuan dari analisis pengelolaan keuangan daerah Kota Subulussalam adalah untuk memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan dalam rangka mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi dan prediksi atas komponen APBK dan laporan keuangan daerah untuk menilai realisasi kinerja keuangan Kota Subulussalam selama tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Analisis pendanaan Pemerintah Kota Subulussalam dilakukan terhadap komponen-komponen laporan keuangan. Analisis dilakukan atas jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan susunan/struktur APBK Kota Subulussalam, Analisis juga dilakukan terhadap unsur-unsur neraca daerah, yakni Aset, hutang daerah, dan Ekuitas dana, serta terhadap penerimaan daerah yaitu penerimaan dari pembiayaan daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Masa Lalu Periode Tahun 2015-2019

Analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan dimasa lalu. Dari analisis kinerja beberapa tahun ke belakang dapat menjadi referensi melakukan proyeksi kinerja kondisi keuangan melalui berbagai macam metode analisa misalnya dengan melihat rata-rata pertumbuhan,

menggunakan asumsi makro ekonomi (PDRB/laju petumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain), dan dapat juga dengan dasar kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah serta dapat melalui kebijakan bidang keuangan daerah.

Kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam selama periode tahun 2015-2019 dapat dilihat atau diukur berdasarkan dari perkembangan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dalam periode dimaksud. Sesuai data yang tersedia, menunjukan peningkatan realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi belanja daerah.

Penerimaan Pendapatan Asli daerah (PAD) sudah menunjukkan peningkatan yang baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan ketentuan dan aturan serta perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja pengelolaan belanja pemerintah Kota Subulussalam periode 2015-2019 yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung, dilihat dari realisasi dan target sudah menunjukan kinerja yang semakin baik, begitu juga dari sisi penilaian laporan keuangan daerah menunjukan kinerja yang cukup baik, terlihat dari hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, dan 2018, 2019* memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pembiayaan daerah selama ini difokuskan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Aceh dan menutupi defisit belanja.

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBK. Kinerja pelaksanaan APBK diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

3.1.1. kinerja Pelaksanaan APBK

A. Analisa Realisasi Pendapatan Daerah

Analisis pendapatan daerah memberikan gambaran kondisi pendapatan daerah yang tercermin dalam APBK. Pendapatan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD mencakup: 1) **Pajak Daerah**, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Zakat dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) **Dana Perimbangan** yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta 3) **Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah** meliputi Hibah, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus,

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Kinerja pendapatan daerah diukur dengan indikator derajat kemandirian keuangan daerah (desentralisasi fiskal). Indikator ini dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah. Dengan mengetahui kemandirian keuangan daerah ini akan diketahui seberapa besar *local taxing power* suatu daerah, serta seberapa besar kemampuan PAD dalam mendanai belanja daerah yang dianggarkan untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Derajat desentralisasi fiskal Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2015-2019.

Berikut ini disajikan proporsi PAD Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah tahun 2015-2019

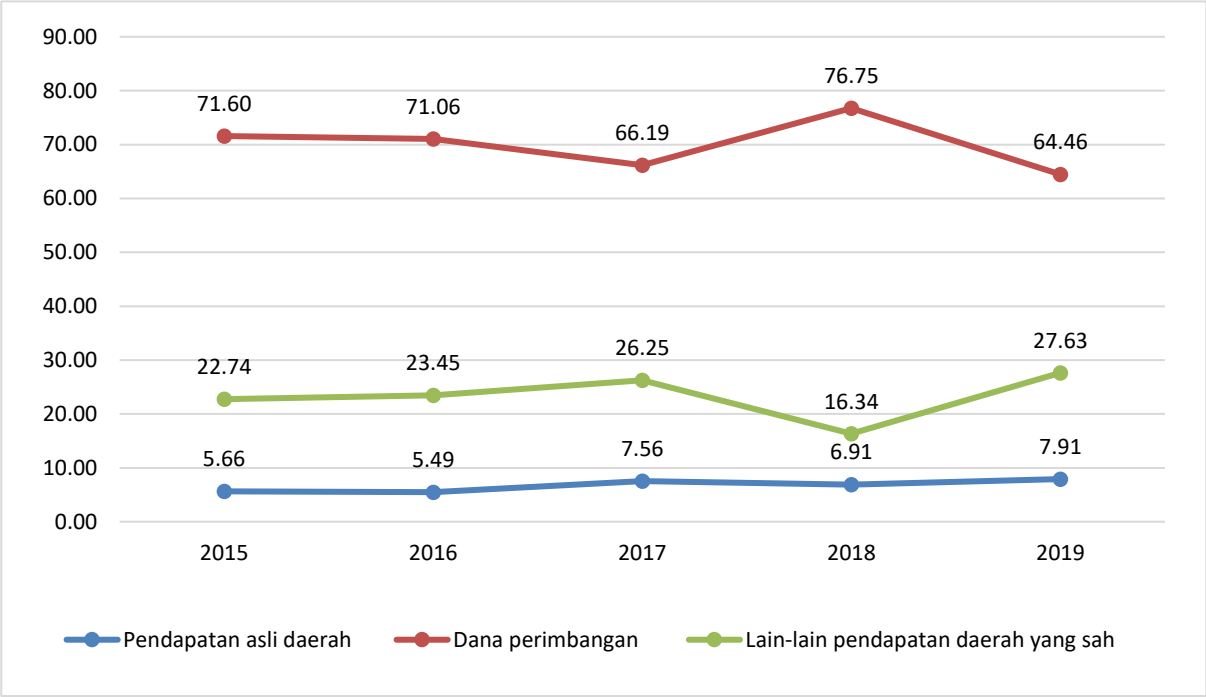

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.1. Proporsi PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah (%)

Pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lain-lain PAD Yang Sah menjadi sumber yang dominan dengan rata-rata kontribusi 75,21 %. Perbandingan proporsi unsur-unsur PAD dapat dilihat pada Gambar 3.2.

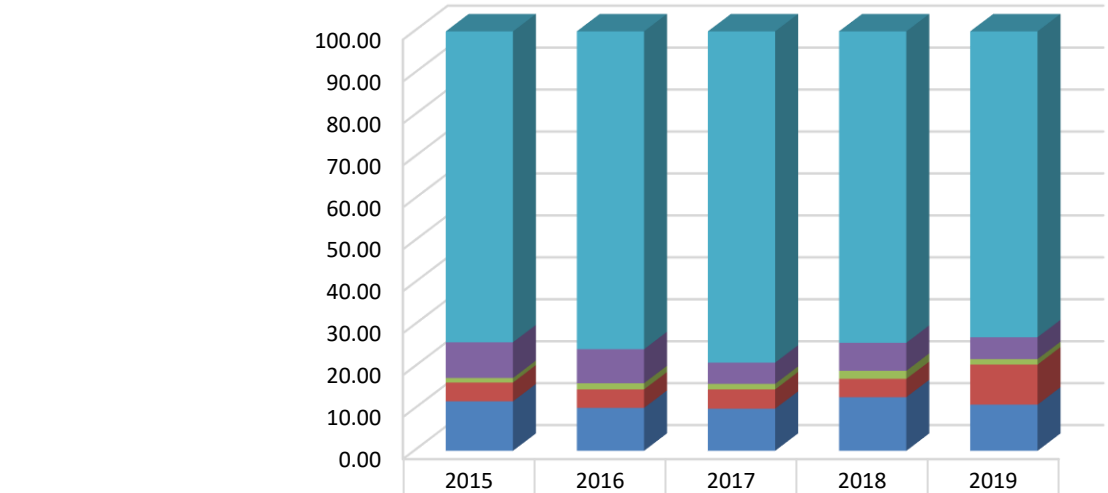

	2015	2016	2017	2018	2019
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	74.13	75.77	78.98	74.24	72.92
Zakat	8.51	8.12	5.06	6.69	5.21
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.08	1.47	1.32	1.91	1.30
Retribusi daerah	4.48	4.40	4.61	4.37	9.57
Pajak daerah	11.80	10.24	10.04	12.79	11.00

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.2. Proporsi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Total PAD (%)

Kinerja pelaksanaan APBK meliputi perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan dan gambaran realisasi belanja daerah tahun 2015-2019. Jelasnya dapat di lihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan(%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	**PENDAPATAN**	**634.479.221.203,25**	**771.345.794.684,80**	**747.574.253.473,08**	**563.661.786.542,45**	**727.219.608.547,52**	**7,48**
1.1	**Pendapatan asli daerah**	**35.905.412.862,83**	**42.314.514.319,00**	**56.519.514.115,17**	**38.955.598.635,44**	**57.544.722.713,52**	**17,97**
1.1.1	Pajak daerah	4.235.756.538,83	4.332.002.552,76	5.674.972.218,00	4.982.608.784,28	6.330.000.000,00	13,83
1.1.2	Retribusi daerah	1.608.635.927,00	1.862.694.256,00	2.603.084.216,00	1.700.629.348,00	5.505.700.000,00	19,03
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	389.133.931,00	620.795.994,00	744.312.268,97	745.620.424,00	745.620.424,00	34,87
1.1.4	Zakat	3.056.434.104,00	3.435.664.274,00	2.859.914.821,00	2.606.879.174,00	3.000.000.000,00	-2,16
1.1.5	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	26.615.452.362,00	32.063.357.242,24	44.637.230.591,20	28.919.860.905,16	41.963.402.289,52	19,60
1.2	**Dana perimbangan**	**454.292.012.035,00**	**548.122.264.173,00**	**494.792.096.493,00**	**432.614.060.638,00**	**468.762.363.000,00**	**5,42**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	15.861.221.035,00	12.477.315.997,00	14.816.952.238,00	12.796.167.077,00	15.091.963.000,00	-10,95
1.2.2	Dana alokasi umum	292.296.821.000,00	346.538.214.000,00	343.605.010.000,00	345.246.781.638,00	353.735.077.000,00	12,44
1.2.3	Dana alokasi khusus	146.133.970.000,00	189.106.734.176,00	136.370.134.255,00	74.571.111.923,00	99.935.323.000,00	-16,92
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**144.281.796.305,42**	**180.909.016.192,80**	**196.262.642.864,91**	**92.092.127.269,01**	**200.912.522.834,00**	**9,26**
1.3.1	Pendapatan Hibah			248.730.000,00	-	2.200.000.000,00	37,10
1.3.2	Dana Darurat				-	-	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	13.404.937.314,42	16.716.298.272,80	14.885.879.159,91	15.806.124.569,01	17.911.789.766,00	13,06
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				12.346.520.000,00	14.077.458.366,00	93,85
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-	-	-	
1.3.6	Pendapatan Transfer DD dari APBN	16.712.583.000,00	43.478.732.000,00	64.724.470.000,00	63.939.482.700,00	69.331.821.000,00	50,37
1.3.7	Transfer Alokasi Dana Insentif Daerah				-	-	
1.3.8	Transfer Bagian Dana Otonomi Khusus Aceh	104.164.275.991,00	105.713.985.920,00	116.403.563.705,00	-	97.391.453.702,00	-19,95

PAD selama kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu tingkat pertumbuhan rata-rata per tahunnya adalah berkisar 17,97%. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua komponen PAD kecuali komponen Zakat yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Komponen Pendapatan Asli Daerah yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah Komponen Pengelolaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dimana rata-rata pertumbuhan per tahunnya mengalami peningkatan sebesar 34,87% dan komponen Lain-Lain Pendapatan daerah yang sah yang mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 19,60%.

Selain itu Retribusi daerah dan Pajak Daerah juga menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. Dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 retribusi daerah dan pajak memberikan kontribusi besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 19,03% dan 13,83% dari Total PAD. Penerimaan Retribusi Daerah Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian, ada upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk lebih mengintensifkan penerimaan pajak daerah antara lain :

1. Mempertahankan penerimaan pajak tahun-tahun sebelumnya melalui upaya peningkatan pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menggali potensi pajak melalui regulasi dan penerapan insentif dan disinsentif

Komponen-komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan asli daerah berturut-turut adalah sebagai berikut :

a. lain lain pendapatan asli daerah yang sah memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 72,92% dari total PAD 2019
b. Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar kedua setelah lain lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu sebesar 11,00% dari total PAD 2019
c. retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Pajak Daerah yaitu sebesar 9,57% dari Total PAD 2019
d. Zakat berada pada urutan keempat dengan kontribusi sebesar 5,21% dari total PAD 2019
e. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi paling rendah yaitu sebesar 1,30% dari total PAD 2019.

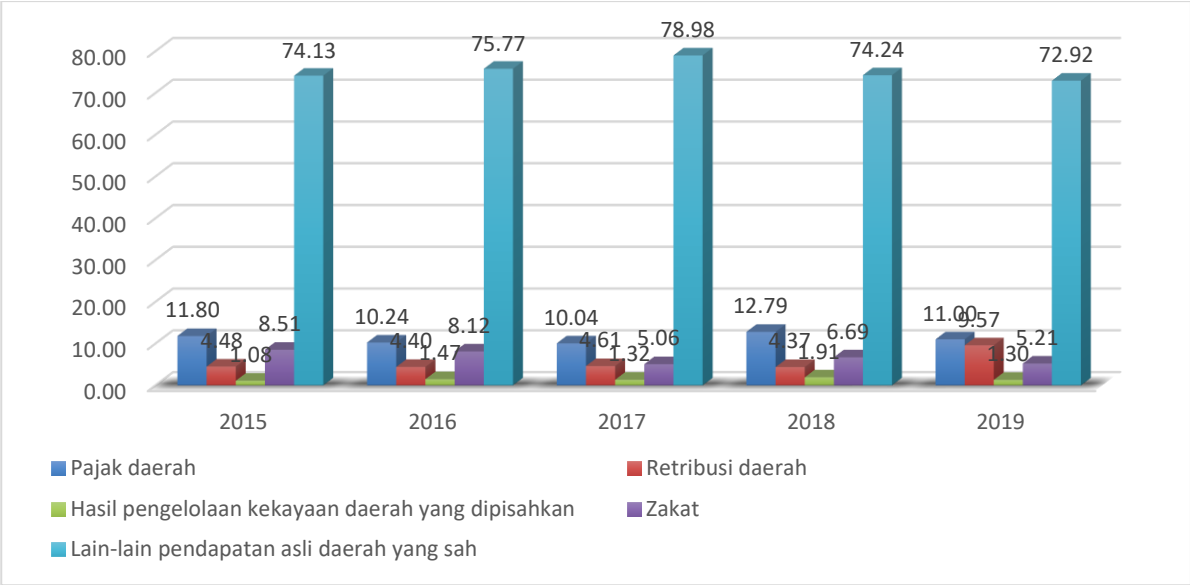

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

Dari sisi kebijakan, ada 3 (tiga) komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah yang dapat terus menerus dilakukan upaya-upaya intensifikasi yaitu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan, sementara untuk komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah besaran kontribusinya sangat bergantung dari kebijakan kebijakan eksternal.

Dari Tabel 3.1, Kota Subulussalam terlihat masih besar ketergantungan terhadap dana perimbangan, ini menunjukkan bahwa daerah secara umum masih jauh dari mandiri (otonom) dalam membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing. Kondisi ini, berisiko bagi APBK dan pembangunan di Kota Subulussalam, karena dana perimbangan yang akan diterima dapat naik atau turun, tergantung pada realisasi penerimaan negara.

Pada tahun 2015 - 2019, rata-rata kontribusi DAU terhadap APBK Kota Subulussalam sebesar 49,37%. Namun demikian kecenderungan yang terjadi persentase DAU terhadap pendapatan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 cenderung semakin menurun. Pada Tahun 2019, persentase penerimaan DAU terhadap total pendapatan kota Subulussalam berkisar 48,64%. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4.

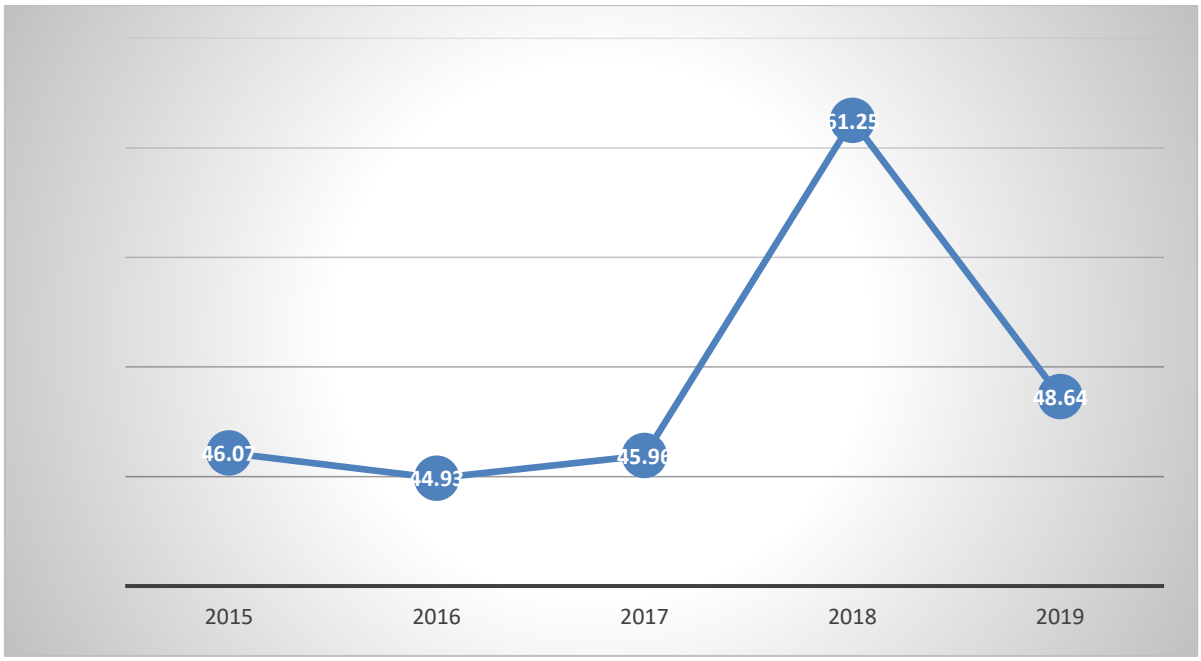

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.4. Persentase Penerimaan DAU terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan realisasi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2015-2019.

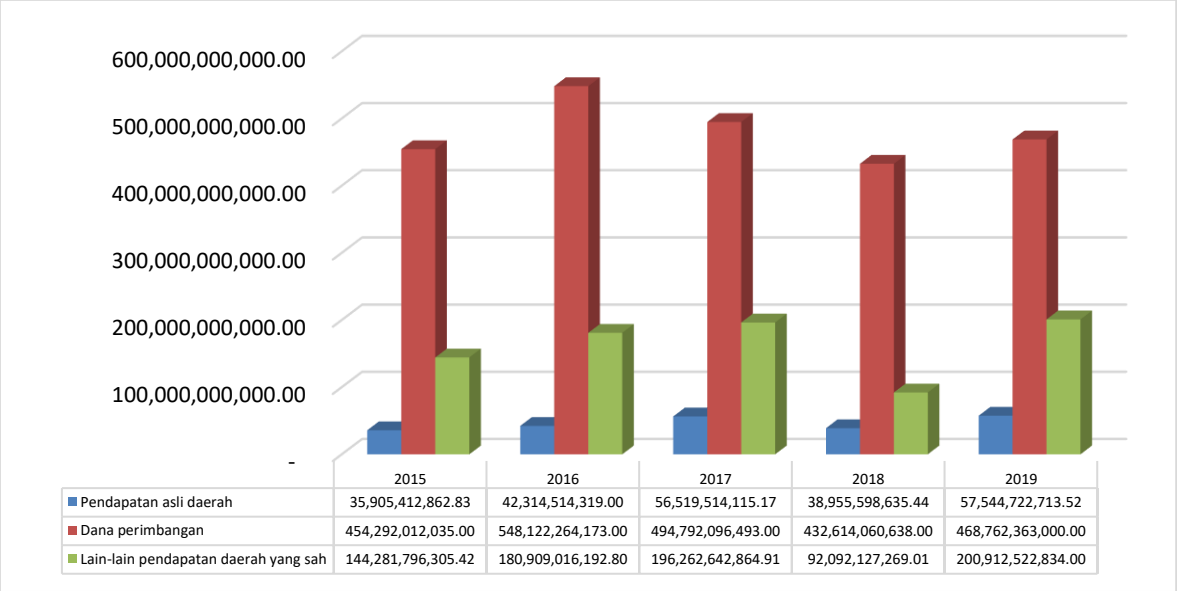

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.5. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Dari Gambar diatas, dapat dilihat bahwa proporsi pendapatan kota Subulussalam dalam kurun waktu empat tahun terakhir masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan dari pusat. Proporsi kedua yang menopang pendapatan daerah Kota Subulussalam adalah dari Lain-lain pendapatan daerah

yang sah sementara Pendapatan Asli Daerah Memberi Kontribusi Paling kecil terhadap pendapatan daerah. Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 menunjukan tren positif, dimana persentase kontribusinya terhadap total pendapatan selalu meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kontribusi PAD terhadap Total pendapatan Kota Subulussalam masih berkisar 5,66% dan meningkat setiap tahunnya hingga pada tahun 2019 mecapai kisaran 7,91%. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

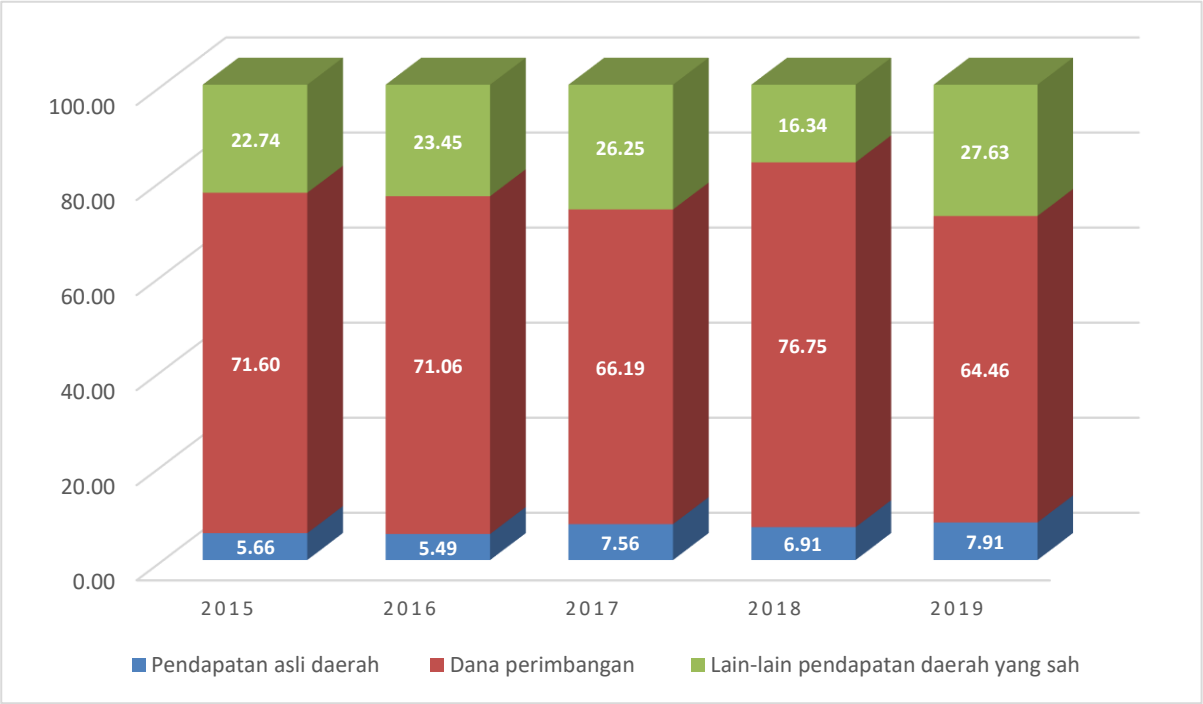

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.6. Kontribusi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

B. Analisis Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran tahun yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja Daerah terdiri dari dua yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pengelolaan Belanja Daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran berbasis kinerja yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target kinerja. Mengingat kinerja pemerintah daerah harus selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan publik, oleh karenanya kinerja harus selalu

diukur tingkat efektivitas dan efisiennya sehingga dapat dipertangungjawabkan akuntabilitasnya kepada masyarakat.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Subulussalam masa lalu juga dapat dilihat dari sisi belanja daerah selama periode 5 (lima) tahun 2015-2019. Kinerja ini ditunjukkan oleh seberapa besar penerimaan daerah digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Adapun Belanja Tidak Langsung meliputi jenis belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Struktur Belanja Daerah di Kota Subulussalam masih didominasi oleh Belanja Tidak Langsung. Proporsi Belanja Tidak Langsung dari tahun 2015-2019 antara 32,21 persen - 48,74 persen atau rata-rata 38,78 persen.

C. Proporsi Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2015-2019

Total Belanja Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 mengalami peningkatan. Total Belanja tahun 2015 sebesar Rp.431.459.956.746,40,-meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 443.040.114.458,00,- Proporsi Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan dari sebesar Rp 205.001.955.156,87 pada tahun 2015 menjadi Rp 286.603.354.855,58 pada tahun 2019, sedangkan Belanja Langsung meningkat dari sebesar Rp 431.459.956.746,40 pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 443.040.114.458,00 pada tahun 2019. Proporsi belanja langsung diatas memberikan gambaran bahwa alokasi anggaran untuk program pembangunan terus meningkat, untuk menyelesaikan permasalahan daerah.

Realisasi belanja daerah Kota Subulussalam pada periode 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2015 s/d Tahun 2019 Kota Subulussalam

Uraian	Jumlah					Rata-rata Pertumbuhan(%)
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
2	3	4	3	4	5	6
Belanja Tidak Langsung	**205.001.955.156,87**	**274.947.438.890,00**	**286.514.254.855,58**	**277.708.290.514,00**	**286.603.354.855,58**	**7,13**
Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS)	157.767.219.842,87	161.965.369.482,00	161.736.441.763,58	161.874.895.014,00	161.825.541.763,58	0,49
Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	7.546.000.000,00	19.809.430.000,00	5.944.700.000,00	5.680.300.000,00	5.944.700.000,00	(51,14)
Belanja Bantuan Sosial	2.676.000.000,00	2.593.000.000,00	7.980.017.592,00	2.500.000.000,00	7.980.017.592,00	40,53
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa	1.109.260.000,00	1.034.260.001,00	1.183.570.000,00	1.983.570.000,00	1.183.570.000,00	(9,74)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa	34.903.475.314,00	88.045.379.407,00	107.669.525.500,00	103.669.525.500,00	107.669.525.500,00	17,90
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	15,00
Belanja Langsung	**431.459.956.746,40**	**498.908.046.051,40**	**464.762.619.016,00**	**292.010.996.362,00**	**443.040.114.458,00**	**3,84**
Belanja Pegawai	38.102.324.120,00	42.471.589.300,00	65.280.496.425,00	67.557.057.781,00	55.175.473.500,00	2,64
Belanja Barang dan Jasa	132.202.086.876,40	135.234.151.305,83	123.533.374.408,00	127.913.005.088,00	183.787.167.109,00	23,53
Belanja Modal	261.155.545.750,00	321.202.305.445,57	275.948.748.183,00	96.540.933.493,00	204.077.473.849,00	(13,58)
JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 +2.2)	**636.461.911.903,27**	**773.855.484.941,40**	**751.276.873.871,58**	**569.719.286.876,00**	**729.643.469.313,58**	**5,13**

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Dari data pada Tabel 3.2 realisasi belanja tidak langsung Tahun 2015-2019 terlihat bahwa total Belanja tidak langsung dari tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya terutama peningkatan setiap tahun terjadi pada komponen Belanja Pegawai. Peningkatan belanja pegawai sejalan dengan penambahan jumlah pegawai yang ada di kota Subulussalam dan perubahan administrasi kepegawaian secara berkala. Lain halnya dengan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, besarannya mengalami fluktuasi setiap tahunnya karena hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan kebijakan umum terhadap prioritas anggaran tahun bersangkutan.

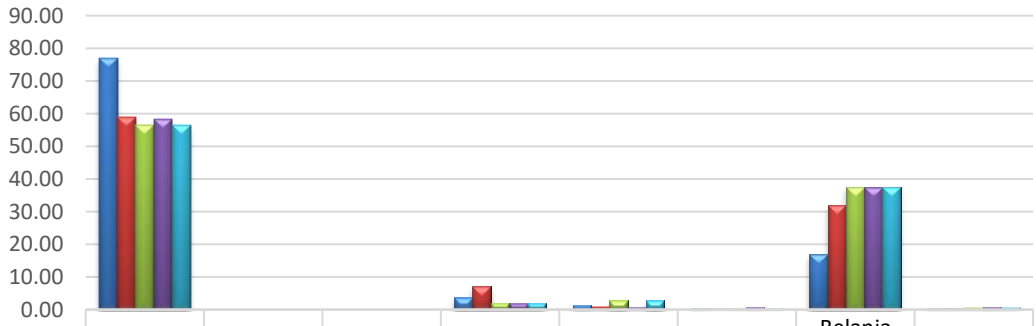

	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS)	Belanja Bunga	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa	Belanja Tidak Terduga
Tahun 2015	76.96	0.00	0.00	3.68	1.31	0.54	17.03	0.49
Tahun 2016	58.91	0.00	0.00	7.20	0.94	0.38	32.02	0.55
Tahun 2017	56.45	0.00	0.00	2.07	2.79	0.41	37.58	0.70
Tahun 2018	58.29	0.00	0.00	2.05	0.90	0.71	37.33	0.72

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.7. Proporsi Komponen Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja Tidak Langsung Tahun 2015-2019

Rata-rata proporsi Belanja Pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan pegawai yang termasuk dalam kategori Belanja tidak langsung terhadap total Belanja Tidak Langsung berkisar 61,41%, sementara secara umum rata-rata proporsi total Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah berkisar 38,78%. Angka ini secara tidak langsung menunjukkan masih lebih besar keberpihakan pemerintah Kota Subulussalam untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang dapat membawa hasil *(outcome)* bagi kepentingan masyarakat. Persentase realisasi belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah tahun 2015-2019 dapat digambarkan melalui Gambar berikut ini :

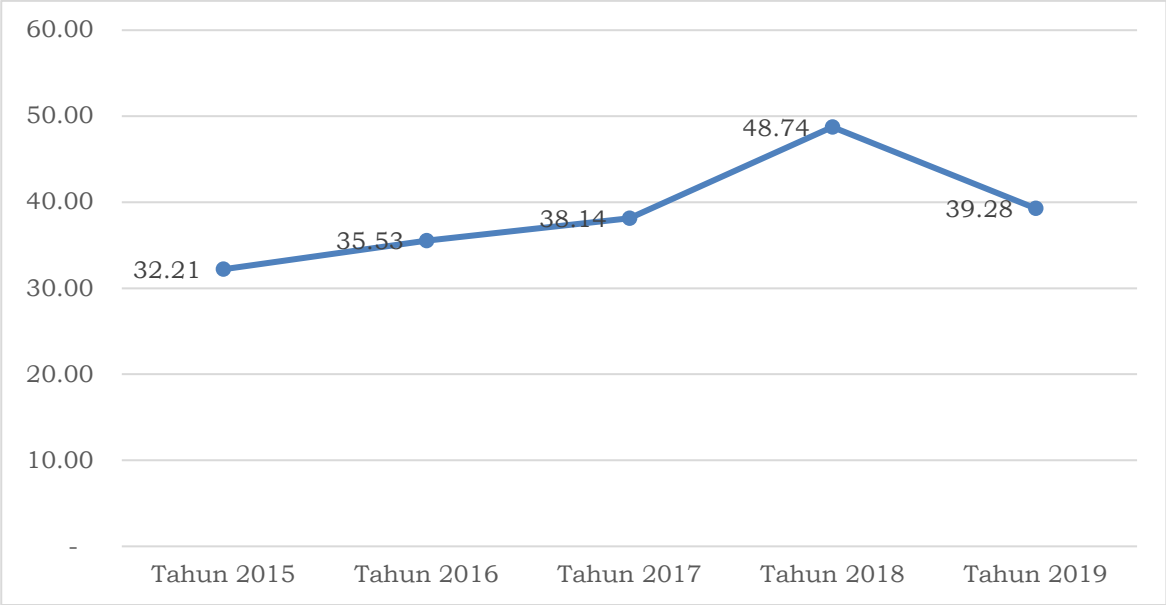

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.8. Persentase Proporsi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun 2015-2019

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

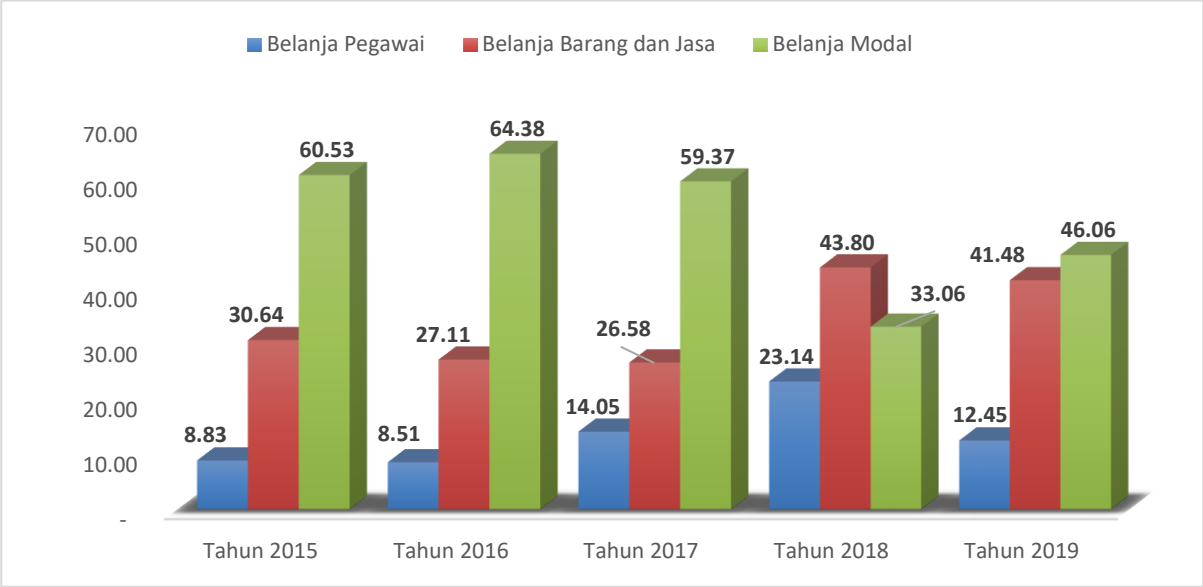

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.9. Proporsi Komponen Belanja Langsung Terhadap total Belanja Langsung Tahun 2015-2019

Apabila dilihat pada Gambar 3.9. tentang rata-rata pertumbuhan belanja daerah 2015-2019, terlihat bahwa proporsi belanja pegawai pada komponen belanja langsung masih cukup tinggi yaitu berkisar antara 8,83 – 23,14% dari total Belanja Langsung, sementara proporsi Belanja Modal berkisar antara 33,06-64,38% dari Belanja langsung sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa berkisar rata-rata 27,11-43,80% dari Belanja Langsung. Namun demikian yang perlu menjadi perhatian adalah terdapat kecenderungan penurunan proporsi belanja modal terhadap belanja langsung dari tahun 2015-2019. Sementara sebaliknya terdapat kecenderungan peningkatan proporsi belanja barang dan jasa setiap tahunnya.

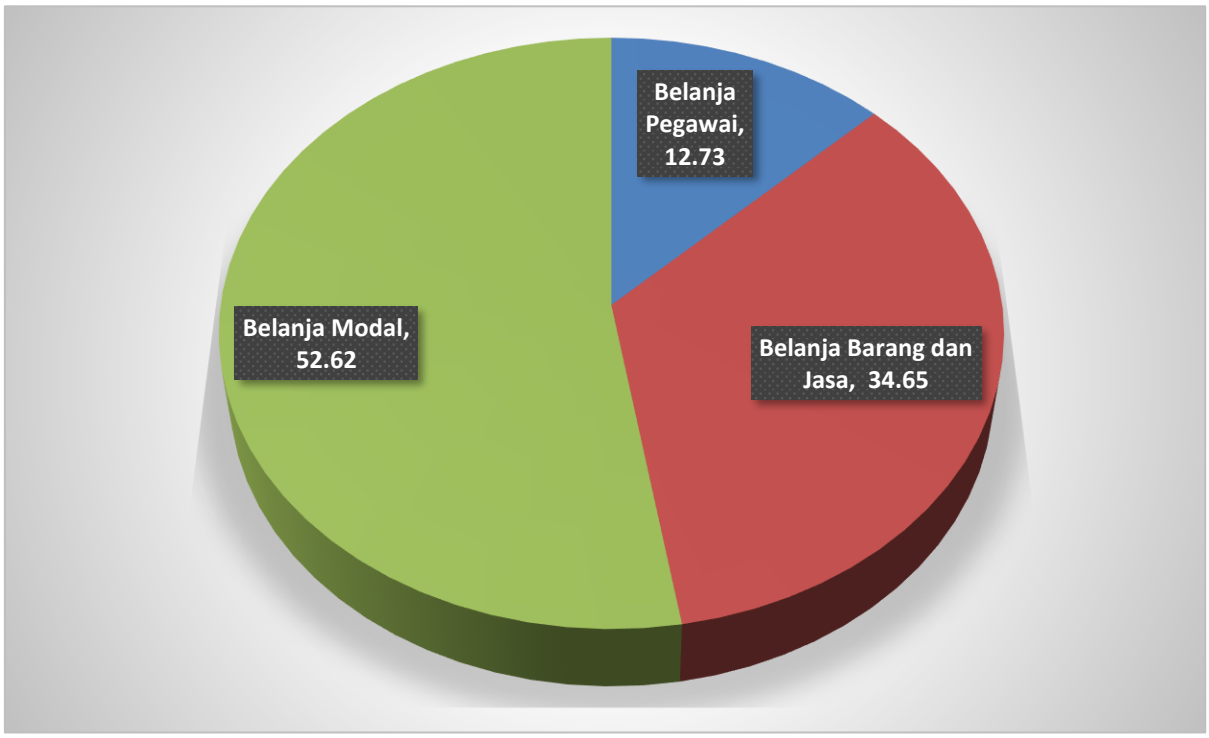

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.10. Rata-Rata Perbandingan antara Komponen-Komponen Belanja pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015-2019

Apabila kita lihat tren realisasi belanja langsung dan realisasi total belanja daerah dari tahun 2015-2019, maka dapat dilihat bahwa rata-rata persentase realisasi belanja langsung terhadap total belanja daerah masih berkisar 62,22%. Angka ini masih lebih besar dibandingkan dengan persentase realisasi Belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah yang hanya berkisar 38,78%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan APBK Kota Subulussalam masih lebih berorientasi pada kegiatan-kegiatan pembangunan dibandingkan dengan pemenuhan kebutuhan pegawai/aparatur. Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

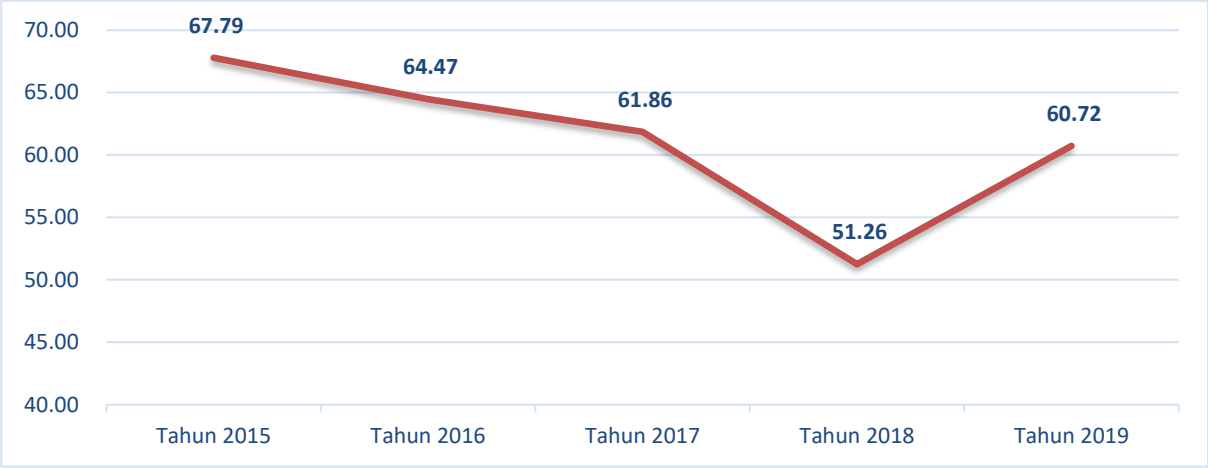

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.11. Persentase Proporsi Belanja Langsung terhadap Total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019

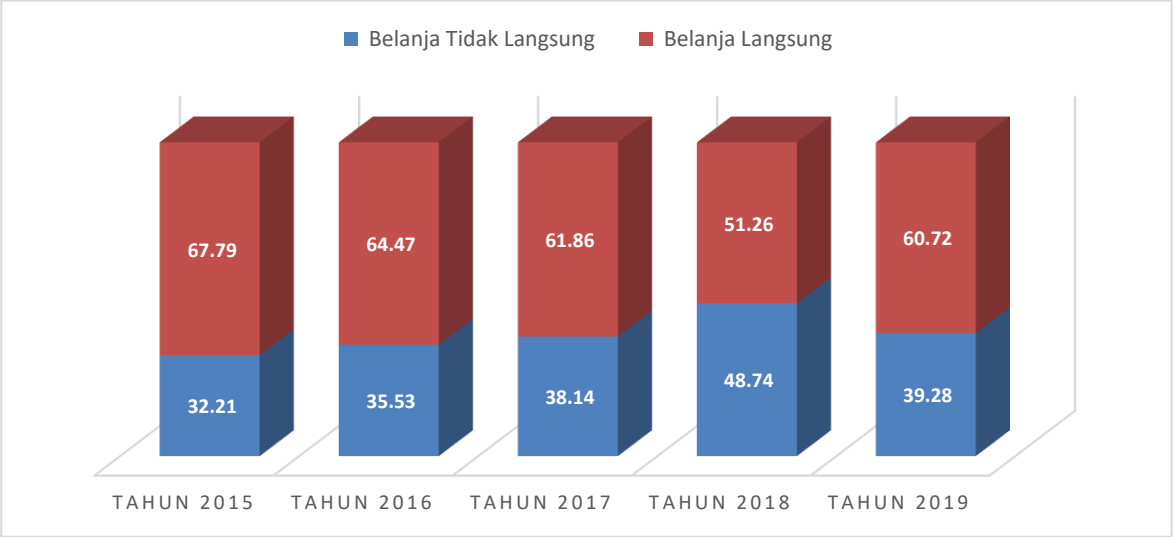

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Gambar 3.12. Persentase Proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung teradap Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2015-20119

Apabila dilihat pada Gambar 3.11 tentang realisasi Belanja Kota Subulussalam tahun 2015-2019, terlihat bahwa rata-rata rasio antara Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 38,78% : 61,72%. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan anggaran terhadap pemenuhan kebutuhan publik yang telah direncanakan dalam bentuk pelaksanaan urusan dan program pembangunan lebih besar dibanding kebutuhan lainnya berupa belanja gaji pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Kampong, belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Kampong dan belanja tidak terduga.

D. Pembiayaan Daerah

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup: (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (2) Pencairan Dana Cadangan; (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (4) Penerimaan Pinjaman Daerah; (5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Kredit Bergulir (6) Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan dari Pihak Ketiga.

Penerimaan Pembiayaan Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 fluktuatif, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp 21.695.357.462,47 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Dimana selama kurun waktu dari tahun 2015-2019 Penerimaan Pembiayaan Kota Subulussalamyang terbersar yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 36.302.517.483,26 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Kontribusi Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) terlihat seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Kota Subulussalam
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**21.695.357.462,47**	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**3.423.860.766,06**	-207,96
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	-207,96
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	-207,96
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**1.500.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	-100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	-	-	-	1.000.000.000,00	-100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pembayaran Utang Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.500.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000.000,00**	**-100,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**20.195.357.462,47**	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**2.423.860.766,06**	-252,50

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

E. Neraca Daerah.

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Laporan Neraca Daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah

Dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Subulussalam beberapa perkiraan tahun terakhir terjadi peningkatan, antaranya pos Aset rata-rata peningkatan pertahun sebesar 26,86 %, pos aktiva tetap terjadi peningkatan rata-rata pertahun sebesar 27,57 %, sementara itu peningkatan jumlah ekuitas dana bergerak fluktuatif setiap tahunnya. Perkembangan neraca Pemerintah Kota Subulussalam dari tahun 2016 – 2019 sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Neraca Pemerintah Kota Subulussalam per 31 Desember Tahun 2016 s/d 2019

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 **) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	**ASET**	**1.064.650.371.185,99**	**1.876.062.557.421,44**	**2.079.669.433.503,44**	**2.607.219.606.152,29**	**26,86**
1.1	**ASET LANCAR**	**55.130.366.159,94**	**42.762.229.983,79**	**61.409.588.638,79**	**51.814.020.879,81**	**(1,86)**
1.1.1	Kas di Kas Daerah		332.401.857,62	1.075.452.395,07	2.465.321.864,16	47,63
1.1.2	Kas di Bendahara Penerimaan		100.174.669,62	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran		158.825.588,00	35.135.543,00	35.135.543,00	(117,35)
1.1.5	Kas di Bendaharan Dana Kapitasi JKN FKTP		0	0	0	0,00
1.1.7	Setara Kas		0	163.972.153,55	152.893.183,72	30,92
1.1.8	Kas di Badan Layanan Umum Daerah		0	676.881.911,00	857.411.833,00	40,35
1.1.11	Piutang Pajak		10.894.341.290,00	12.995.870.876,00	11.965.747.372,00	0,12
1.1.12	Piutang Retribusi		162.327.767,00	117.520.471,00	183.732.638,00	15,90
1.1.13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0	0	0	0,00
1.1.14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		7.647.480.100,00	13.461.596.700,00	8.786.134.396,00	(13,42)
1.1.19	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		2.445.044.305,55	6.946.110.681,37	5.878.236.835,46	13,41
1.1.20	Piutang Pendapatan Lainnya		11.558.457,00	0	16.089.434,00	42,72

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 **) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.21	Piutang Lain-Lain		710.573.338,00	670.573.338,00	524.681.291,00	(21,08)
1.1.22	Penyisihan Piutang		5.386.121.454,00	7.326.788.124,30	7.326.788.124,30	8,83
1.1.23	Beban Dibayar Dimuka		0	0	0	0,00
1.1.25	Persediaan		14.913.381.157,00	17.939.686.445,50	13.621.848.365,17	(13,73)
	Jumlah Aktiva Lancar	**55.130.366.159,94**	**42.762.229.983,79**	**61.409.588.638,79**	**51.814.020.879,81**	**(1,86)**
1.2	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**
	Jumlah Investasi Permanen	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**
1.2	**AKTIVA TETAP**	**998.852.481.192,45**	**1.798.096.429.591,15**	**1.982.240.997.268,15**	**2.518.965.723.635,98**	**27,57**
1.2.1	Tanah		67.350.457.348,00	69.534.188.650,00	73.621.362.000,00	4,69
1.2.2	Peralatan dan Mesin		196.733.283.374,95	205.644.288.059,95	256.944.673.188,78	14,47
1.2.3	Gedung dan Bangunan		466.093.498.103,00	491.229.877.492,00	512.928.791.563,00	4,45
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		665.577.156.352,00	727.217.455.352,00	983.621.455.535,00	19,47
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		21.977.148.560,00	24.455.047.580,00	28.047.580.673,00	11,48
1.2.6	Kontruksi dalam Pengerjaan		55.693.037.043,00	54.190.612.307,00	64.112.335.907,00	9,54

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 **) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		324.671.848.810,20	409.969.527.827,20	599.689.524.769,20	25,83
	Jumlah Aktiva Tetap	**998.852.481.192,45**	**1.798.096.429.591,15**	**1.982.240.997.268,15**	**2.518.965.723.635,98**	**27,57**
	DANA CADANGAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
1.3	**ASET LAINNYA**	**7.667.523.833,60**	**32.203.897.846,50**	**33.018.847.596,50**	**33.439.861.636,50**	**20,51**
1.3.1	Aset Tidak Berwujud		1.083.646.000,00	1.083.646.000,00	1.083.646.000,00	0,00
1.3.2	Aset Lain-Lain		31.120.251.846,50	31.935.201.596,50	32.356.215.636,50	1,71
	Jumlah Aset Lainnya	**7.667.523.833,60**	**32.203.897.846,50**	**33.018.847.596,50**	**33.439.861.636,50**	**20,51**
	JUMLAH ASET DAERAH/AKTIVA	**1.064.650.371.185,99**	**1.876.062.557.421,44**	**2.079.669.433.503,44**	**2.607.219.606.152,29**	**26,86**
2	**KEWAJIBAN**	**64.073.657.864,64**	**95.303.518.425,48**	**69.604.445.177,70**	**85.254.022.164,21**	**7,85**
2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**32.036.828.932,32**	**47.651.759.212,74**	**18.218.001.790,85**	**33.867.578.777,36**	**2,73**
2.1.9	Pendapatan Diterima Dimuka	149.882.239,66	169.847.600,84	97.963.532,85	63.848.612,84	(88,55)
2.1.11	Utang Beban	4.626.118.239,66	18.140.865.976,90	0	4.462.684.529,52	(52,54)
2.1.12	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.260.828.453,00	29.341.045.635,00	18.120.038.258,00	29.341.045.635,00	11,33

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 **) (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**32.036.828.932,32**	**47.651.759.212,74**	**18.218.001.790,85**	**33.867.578.777,36**	**2,73**
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**32.036.828.932,32**	**47.651.759.212,74**	**51.386.443.386,85**	**51.386.443.386,85**	**11,23**
3	**EKUITAS DANA**	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**3.423.860.766,06**	**(207,96)**
3.1	**EKUITAS DANA LANCAR**	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**3.423.860.766,06**	**(207,96)**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06	(207,96)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**3.423.860.766,06**	**(207,96)**
3.2	**EKUITAS DANA INVESTASI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.3	**EKUITAS DANA CADANGAN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.3.1	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
	JUMLAH EKUITAS DANA	**36.302.517.483,26**	**9.371.695.794,54**	**2.082.646.579,62**	**3.423.860.766,06**	**(273,71)**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**100.376.175.347,90**	**104.675.214.220,02**	**71.687.091.757,32**	**88.677.882.930,27**	**(3,02)**

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

***) Angka Sangat Sementara (Un Audited)*

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sector publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio).

Rasio lancar (current ratio) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio keuangan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas Kota Subulussalam Tahun 2016 s/d 2019

No	Uraian	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2019 Rp
1	2	3	4	5	6
A.	**Rasio Likuiditas**				
	Aset Lancar	55.130.366.160	42.762.229.984	61.409.588.639	51.814.020.880
	Kas dan Piutang	40.636.654.315	27.848.848.827	43.469.902.193	38.192.172.515
	Persediaan	14.493.711.845	14.913.381.157	17.939.686.446	13.621.848.365
	Kewajiban Jangka Pendek	32.036.828.932	47.651.759.213	18.218.001.791	33.867.578.777
1.	Rasio Lancar *(Current Ratio)*	1,72	0,90	3,37	1,53
2.	Rasio Cepat *(Quick Ratio)*	1,27	0,58	2,39	1,13
B.	**Rasio Solvabilitas**				
	Total Aset	1.064.650.371.186	1.876.062.557.421	2.079.669.433.503	2.607.219.606.152
	Total Kewajiban	64.073.657.865	95.303.518.425	69.604.445.178	85.254.022.164
	Total Ekuitas	36.302.517.483	9.371.695.795	2.082.646.580	3.423.860.766
1.	DAR (Rasio Total Hutang terhadap Total Aset)	0,0602	0,0508	0,0335	0,0327
2.	DER (Rasio Total Hutang terhadap Ekuitas)	1,7650	10,1693	33,4212	24,9000

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kota Subulussalam

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa baik rasio lancar maupun rasio cepat Pemerintah Kota Subulussalam cenderung menurun meski masih positif. Rasio ini menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dalam hal ini dari entitas pemerintah daerah dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

Berdasarkan Tabel 3.5 meskipun terlihat mengalami trend penurunan namun rasio lancar menunjukkan Pemerintah Kota Subulussalam masih sangat sehat karena aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi.

Rasio Cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar yang sudah dikurangi tingkat persediaan dengan kewajiban lancar. Meskipun mengalami penurunan namun secara umum rasio cepat menunjukkan Pemerintah Kota Subulussalam masih sangat sehat karena aktiva lancar yang sudah dikurangi persediaan masih lebih besar daripada kewajiban jangka pendek yang harus dipenuhi. Menurunnya kedua rasio likuiditas menunjukkan adanya tekanan keuangan ***(financial distress)*** yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Subulussalam walaupun tidak akan mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Analisis *rasio solvabilitas* dilakukan dengan menghitung analisis rasio total hutang terhadap total asset atau *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan Rasio hutang terhadap ekuitas atau *Debt to Equity Ratio* (DER). DAR bertujuan utnuk melihat dan menganalisis kemampuan aset dalam memenuhi kewajiban entitas di masa mendatang. Tabel 3.5 menunjukkan bahwa hasil analisis DAR jauh di bawah 1%. Angka rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Subulussalam memiliki kemampuan untuk membayar hutang yang menjadi kewajiban pemerintah daerah karena hutang yang dimiliki masih jauh lebih kecil dari nilai asset yang dimiliki. Secara keseluruhan kinerja keuangan Pemerintah Kota Subulussalam, dilihat dari kinerja Neraca Daerah, sangat sehat.

3.1.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan meliputi kebijakan pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja serta pembiayaan. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan adalah dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan

mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan public terutama pada masyarakat miskin dan kurang beruntung, pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

3.1.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

A. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu juga dapat dilihat dari proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Tujuan penghitungan rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja Daerah adalah untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah. Data Belanja Pegawai di sini adalah penjumlahan dari Belanja Pegawai Langsung dan Belanja Pegawai Tidak Langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai.

Perkembangan proporsi belanja pegawai terhadap Total Belanja Daerah menunjukkan kecenderungan menurun dari sebesar 30,77% pada tahun 2015 menjadi sebesar 29,74% pada tahun 2019 Perkembangan proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Gambar 3.13.

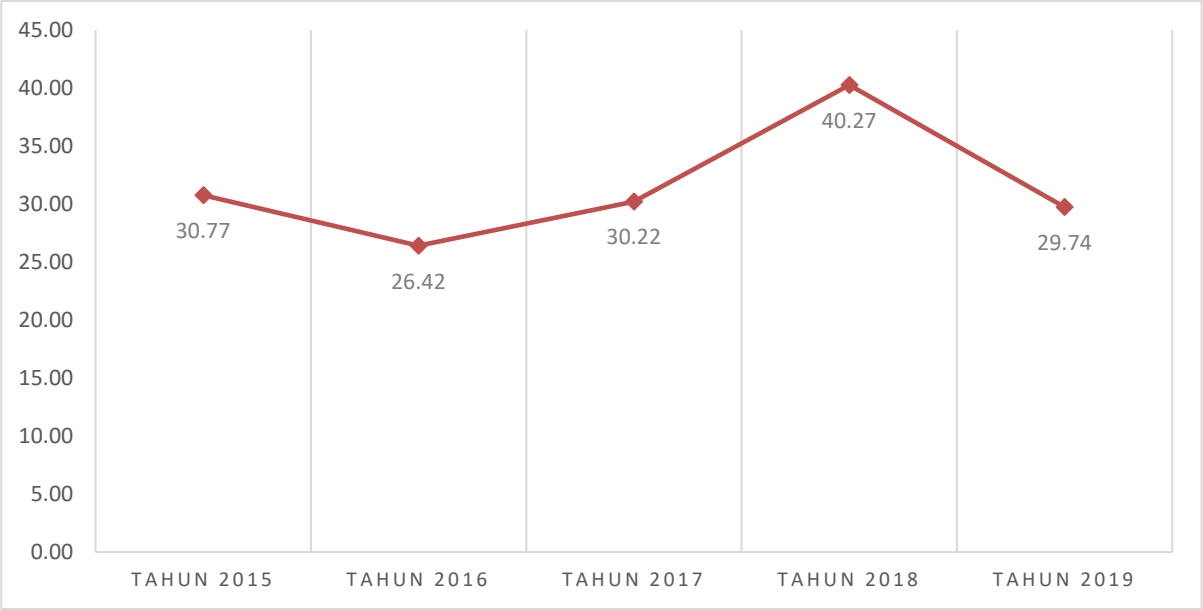

Gambar 3.13. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan porsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah belanja barang dan jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki multiplier effect dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

Di sisi lain rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah Kota Subulussalam menunjukkan kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017-2019, dari sebesar 30,75 % pada tahun 2017 menjadi sebesar 27,97 % pada tahun 2019. Perkembangan proporsi Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Hal ini menjelaskan bahwa jika semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.5.
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

NO	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Tahun Berjalan 2019
1	2	3	4	5
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**286.603.354.855,58**	**296.708.290.514,00**	**286.603.354.855,58**
2.1.1	Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan PNS)	161.825.541.763,58	170.874.895.014,00	161.825.541.763,58
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	5.944.700.000,00	5.680.300.000,00	5.944.700.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.980.017.592,00	2.500.000.000,00	7.980.017.592,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa	1.183.570.000,00	1.983.570.000,00	1.183.570.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Desa	107.669.525.500,00	113.669.525.500,00	107.669.525.500,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**454.762.619.016,00**	**312.010.996.362,00**	**443.040.114.458,00**
2.2.1	Belanja Pegawai	53.280.496.425,00	67.557.057.781,00	55.175.473.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	173.533.374.408,00	147.913.005.088,00	183.787.167.109,00
2.2.3	Belanja Modal	227.948.748.183,00	96.540.933.493,00	204.077.473.849,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 +2.2)	**741.365.973.871,58**	**608.719.286.876,00**	**729.643.469.313,58**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

B. Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

Realisasi Belanja Pemenuhan Aparatur Pemerintah Kota Subulussalam selama periode tahun 2015–2019 sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**185.864.909.012,00**	**176.251.486.260,00**	**187.041.516.808,00**	**187.126.080.253,58**	**1,63**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	131.639.059.312,00	141.725.154.259,00	144.902.841.808,00	161.518.725.161,58	10,26
2	Belanja Tambahan Penghasilan	29.965.419.700,00	19.298.532.001,00	7.877.475.000,00	4.155.637.500,00	(268,76)
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRK serta Operasional KDH/WKDH	1.258.000.000,00	1.308.000.000,00	1.977.000.000,00	1.942.000.000,00	16,52
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	(12,50)
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
6	Belanja Uang Lembur	-	-	-	-	-
7	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.402.430.000,00	13.319.800.000,00	32.084.200.000,00	19.109.717.592,00	(13,71)
B	**BELANJA LANGSUNG**	**90.327.394.729,26**	**101.526.563.370,00**	**88.292.815.010,00**	**89.126.762.282,00**	**(3,58)**
1	Belanja Honorarium PNS	15.415.827.508,00	17.713.833.925,00	9.874.910.000,00	12.865.939.500,00	(8,56)
2	Belanja Honorarium Non PNS	28.255.942.900,00	31.936.362.500,00	29.756.570.837,00	25.263.180.000,00	(14,01)
3	Belanja Uang Lembur	283.646.000,00	116.624.000,00	190.612.000,00	149.810.000,00	(23,61)
4	Honorarium Dana Bantuan Operasional (DBO) Sekolah Menengah (Dana Otsus)	740.094.000,00	3.960.200.972,00	3.620.100.000,00	2.927.490.000,00	3,95
5	Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	781.600.000,00	3.674.400.000,00	3.076.257.736,00	1.080.550.000,00	(99,27)
6	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	10.000.000,00	60.000.000,00	600.000.000,00	40.000.000,00	(343,75)
7	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.630.217.483,26	3.517.750.925,00	3.517.439.182,00	3.852.954.000,00	5,80
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	-	500.000,00	-	-	-
9	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	4.863.881.890,00	4.700.204.820,00	3.638.540.829,00	2.652.884.000,00	(49,42)
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	800.613.000,00	970.565.000,00	750.196.000,00	883.190.000,00	3,63

NO.	URAIAN	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7
11	Belanja Pakaian Kerja	289.688.000,00	250.868.000,00	146.982.000,00	435.400.000,00	35,52
12	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.456.297.300,00	1.345.010.640,00	1.073.931.500,00	1.074.915.000,00	(15,13)
13	Belanja Perjalanan Dinas	24.754.207.241,00	24.691.882.588,00	21.825.275.469,00	25.555.439.182,00	5,28
14	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	-	-	-	-	-
15	Belanja Pemulangan Pegawai	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan,dll)	9.045.379.407,00	8.588.360.000,00	10.221.999.457,00	12.345.010.600,00	18,59
TOTAL		**276.192.303.741,26**	**277.778.049.630,00**	**275.334.331.818,00**	**276.252.842.535,58**	**(0,05)**

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019 (Data Tahun 2019, merupakan data APBK)

C. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kota Subulussalam sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 3.5 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2016 - 2019 dirinci pada Tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Subulussalam

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
1	Tahun anggaran 2016	276.192.303.741,26	773.855.484.941,40	35,69
2	Tahun anggaran 2017	277.778.049.630,00	751.276.873.871,58	36,97
3	Tahun anggaran 2018	275.334.331.818,00	569.719.286.876,00	48,33
4	Tahun anggaran 2019* (target)	276.252.842.535,58	730.643.469.313,58	37,81

Keterangan : Sumber data pada kolom (a) berasal dari Tabel 3.6 dan kolom (b) berasal dari data realisasi APBD
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

Berdasarkan tabel diatas, proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pembiayaan Pengeluaran di Kota Subulussalam pada tahun 2016-2019 terus mengalami fluktuatif. Rata-rata proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran di Kota Subulussalam adalah sebesar 39,70 %. Hal ini menunjukkan bahwa APBK Subulussalam lebih memprioritaskan keberhasilan program prioritas pembangunan daerah dari sisi Belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk Belanja Aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBK.

3.1.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBK dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan dengan belanja.

A. Analisis Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Realisasi Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8.
Surplus/(Defisit) Riil Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

NO.	URAIAN	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019* (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi Pendapatan	634.479.221.203,25	771.345.794.684,80	747.574.253.473,08	563.661.786.542,45	727.219.608.547,52
2	Realisasi Belanja	636.461.911.903,27	773.855.484.941,40	751.276.873.871,58	569.719.286.876,00	729.643.469.313,58
3	Realisasi Pembiayaan	20.195.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	2.423.860.766,06
4	Surplus/(Defisit) Riil	18.212.666.762,45	33.792.827.226,66	5.669.075.396,04	(3.974.853.753,93)	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam , 2019
**) Tahun 2019 Angka APBD*

Dari Tabel 3.8 diatas tampak bahwa pada tahun 2015 hingga tahun 2017 Kota Subulussalam mengalami surplus anggaran, dan Surplus anggaran pada tahun tersebut dipergunakan sebagai pembiayaan tahun berikutnya. Namun demikian tahun 2018 terjadi defisit.

Tabel 3.9.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kota Subulussalam

NO.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	21.695.357.462,47	36.302.517.483,26	9.371.695.794,54	2.082.646.579,62	3.423.860.766,06
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019

B. Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kota Subulussalam selama periode 2015-2019 diantaranya bersumber dari efisiensi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Gambaran pembiayaan riil daerah selama 5 tahun terakhir (2015-2019) tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015		2016		2017		2018		2019*)	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8
1.	Jumlah SiLPA	21.695.357.462,47	100,00	36.302.517.483,26	100,00	9.371.695.794,54	100,00	2.082.646.579,62	100,00	3.423.860.766,06	100,00
2.	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	9.969.527.827,20	45,95	4.913.381.157,00	13,53	3.343.318.186,73	35,67	2.082.646.579,62	100,00	3.423.860.766,06	100,00
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	7.980.017.592,00	36,78	6.302.517.483,26	17,36	4.671.848.810,20	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kegiatan lanjutan	3.745.812.043,27	17,27	25.086.618.843,00	69,10	1.356.528.797,61	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Subulussalam, 2019
**) Tahun 2019 Angka APBD*

3.2. Kerangka Pendanaan

3.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Subulussalam juga bergantung pada proyeksi pertumbuhan ekonomi, realisasi investasi dan kemampuan pengeluaran investasi oleh Pemerintah Kota. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019-2023 diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan stabilitas politik dan keamanan baik nasional maupun tingkat kota. Arah kebijakan keuangan daerah bermanfaat untuk:

a. Menopang proses pembangunan kota yang berkelanjutan sesuai dengan visi nasional dan visi spesifik Pemerintah Kota Subulussalam.
b. Menyediakan pelayanan dasar secara memadai bagi kesejahteraan masyarakat.
c. Meminimalkan resiko fiskal sehingga keberlanjutan anggaran Kota dapat terjamin

Proyeksi data disusun berdasarkan data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data adalah:

a. Pendapatan

   Proyeksi pendapatan mempertimbangkan perkembangan PDRB, inflasi, pendapatan nasional dan perkembangan sektor-sektor pembangunan yang mempengaruhi penerimaan pajak dan restribusi.

b. Belanja

   Proyeksi belanja mempertimbangkan kenaikan belanja pegawai pada belanja tidak langsung dan permasalahan pembangunan dan kewajiban yang mengikat pada belanja langsung.

A. Proyeksi Pendapatan Daerah

Otonomi daerah menimbulkan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan segala urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diperlukan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah berkaitan dengan upaya melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah merupakan seluruh penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri maupun alokasi dari Pemerintah Pusat sebagai hak pemerintah daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah Kota Subulussalam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat termasuk dalam salah satu sumber pendapatan daerah.

A1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus ditingkatkan, karena merupakan salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

Analisis potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai sumber pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggungjawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Sehingga diperlukan pula upaya yang mendorong peningkatan efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam mengelola sumber pendapatan daerah.

Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan karena kurangnya inovasi daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidak optimisan akan hasil yang mungkin dicapai.

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD, beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain,

1. Melakukan upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) sumber daya alam yang baru. Upaya tersebut dapat berupa membuka kawasan-kawasan sentra produksi yang dapat menambah usaha masyarakat dan industri kecil menengah sehingga akan menambah retribusi dan pajak daerah.

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Melakukan intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah intensifikasi terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah.

   Di samping itu dengan langkah *tax effort*, yaitu upaya optimalisasi PAD melalui pajak dengan melakukan upaya *law enforcement* bagi aparat pajak, mengkaji ulang terhadap nilai jual atau jumlah objek pajak yang ada dalam pos bagi hasil pajak (pemerintah pusat dan propinsi) seperti Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang sudah dilimpahkan ke daerah tahun 2011 dengan mengkaji ulang NJOP, jumlah objek, dan subjek pajak. Demikian pula halnya dengan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan pajak, menambah jumlah pajak daerah secara proporsional dan profesional dengan melihat potensi pajak, dan retribusi daerah senyatanya.

   Usaha peningkatan penerimaan daerah melalui ektensifikasi perlu diupayakan dengan menciptakan sumber penerimaan baru meliputi, menciptakan sektor produksi baru melalui upaya *creative financing* dengan melibatkan pihak swasta dengan stimulan yang menarik (perijinan, lahan, market yang jelas, insentif pajak) untuk menanamkan investasinya ke daerah.

Identifikasi sektor unggulan terhadap potensi daerah perlu terus digali dan dikembangkan secara konsisten sebagai sumber PAD potensial, misal sektor pariwisata, pertanian/perikanan, dan perdagangan.

3. Menarik investor melalui insentif pajak ringan, birokrasi yang mudah, infrastruktur yang mendukung, serta memperbanyak MICE (*meeting, insentive, conference, exhibition*) dengan tujuan menciptakan iklim dunia usaha yang kondusif, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berbanding lurus dengan pelayanan kepada masyarakat. Semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula peluang untuk memberikan pelayanan dan fasilitas pada masyarakat dalam berbagai bentuknya.

4. Meningkatkan pengelolaan aset daerah dengan pola kerjasama dengan pihak ketiga/swasta. Banyak aset daerah berupa tanah dan bangunan yang dapat dikelola dengan pola kerjasama pemerintah-swasta.

5. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan retribusi dan pajak daerah. Upaya ini sangat berpengaruh terhadap upaya optimalisasi penerima retribusi dan pajak daerah yang telah ada yang selama ini belum sesuai dengan potensipendapatan daerah

Jika saja PAD itu dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari seluruh stakeholder (perangkat daerah), maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang pro-rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Semakin baik kualitas otonomi daerah, maka ketergantungan dengan Pemerintah Pusat semakin berkurang.

A2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yaitu dana transfer ke daerah. Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi *dari revenue sharing policy.* Konsep *revenue sharing* didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring

meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan *revenue sharing* harus transparan, demokratis dan adil.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam. DAU yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK.

Sedangkan peningkatan pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil, peningkatan akurasi data sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, dan peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

A3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan yang ditetapkan untuk pendapatan tersebut adalah aktif bekerja sama dengan Pemerintah Aceh guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang dikelola oleh Pemerintah Aceh.

Selain dana bagi hasil pajak dari Provinsi, sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dari dan Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus, Dana Desa, dan dana transfer daerah lainnya seperti Dana Insentif Daerah, Dana Hibah, Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lain, Dana Darurat dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menghitung proyeksi pendapatan Kota Subulussalam, asumsi-asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Proyeksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan asumsi:
   a) Perhitungan didasarkan atas potensi dari pertumbuhan bangunan-bangunan bertingkat dan dari bangkitan ekonomi di Kota Subulussalam.
   b) Perhitungan potensi dari bangunan tinggi didasarkan atas data pendaftaran IMB dan SKRK dari tahun 2015-2019 dan asumsi pertumbuhan dimasa yang akan datang

2) Proyeksi BPHTB berdasarkan asumsi potensi dari pertumbuhan aktivitas jual beli properti di Kota Subulussalam

3) Proyeksi Pajak Hotel berdasarkan asumsi:
   a) Perhitungan proyeksi pajak hotel didasarkan atas rata-rata okupansi dari hotel sebesar 32,68 %
   b) Dengan menggunakan rata-rata jumlah kamar per hotel per kelas dan rata-rata tarif hotel per hotel per kelas dan asumsi kenaikan okupansi dan tarif kamar 2,36 % per tahun (berdasarkan PDRB Akomodasi)

4) Proyeksi Pajak Restoran berdasarkan asumsi:
   a) Perhitungan didasarkan atas data wajib pajak restoran
   b) Disumsikan rata-rata pertumbuhan unit restoran/cafe sebesar 3% per tahun

5) Proyeksi Pajak Air Bawah berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Subulussalam berusaha untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dari PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah oleh masyarakat.

6) Proyeksi Pajak Reklame berdasarkan asumsi Pemerintah Kota Subulussalam melakukan penyesuaian regulasi dengan melakukan perhitungan pajaknya berdasarkan Qanun Kota Subulussalam Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dengan pendekatan harga kontrak per setiap kali penayangan materi/iklan

7) Proyeksi Pajak Hiburan berdasarkan asumsi:
   a) Peningkatan proyeksi pajak hiburan setiap tahunnya dipengaruhi oleh peningkatan even yang akan diadakan di Kota Subulussalam.
   b) Selain dari peningkatan even, diasumsikan terdapat penambahan gedung hiburan

8) Proyeksi Pajak Parkir berdasarkan asumsi:
   a) Jumlah kapasitas disesuaikan dengan luas rata-rata daya tampung parkir sesuai kriteria objek pajak
   b) Tingkat *Turn over* disesuaikan dengan kendaraan yang parkir

c) Penentuan Turn over yang meningkat dengan mempertimbangkan luas lahan yang tidak bertambah namun tingkat keramaian yang semakin meningkat.

9) Proyeksi Pajak Penerangan Jalan berdasarkan asumsi:
   a) Peningkatan proyeksi pajak penerangan setiap tahunnya diasumsikan oleh peningkatan jumlah bangunan
   b) Diasumsikan adanya kenaikan tarif dasar listrik

10) Proyeksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berdasarkan asumsi :
   a) asumsi gaji untuk penerimaan Pegawai Negeri Sipil maka untuk Dana Alokasi Umum diproyeksikan terjadi peningkatan.
   b) pertumbuhan ekonomi di Kota Subulussalam berbanding lurus dengan penjualan kendaraan bermotor sehingga meningkatkan bagi hasil pajak provinsi yang diberikan Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kota Subulussalam.

Berdasarkan hasil *forecasting* menurut data masa lalu dan asumsi yang dikemukakan diatas, didapat proyeksi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 rata-rata mengalami peningkatan sebesar 20,24%. Proyeksi pendapatan Kota Subulussalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 disajikan seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Proyeksi Pendapatan Kota Subulussalam Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4				**PENDAPATAN DAERAH**	**747.585.126.626,00**	**775.820.371.838,51**	**808.968.587.104,75**	**844.308.005.247,54**	**881.977.100.268,26**	**7,96**
4	**1**			**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**66.942.889.328,00**	**71.389.221.965,61**	**76.152.785.670,73**	**81.256.698.351,17**	**86.725.794.093,60**	**11,80**
4	1	1		Pajak Daerah	6.330.000.000,00	6.915.931.981,23	7.556.100.342,65	8.255.525.436,50	9.019.692.320,40	15,57
4	1	2		Retribusi Daerah	4.377.268.904,00	4.579.498.727,36	4.791.071.568,57	5.012.419.075,04	5.243.992.836,30	8,45
4	1	3		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	745.620.424,00	767.582.197,21	790.190.840,41	813.465.406,76	837.425.510,58	5,56
4	1	4		Lain-lain PAD yang Sah	55.490.000.000,00	59.126.209.059,82	63.015.422.919,10	67.175.288.432,88	71.624.683.426,32	11,64
4	**2**			**PENDAPATAN TRANSFER**	**677.792.237.298,00**	**704.431.149.872,90**	**732.815.801.434,02**	**763.051.306.896,37**	**795.251.306.174,66**	**7,62**
4	**2**	**1**		**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**556.205.184.740,00**	**582.858.265.950,92**	**610.817.743.015,01**	**640.148.796.823,12**	**670.919.906.618,14**	**8,75**
4	2	1	1	Dana Perimbangan	473.836.633.740,00	496.170.960.840,24	519.581.134.564,70	544.119.879.088,60	569.842.538.569,80	8,62
4	2	1	2	Dana Insentif Daerah (DID)	11.059.843.000,00	11.441.407.583,50	11.836.136.145,13	12.244.482.842,14	12.666.917.500,19	6,45
4	2	1	3	Dana Otonomi Khusus						

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	1	5	Dana Desa	71.308.708.000,00	75.245.897.527,19	79.400.472.305,18	83.784.434.892,38	88.410.450.548,14	9,93
4	**2**	**2**		**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**121.587.052.558,00**	**121.572.883.921,97**	**121.998.058.419,01**	**122.902.510.073,25**	**124.331.399.556,53**	**1,49**
4	2	2	1	Pendapatan Bagi Hasil	24.040.222.087,00	26.948.360.695,30	30.208.295.977,29	33.862.584.673,32	37.958.931.600,11	19,38
4	2	2	2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2	2	3	Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota	97.546.830.471,00	94.624.523.226,67	91.789.762.441,72	89.039.925.399,93	86.372.467.956,42	0,00
4	**3**			**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.850.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**3**	**1**		**Pendapatan Hibah**	**2.850.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	3	1	1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	1	2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah DaerahLainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	1	3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	1	4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3	1	5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	2.850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**3**	**2**		**Dana Darurat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	3	2	1	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**3**	**3**		**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	3	3	1	Lain-lain Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

B. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan 5 tahun ke depan. Sesuai dengan Visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian Visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Dalam rangka mempertimbangkan alokasi belanja, maka diperlukan struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat. Struktur anggaran yang tepat merupakan syarat pokok bagi pengelola keuangan yang baik di daerah, untuk itu ada beberapa yang di lakukan, yaitu:

1) Struktur anggaran harus secara eksplisit memisahkan pendapatan dan pembiayaan. Pembiayaan yang berasal dari utang misalnya, tidak bisa diklaim sebagai pendapatan karena suatu saat nanti dana tersebut harus dikembalikan.
2) Demikian pula penerimaan yang berasal dari kinerja anggaran tahun-tahun sebelumnya (seperti dana cadangan dan SiLPA) ataupun dana dana yang bersifiat temporer (seperti hasil penjualan aset daerah) perlu dipertimbangkan jika akan dimasukkan ke dalam komponen pendapatan daerah.

3) Struktur alokasi anggaran harus disusun sesuai prioritasnya, yakni antara alokasi belanja untuk urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan.

Untuk memenuhi syarat kecukupan (*sufficient condition*) bagi pengelola keuangan daerah yang baik maka daerah perlu memahami dan menggali potensi keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada, prioritas-prioritas pembangunan daerah dengan beberapa pertimbangan tersebut menjadi dasar pola alokasi belanja di Kota Subulussalam.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai *(performance-based budgeting)*. Dalam perencanaan lima tahun ke depan. Belanja Daerah diproyeksikan berdasarkan kebutuhan daerah untuk membiayai antara lain:

1) Belanja tidak langsung yang dipergunakan untuk membiayai gaji pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, dan sejenisnya;
2) Belanja langsung yang dipergunakan menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi kota berupa belanja modal, belanja barang jasa dan belanja operasional lainnya.

Dalam upaya mewujudkan "***KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI"*,** dengan cara mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam melalui pelayanan dasar yang terpenuhi dan pemberdayaan masyarakat serta menumbuhkembangkan kegiatan sosial bermasyarakat dengan nuansa Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan tata ruang, pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, ruang gerak anggaran perlu lebih dioptimalkan tidak hanya melalui mobilisasi sumber pendapatan, tetapi juga melakukan efisiensi belanja. Di samping itu, perlu dilakukan proses penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) dengan melibatkan seluruh stakeholders. Dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur kota, perlu dikembangkan model pembiayaan public-private partnership.

Kebijakan belanja Pemerintah Kota Subulussalam diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Efisiensi belanja antara lain dilakukan dengan meminimalkan belanja yang tidak langsung dirasakan pada masyarakat, melakukan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektivitas setiap program, dan melakukan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya.

b. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan, secara berkelanjutan dengan menitikberatkan pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, urusan Pilihan dan Non Urusan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Kota, dengan meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

c. Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan kata lain bahwa belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai setiap tahunnya (*performance-based budgeting*).

d. Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas

dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta, sesuai ketentuan.

e. Transparansi dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Pada setiap tahunnya, Belanja daerah nantinya akan dikelompokkan dalam Urusan Pemerintahan dan Penunjang Urusan Pemerintahan. Urusan Pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Kebudayaan, Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Energi dan Sumber Daya Mineral; dan Perdagangan. Sementara Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, serta Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan; dan urusan kekhususan dan keistemewaan Aceh serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. royeksi belanja Kota Subulussalam pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.12.
Proyeksi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5			**BELANJA DAERAH**	**751.008.987.392,06**	**778.442.816.529,00**	**811.801.133.587,29**	**847.362.839.426,07**	**885.267.114.829,14**	**7,96**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**427.537.920.534,06**	**440.009.661.860,58**	**452.868.160.913,29**	**466.125.895.297,69**	**479.795.756.291,60**	**5,53**
5	1	1	Belanja Pegawai	165.595.915.552,06	169.239.025.694,21	172.962.284.259,48	176.767.454.513,19	180.656.338.512,48	4,21
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	249.795.204.982,00	258.538.037.156,37	267.586.868.456,84	276.952.408.852,83	286.645.743.162,68	6,54
5	1	3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	5	Belanja Hibah	8.750.300.000,00	8.808.927.010,00	8.867.946.820,97	8.927.362.064,67	8.987.175.390,50	1,32
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	3.396.500.000,00	3.423.672.000,00	3.451.061.376,00	3.478.669.867,01	3.506.499.225,94	1,57
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**210.347.517.358,00**	**218.927.994.992,51**	**233.233.048.802,77**	**248.512.361.035,28**	**265.874.582.420,03**	**11,47**
5	2	1	Belanja Modal Tanah	4.400.000.000,00	4.500.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00	8,08
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.094.567.566,00	22.064.917.674,04	23.079.903.887,04	24.141.579.465,85	25.252.092.121,27	8,42
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.099.507.047,00	48.634.979.934,59	51.309.903.830,99	54.131.948.541,69	57.109.205.711,48	9,90
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.280.705.512,00	137.177.687.304,09	147.414.226.083,98	158.530.269.846,98	171.524.218.648,34	12,91
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.472.737.233,00	6.550.410.079,80	6.629.015.000,75	6.708.563.180,76	6.789.065.938,93	2,34
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**13,33**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	13,33
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**111.123.549.500,00**	**117.005.159.675,92**	**123.199.923.871,23**	**129.724.583.093,09**	**136.596.776.117,51**	**9,57**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	1.183.570.000,00	1.211.975.680,00	1.241.063.096,32	1.270.848.610,63	1.301.348.977,29	4,58
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	109.939.979.500,00	115.793.183.995,92	121.958.860.774,91	128.453.734.482,46	135.295.427.140,22	9,61

Sumber: Hasil Analisis, 2019

C. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi Pembiayaan Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. Pada periode tahun 2020-2024, pembiayaan netto Kota Subulussalam diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 7,46%. Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam tahun 2020-2024 tampak pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Proyeksi Pembiayaan Kota Subulussalam Tahun 2019-2023

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6			**PEMBIAYAAN DAERAH**	**3.423.860.766,06**	**2.622.444.690,49**	**2.832.546.482,54**	**3.054.834.178,53**	**3.290.014.560,88**	**7,46**
6	**1**		**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**3.423.860.766,06**	**3.622.444.690,49**	**3.832.546.482,54**	**4.054.834.178,53**	**4.290.014.560,88**	**10,38**
6	1	1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	3.423.860.766,06	3.622.444.690,49	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88	10,38
6	1	2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yangDipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	5	Penerimaan Kembali Pemberian PinjamanDaerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**2**		**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**0,00**
6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	2	Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6	2	3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2	5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Hasil Analisis, 2019

D. Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Proyeksi terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja wajib dan mengikat ini merupakan belanja yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya, seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja kantor, dan belanja sejenisnya. Sedangkan belanja prioritas utama merupakan belanja yang digunakan dalam rangka keberlangsungan layanan dasar pemerintah daerah yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Subulussalam selama periode 2020-2024 diproyeksikan mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 adanya penerimaan CPNS dikota subulussalam, halini diperkirakan dapat menambah jumlah blanja wajib pada pos belanja pegawai.

Selanjutnya, Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan mengikat serta Prioritas Utama Kota Subulussalam tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut berikut.

Tabel 3.14.
Proyeksi Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
					Belanja Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	**371.013.310.727,06**	**384.398.776.677,13**	**398.353.386.887,06**	**412.920.375.047,78**	**428.108.941.886,88**	**6,81**
5	**1**				**BELANJA OPERASI**	**246.597.846.602,06**	**253.769.404.510,59**	**261.188.645.212,94**	**268.881.853.706,73**	**276.840.379.065,22**	**5,56**
5	**1**	**1**			**Belanja Pegawai**	**165.595.915.552,06**	**169.239.025.694,21**	**172.962.284.259,48**	**176.767.454.513,19**	**180.656.338.512,48**	**4,21**
5	1	1	1		Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	126.306.205.979,06	129.084.942.510,60	131.924.811.245,83	134.827.157.093,24	137.793.354.549,29	4,21
5	1	1	2		Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.592.950.000,00	12.869.994.900,00	13.153.134.787,80	13.442.503.753,13	13.738.238.835,70	4,21
5	1	1	3		Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.987.719.000,00	19.405.448.818,00	19.832.368.692,00	20.268.680.803,22	20.714.591.780,89	4,21
5	1	1	4		Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	5.165.487.300,00	5.279.128.020,60	5.395.268.837,05	5.513.964.751,47	5.635.271.976,00	4,21
5	1	1	5		Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	601.553.273,00	614.787.445,01	628.312.768,80	642.135.649,71	656.262.634,00	4,21
5	1	1	6		Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.942.000.000,00	1.984.724.000,00	2.028.387.928,00	2.073.012.462,42	2.118.618.736,59	4,21
5	**1**	**2**			**Belanja Barang dan Jasa**	**81.001.931.050,00**	**84.530.378.816,39**	**88.226.360.953,46**	**92.114.399.193,54**	**96.184.040.552,74**	**8,08**
5	1	2	1		Belanja Barang	6.146.974.583,00	6.420.300.630,07	6.706.573.773,88	7.006.438.814,25	7.320.573.839,94	8,20
5	1	2	1	4	Belanja Makanan dan Minuman	3.292.025.583,00	3.473.086.990,07	3.664.106.774,52	3.865.632.647,12	4.078.242.442,71	9,90
					- Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.292.025.583,00	3.473.086.990,07	3.664.106.774,52	3.865.632.647,12	4.078.242.442,71	9,90
5	1	2	1	5	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.159.939.000,00	1.197.057.048,00	1.235.362.873,54	1.274.894.485,49	1.315.691.109,02	6,01
5	1	2	1	6	Belanja Pakaian Kerja	113.284.000,00	117.815.360,00	122.527.974,40	127.429.093,38	132.526.257,11	7,40
5	1	2	1	7	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hariTertentu	1.581.726.000,00	1.632.341.232,00	1.684.576.151,42	1.738.482.588,27	1.794.114.031,09	6,01
5	1	2	2		Belanja Jasa	47.692.580.805,00	50.157.534.182,77	52.750.944.423,19	55.486.853.694,37	58.367.660.009,95	9,38
5	1	2	2	1	Belanja Jasa Kantor	40.844.390.957,00	43.090.832.459,64	45.460.828.244,91	47.961.173.798,39	50.599.038.357,30	9,90

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	1	2	2	2	Belanja Jasa Asuransi	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1	2	2	9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	81.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	90.000.000,00	95.000.000,00	8,21
5	1	2	2	10	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi danBimbingan Teknis PNS	6.765.214.848,00	6.981.701.723,14	7.205.116.178,28	7.435.679.895,98	7.673.621.652,65	6,01
5	1	2	4		Belanja Perjalanan Dinas	25.940.775.662,00	26.729.544.003,55	27.544.342.756,39	28.386.106.684,92	29.255.806.702,85	5,76
5	1	2	4	1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.012.447.500,00	7.328.007.637,50	7.657.767.981,19	8.002.367.540,34	8.362.474.079,66	8,25
5	1	2	4	2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.928.328.162,00	19.401.536.366,05	19.886.574.775,20	20.383.739.144,58	20.893.332.623,20	4,76
5	1	2	5		Belanja Barang dan/atau Jasa untukDiserahkan/Dijual/ Diberikan kepadaMasyarakat/Pihak Ketiga	1.221.600.000,00	1.223.000.000,00	1.224.500.000,00	1.235.000.000,00	1.240.000.000,00	0,90
5	1	2	5	3	Belanja Pemberian Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.221.600.000,00	1.223.000.000,00	1.224.500.000,00	1.235.000.000,00	1.240.000.000,00	0,90
5	**2**				**BELANJA MODAL**	**13.291.914.625,00**	**13.624.212.490,63**	**13.964.817.802,89**	**14.313.938.247,96**	**14.671.786.704,16**	**4,76**
5	**2**	**2**			**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**8.807.520.066,00**	**9.027.708.067,65**	**9.253.400.769,34**	**9.484.735.788,57**	**9.721.854.183,29**	**4,76**
					-Belanja Modal (Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan,dll)	8.807.520.066,00	9.027.708.067,65	9.253.400.769,34	9.484.735.788,57	9.721.854.183,29	4,76
5	**2**	**3**			**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**4.484.394.559,00**	**4.596.504.422,98**	**4.711.417.033,55**	**4.829.202.459,39**	**4.949.932.520,87**	**4,76**
5	2	3	1		Belanja Modal Bangunan Gedung (Gedung Kantor)	4.484.394.559,00	4.596.504.422,98	4.711.417.033,55	4.829.202.459,39	4.949.932.520,87	4,76
5	**4**				**BELANJA TRANSFER**	**111.123.549.500,00**	**117.005.159.675,92**	**123.199.923.871,23**	**129.724.583.093,09**	**136.596.776.117,51**	**9,57**
5	**4**	**1**			**Belanja Bagi Hasil**	**1.183.570.000,00**	**1.211.975.680,00**	**1.241.063.096,32**	**1.270.848.610,63**	**1.301.348.977,29**	**4,58**
5	4	1	1		Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.183.570.000,00	1.211.975.680,00	1.241.063.096,32	1.270.848.610,63	1.301.348.977,29	4,58

Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
5	**4**	**2**			**Belanja Bantuan Keuangan**	**109.939.979.500,00**	**115.793.183.995,92**	**121.958.860.774,91**	**128.453.734.482,46**	**135.295.427.140,22**	**9,61**
5	4	2	5		Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	109.939.979.500,00	115.793.183.995,92	121.958.860.774,91	128.453.734.482,46	135.295.427.140,22	9,61

Sumber: Hasil Analisis, 2019

3.2.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Untuk menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan dilakukan proyeksi sesuai dengan proyeksi kapasitas riil kemampuan daerah, proyeksi penggunaan kapasitas riil kemampuan daerah, kerangka pendanaan alokasi prioritas I, II, III Tahun 2020-2024.

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

a) Penerimaan retribusi dan pajak daerah diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
b) Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
c) Penerimaan dana alokasi umum dan khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
d) Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Proyeksi penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kota Subulussalam Tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Kota Subulussalam

No.	Uraian	Proyeksi				
		2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Pendapatan	747.585.126.626,00	775.820.371.838,51	808.968.587.104,75	844.308.005.247,54	881.977.100.268,26
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	3.423.860.766,06	2.622.444.690,49	2.832.546.482,54	3.054.834.178,53	3.290.014.560,88
	Total penerimaan	**751.008.987.392,06**	**778.442.816.529,00**	**811.801.133.587,29**	**847.362.839.426,07**	**885.267.114.829,14**
	Dikurangi:					
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	371.013.310.727,06	384.398.776.677,13	398.353.386.887,06	412.920.375.047,78	428.108.941.886,88
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**376.571.815.898,94**	**391.421.595.161,38**	**410.615.200.217,69**	**431.387.630.199,76**	**453.868.158.381,38**

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Selanjutnya, setelah diketahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk selama 5 (lima) tahun kedepan, tahap berikutnya adalah rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rincian data penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dimaksud, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.16.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Subulussalam

NO	URAIAN	2020 Rp	2021 Rp	2022 Rp	2023 Rp	2024 Rp
1	2	3	4	5	6	7
I	**KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**	**751.008.987.392,06**	**779.442.816.529,00**	**812.801.133.587,29**	**848.362.839.426,07**	**886.267.114.829,14**
	I.a Pendapatan	747.585.126.626,00	775.820.371.838,51	808.968.587.104,75	844.308.005.247,54	881.977.100.268,26
	I.b Penerimaan Pembiayaan	3.423.860.766,06	3.622.444.690,49	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
II	**BELANJA DAERAH**	**751.008.987.392,06**	**779.442.816.529,00**	**812.801.133.587,29**	**848.362.839.426,07**	**886.267.114.829,14**
	II.a Total Belanja Prioritas I	**666.314.603.889,28**	**692.398.944.428,66**	**725.670.852.299,97**	**760.645.534.404,04**	**798.462.167.122,35**
	II.a.1 Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	371.013.310.727,06	384.398.776.677,13	398.353.386.887,06	412.920.375.047,78	428.108.941.886,88
	II.a.2 Belanja Prioritas I	295.301.293.162,22	307.000.167.751,52	326.317.465.412,91	346.725.159.356,26	369.353.225.235,47
	- Belanja Urusan Pendidikan 20%	145.201.797.478,41	150.888.563.305,80	162.560.226.717,46	169.672.567.885,21	177.253.422.965,83
	- Belanja Urusan Kesehatan 10%	70.100.898.739,21	73.944.281.652,90	81.280.113.358,73	84.836.283.942,61	88.626.711.482,91
	- Belanja Program Prioritas Pencapaian Visi Misi	79.998.596.944,60	82.167.322.792,82	82.477.125.336,73	92.216.307.528,44	103.473.090.786,72
	II.a.3 Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	- Penyertaan Modal Daerah	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	II.b Total Belanja Prioritas II	**70.547.583.502,78**	**72.311.273.090,35**	**72.311.273.090,35**	**72.311.273.090,35**	**72.311.273.090,35**
	II.b.1 Belanja Program Prioritas SKPK (Urusan Pelayanan)	70.547.583.502,78	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35	72.311.273.090,35
	II.c Total Belanja Prioritas III	**14.146.800.000,00**	**14.732.599.010,00**	**14.819.008.196,97**	**15.406.031.931,68**	**15.493.674.616,44**
	II.c.1 belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.2 belanja hibah	8.750.300.000,00	8.808.927.010,00	8.867.946.820,97	8.927.362.064,67	8.987.175.390,50
	II.c.3 belanja bantua sosial	3.396.500.000,00	3.423.672.000,00	3.451.061.376,00	3.478.669.867,01	3.506.499.225,94
	II.c.4 belanja bagi hasi (Diluar bagihasil Wajib Ke Pemerintah Desa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.5 belanja bantuan Keuangan (diluar bantuan keuangan wajib ke pemerintah desa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	II.c.6 belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
III	**TOTAL BELANJA PRIORITAS (Prioritas I+II+III)**					

Sumber: Hasil Analisis, 2019

Surplus anggaran diperbolehkan apabila nilainya tidak material dan tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program. Berdasarkan uraian dan penyajian tabel di atas maka jumlah kapasitas riil kemampuan keuangan yang ada tersebut merupakan modal pemerintah daerah dalam membiayai:

a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (dedicated) kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan pencapaian amanat/kebijakan nasional SDGs yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (dua puluh persen) dan kesehatan sebesar 10 % (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
c. Rencana alokasi pengeluaran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KOTA SUBULUSSALAM

Analisis isu-isu strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Subulussalam tahun 2019-2024 diidentifikasi melalui serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis,. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan. Isu strategis ini diperoleh dengan cara mengidentifikasi isu-isu penting dan permasalahan-permasalahan pembangunan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pembidangan permasalahan di Kota Subulussalam secara umum mencakup: (i) Bidang Pemerintahan Umum, (ii) Bidang Ekonomi, (iii) Bidang Sosial Budaya, (iv) Bidang Infrastruktur, dan (v) keistimewaan Aceh. Penjabaran permasalahan selengkapnya adalah sebagai berikut.

4.1.1 Bidang Pemerintahan Umum

A. Permasalahan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Dasar

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Pemenuhan standar pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (ii) Belum terpenuhinya ketersediaan Standar Pelayanan Publik dan maklumat pelayanan publik; (iii) Tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dinilai belum sesuai yang diharapkan; (iv) Sistem inovasi daerah belum optimal pengembangannya; dan (v) manajemen kebencanaan kurang optimal.

B. Integrasi Perencanaan dan Pelaporan

Permasalahan yang muncul adalah: (i) Permasalahan akurasi, kebaruan data dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja; (ii) Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaporan dan evaluasi.

C. Kinerja Pengelolaan Keuangan

Masalah pendataan data dasar *(based data)* objek dan subjek pajak berpengaruh terhadap intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Kota Subulussalam yang belum optimal. Efektifitas dan efisiensi belanja kota perlu dioptimalkan untuk belanja yang kemanfaatannya lebih besar di masyarakat. Publikasi informasi keuangan kota kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Publikasi ini harus dilakukan oleh semua SKPK sebagai bentuk akuntabilitas sosial (pasal 394, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah). Ketertiban administrasi aset daerah perlu ditingkatkan terkait sertifikasi tanah, menyangkut persoalan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

D. Manajemen Kepegawaian dan Penataan Organisasi

Penempatan aparatur secara proporsional berdasarkan kebutuhan organisasi juga masih bermasalah, misalnya proporsi penempatan pegawai SKPK. Manajemen aparatur berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan perlu dioptimalkan (merujuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara).

E. Penyusunan, Implementasi, dan Penegakan Regulasi Daerah

Produktivitas kajian qanun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebutuhan/tuntutan masyarakat perlu ditingkatkan. Penegakan regulasi pemerintah untuk kasus-kasus sengketa lahan dan peruntukan lahan masih banyak persoalan.

F. Keterbukaan Informasi, Akuntabilitas Publik, dan Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pelibatan masyarakat dan kelembagaan forum warga dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan transparansi informasi dan kemudahan akses publik masih perlu ditingkatkan, karena belum semua SKPK menggunakan teknologi informasi untuk mempublikasikan data dokumen rencana kerja

dan dokumen anggaran secara rutin, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Penanganan tindak lanjut aduan masyarakat sebagai wujud monitoring evaluasi pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat, belum optimal. Pelibatan masyarakat dalam fungsi pengawasan dan kualitas dengar pendapat publik (public hearing) yang diadakan oleh DPRK dalam pembahasan RAPBK masih perlu ditingkatkan.

G. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

Akuntabilitas dan tata pemerintahan menjadi sangat penting mengingat akuntabilitas menjadi salah satu parameter tata pemerintahan yang baik. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Nilai LAKIP dan LPPD adalah parameter utama. Dari 3 parameter tersebut, nilai LAKIP Kota Subulussalam masih menjadi masalah, yaitu dengan nilai C.

Kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum optimal dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dalam mereviu dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

4.1.2 Bidang Sosial dan Budaya

Kualitas pelayanan bidang sosial dan budaya di Kota Subulussalam dinilai masih belum memuaskan yang disebabkan oleh beberapa permasalahan berikut:

A. Permasalahan Pendidikan dan Peningkatan Sumberdaya Manusia

a. Masih Terdapat Usia Anak Sekolah Yang Tidak bersekolah
b. Minimnya Sarana dan Prasarana jenjang pendidikan dasar
c. Terbatasnya tenaga pendidik dan kependidikan dengan kompetensi dan distribusi yang belum merata
d. Masih rendahnya uji kompetensi guru, masih di bawah rata-rata uji kompetensi guru secara nasional.
e. Sistem pendidikan yang masih belum berimbang antara orientasi pada kecerdasan intelektual dengan kecerdasan emosi dan spritual.
f. Belum Optimalnya peran Pemuda dalam pembangunan daerah
g. Minimnya sarana dan Prasarana Kebudayaan dan Olahraga
h. Masih Kurangnya Pembinaan Seni Budaya Lokal

i. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya dan pelestarian tradisi

B. Permasalahan Kesehatan

Beberapa permasalahan dalam pelayanan kesehatan yang masih menjadi perhatian di Kota Subulussalam adalah:

a. Masih Terjadinya Kasus Gizi Buruk
b. Masih tingginya Balita Stunting
c. Masih Terjadinya Kasus Penyakit Menular
d. Masih terjadinya angka kematian ibu dan bayi
e. Belum Meratanya Tenaga Kesehatan
f. Terbatasnya sarana dan Prasarana kesehatan serta pelayanan kesehatan belum maksimal

C. Permasalahan Sosial, Kependudukan, Kearsipan, Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Masih Tingginya Jumlah PMKS
b. Terbatasnya data dan Informasi terhadap sistem administrasi kerasipan
c. Rendahnya Pengelolaan dan penggunaan Dana Desa
d. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan
e. Belum optimalnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak
f. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini;
g. Belum tersedianya sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah.
h. Belum optimalnya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya;
i. Belum efektifnya kelembagaan perlindungan anak.

4.1.3 Bidang Infrastruktur

a. Masih terdapatnya Perumahan tidak layak huni
b. Minimnya Ketersediaan Air bersih dan sanitasi layak
c. Masih rendahnya Panjang jalan dalam kondisi baik
d. Konektifitas jaringan jalan belum optimal
e. Belum optimalnya pemenuhan aksesibilitas transportasi untuk mendukung daya saing wilayah.

f. Ketersediaan sarana prasarana dasar permukiman yang belum memadai
g. Ketergantungan Ketersediaan Listrik dari Daerah Sumatera Utara
h. Masih rendahnya kondisi sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan
i. Masih minimnya sarana dan prasarana dalam upaya mitigasi dan adaptasi bencana
j. Masih adanya pelaku usaha dan masyarakat yang kurang taat terhadap pemanfaatan ruang
k. Belum adanya dokumen turunan RTRW yang ditetapkan
l. Belum semua bangunan memiliki IMB
m. Belum optimalnya layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi dan telekomunikasi yang cepat dan aman;
n. Belum meratanya akses internet untuk masyarakat.
o. Belum adanya pelembagaan pengelolaan persampahan kota menuju konsep zero waste.

4.1.4 Bidang Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi yang cenderung stagnan
b. Lambatnya Penurunan Angka Kemiskinan
c. Masih tingginya angka Pengangguran
d. Masih Rendahnya Pengelolaan Usaha Ekonomi Kecil dan Menengah
e. Belum Optimalnya Produksi Pertanian dan kehutanan
f. Belum optimalnya pengarusutamaan gender dalam kegiatan pembangunan
g. Belum Maksimalnya Pengelolaan destinasi Wisata
h. Belum maksimalnya pemanfaatan Taman Hutan Rakyat
i. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah
j. Belum selesainya penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPP) Kota Subussalam
k. Sebagai panduan pembangunan pariwisata secara terpadu yang menyangkut aspek sosial dan ekonomi serta bersifat
l. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja sehingga belum dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar
m. Sarana dan prasarana BLK belum memadai
n. Kesempatan kerja yang ada belum mampu menampung seluruh pencari kerja;
o. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja

p. Pengembagan kawasan untuk investor dan status lahan masih menjadi kendala

4.1.5 Bidang Keistimewaan Aceh

a. Permasalahan terkait pendidikan dayah/pesantren di Kota Subulussalam adalah belum optimalnya pengembangan pendidikan dayah/pesantren, baik dalam bentuk pembangunan fasilitas maupun pemberdayaan santri serta kelembagaan.
b. Materi Syariat Islam yang diselenggarakan di semua jenjang sekolah umum belum berdampak pada pendidikan karakter .
c. Permasalahan dalam kehidupan adat adalah belum optimalnya upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat Islam
d. Masih kurangnya kebersamaan ulama dan umara mengakibatkan permasalahan dalam mengoptimalkan peran ulama dalam perumusan dan penetapan serta pengawasan kebijakan Pemerintah Kota Subussalam.
e. Belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah
f. Belum optimalnya pelaksanaan syari'at islam

4.2. Lingkungan Strategis

4.2.1. Analisis Lingkungan Internal

Pembahasan mengenai lingkungan internal yang akan dikaji dalam bagian ini, mencakup: (i) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota, (ii) Kondisi Demografi, dan (iii) Lingkungan Sosial Budaya. Penjelasan selengkapnya akan dipaparkan pada bagian berikut.

1) Posisi Geografis dan Geoekonomi Kota Subulussalam sebagai daerah penggunungan di Aceh memiliki SDA, dan kesuburan tanah. Dalam Provinsi Aceh, Kota Subulussalam dijadikan kawasan peruntukan pengembangan Agro industri dan sentra produksi.

   Implikasi tantangannya: (i) harus menciptakan iklim yang kondusif dan ramah investasi; (ii) mengembangkan kecakapan kota mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melingkupi aspek kebijakan/regulasi, aspek kelembagaan Iptek; aspek infrastruktur inovasi; budaya inovasi; dan pengembangan klaster industri secara komprehensif dan kolaboratif; (iii) mensinergikan nilai global dan nilai budaya lokal kota dalam penataan fungsi kota sebagai kota MICE; (iv) menata kota yang berorientasi ekonomi

perdagangan yang kompetitif, memberi kenyamanan bagi pelaku usaha atau investor untuk menambah lama tinggal (*length of stay*) di Kota Subulussalam.

2) Kondisi Demografi

Kota Subulussalam termasuk kota dengan laju pertumbuhan penduduk rendah di Provinsi Aceh. Tantangan bagi kota: memanfaatkan data kependudukan untuk perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna lahan/tanah serta perencanaan dan penganggaran pembangunan, mengantisipasi dampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang dapat berisiko pada kesehatan lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup.

3) Lingkungan Sosial Budaya

Kota Subulussalam adalah kota yang memiliki peninggalan sejarah, baik bangunan maupun budaya. Di Kota Subulussalam banyak aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas warga. LSM sebagai modal sosial kota ini dapat dimanfaatkan sebagai forum bagi warga untuk berdiskusi dan bersama-sama pemerintah mengembangkan Kota Subulussalam sebagai Kota sentra produksi.

4.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Untuk melengkapi upaya didalam penentuan isu strategis, juga dilakukan analisis lingkungan eksternal dengan menelaah agenda pembangunan Aceh, pembangunan nasional dan kebijakan internasional, untuk memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pembangunan Kota Subulussalam.

1. Analisis Kebijakan Pembangunan Aceh

   a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA)

      Kebijakan berbasis geospasial, RPJP Aceh Tahun 2012-2032 memperkuat kebijakan yang telah di tetapkan pemerintah pusat dalam RTRWN dan RTRW Aceh, dimana Kota Subulussalam ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategi Nasional (PKSN) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sementara menindaklanjuti penetapan tersebut, Pemerintah Aceh dalam RTRW menetapkan Sabang menjadi salah satu Wilayah Pengembangan (WP) Banda Aceh-Sabang-Jantho (BASAJAN) dan Kawasan Andalan Aceh (KAA) dalam sektor Pariwisata dan Perikanan. Kebijakan ini berdampak kepada upaya Kota

Subulussalam dalam mempersiapkan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik yang terintegrasi untuk mendukung Subulussalam sebagai kawasan strategis dan unggulan di Aceh dengan tujuan akhir mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2033

1. **Kebijakan pengembangan struktur ruang** meliputi:

   (a) mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie Kota Subussalam dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (Information Technology Center) dan Aceh digital.

   (b) Pusat kegiatan primer sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional.

2. **Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Aceh,** meliputi:

   Kota Subulussalam memiliki Hutan Lindung seluas 3.400 Ha, TWA seluas 6.525 Ha (daratan 1.250 Ha, Laut 5.275 Ha)

3. **Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Aceh,** yaitu Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center). Kebijakan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 menempatkan Subulussalam pada posisi yang strategis bagi perkembangan Aceh, Sehingga perlu senergitas dan kesesuaian pada tataran kebijakan hingga pelaksanaan program dan kegiatan.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022

Visi yang ingin di capai dalam pembangunan jangka menengah Aceh 2017-2022 yakni "*Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani.*" Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut: (1) **Aceh yang damai** bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan; (2) **Aceh yang sejahtera** bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan,

pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak; (3) **Pemerintahan yang bersih**, adil dan melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

MISI dari Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut: (1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan; (2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain; (3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki; (4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum; (5) Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah,berkualitas dan terintegrasi; (6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan; (7) Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi; (8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan; (9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan

2. Analisis Kebijakan Pembangunan Nasional

   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

   Tantangan yang dihadapi dari kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bagi pembangunan daerah Kota Kota Subulussalam adalah: (i) mengelola penataan organisasi pemerintah daerah yang efisien dan

efektif; (ii) mengelola aparatur supaya profesional, kompetitif, akuntabel; (iii) pengelolaan keuangan daerah yang memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar secara efisien dan akuntabel; (iv) tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dengan multi pemangku kepentingan dan akuntabel; (v) inovasi daerah.

3. Analisis Kebijakan Internasional

   a. Sustainable Development Goals (SDG's)

      Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDG's) yang berakhir pada tahun 2015. MDG's yang diklaim sukses membawa penduduk negara dunia ketiga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang diukur melalui *Human Development Index* dilanjutkan dengan pencanangan SDG's. SDG's adalah sasaran jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan di sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

      Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang.

      Bila pada Millenium Development Goals (MDG's) terdapat 8 sasaran dan 60 target maka pada Sustainable Development Goals (SDG's) ini terdapat 17 sasaran dan 169 target pembangunan. 17 sasaran tersebut terdiri dari:

      1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
      2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
      3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
      4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
      5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.

6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan diantara negara - negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya samudera dan kepesisiran untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

18. SDG's sebagai agenda global perlu diintegrasikan dengan agenda pembangunan nasional dan agenda pembangunan Kota Sabulussalam.

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN sehingga pada prakteknya terbentuk sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. MEA ini telah disepakati oleh negara-negara di ASEAN dan mulai diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2015.

Tantangan dari pemberlakuan MEA sejak tahun 2015 adalah kesiapan pemerintah Kota Subulussalam mempersiapkan mental dan keterampilan hidup penduduk Kota Subulussalam menghadapi MEA, yaitu: (i) memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; (ii) mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; (iii) meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.

Berdasarkan dinamika lingkungan strategis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai pertimbangan dalam perumusan isu strategis 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 4.1.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Provinsi Aceh**	**Dinamika Kota Subussalam**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**SDGs** 1. Hilangkan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia; 2. Hilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan 3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur 4. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan 6. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang;	**RPJMN** 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara 2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 3. Membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	**RPJMA** 1. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik 2. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan 3. Penguatan perdamaian secara berkelanjutan 4. Pemenuhan ketahanan dan kemandirian pangan 5. Pengembangan pertanian dan perikanan 6. Pengembangan industri, dan koperasi dan UMKM 7. Pengembangan pariwisata 8. Ketenagakerjaan; 9. Ketersediaan dan ketahanan energi 10. Pemenuhan data yang berkualitas, terpusat dan terintegrasi 11. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah 12. Pemenuhan perumahan dan permukiman layak huni 13. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan	**RPJMK** 1. Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan 2. Peningkatan aksebilitas pendidikan secara menyeluruh. 3. Peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan 4. Peningkatan akses layanan kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas 5. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender 6. Peningkatan infrastruktur ekonomi yang berkualitas 7. Peningkatan infrastruktur sosial yang berkualitas 8. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup 9. Peningkatan pertumbuhan ekonomi

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Provinsi Aceh**	**Dinamika Kota Subussalam**
	7. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang; 8. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang 9. Membangun infrastruktur yang berkualitas mendorong peningkatan produksi yang berkelanjutan serta mendorong inovasi; 10. Mengurangi ketidaksetaraan baik dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia; 11. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan; 12. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi;	5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial indonesia	14. Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga 15. Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan 16. Pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17. Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumberdaya alam, dan lingkungan hidup	10. Penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan ketimpangan pendapatan 11. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis kampong 12. Peningkatan pengembanga pariwisata dan budaya lokal 13. Peningkatan ketersediaan dan kemandirian pangan 14. Peningkatan Ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat 15. Penggunaan Sistem Informasi dalam memberikan pelayanan publik 16. Mewujutkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakat Kota Subulussalam

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Provinsi Aceh**	**Dinamika Kota Subussalam**
	13. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan; 15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan,mengurangi tanah tandus, serta tukar guling tanah; 16. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan; 17. Memperkuat implementasi dan menghidupakn kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.			

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Provinsi Aceh**	**Dinamika Kota Subussalam**
2.	**MEA** 1. Memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi untuk mencintai dan mendukung produk dalam negeri; 2. Mengupayakan standarisasi dan sertifikasi keterampilan yang dipersyaratkan untuk kompetisi pasar tenaga kerja; 3. meningkatkan arus investasi, mencetak eksportir ke ASEAN, pengiriman tenaga terampil ke ASEAN, dan peningkatan kunjungan wisata.	**UU 37 Tahun 2000** 1. Kelengkapan prasarana kelas dunia, 2. Insentif yang menarik, 3. Manajemen yang profesional, 4. Lingkungan permukiman yang menyenangkan, 5. Peraturan dan prosedur yang jelas dan mudah, 6. Landasan hukum yang pasti, dan jaminan keamanan	**Keistimewaan Aceh** 1. Penyelenggaraan kehidupan beragama, 2. penyelenggaraan kehidupan adat, 3. penyelenggaraan pendidikan, dan 4. peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah	**Keistimewaan Aceh** 1. Penyelenggaraan kehidupan masyarakat kota subulussalam yang Islami dan berbudaya
3.	**Pemanasan global** 1. Konsentrasi emisi GRK yang diperkirakan terus berlipat pada tahun 2030 akan meningkatkan efek GRK 2. Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menuangkan secara konsisten komitmen global mengenai penghapusan GHGs	**Grand Design Pengelolaan Kawasan Perbatasan** 1. Penanganan terhadap masalah yang dihadapi oleh perbatasan sampai saat ini masih dilakukan secara parsial, terkait dengan masalah wewenang pemerintah pusat dan daerah 2. Penegakan hukum di perbatasan belum optimal karena luasnya area yang harus diawasi yang		

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Provinsi Aceh	Dinamika Kota Subussalam
		berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana serta sumber daya 3. minimnya alokasi anggaran pembangunan		

4.3. Isu Strategis Pembangunan

Isu Strategis Kota Subulussalam yang telah diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembangunan, maka ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2020-2024, dengan mengidentifikasi dan analisa kondisi riil, tantangan lima tahun kedepan, serta dinamika lingkungan strategis serta telaahan dokumen yang ada, maka isu-isu strategis pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:

4.3.1. Peningkatan kualitas, pelayanan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia;

Untuk mewujudkan Peningkatan kualitas, pelayanan Pendidikan dan Sumberdaya Manusia, terdapat 3 aspek yang menjadi isu strategis Kota Subulussalam yaitu:

a. Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;

b. Perluasan Kesempatan Kerja; dan

c. Pemberdaaan Masyarakat.

Pemenuhan standar dan mutu pelayanan dasar di bidang pendidikan sangat menentukan kualitas SDM suatu daerah. Modal utama dalam pembangunan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, kualitas dari SDM sendiri harus terus ditingkatkan agar mampu menciptakan daya saing yang tinggi, yang dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan agar seluruh masyarakat Kota Subulussalam memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga mempunyai peluang yang besar menuju pada akses pendidikan di jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Tantangan lainnya yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, antarwilayah, dan antargender.

Terbatasnya lapangan kerja, keterampilan, dan kecakapan tenaga kerja yang kurang sesuai dengan sektor ekonomi yang membutuhkannya merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jumlah pengangguran terus meningkat di Kota Subulussalam.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil survey BPS yang telah dipublikasi per Agustus 2019, dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka dikelompokkan berdasarkan kelompok jenjang pendidikan. TPT untuk kelompok penduduk dengan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) paling tinggi diantara tingkat pendidikan lain dan diikuti dengan TPT Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja yang tidak terserap terutama pada tingkat pendidikan SMK dan SMA sementara mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima pekerjaan apa saja. Hal ini dapat dilihat dari TPT SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat pendidikan.

Pola pertumbuhan inklusif harus diciptakan di Kota Subulussalam untuk memaksimalkan potensi ekonomi dengan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar kerja yang baik dan ramah keluarga miskin akan dapat mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Upaya lain untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan pekerjaan baru menjadi salah satu sarana untuk menurunkan tingkat pengangguran di Kota Subulussalam, mengingat sangat terbatasnya kesempatan kerja di sector-sektor industry pengolahan maupun sector jasa lainnya. Salah satu isu yang menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor ekonomi kreatif untuk bisa memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan lapangan kerja baru.

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Subulussalam yang masih rendah juga menjadi salah satu aspek yang berpotensi memicu peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam. Produktivitas Tenaga Kerja yang rendah menjadi salah satu pemicu lemahnya daya serap tenaga kerja dari perusahaan perusahaan yang membutuhkan produktivitas tenaga kerja yang sangat tinggi.

Perlindungan sosial terhadap pekerja informal juga harus ditingkatkan. Perluasan kesempatan kerja dan usaha yang baik perlu diciptakan untuk penduduk kurang mampu dan penduduk kondisi rentan, termasuk

penyandang disabilitas dan lanjut usia potensial. Kelompok penduduk seperti itu biasanya memiliki kesempatan yang sangat terbatas dalam sektor pekerjaan formal dan tidak memiliki sumber pekerjaan alternatif lain untuk menunjang ekonomi keluarga. Peluang kerja yang dapat diperoleh kelompok penduduk tersebut masih kurang memenuhi standar hidup yang layak dan berkesinambungan. Diperlukan keterpaduan berbagai instansi sosial untuk mendukung penduduk yang kurang mampu agar dapat mengelola berbagai resiko, pembukaan kesempatan dan lingkungan yang inklusif agar penduduk yang kurang mampu memperoleh penghidupan yang layak dan jaminan sosial yang memadai.

4.3.2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

Pelayanan kesehatan diprioritaskan untuk menurunkan disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana, serta tenaga kesehatan dasar dan rujukan. Selain itu, tantangan utamanya adalah meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menyiapkan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional. Kesehatan yang holistik dan komprehensif mencakup kesehatan secara fisik, mental, sosial dan spiritual dengan pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Derajat kesehatan masyarakat yang holistik dan komprehensif merupakan tujuan utama dari pembangunan kesehatan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Subulussalam pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan masih sangat rendah.

4.3.3. Pengembangan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

Salah satu indikator mengukur kemajuan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan infrastruktur yang mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi. Secara kewilayahan, infrastruktur wilayah memiliki peran strategis dalam peningkatan struktur perwilayahan, mendukung distribusi barang, jasa dan mobilitas orang. Untuk mendukung peran tersebut, infrastruktur memerlukan pengembangan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan yang diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kota Subulussalam.

Infrastruktur wilayah meliputi infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, listrik, telepon dan sarana lain seperti sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Kebutuhan infrastruktur wilayah tersebut terkait dengan fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, dimana dengan kondisi infrastruktur wilayah yang baik dan mantap maka dapat menjadi faktor penarik investor untuk berinvestasi di Kota Subulussalam.

Dalam pemenuhan kebutuan penyediaan dan kemantapan infrastruktur wilayah ini, Pemerintah Kota Subulussalam akan bersinergi dengan Desa yang memiliki kewenangan dan keuangan yang salah satu tugasnya juga melaksanakan pembangunan. Infrastruktur yang memang menjadi wilayah kewenangan desa, akan dipenuhi oleh desa sesuai dengan procedure perencanaan dan penganggaran desa. Sedangkan yang berada di wilayah kewenangan Kota Subulussalam, maka akan dibangun oleh Pemerintah Kota.

a. Kemantapan jembatan dan jalan meliputi jalan Kota dan poros desa terutama jalan-jalan penghubung ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur dasar meliputi perumahan, sanitasi, dan listrik;
c. Keterpaduan pembangunan bidang keciptakaryaan meliputi sanitasi, penataan kawasan kumuh, penataan dan pengembangan bangunan dan lingkungan permukiman;
d. Mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan/atau di perbatasan;
e. Penataan fasiltias sosial dan fasilitas umum meliputi jalan pemukiman, taman, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau;
f. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau;

g. Sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi meliputi saluran pembuangan air limbah domestic, sampah dan pengolahannya terutama sarana TPS dan TPA sekaligus pengembangan manajemen pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan jamban;

h. Pemeliharaan irigasi teknis dan setengah teknis dengan manajemen sumber daya air berbasis data hidrologis dan timbangan keragaan pengairan;

i. Prasarana telekomunikasi dan informasi

Selebihnya, yang terpenting dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur ini adalah aspek pemerataan. Daerah pinggiran yang selama ini seringkali termarginalkan, ke depan justru harus menjadi prioritas, sehingga desa-desa pinggiran dapat melakukan percepatan pembangunan.

Saat ini, kualitas lingkungan hidup baik kualitas air, udara maupun tutupan lahan semakin menurun. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan perlu menjadi perhatian kedepan dan harus dilakukan secara seimbang dan holistik bersamaan dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Berbagai aktivitas yang dilakukan harus dipastikan agar tidak mengakibatkan terlampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem dan pencemaran. Fokus utama lainnya adalah mengantisipasi dampak dari perubahan iklim dengan melakukan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dampak perubaan iklim dapat meningkatkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi serta menurunkan tingkat kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu antar lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama penyebaran dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu juga dengan air limbah domestik harus dikelola secara tepat guna.

Pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang, penanganan kebencanaan tetap menjadi perhatian utama untuk lima tahun kedepan.

4.3.4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal;

Isu Strategis berkaitan dengan Penguatan daya saing ekonomi masyarakat berbasis pada potensi local mempunyai 3 aspek yakni:

a. Pemerataaan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari menurunnya ketimpangan social dan ekonomi (Indeks Gini rasio)

b. Penurunan Angka Kemiskinan

c. Penguatan daya saing usaha mikro kecil dan menengah, sector ekonomi kreatif, Pertanian, industry dan perdagangan, serta pariwisata berbasis pada potensi local.

Pemerataaan kesejahteraan masyarakat

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2019 PDRB per kapita penduduk Kota Subulussalam adalah 16,69 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 2,81 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Subulussalam dari tahun 2015-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin meningkat.

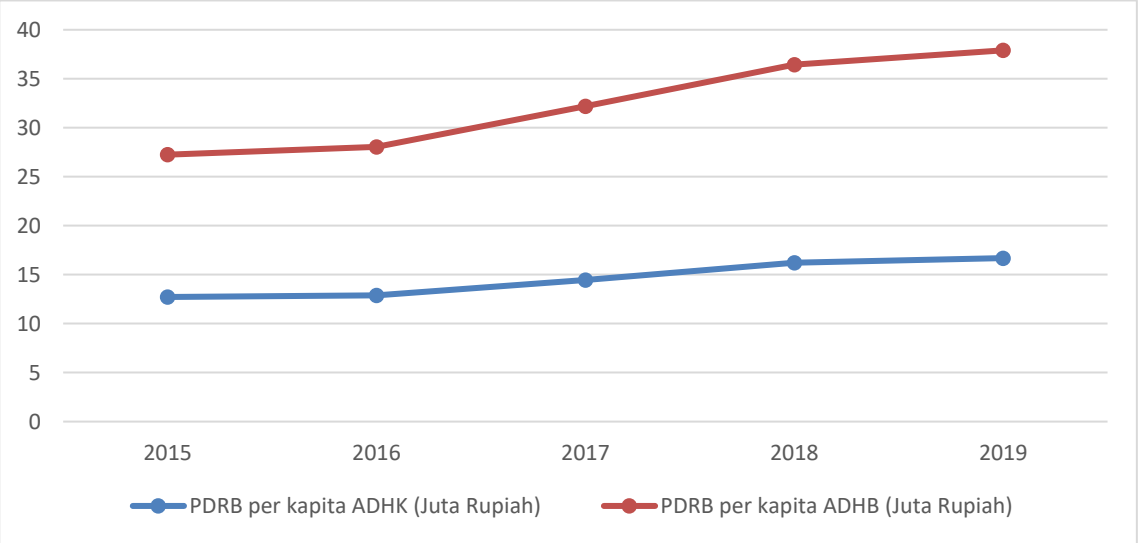

Grafik ..... PDRB Per Kapita Kota Subulussalam ADHB dan ADHK dalam juta rupiah Tahun 2019 – 2019

Tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari peningkatan PDRB Per Kapita, tetapi harus dievaluasi juga apakah tingkat sejahteaan tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat. Dari hsill evaluasi terhadap indicator makro ekonomi kota Subulussalam, ternyata Kesenjangan sosial diakibatkan oleh ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Subulussalam yang masih cukup tinggi. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum maksimal, sehingga ketimpangan sosial semakin terlihat jelas. Kesempatan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya terlihat masih sangat timpang dibandingkan dengan keluarga pada kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan yang lebih baik.

Kondisi sebagaimana dijelaskan diatas sangat disebabkan karena ketidakberdayaan atau ketidakmampuan *(powerlessness)* masyarakat miskin dalam hal:

1) memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan (basic need deprivation);
2) melakukan kegiatan yang produktif (cenderung melakukan kegiatan unproductiveness);
3) menjangkau akses sumber sosial dan ekonomi(inaccessability);
4) menentukan nasibnya sendiri dan senantiasa mendapatkan perlakuan diskriminatif;
5) membebaskan diri dari mental dan budaya miskin

Kemiskinan

Kemiskinan selalu menjadi isu strategis baik di tingkat Kota, di tingkat Propinsi maupun di tingkat nasional. Berdasarkan dari hasil evaluasi ada beberapa indikator yang dijadikan parameter untuk penanggulangan kemiskinan antara lain adalah:

1. Angka Kemiskinan
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan *(Poverty Gap Index-P1),* merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin

terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi Indeks Kedalaman Kemiskinan maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Kegunaan dari Nilai agregat dari poverty gap index adalah untuk mengetahui seberapa besar biaya untuk mengentaskan kemiskinan. Semakin kecil nilai poverty gap index, maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan untuk target sasaran bantuan dan program.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan *(Poverty Severity Index-P2),* merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indikator Keparahan Kemiskinan berfungsi untuk memberikan informasi yang saling melengkapi pada insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapijurang kemiskinannya *(poverty gap)* rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin.

Berdasarkan publikasi dari BPS Tahun 2019, berikut ini adalah gambaran indikator indikator kemiskinan yang ada di Kota Subulussalam dapat digambarkan dari grafik-grafik berikut ini.

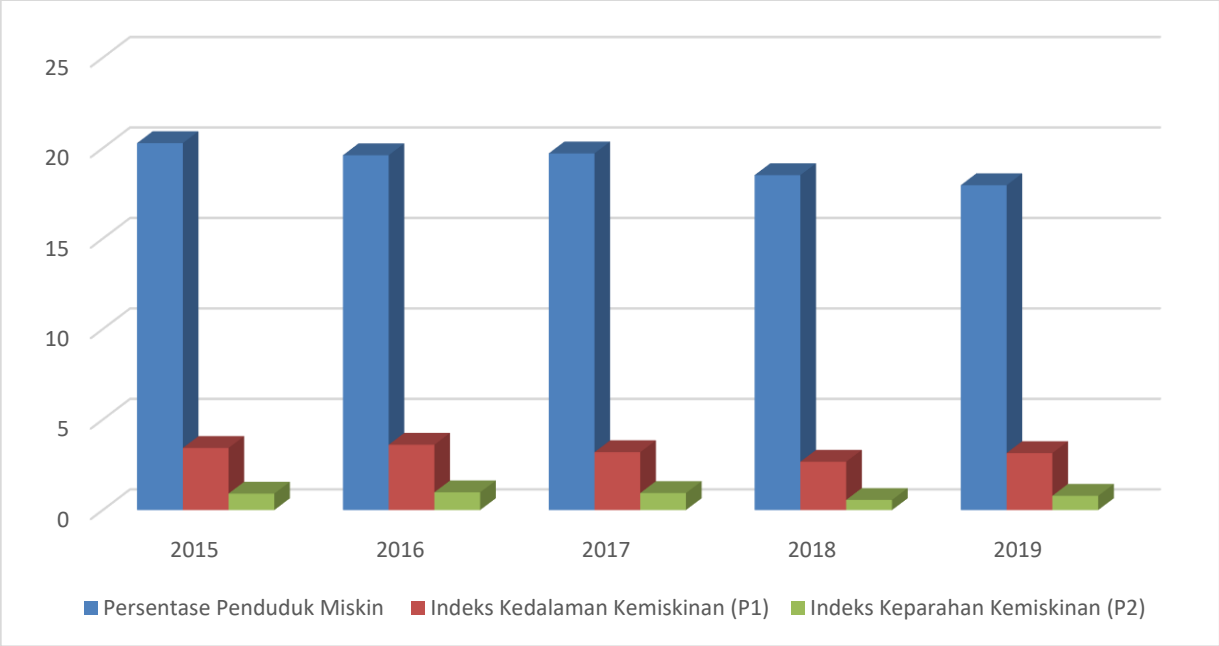

Grafik ... Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

Grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahunnya Kota Subulussalam telah berhasil menurunkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan kondisi terakhir di tahun 2019 angka kesenjangan tersebut sudah mencapai indeks yaitu di angka 3,15. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Subulussalam cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Hal ini berimplikasi pada besaran pembiayaan program penanggangulangan kemiskinan.

Daya Saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sudah menjadi keniscayaan bahwa produk-produk yang dihasilkan dari UMKM dan IKM harus mampu berdaya saing dengan produk-produk dari luar negeri. Secara spesifik, beberapa hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan daya saing UMKM adalah:

a. Produktivitas

Produktivitas merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu UKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat. Tingkat produktivitas yang dicapai UKM merupakan indikator seberapa efisien UKM tersebut dalam mengkombinasikan sumber daya ekonomisnya saat ini. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan perbaikan tingkat pendidikan dan keahlian manajerial.

b. Inovasi

Tidak terhindarkan lagi bagi suatu daerah yang ingin maju dalam pertumbuhan ekonomi dan daya saing selalu bertumpu kepada iptek sebagai penggerak pembangunan, berarti kata "Inovasi" selalu menjadi tema utama dalam setiap pengambilan kebijakan disektor ekonomi. Inovasi menjadi semakin menentukan dalam pembangunan menuju kemandirian daerah yang berdaya saing tinggi, terutama ketika menghadapi era keterbukaan dan kebebasan perdagangan dalam kawasan tanpa batas. Pada situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Untuk itu usaha kecil harus mengenal jauh lebih dekat konsumennya sehingga mereka betul betul dapat mengetahui kebutuhan pasar dan dapat menyediakan kebutuhan tersebut melalui inovasi dan keratifitasnya.

c. Iklim Usaha yang Kondusif

Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah tingkat kesulitan mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal lainnya adalah seringkali kebijakan perekonomian Pemerintah dinilai belum secara maksimal memihak kepentingan usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar.

d. Akses permodalan *(Access to Finance)*

Masalah mendasar usaha kecil yang paling menonjol menyangkut menyediakan pembiayaan usaha alias modal usaha. Kebutuhan modal sangat terasa pada saat seseorang ingin memulai usaha baru. Alhasil, biasanya bila motivasinya kuat, seseorang akan tetap memulai usaha kecil tetapi dengan modal seadanya.

Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang menghadang usaha kecil menyangkut kemampuan akses pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil serta akses informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut. Padahal pilihan sumber modal sangat banyak dan beragam.

Lembaga keuangan bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun untuk bermitra dengan bank, usaha kecil dituntut menyajikan proposal usaha yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Disamping itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable alias dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalannya. Akibat bank berlaku prudent atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses bank akan mencari jalan pintas. Kemana lagi kalau bukan kepada para pelempar uang alias rentenir tetapi usaha kecil harus rela dengan biaya uang yang mencekik.

Ada anggapan keliru. Seolah olah, usaha kecil tidak mempermasalahkan biaya bunga yang tinggi dari rentenir. Adalah anggapan yang sangat keliru. Mereka terpaksa memakai uang rentenir karena terpaksa akibat sulit mengakses modal dari bank. Usaha kecil yang berhasil menembus kendala akses modal, pasar dan informasi. Kendala beralih pada yang lebih advance. Seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahakan kualitas produk dan kuantitas produksi.

e. Kemampuan penetrasi pasar

Selanjutnya Produktivitas UKM melalui pemberian kredit untuk investasi dan modal kerja akan menjadi sia-sia bila produk yang dihasilkan tidak dipasarkan dengan benar, meskipun produk tersebut memiliki nilai jual dan kualitas yang tinggi. Usaha kecil pada umumnya mempunyai permasalahan terkait lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, karena pada umumnya usaha kecil merupakan unit usaha keluarga, produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. Pemasaran (Marketing) adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Ada empat komponen pemasaran yaitu:

1. Product (produk)
2. Price (harga)
3. Place (tempat, termasuk juga distribusi)
4. Promotion (promosi)

f. Akses Informasi

Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik.

g. sarana prasarana usaha

Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

Produktivitas usaha ekonomi kreatif masih rendah

Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide, pengetahuan skill dan talenta, daripada sumber daya tenaga. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Sehingga diperlukan pengetahuan tentang potensi diri dan lingkungan budaya setempat, dari warga masyarakat masing-masing sebagai sumber hidup dan tempat tinggalnya. Untuk mendorong produktivitas ekonomi kreatif di Kota Subulussalam, ada beberapa permasalahan yang perlu dibenahi yaitu:

a. Belum sinergisnya peran pemerintah, pelaku usaha dan aktor intelektual dalam menumbuhkembangkan lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif

b. Manajemen pengelolaan usaha ekonomi kreatif masih lemah.

c. Permasalahanlainnya adalah permodalan dan pemasaran produk, Sumber Daya Manusia (SDM), Bahan baku, infrastruktur dan teknologi.

Potensi dan Daya Saing Wilayah

Investasi adalah motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk itu maka sangat penting membangun iklim investasi yang ramah bagi investor *(business friendly)*, karena dengan demikian akan mampu menarik

investor-investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke suatu daerah yang secara tidak langsung akan mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan aktivitas perekonomian, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi local di setiap wilayah harus digali untuk menumbuhkan kembangkan potensi ekonomi masyarakat di setiap wilayah.

Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

Untuk mendorong dan menarik investasi ke daerah, diperlukan Profil Potensi Daerah yang berisi tentang informasi peluang usaha yang layak bagi investor. Profil Potensi Daerah ini dimaksudkan agar investor dapat lebih cepat menangkap peluang investasi dan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan adanya Profil Potensi Daerah, UKM juga dapat mengidentifikasi peluang usaha yang ada. Dengan Profil Potensi Daerah yang telah memenuhi kriteria, maka diharapkan daerah dapat mempunyai prospek usaha dengan pasar yang jelas serta sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah. Disamping itu profil proyek investasi di daerah juga dapat digunakan sebagai materi utama dalam berbagai kegiatan untuk mempromosikan potensi daerah.

Penguatan daya saing industry dan perdagangan

Sektor industri pengolahan di Kota Subulussalam memiliki kontribusi terbesar keempat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan industri pengolahan di Kota Subulussalam mengalami perkembangan yang baik, begitu juga potensinya untuk dikembangkan. Industri unggulan dan ekonomi kreatif sangat potensial untuk dikembangkan di Kota Subulussalam, dengan mendorong industri kecil dan atau UMKM, serta industri kreatif. Namun permasalahan klasik yang sering dihadapi dalam pengembangan industri kecil

mengengah, UMKM maupun industri kreatif diantaranya adalah sulitnya akses permodalan, masih sulitnya pemasaran dikarenakan belum berkembangnya sentra-sentra produksi, sumberdaya pelaku IKM, UMKM, serta masih rendahnya jiwa kewirausahaan insan kreatif.

Penguatan daya saing pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu subsektor yang menggerakkan pertumbuhan sektor tersier di Kota Subulussalam. Perkembangan pariwisata Kota Subulussalam akan mendorong tumbuhnya sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor tersier lainnya. Objek wisata yang terdapat di Kota Subulussalam cukup banyak, mulai dari wisata berbasis alam, berbasis sejarah, wisata kuliner, wisata berbasis pendidikan dan atau wisata ilmiah, serta wisata rekreasi. Potensi lain pariwisata Kota Subulussalam adalah dikembangkannya pariwisata berbasis tematik potensi di setiap wilayah yang selama ini belum secara optimal dikembangkan di Kota Subulussalam.

Pengembangan pariwisata Kota Subulussalam ke depan perlu perencanaan yang komprehensif, dengan mengidentifikasi potensi, jenis-jenis pariwisata, dan daya dukung terhadap destinasi wisata, serta sesuai dengan karakter Kota Subulussalam. Pengembangan wisata yang merubah bentang alam *(tidak berbasis sumberdaya alam)* sebaiknya tidak dikembangkan di Kota Subulussalam. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pariwisata Kota Subulussalam perlu ditingkatkan seperti pusat informasi pariwisata, pengembangan destinasi wisata, termasuk sistem transportasi menuju lokasi objek wisata.

4.3.5. Peningkatan kualitas birokrasi, tata kelola, dan pelayanan publik;

Kualitas tata kelola pemerintahan merupakan prasyarat tercapainya sasaran pembangunan daerah baik dalam jangka panjang, menengah, maupun pendek. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Perubahan yang disasar mengarah pada 8 (delapan) perubahan yaitu:

1) Mental Aparatur

2) Pengawasan

3) Akuntabilitas

4) Kelembagaan

5) Tata Laksana

6) SDM Aparatur

7) Peraturan Perundangan

8) Pelayanan Publik

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2014-2019 masih menyisakan berbagai tantangan ke depan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.

Beberapa permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki melalui pelaksanaan reformasi birokrasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Birokrasi belum sepenuhnya bersih dan akuntabel.

   Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

   a. Rendahnya komitmen pimpinan di tingkat pusat dan daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Meskipun Indeks Persepsi Korupsi membaik, tetapi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi belum memberikan hasil yang signifikan;

   b. Penyelenggaraan pemerintahan belum mencerminkan penyelenggaraan yang bersih dan bebas KKN Peran Aparat Pengawas Internal masih belum sepenuhnya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;

   c. Manajemen kinerja masih belum sepenuhnya diterapkan. Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah. Hal ini ditandai dengan lemahnya keterkaitan antara input anggaran dengan kinerja organisasi, dan orientasi kegiatan masih belum sepenuhnya berfokus pada hasil yang diharapkan dan dampak kemanfaatan yang ditimbulkan

terhadap masyarakat/publik baik secara langsung maupun tidak langsung;

d. Manajemen pembangunan daerah belum berjalan secara optimal Penetapan indikator kinerja daerah belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap.

e. Antara sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi. Manajemen pembangunan daerah masih belum menerapkan sistem reward dan punishment yang efektif;

2. Birokrasi belum efektif dan efisien.

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

a. Tata kelola pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan.

Pemerintah belum sepenuhnya mampu membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Pemerintah sebagai aktor kunci, belum sepenuhnya berperan dalam menciptakan sinergi pelaksanaan pembangunan, baik dengan masyarakat maupun dengan dunia usaha;

b. Lemahnya penegakan hukum

Penegakan hukum yang banyak diwarnai dengan perilaku koruptif dari aparat penegak hukum;

c. Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien

Masih banyak ditemukan kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, antara lain disebabkan oleh: belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik;

d. Kelembagaan birokrasi pemerintah masih belum efektif

Kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni 1) organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; 2)

fragmented dan tumpang tindih fungsi; dan 3) banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi over institution dan tumpang tindih tugas dan fungsi;

e. Penerapan e-government belum berjalan efektif dan efisien

Penerapan e-government belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi;

f. Manajemen SDM Aparatur masih belum berjalan secara efektif

Masih banyak terjadi penempatan ASN dalam jabatan yang tidak sesuai kompetensi, dan terjadi gap kompetensi pegawai yang ada dengan persyaratan kompetensi jabatan yang diduduki, sehingga kinerja/produktivitas belum optimal. Integritas PNS yang dinilai masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja. Manajemen kinerja pegawai belum berjalan sehingga berdampak pada belum dapat dilaksanakannya identifikasi kelompok pegawai yang potensial *(talent pool)* untuk kaderisasi kepemimpinan. Sistem pembinaan karier pegawai belum dapat memberikan kejelasan karier pegawai yang memiliki prestasi baik. Dengan belum berjalannya manajemen kinerja juga berdampak pada perencanaan pelatihan kepada pegawai yang berorientasi pada pengembangan kompetensi belum dapat direalisasikan hampir di seluruh jajaran instansi pemerintah. Perbaikan gaji *(remunerasi)* masih terkendala dengan sistem pembayaran pensiun yang masih bergantung penuh dengan APBN.

g. Inefisiensi penggunaan anggaran

Penggunaan masih dihadapkan pada beberapa kendala antara lain:

1) belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif;

2) sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, dan

3) besarnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan kualitas pelayanan atau dampak pembangunan yang dihasilkan;

h. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih belum mampu mendorong kinerja birokrasi

Penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan kepemimpinan pegawai ASN belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi serta memberikan kontribusi secara tidak langsung bagi kinerja organisasi.

3. Pelayanan publik masih belum memiliki kualitas yang diharapkan

Beberapa tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan ini antara lain:

a. Pelayanan perijinan masih belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien

Masih ada proses kerja birokrasi yang rumit dan kewenangan yang terpencar di berbagai instansi, membuat pelayanan perijinan memakan waktu yang lama dan biaya yang tinggi.

b. Praktek pungutan liar (pungli) dalam pelayanan perijinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi

Kejelasan biaya pelayanan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik, karena masih banyak biaya-biaya lain yang tidak resmi muncul dalam praktik pelayanan perijinan. Karena itu praktik pelayanan perijinan di Indonesia, tidak hanya memerlukan waktu yang lama tetapi juga biaya yang tinggi;

c. Praktek manajemen pelayanan publik belum dijalankan dengan baik

Berbagai aspek manajemen pelayanan publik sebagaimana digambarkan pada UU Pelayanan Publik, seperti standar pelayanan dan maklumat pelayanan, belum secara konsisten diimplementasikan. Masalah lainnya: rendahnya kompetensi petugas pelayanan, inovasi dan budaya pelayanan bermutu, serta penggunaan e-services sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan yang belum merata. Disamping

itu¸ masih terdapat fragmented dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang beorientasi pada kinerja yang tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat. Dampak yang terjadi apabila kualitas pelayanan publik semakin baik maka akan meningkatkan daya saing dan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Birokrasi pemerintahan di Kota Subulussalam dibanyak sector masih dirasakan kurang efisien. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntabel baik dari segi penyusunan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif, dan akuntabel, serta pelayanan publik belum optimal.

Prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik. Pemantapan akuntabilitas keuangan dan kinerja di Kota Subulussalam memang sudah meningkat. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Kota Subulussalam telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2018. Namun, opini WTP tersebut belum sepenuhnya mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset milik daerah belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum, serta sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan kedepan yang harus ditindaklanjuti diantaranya adalah peningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan dan pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja.

4.3.6. Penguatan nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami;

Isu nilai-nilai budaya masyarakat subulussalam yang islami merupakan isu yang bersifat lintas sektor/bidang, mulai dari pendidikan keagamaan, lingkungan masyarakat, ketakwaan, hingga budaya dan adat istiadat masyarakat. Ada banyak tugas berat Pemerintah Kota subulussalam untuk

menyelesaikan tantangan yang ada di bidang ini, mengingat isu ini terkait erat dengan *human ware* yang dalam hal ini adalah manusianya serta *soft ware* yang berarti nilai-nilainya, sehingga prosesnya pun dimulai dari membekali dengan pengetahuan, hingga menata sikap dan perilaku.

Modal dasarnya adalah budaya dan agama yang tumbuh kuat di masyarakat selama ini, sehingga dapat dijadikan pegangan dalam berperilaku di lingkungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan ibadah rutin masyarakat. Artinya, pendekatan yang dipilih dalam membangun diskursus pada isu ini harus dengan pendekatan spasial dan sektoral yaitu:

1. pendekatan spasial mengarah pada pemberdayaan komunitas dan berbasis wilayah, dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang ada di lokal, baik SDM, modal sosial, keuangan, infrastruktur pendukung serta sumber daya alam yang dimiliki.
2. pendekatan sektoral mengarah pada model pendekatan berbasis isu sektor, seperti kebudayaan, keagamaan, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi.

Pada isu ini, ada upaya melakukan internalisasi nilai-nilai kebaikan ke dalam masyarakat sehingga tercipta relasi yang harmonis, toleransi dan saling menghormati, kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman dan tentram, serta menciptakan SDM yang berkualitas.

4.3.7. Peningkatan kesejahteraan anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu isu strategis pembangunan. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dalam UU tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sementara dalam faktanya, masih begitu banyak masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga untuk mencapai hidup layak sangat susah. Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi para PMKS.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada peraturan di atas, Pemerintah Kota Subulussalam terus menggalang kekuatan untuk menangani PMKS. Sasaran atau objek dari program penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini yakni perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yakni anak yatim, fakir miskin, kaum dhuafa, disabilitas, dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

4.4. Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Berikut ini digambarkan keterkaitan antara hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Gambar ..... Keterkaitan antara Permasalahan dan Isu Strategis dalam RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KOTA SUBULUSSALAM

5.1. Visi

Visi merupakan sebuah harapan yang akan dicapai pada masa datang dalam periode tertentu yang dijabarkan kedalam misi, program dan kegiatan sebagai media pencapaian visi. Penyusunan visi dilatarbelakangi oleh kondisi yang berlaku pada suatu wilayah yang ditunjukkan secara jelas oleh beragam permasalahan beserta solusinya dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang dimiliki dan berkelanjutan. Berkelanjutan mengandung maksud agar visi selalu terkait dengan kondisi masa lalu yang telah dilaksanakan, karena pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan secara bertahap.

Visi RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 merupakan tranformasi dari visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) tahun 2015-2035, yang disesuaikan dengan tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi pada periode lima tahun mendatang. Visi RPJPD Kota Subulussalam adalah "***Kota Subulussalam Yang Damai, Mandiri, Sejahtera, Dan Islami"***, dan dokumen RPJMD Kota Subulussalam 2020-2024 merupakan tahapan kedua pada Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Subulussalam 2015-2035 yaitu ***"SDG's dan Agroindustri", dengan melakukan beberapa arah kebijakan seperti; 1) pengembangan agroindustri melalui peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dengan memperhatikan keserasian lingkungan, 2)*** Pemantapan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, sistem transportasi darat yang semakin baik, 3) Memperkuat sistem teknologi komunikasi, informasi dan telematika melalui pengembangan iptek dan peningkatan daya saing perlu dilakukan dalam rangka mendukung aktifitas perekonomian dan dunia usah, 4) Pembangunan bidang pendidikan telah semakin baik yang antara lain ditandai oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas dan berdaya saing, 5) Prioritas kesehatan ditujukan pada reformasi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui akreditasi dan standarisasi sehingga memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional, 6) mengimplementasikan syariat Islam dalam setiap aspek kehidupan sehingga menciptakan kerukunan dan harmonisasi dalam kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, visi dalam RPJM Kota Subulussalam merupakan abstraksi yang mengakomodasi visi dan misi kepala daerah terpilih yang telah disampaikan

pada DPR Kota Subulussalam pada saat pencalonannya, yaitu "**KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI".** Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kota Subulussalam Menjadi Daerah Yang Sejahtera, dalam hal ini terkandung cita-cita unluk mensejahterakan masyarakat Kota Subulussalam melalui program-program permberdayaan masyarakat dan peningkatan pemenuhan pelayanan infrastruktur masyarakat terutama di pedesaan sehingga masyarakat yang berada dalam lingkungan Kota Subulussalam dapat terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Disamping itu juga memuat program-program peningkatan kualitas dan mutu pendidikan baik dalam penguatan suprastruktur maupun infrastruktur dan membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Subulussalam serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu dan gratis.

2. Kota Subulussalam Menjdai Daerah Yang Islami, dalam visi ini terkandung cita-cita dan keinginan mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang lslami dengan menjalankan syari'ai lslam secara khaffah, untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keislaman baik farmal dan nan formal serta menumbuhkembangkan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakalan yang bernuansa islam dalam kehidupan masyarakat.

5.2. Misi

Dalam mewujudkan visi Kota Subulussalam tersebut ditempuh melalui 6 (enam) Misi pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas**

   Maksud dari misi ini adalah upaya yang akan dilakukan di bidang pendidikan yaitu berusaha untuk memajukan kualilas pendidikan di Kota Subulussalam. Untuk mencapai keinginan tersebut maka akan ditempuh dengan cara meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan sebagai tempat belajar dan mengajar, baik peningkatan pembangunan ruang kelas baru maupun pembangunan sekolah baru serta memenuhi peralatan yang menunjang kegiatan belajar agar terwujudnya kenyamanan dalam proses belajar dan pengajar. Peningkatan kapasitas tenaga pengajar yang profesional melalui kerjasama dengan universitas terkemuka untuk pemenuhan tenaga guru disetiap jenjang sekolah atau sederajat. Peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar serta memberikan beasiswa disemua jenjang pendidikan.

2. **Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas**

   Maksud dari misi ini" adalah berupaya unluk memberikan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat. Mewujudkan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan di semua pusat pelayanan kesehatan mulai dari RSUD sampai dengan Posyandu yang indah dan nyaman. Penambahan tenaga dokler spesialis dengan cara melakukan kerjasama atau kontrak kerja serta merekrut CPNS khusus farmasi bagi dokter spesialis. Peningkatan kualitas tenaga kesehatan agar memiliki kompelensi yang boik. Dalam memenuhi kekurangan tenaga medis akan dilakukan keriasama dengan universitas terkemuka untuk menempatkan tenaga-tenaga dokter muda yang akan menyelesaikan pendidikannya untuk memdharma baktikan tenaganya di Kota Subulussalam. Memberikan insentif/tombohon penghosilon khusus untuk para tenaga kesehatan yang berada di Desa-Desa terpencil yang besarannya setara dengan tunjangan jabatan pejabat struktural eselon III.a.

3. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat**

   Maksud dari Misi ini adalah upaya dalam menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan dasar bagi kepentingan masyarakat yang akan berdampak kepada pertumbuhon perekonomion daerah. Sarana dan prasarana dasar yang menjadi prioritas dalam hal ini adalah sarana dan prasarana transportasi jalan dan jembatan, perumahan dan permukiman, serta perdagangan. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi (jalan dan jembatan), diprioritaskan untuk membuka akses-akses jaringan jalan yang menuju ke setiap Desa dan antar kecamatan. Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, diprioritaskan pembangunan perumahan rakyat khususnya rumah-rumah kaum dhuafa dan masyarakat miskin dipadukan dengan pembuatan jalan-jalan lingkungan, drainase, kebutuhan air bersih, pengelolaan persampahan agar terwujudnya kenyamanaa dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat didukung oleh pembangunan prasarana jalan-jalan produksi perkebunan masyarakat. Tujuan dari pembangunan infrastruktur selain dari untuk kebermanfaatan bagi masyarakat juga ingin menjadikan Kota Subulussalam sebaga Pusat Perdagangan (Centered lrode) terutama di wilayah pantai barat selatan aceh, melalui pembangunan Pasar lnduk dan distributor pergudangon, membangun pertokoan semi permanen disepanjang jalan barat selatan aceh menuju sumatera utara yang berfungsi sebagai tempat

persinggahan mobil-mobil angkutan yang nantinya memiliki fungsi ganda sebagai penggerak roda perekonomion masyarakal dalam bidang usaha perdagangan. Khusus dalam rangka pembangunan sarana kelistrikan akan mengupayakan masuknya investor pembangkit listrik yang berbasis PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) maupun PLTA.

4. **Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik**

   Misi ke-4 ini adalah mengupayakan mensejahterakan masyarakat di wilayah Kota Subulussalam dengan memprioritaskan komoditi unggulan yang memiliki nilai ekonomis dan nilai pasar yang baik. Dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan atau kesejahteraan masyarakat maka akan diprioritaskan pembangunan perkebunan rakyat bagi masyarakat yang tergolong kategori miskin (golongan ekonomi lemah) ± 1Ha/Kepala keluarga dengan komoditi berupa kelapa sawit dan karet. Secara berkelanjutan pembangunan perkebunan rakyat terus dilakukan dengan melakukan pembinan kepada petani mulai dari penanaman sampai dengan berproduksi.

5. **Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Desa Secara Terpadu**

   Maksud Misi ke-5 adalah upaya dalam meningkotkon kapasitas aparatur pemerintahan daerah dan desa di lingkungan Kota Subulussalam. Menjadikan pemerintahan desa dapat menjadi desa swasembada. Dalam lima tahun kedepan pemerintah Kota Subulussalam akan mengupayakan dan memfungsikan kantor desa yang ada di wilayah Kkota subulussalam. Dalam mewujudkon reformasi birokrasi dilakukan dengan meningkolkon kopositos pemerintohon Kota Subulussala baik peningkolon kualitas aparatur, kemampuan pengelolaan keuangan daerah maupun penataan organisasi dan manajemen pemerintahan.

6. **Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam Melalui Penguatan Kembali Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat**

   Maksud dari misi ini adalah upaya dalam meningkatkan penerapan syori'at islam secara khaffah di lingkungon Kota Subulussalam. Untuk dapat berjalan dengan baik dan tegaknya syari'at islam ini diperlukan keterlibatan ulama, da'i-da'i, organisasi-organisasi islam dan masyarakat secara umum. Pembinaan keislaman bagi masyarakat akan dilakukan dengan cara pendekatan syiar-syiar islam seperti wajib membaca al-qur'an selesai maghrib serta shalat subuh bagi aparatur sipil negara, membangun akhlakul karimah bagi generasi muda. Dalam rangka menumbuhkembangkan kepedulian sosial di masyarakat maka akan dikembangkan baitul mal dengan membentuk cabang-cabang baitul mal di setiap

kecamatan dan desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran zakat, ifaq dan sadaqah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan Kota Subulussalam. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Subulussalam mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan rencana strategis (RENSTRA) perangkat kota.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020– 2024, dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini:

MISI 1: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

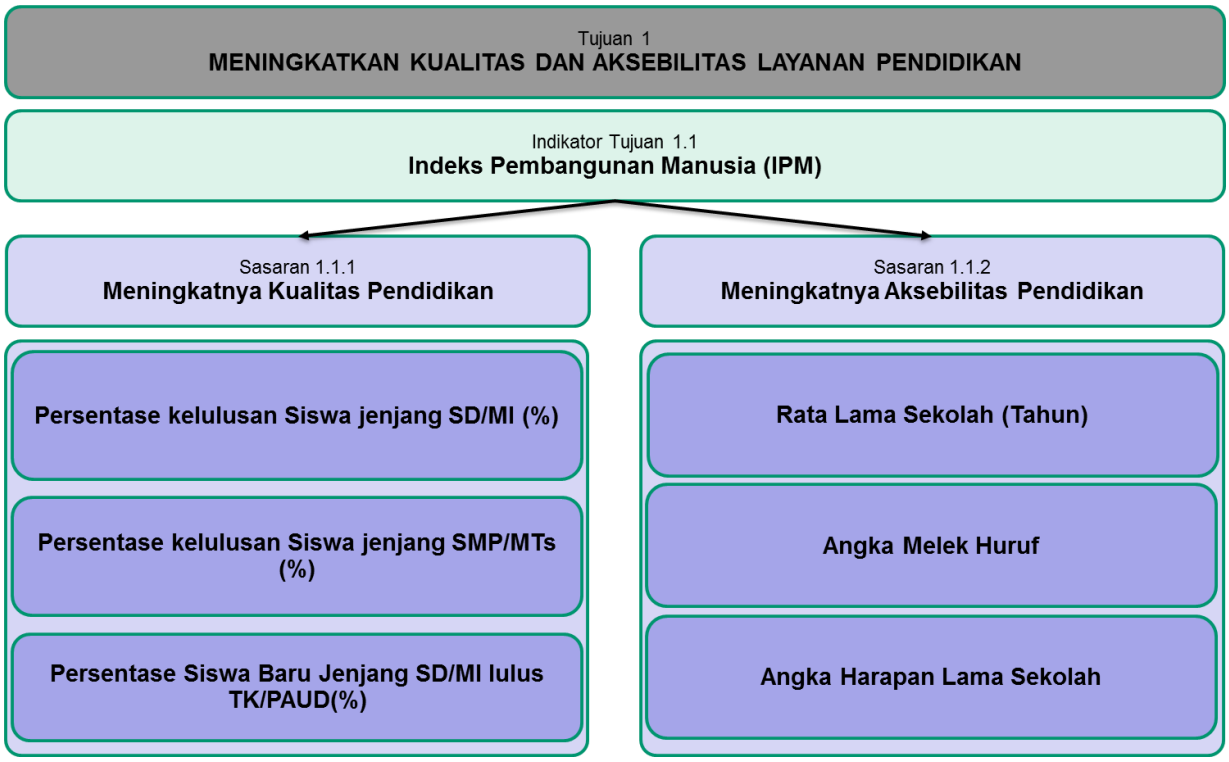

Gambar ..... Penjabaran Misi 1, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 1: Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian misi 1, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas adalah meningkatnya kualitas dan akses layanan pendidikan, yag dapat diukur dari indeks pembangunan manusi yang semakin maningkat

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat kota subulussalam adalah persentase kelulusan siswa pada jenjang SD/MI, persentase kelulusan siswa pada jenjang SMP/MTs, dan Persentase siswa baru jenjang SD/MI yang lulus TK/PAUD.
2. Meningkatnya aksebilitas pendidikan

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya aksebilitas pendidikan bagi masyarakat kota subulussalam adalah meningkatnya rata – rata lama sekolah, menurunnya angka melek huruf, dan meningkatnya angka harapan lama sekolah.

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

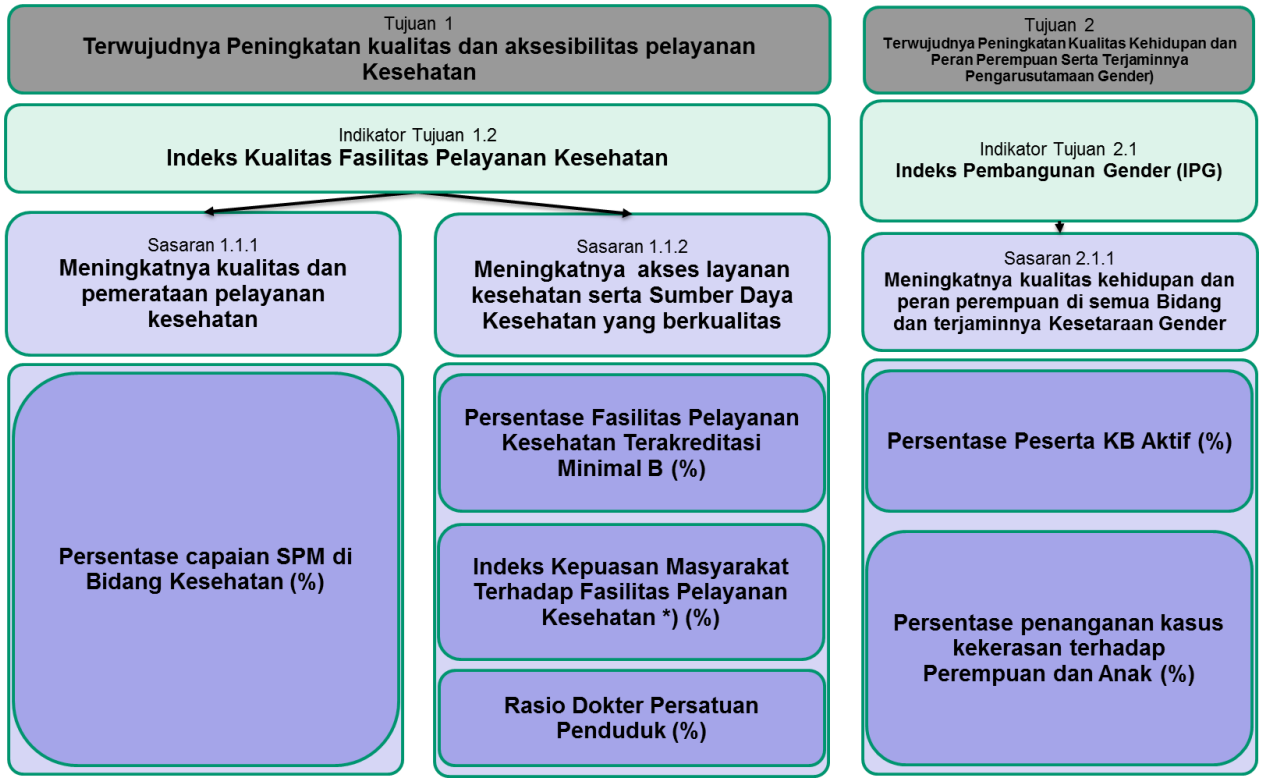

Gambar ..... Penjabaran Misi 2, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 2: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas

Dalam rangka pencapaian misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas yaitu :

1. Terwujutnya peningkatan Kualitas dan Aksebilitas kesehatan, yang dapat diukur dari indeks kualitas fasilitas pelayanan kesehatan,
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender, yang dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG).

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase capaian SPM di bidang kesehatan.
2. Meningkatnya akses layanan kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi minimal B, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rasio Dokter Persatuan Penduduk.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 1 sasaran yaitu Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase peserta KB Aktif dan Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

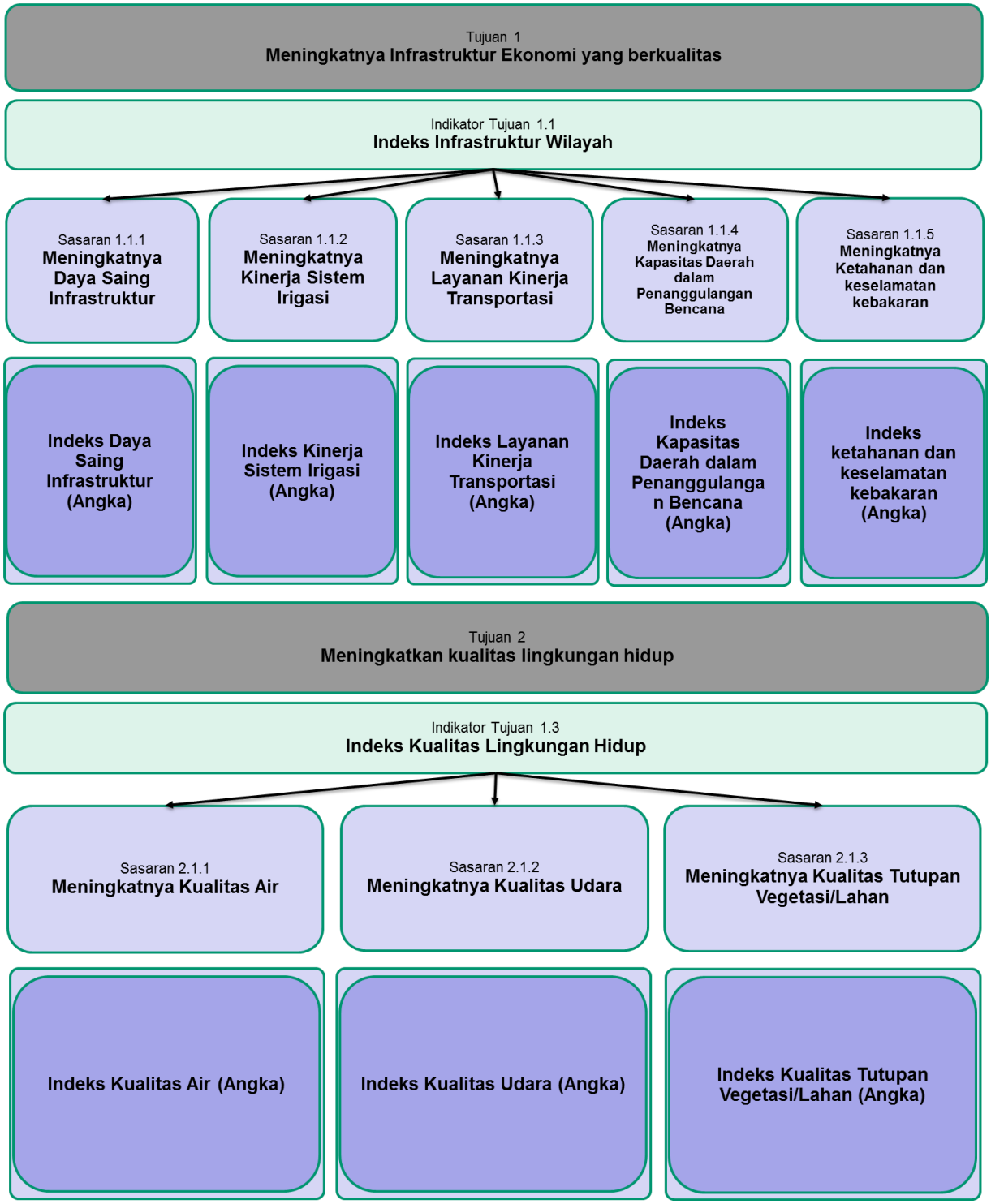

Gambar ..... Penjabaran Misi 3, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka pencapaian misi 3, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat yaitu :

1. Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas, yang dapat diukur dari Indeks Infrastruktur Wilayah,
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang dapat diukur dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur.
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Daya Saing Infrastruktur.
2. Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Kinerja Sistem Irigasi.
3. Meningkatnya Layanan Kinerja Transportasi
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Layanan Kinerja Transportasi.
4. Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
5. Meningkatnya Ketahanan dan keselamatan kebakaran
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran.

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 3 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Air.

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Kualitas Air
2. Meningkatnya Kualitas Udara

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Kualitas Udara
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi/Lahan

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi/Lahan

MISI 4: Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik

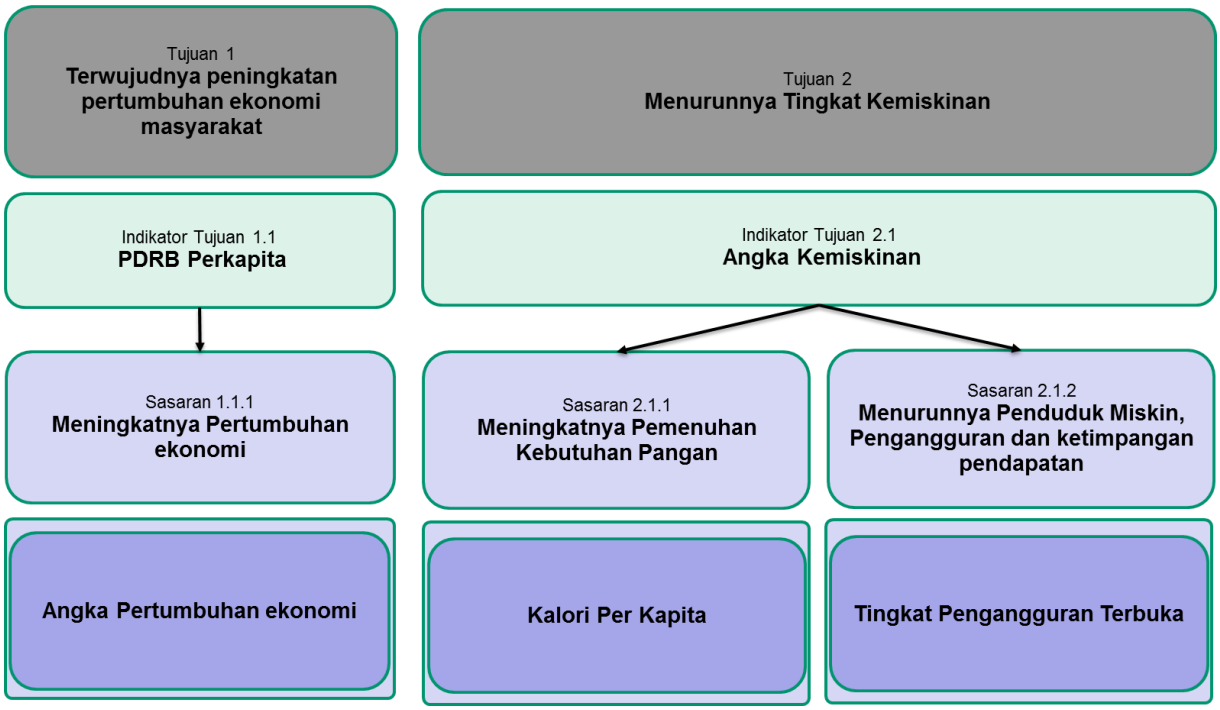

Gambar ..... Penjabaran Misi 4, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 4: Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik

Dalam rangka pencapaian misi 4, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang dapat diukur dari Pertumbuhan PDRB Perkapita
2. Menurunnya Tingkat Kemiskinan, yang dapat diukur dari Angka Kemiskinan.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 1 sasaran yaitu Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah angka pertumbuhan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan.
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah kalori per kapita.
2. Menurunnya Penduduk Miskin, Pengangguran dan ketimpangan pendapatan
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Tingkat Pengangguran Terbuka.

MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transaparan

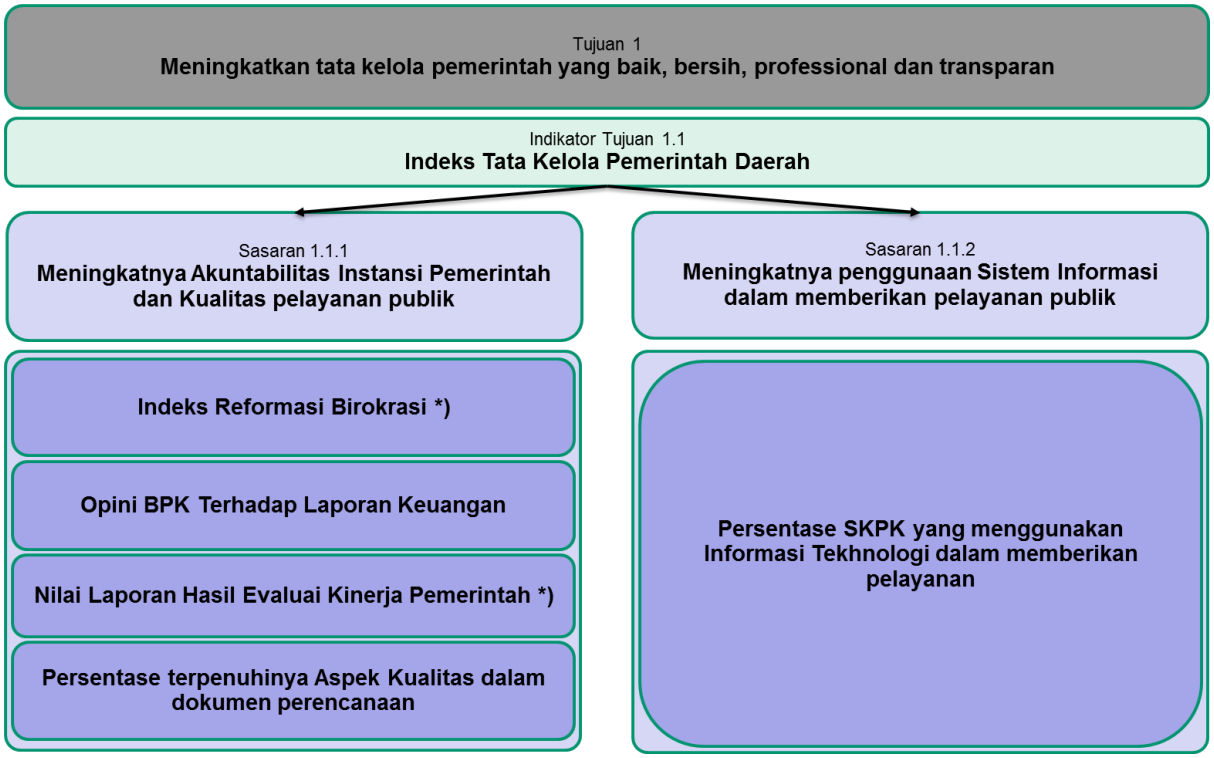

Gambar ..... Penjabaran Misi 5, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 5: Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transaparan

Dalam rangka pencapaian misi 5, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transaparan adalah Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional dan transparan.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik kota subulussalam adalah Indeks Reformasi Birokrasi, Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Nilai Laporan Hasil Evaluai Kinerja Pemerintah dan Persentase terpenuhinya Aspek Kualitas dalam dokumen perencanaan.

2. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi dalam memberikan pelayanan publik

   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi dalam memberikan pelayanan publik kota subulussalam adalah Persentase SKPK yang menggunakan Informasi Tekhnologi dalam memberikan pelayanan.

MISI 6: Mewujudkan penerapan syariat Islam melalui pengaturan Sistem Sosial yang Berbasis Islam dalam Kehidupan

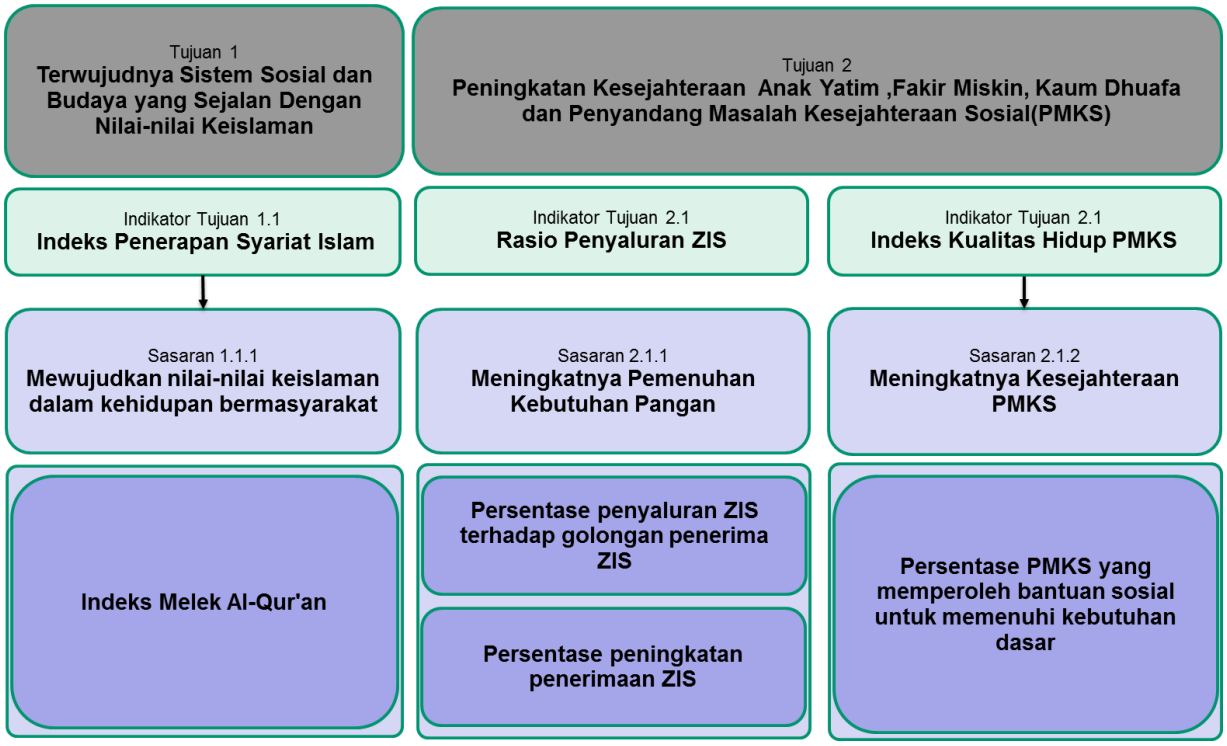

Gambar ..... Penjabaran Misi 6, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

MISI 5: Mewujudkan penerapan syariat Islam melalui pengaturan Sistem Sosial yang Berbasis Islam dalam Kehidupan

Dalam rangka pencapaian misi 6, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan dengan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah di terjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian

indikator kinerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

A. Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai dalam misi Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai ekonomi dan prospek pasar yang baik yaitu :

1. Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman, yang dapat diukur dari Indeks Penerapan Syariat Islam
2. Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim ,Fakir Miskin, Kaum Dhuafa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS), yang dapat diukur dari Rasio Penyaluran ZIS dan Indeks Kualitas Hidup PMKS.

B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 1 sasaran yaitu Mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat.

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Indeks Melek Al-Qur'an.

Untuk mencapai tujuan 2 sebagaimana ditetapkan diatas maka ada 2 sasaran yaitu:

1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan.
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS dan Persentase peningkatan penerimaan ZIS.
2. Meningkatnya Kesejahteraan PMKS
   Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait dengan sasaran tersebut diatas adalah Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tujuan Pembangunan Kota Subulussalam selama 2019-2024 ditetapkan berdasarkan 6 (enam) misi pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya sasaran pembangunan Kota Subulussalam ditetapkan sesuai dengan masing-masing tujuan pembangunan. Secara rinci keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diuraikan pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam, 2020-2024 Berdasarkan Misi

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Visi : KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI										
	Misi 1 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas										
1.1.		Meningkatkan Kualitas Dan Aksebilitas Layanan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,46	65,42	66,76	67,54	68,14	68,96	68,96
1.1.1.		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase kelulusan Siswa jenjang SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase kelulusan Siswa jenjang SMP/MTs	%	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Siswa Baru Jenjang SD/MI lulus TK/PAUD	%	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2.		Meningkatnya Aksebilitas Pendidikan	Rata Lama Sekolah	Tahun	7,66	7,88	8,12	8,54	8,92	9,24	9,24
			Angka Melek Huruf	%	96,78	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86	98,86
			Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,21	14,48	14,76	14,98	15,34	15,60	15,60
	Misi 2 : Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas										
2.1.		Terwujudnya Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan Kesehatan	Indeks Kualitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks	7	7,2	7,4	7,6	7,8	8	8

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2.1.1.		Meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Persentase capaian SPM di Bidang Kesehatan	%	48,02	48,78	49,26	49,54	49,82	60,56	60,56
2.1.2.		Meningkatnya akses layanan kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Minimal B	%	68,64	69,12	70,46	71,12	71,98	72,58	72,58
			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Indeks	7	7,2	7,4	7,6	7,8	8	8
			Rasio Dokter Persatuan Penduduk	Rasio	47	49	51	53	55	57	57
2.2		Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Terjaminnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	65	66	67	68	69	70	70
2.2.1		Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender	Persentase Peserta KB Aktif	%	72,71	72,48	74,12	76,24	78,26	80,14	80,14
			Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	%	14	20	26	32	38	42	42
	Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan masyarakat										
3.1.		Meningkatnya Infrastruktur Ekonomi yang berkualitas	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	31,00	31,00	33,33	35,73	37,84	41,87	41,87

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.1.1.		Meningkatnya Daya Saing Infrastruktur	Indeks Daya Saing Infrastruktur (Angka)	Indeks	27,67	27,67	28,36	29,07	30,52	31,29	31,29
3.1.2.		Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	N/A	10,00	12,50	15,00	20,00	25,00	25,00
3.1.3.		Meningkatnya Layanan Kinerja Transportasi	Indeks Layanan Kinerja Transportasi	Indeks	22,33	22,33	24,56	27,02	29,72	32,69	32,69
3.1.4.		Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks	N/A	25,00	26,25	27,56	28,94	30,39	30,39
3.1.5.		Meningkatnya Ketahanan dan keselamatan kebakaran	Indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran	Indeks	N/A	70,00	75,00	80,00	80,00	90,00	90,00
3.2.		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,69	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20	76,20
3.2.1.		Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Indeks	20,49	20,49	21,51	22,59	23,72	24,91	24,91
3.2.2.		Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Indeks	23,94	23,94	25,13	26,39	27,71	29,10	29,10
3.2.3.		Meningkatnya Kualitas Tutupan Vegetasi/Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Vegetasi/Lahan	Indeks	18,26	18,26	19,18	20,14	21,14	22,20	22,20
	Misi 4 : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik										
4.1.		Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat	PDRB Perkapita	%	1726,92	1807,12	1895,22	1987,52	2081,72	2176,92	2176,92

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
4.1.1.		Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi	Angka Pertumbuhan ekonomi	%	4,42	4,62	4,82	5,02	5,22	5,42	5,42
4.2.		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	17,95	15,95	13,95	11,95	9,95	7,95	7,95
4.2.1.		Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan	Kalori Per Kapita	Kkal	2101,57	2110	2120	2130	2140	2150	2150
4.2.2.		Menurunnya Penduduk Miskin, Pengangguran dan ketimpangan pendapatan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,25	6,6	5,95	5,3	4,65	4,0	4,0
	Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transaparan										
5.1.		Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, professional dan transparan	Indeks Tata Kelola Pemerintah Daerah	Indeks	5,43	5,62	5,68	5,73	5,77	6,21	6,21
5.1.1.		Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Kualitas pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi *)	Nilai	58,14	61,25	62,43	62,96	63,81	64,22	64,22
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Nilai Laporan Hasil Evaluai Kinerja Pemerintah *)	Nilai	C	C	CC	CC	B	BB	BB
			Persentase terpenuhinya Aspek Kualitas dalam dokumen perencanaan	%	41,62	43,84	55,68	62,73	81,96	90,58	90,58
5.1.2.		Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi dalam memberikan pelayanan publik	Persentase SKPK yang menggunakan Informasi Tekhnologi dalam memberikan pelayanan	%	32,68	38,61	42,83	50,68	58,4	60,5	60,5
				Indeks							
	Misi 6 : Mewujudkan penerapan syariat Islam melalui pengaturan Sistem Sosial yang Berbasis Islam dalam Kehidupan										
6.1.		Terwujudnya Sistem Sosial dan Budaya yang Sejalan Dengan Nilai-nilai Keislaman	Indeks Penerapan Syariat Islam	Indeks	68,14	72,28	73,61	74,86	76,12	77,86	77,86
6.1.1.		Mewujudkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Melek Al-Qur'an	Indeks	75,82	77,43	78,52	79,83	81,14	82,36	82,36
6.2.		Peningkatan Kesejahteraan Anak Yatim ,Fakir Miskin, Kaum Dhuafa dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)	Rasio Penyaluran ZIS	Rasio	93,84	94,63	95,96	96,72	97,88	98,63	98,63

No	Visi & Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi Awal	Target tahun ke-					Kondisi Akhir
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
			Indeks Kualitas Hidup PMKS	Indeks	5,84	5,68	5,76	5,93	6,12	6,28	6,28
6.2.1.		Penguatan Tatanan Ekonomi Berbasis Syariat	Persentase penyaluran ZIS terhadap golongan penerima ZIS	%	68,53	69,82	70,43	72,5	73,68	75,14	75,14
			Persentase peningkatan penerimaan ZIS	%	2,68	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	17,68
6.2.2.		Meningkatnya Kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	%	62,69	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20	76,20

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA SUBULUSSALAM

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasianserta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kota Subulussalam, 2020 – 2024 sebagaimana telah diuraikan pada BAB V sebelumnya, maka selanjutnya disusun Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan berdasarkan Misi Pembangunan Acehdan RPJP Kota Subulussalam priode Tahun 2015-2035. Arah kebijakan pembangunan Kota Subulussalam disusun berdasarkan tema untuk masing-masing tahun sebagai berikut:

1. Tema Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2020

   Pembangunan pada tahun 2020 diselenggarakan dengan tema ***"Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan daya saing SDM dan infrastruktur yang terintegrasi"***.

2. Tema Arah Kebijakan PembangunanTahun 2021

   Pembangunan pada tahun 2021 diselenggarakan dengan tema yaitu ***"Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas"***

3. Tema Arah Kebijakan PembangunanTahun 2022

   Pembangunan pada tahun 2022 diselenggarakan dengan tema yaitu ***"Pemantapan sumberdaya manusia dalam mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing"***.

4. Tema Arah Kebijakan PembangunanTahun 2023

   Pembangunan pada tahun 2023 diselenggarakan dengan tema yaitu ***"Mengembangkan industri pengolahan dan membuka kesempatan kerja kepada sumberdaya lokal yang berkualitas"***.

5. Tema PembangunanTahun 2024

   Pembangunan pada tahun 2024 diselenggarakan dengan tema yaitu ***"Mewujudkan Kota Subulussalam yang berdaya saing dalam kemandirian ekonomi yang inklusif"***.

Selanjutnya dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Kota Subulussalam maka strategi dan arah kebijakan Tahun 2020-2024 dapat di lihat secara rinci pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan, 2019-2024

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Misi 1 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas							
	1.1.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia Kota Subulussalam	1.1.1.	Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas pendidikan	1.1.1.1.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendididikan di Setiap Tingkatan	Memperbaiki sistem dan tatakola pendidikan di Kota Subulussalam
					1.1.1.2.	Pembangunan Sekolah dan Ruang Kelas Baru di Tiap Tingkatan	Menyediakan ruang kelas baru untuk penyelenggaraan proses belajar mengajar
					1.1.1.3.	Pembuatan Taman Kreasi Sekolah	Menyediakan taman pendidikan
					1.1.1.4.	Pembangunan Rumah Komisi dan Beasiswa untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi	
					1.1.1.5.	Memfasilitasi Terwujudnya Perguruan Tinggi di Kota Kubulussalam	
					1.1.1.6.	Penghargaan terhadap Guru Berprestasi + Beasiswa Pendidikan S-I dan SII	
					1.1.1.7.	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengajar	
					1.1.1.8.	Merekrut Tenaga Pengajar yang berkualitas melalui kerjasama dengan Universitas terkemuka untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
						yang profesional dan berkualitas	
			1.1.2.	Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	1.1.2.1.	Peningkatan SDM tenaga pendidik dan Kependidikan	
Misi 2: Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas							
	2.1.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia Kota Subulussalam	2.1.1.	Meningkatnya kualitas dan aksessibilitas kesehatan masyarakat	2.1.1.1.	Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis Mingguan Di Tiap Gampong	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kesehatan
					2.1.1.2.	Posyandu Keliling	
			2.1.2.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kesehatan	2.1.2.1.	Rekrutmen dan Penempatan Dokter Umum dan Dokter Spesialis	Meningkatkan dan memfasilitasi tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan
					2.1.2.2.	Menyediakan rumah singgah dan bantuan bagi pendamping pasien rujukan	
					2.1.2.3.	Menyiapkan lembaga rehabilitasi bagi korban narkoba	
					2.1.2.4.	Kartu Subulussalam Sehat	
					2.1.2.5.	Pembangunan infrastruktur unit pelayanan kesehatan sesuai dengan standar minimal	
					2.1.2.6.	Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan di daerah terpencil	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
Misi 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis Kesejahteraan Masyarakat							
	3.1.	Meningkatnya konektifitas antar wilayah	3.1.1.	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur dasar masyarakat	1. Pembangunan Jalan Yang Terintegrasi Antar Kecamatan, Jalan Menuju Pemukiman 2. Pembangunan Jaringan Air Bersih Keseluruh Wilayah Pemukiman		
			3.1.2.	Berkembangnya wilayah pertumbuhan baru			
			3.1.3.	Meningkatnya pelayanan pertanahan	Penyelesaian konflik sengketa tanah.		Mengoptimalkan penyelesaian konflik tenurial
	3.2.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	3.2.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana	Reaksi Cepat Tanggap darurat penanggulangan bencana alam		Meningkatkan sarana dan prasarana kebencanaan
			3.2.2.	Meningkatnya Pengendalian lingkungan hidup lestari			
Misi 4 : Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomi dan Prospek Pasar yang Baik							
	4.1.	Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat	4.1.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	4.1.1.1.	Membangun Gampong Ternak dan petani	Meningkatkan penerapan cara budidaya yang baik dan benar di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan
			4.1.2.	Meningkatnya kesempatan kerja	4.1.2.1.	Memberikan Pelatihan Dan Meningkatkan Bantuan Peralatan Usaha Bagi Pelaku UMKM	
					4.1.2.2.	Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)	
					4.1.2.3.	Mendatangkan tenaga Ahli Yang Kompeten Sebagai Instruktur Pelatih di BLK	

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
					4.1.2.4.	Mendatangkan Investor Dalam Pengelolaan Produc Turunan Kelapa Sawit	
			4.1.3.	Menurunnya kemiskinan	4.1.3.1.	Memberikan Pelatihan-Pelatihan Berbasis Kompetensi Seperti : Pelatihan Kerajinan Tangan, Pelatihan Bisnis Kuliner Dll	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi
Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Baru, Profesional dan Transparan							
	5.1.	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	5.1.1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	5.1.1.1.	Menyediakan ruang publik dengan Nama "Walikota Menyapa"	
					5.1.1.2.	Membangun Sistem Informasi Subulussalam Terpadu (SISDU)	
			5.1.2.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan dari sumber-sumber yang baru.		
			5.1.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Menciptakan aparatur pemerintah yang memiliki Inovasi dan sejahtera		
Misi 6 : Mewujudkan Penerapan Syari'at Islam melalui Penguatan Sistem Sosial yang Berbasis Islam dalam Kehidupan Masyarakat							
	6.1.	Mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam secara sempurna dan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	6.1.1.	Meningkatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas	6.1.1.1.	Penguatan pengamalan Al-Qur'an dan Al-Hadist dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan pendidikan Islami Dan pengarusutamakan Syariat Islam dalam pembangunan
					6.1.1.2.	Penyelenggaraan pendidikan Hafiz Al-Qur'an	Meningkatkan peran kelembagaan dalam pelaksanaan Syariat Islam

MISI	TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
			6.1.2.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Syariat	6.1.1.3.	Standarisasi kualitas pendidikan dayah	Mengimplementasikan standar kualitas pendidikan dayah
						Peningkatan intensitas Syiar Islam di daerah perbatasan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas Da'i perbatasan
			6.1.3.	Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya yang islami	6.1.1.5.	Tersedianya sarana dan prasarana keagamaan yang islami	Mendorong tersedianya infrastruktur keagamaan yang islami
						Pembangunan infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami	Meningkatkan fasilitas infrastruktur pendukung budaya dan pariwisata yang islami
						Pelaksanaan kegiatan seni budaya dan adat istiadat	Memajukan dan melestarikan seni dan budaya lokal yang Islami
	6.2.	Meningkatnya kesejahteraan anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa (PMKS)	6.2.1.	Meningkatnya kesejahteraan PMKS dan Disabilitas	6.2.1.1.	Peningkatan kesejahteraan PMKS dan disabilitas	1. Meningkatkan keterampilan PMKS 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pekerja sosial 3. Pemenuhan sarana dan prasarana lembaga kesejahteraan sosial 4. Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS 5. Pemenuhan kebutuhan kaum difabel
	6.3.	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan	6.3.1.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	6.3.1.1.	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan	1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam pembangunan 2. Pengarusutamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan

Tabel 6.2.
Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam, 2019-2024

No	Prioritas Pembangunan Kota Subulussalam
1	Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pembangunan sarana prasarana pelayanan dasar, Peningkkatan Mutu Pendidikan dan Kesehatan
2	Meningkatkan Konektifitas jalan antar wilayah dan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pada potensi unggulan daerah, mitigasi bencana dan kelestarian lingkungan hidup
4	Memperkuat tata pemerintahan melalui percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas dan penguasaan IPTEK
5	Memperkuat Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Islami dan Berbudaya

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM

Kerangka pendanaan pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 menjelaskan belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, serta kapasitas riil. Di samping itu, dijelaskan juga indikasi rencana program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan Tahun 2020-2024. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 7.1 dan 7.2. di bawah ini:

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**KAPASITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**			**751.008.987.392,06**	**779.442.816.529,00**	**812.801.133.587,29**	**848.362.839.426,07**	**886.267.114.829,14**
	I.a		Pendapatan	747.585.126.626,00	775.820.371.838,51	808.968.587.104,75	844.308.005.247,54	881.977.100.268,26
	I.b		Penerimaan Pembiayaan	3.423.860.766,06	3.622.444.690,49	3.832.546.482,54	4.054.834.178,53	4.290.014.560,88
5			**BELANJA DAERAH**	**751.008.987.392,06**	**779.442.816.529,00**	**812.801.133.587,29**	**848.362.839.426,07**	**886.267.114.829,14**
5	**1**		**BELANJA OPERASI**	**427.537.920.534,06**	**440.009.661.860,58**	**452.868.160.913,29**	**466.125.895.297,69**	**479.795.756.291,60**
5	1	1	Belanja Pegawai	165.595.915.552,06	169.239.025.694,21	172.962.284.259,48	176.767.454.513,19	180.656.338.512,48
5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	249.795.204.982,00	258.538.037.156,37	267.586.868.456,84	276.952.408.852,83	286.645.743.162,68
5	1	3	Belanja Bunga	0	0	0	0	0
5	1	4	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5	1	5	Belanja Hibah	8.750.300.000,00	8.808.927.010,00	8.867.946.820,97	8.927.362.064,67	8.987.175.390,50
5	1	6	Belanja Bantuan Sosial	3.396.500.000,00	3.423.672.000,00	3.451.061.376,00	3.478.669.867,01	3.506.499.225,94
5	**2**		**BELANJA MODAL**	**210.347.517.358,00**	**218.927.994.992,51**	**233.233.048.802,77**	**248.512.361.035,28**	**265.874.582.420,03**
5	2	1	Belanja Modal Tanah	4.400.000.000,00	4.500.000.000,00	4.800.000.000,00	5.000.000.000,00	5.200.000.000,00
5	2	2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.094.567.566,00	22.064.917.674,04	23.079.903.887,04	24.141.579.465,85	25.252.092.121,27
5	2	3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.099.507.047,00	48.634.979.934,59	51.309.903.830,99	54.131.948.541,69	57.109.205.711,48

Akun	Kelompok	Jenis	URAIAN AKUN	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	2	4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	132.280.705.512,00	137.177.687.304,09	147.414.226.083,98	158.530.269.846,98	171.524.218.648,34
5	2	5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.472.737.233,00	6.550.410.079,80	6.629.015.000,75	6.708.563.180,76	6.789.065.938,93
5	**3**		**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**
5	3	1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
5	**4**		**BELANJA TRANSFER**	**111.123.549.500,00**	**117.005.159.675,92**	**123.199.923.871,23**	**129.724.583.093,09**	**136.596.776.117,51**
5	4	1	Belanja Bagi Hasil	1.183.570.000,00	1.211.975.680,00	1.241.063.096,32	1.270.848.610,63	1.301.348.977,29
5	4	2	Belanja Bantuan Keuangan	109.939.979.500,00	115.793.183.995,92	121.958.860.774,91	128.453.734.482,46	135.295.427.140,22

Selanjutnya indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan Kota Subulussalam Tahun 2020-2024 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2020-2024

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01					URUSAN WAJIB																
01	01				Wajib Pelayanan Dasar																
01	01	01			PENDIDIKAN																
01	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			3.656.400.000		0		0		0		0		3.656.400.000	DISDIK
01	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			1.618.846.666		0		0		0		0		1.618.846.666	DISDIK
01	01	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			80.000.000		0		0		0		0		80.000.000	DISDIK
01	01	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			367.000.000		0		0		0		0		367.000.000	DISDIK
01	01	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persen			529.200.000		0		0		0		0		529.200.000	DISDIK
01	01	01	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Persen			383.600.000		0		0		0		0		383.600.000	DISDIK
01	01	01			Program Penunjang Urusanpemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		84.689.197.563		87.229.873.490		89.846.769.695		92.542.172.785		354.308.013.533	DISDIK

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	01	15		Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	Persen			2.996.330.000		0		0		0		0		2.996.330.000	DISDIK
01	01	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Kelulusan Pendidikan Tingkat SD/MI dan SMP/MTs	Persen			32.278.744.000		0		0		0		0		32.278.744.000	DISDIK
01	01	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Persentase angka melek huruf	Persen			194.400.000		0		0		0		0		194.400.000	DISDIK
01	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Patisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs	Persen			0		35.469.474.000		36.533.558.220		37.629.564.967		38.758.451.916		148.391.049.102	DISDIK
01	01	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)	Persen			497.500.000		0		0		0		0		497.500.000	DISDIK
01	01	04			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi Standar Kompetensi (PPG)				0		1.497.500.000		1.542.425.000		1.588.697.750		1.636.358.683		6.264.981.433	DISDIK
01	01	01	23		Program Pengembangan Data Informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan				100.634.848		0		0		0		0		100.634.848	DISDIK
01	01	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					200.000.000		0		0		0		0		200.000.000	DISDIK
01	01	01	27		Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi untuk anak Daerah	Persentase angka melanjutkan ke Perguruan Tinggi	Persen			216.000.000		0		0		0		0		216.000.000	DISDIK
01	01	01	29		Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)					12.300.000.000		0		0		0		0		12.300.000.000	DISDIK
01	01	02			KESEHATAN																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.179.400.000		0		0		0		0		2.179.400.000	DINKES
01	01	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				210.000.000		0		0		0		0		210.000.000	DINKES
01	01	02	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				35.000.000		0		0		0		0		35.000.000	DINKES
01	01	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					27.500.000		0		0		0		0		27.500.000	DINKES
01	01	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					30.000.000		0		0		0		0		30.000.000	DINKES
01	01	02	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				20.000.000		0		0		0		0		20.000.000	DINKES
01	01	02	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	DINKES
01	01	02			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		20.819.279.453		21.443.857.837		22.087.173.572		22.749.788.779		87.100.099.640	DINKES
01	01	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	%			934.387.000		0		0		0		0		934.387.000	DINKES
01	01	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%			12.237.439.000		0		0		0		0		12.237.439.000	DINKES
01	01	02	16		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase Stunting	%			1.250.000.000		0		0		0		0		1.250.000.000	DINKES

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000 Penduduk			219.846.000		0		0		0		0		219.846.000	DINKES
01	01	02	24		Program pelayanan kesehatan penduduk miskin					0		0		0		0		0		0	DINKES
01	01	02	25		Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Rasio puskesmas, poskesdes, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk			4.816.229.559		0		0		0		0		4.816.229.559	DINKES
01	01	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Peningkatan kepesertaan asuransi kesehatan	%			22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DINKES
01	01	02	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%			841.152.000		0		0		0		0		841.152.000	DINKES
01	01	02	37		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	%			1.149.000.000		0		0		0		0		1.149.000.000	DINKES
01	01	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam	Tahun			0		23.470.553.559		24.174.670.166		24.899.910.271		25.646.907.579		98.192.041.574	DINKES
01	01	02	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase PHBS di Masyarakat	%			126.000.000		0		0		0		0		126.000.000	DINKES
			20		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase Penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas				500.000.000		0		0		0		0		500.000.000	DINKES
01	01	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	/1000 Penduduk			0		826.000.000		850.780.000		876.303.400		902.592.502		3.455.675.902	DINKES
01	01	02	33		Program pembinaan dan pengembangan aparatur bidang kesehatan	Meningkatnya persentase aparatur kesehatan yang				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DINKES

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						memiliki kompetensi															
01	01	02	38		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya persentase SDM kesehatan yang memiliki kompetensi	%			54.000.000		0		0		0		0		54.000.000	DINKES
01	01	03			Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	/1000 Penduduk			0		176.500.000		181.795.000		187.248.850		192.866.316		738.410.166	DINKES
01	01	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				8.488.248.750		0		0		0		0		8.488.248.750	RSUD
01	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		13.488.251.152		13.892.898.687		14.309.685.647		14.738.976.217		56.429.811.702	RSUD
01	01	02	26		Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata					12.231.731.488		0		0		0		0		12.231.731.488	RSUD
01	01	02	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan					35.000.000.000		0		0		0		0		35.000.000.000	RSUD
01	02	02			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam	Tahun			0		49.231.731.488		50.708.683.433		52.229.943.936		53.796.842.254		205.967.201.110	RSUD
01	01	02	33		Program pembinaan dan pengembangan aparatur bidang kesehatan					112.400.000		0		0		0		0		112.400.000	RSUD
01	01	03			Program Peningkatan Kapasitas Suber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk	/1000 Penduduk			0		412.400.000		424.772.000		437.515.160		450.640.615		1.725.327.775	RSUD
01	01	03			PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
01	01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.960.600.000		0		0		0		0		1.960.600.000	PUPR

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				87.677.583		0		0		0		0		87.677.583	PUPR
01	01	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				32.000.000		0		0		0		0		32.000.000	PUPR
01	01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				80.000.000		0		0		0		0		80.000.000	PUPR
01	01	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					11.324.800		0		0		0		0		11.324.800	PUPR
01	01	03	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	PUPR
01	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		4.352.673.621		4.483.253.830		4.617.751.445		4.756.283.988		18.209.962.883	PUPR
01	01	03	15		Program pembangunan jalan dan jembatan	Panjang jalan Aceh dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM			87.972.968.251		0		0		0		0		87.972.968.251	PUPR
01	01	03	18		Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	KM			375.000.000		0		0		0		0		375.000.000	PUPR
01	01	03	22		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan					15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	PUPR
01	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	KM			0		96.362.968.251		99.253.857.299		102.231.473.017		105.298.417.208		403.146.715.775	PUPR
01	01	03	16		Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong					8.110.000.000		0		0		0		0		8.110.000.000	PUPR
01	03	06			Program Pengelolaan Sistem Drainase	Panjang Drainase Dalam kondisi Baik	KM			0		9.110.000.000		9.383.300.000		9.664.799.000		9.954.742.970		38.112.841.970	PUPR

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	03	25		Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya ketersediaan air baku				3.751.309.700		0		0		0		0		3.751.309.700	PUPR
01	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penduduk Dengan Akses Air Minum Layak	%			0		4.751.309.700		4.893.848.991		5.040.664.461		5.191.884.395		19.877.707.546	PUPR
01	01	03	17		Program pembangunan turap/talud/bronjong					2.802.000.000		0		0		0		0		2.802.000.000	PUPR
01	01	03	23		Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persentase alat berat dan dan sarana laboratorium kebinamargaan dalam kondisi baik				120.000.000		0		0		0		0		120.000.000	PUPR
01	01	03	24		Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau				1.275.200.000		0		0		0		0		1.275.200.000	PUPR
01	01	04			PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
01	01	03	33		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Menurunnya persentase lingkungan kumuh				3.536.166.000		0		0		0		0		3.536.166.000	PUPR
01	01	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Meningkatnya pengembangan pusat ekonomi strategis daerah				4.435.179.500		0		0		0		0		4.435.179.500	PUPR
01	04	04			Program Peningkatan Prasaranan, Sarana dan untilitas Umum (PSU)	Persentase Prasarana, satrana dan untilitas Umum Terpenuhi	%			0		8.971.345.500		9.240.485.865		9.517.700.441		9.803.231.454		37.532.763.260	PUPR
01	01	04	15		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan rumah layak huni				2.717.841.000		0		0		0		0		2.717.841.000	PUPR
01	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase pembangunan rumah layak huni				0		4.717.841.000		4.859.376.230		5.005.157.517		5.155.312.242		19.737.686.989	PUPR

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	05			KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
01	01	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	persen			549.650.550		0		0		0		0		549.650.550	KESBANGPOL
01	01	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen			94.840.000		0		0		0		0		94.840.000	KESBANGPOL
01	01	05	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	persen			40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	KESBANGPOL
01	01	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		persen			18.000.000		0		0		0		0		18.000.000	KESBANGPOL
01	01	05	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen			25.300.000		0		0		0		0		25.300.000	KESBANGPOL
01	01	05			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		1.448.785.143		1.492.248.697		1.537.016.158		1.583.126.643		6.061.176.641	KESBANGPOL
01	01	05	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	persen			86.627.000		0		0		0		0		86.627.000	KESBANGPOL
01	01	05	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		persen			20.900.000		0		0		0		0		20.900.000	KESBANGPOL
08	01	02			Program Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan	persen			0		107.527.000		110.752.810		114.075.394		117.497.656		449.852.860	KESBANGPOL

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						wawasan kebangsaan															
01	01	05	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persetase penurunan masalah penyakit masyarakat	persen			322.747.500		0		0		0		0		322.747.500	KESBAN GPOL
08	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persetase penurunan masalah penyakit masyarakat	persen			0		322.747.500		332.429.925		342.402.823		352.674.907		1.350.255.155	KESBAN GPOL
01	01	05	21		Program pendidikan politik masyarakat	Persentase peningkatakan pemahaman dan Partisipasi Masyarakat di bidang politik	persen			109.197.500		0		0		0		0		109.197.500	KESBAN GPOL
08	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase peningkatakan pemahaman dan Partisipasi Masyarakat di bidang politik	persen			0		109.197.500		112.473.425		115.847.628		119.323.057		456.841.609	KESBAN GPOL
01	01	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	persen			3.019.391.667		0		0		0		0		3.019.391.667	POL PP&WH
01	01	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	persen			44.816.666		0		0		0		0		44.816.666	POL PP&WH
01	01	05	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				18.200.000		0		0		0		0		18.200.000	POL PP&WH
01	01	05	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu Wajib)	persen			55.350.000		0		0		0		0		55.350.000	POL PP&WH
01	01	05	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	kegiatan	1		24.000.000		0		0		0		0		24.000.000	POL PP&WH

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	05	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	kegiatan	1		63.463.200		0		0		0		0		63.463.200	POL PP&WH
01	01	05			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		4.107.206.272		4.230.422.460		4.357.335.134		4.488.055.188		17.183.019.054	POL PP&WH
01	01	05	15		Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen			51.844.000		0		0		0		0		51.844.000	POL PP&WH
01	01	05	19		Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase peningkatan penyelesaian sengketa berbasis masyarakat	kegiatan	1		113.168.000		0		0		0		0		113.168.000	POL PP&WH
01	01	05	23		Program Pengawasan Syariat Islam	Menurunnya pelanggaran syariat islam	kegiatan	1		561.325.000		0		0		0		0		561.325.000	POL PP&WH
01	01	05	24		Program Pengamanan Penegakan PERDA	Persentase penurunan pelanggaran qanun dan kebijakan kepala daerah	kegiatan	1		45.536.000		0		0		0		0		45.536.000	POL PP&WH
01	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen			0		771.873.000		795.029.190		818.880.066		843.446.468		3.229.228.723	POL PP&WH
01	01	06			SOSIAL																
01	01	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Persen			766.600.000		0		0		0		0		766.600.000	DINSOS
01	01	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen			127.000.000		0		0		0		0		127.000.000	DINSOS
01	01	06	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan	Persen			32.500.000		0		0		0		0		32.500.000	DINSOS

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Penggunaan Atribut Pegawai															
01	01	06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen			55.000.000		0		0		0		0		55.000.000	DINSOS
01	01	06	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			85.300.000		0		0		0		0		85.300.000	DINSOS
01	01	06	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persen			23.250.000		0		0		0		0		23.250.000	DINSOS
01	01	05			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.527.125.856		2.602.939.632		2.681.027.821		2.761.458.655		10.572.551.964	DINSOS
01	01	06	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persaentase jumlah fakir miskin, KAT dan PMKS yang mendapat bantuan	Persen			2.608.750.000		0		0		0		0		2.608.750.000	DINSOS
01	01	06	15		Program pengembangan data/informasi		Persen			90.000.000		0		0		0		0		90.000.000	DINSOS
01	01	06	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase masalah sosial yang terselesaikan	Persen			1.376.670.000		0		0		0		0		1.376.670.000	DINSOS
01	01	06	18		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas dan eks Trauma yang mendapat bantuan	Persen			653.500.000		0		0		0		0		653.500.000	DINSOS
01	01	06	20		Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Persen			510.439.806		0		0		0		0		510.439.806	DINSOS
01	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persaentase jumlah fakir miskin, dan PMKS yang mendapat bantuan	Persen			0		5.239.359.806		5.396.540.600		5.558.436.818		5.725.189.923		21.919.527.147	

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	01	06	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial	Persen			154.256.000		0		0		0		0		154.256.000	DINSOS
01	01	06	22		Program Evaluasi pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Persentase capaian SPM Sosial	Persen			14.425.000		0		0		0		0		14.425.000	DINSOS
01	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial	Persen			0		168.681.000		173.741.430		178.953.673		184.322.283		705.698.386	
01	02				Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
01	02	01			TENAGA KERJA																
01	02	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				864.633.333		0		0		0		0		864.633.333	DISNAKER
01	02	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				57.500.000		0		0		0		0		57.500.000	DISNAKER
01	02	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				30.000.000		0		0		0		0		30.000.000	DISNAKER
01	02	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					32.700.000		0		0		0		0		32.700.000	DISNAKER
01	02	01	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				18.000.000		0		0		0		0		18.000.000	DISNAKER
01	02	01	19		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				40.500.000		0		0		0		0		40.500.000	DISNAKER

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.988.343.314		3.077.993.613		3.170.333.422		3.265.443.424		12.502.113.774	DISNAKER
01	02	01	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pesentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi				1.095.000.000		0		0		0		0		1.095.000.000	DISNAKER
02	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja	Pesentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen			0		1.095.000.000		1.127.850.000		1.161.685.500		1.196.536.065		4.581.071.565	DISNAKER
01	02	01	17		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tingkat pemutusan hubungan kerja				121.500.000		0		0		0		0		121.500.000	DISNAKER
02	07	05			Program Hubungan Industrial	Tingkat pemutusan hubungan kerja	Persen			0		121.500.000		125.145.000		128.899.350		132.766.331		508.310.681	DISNAKER
01	02	02			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
01	02	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran				575.908.975		0		0		0		0		575.908.975	DP3A&KB
01	02	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				211.783.333		0		0		0		0		211.783.333	DP3A&KB
01	02	02	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				35.925.000		0		0		0		0		35.925.000	DP3A&KB
01	02	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					55.400.000		0		0		0		0		55.400.000	DP3A&KB

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	02	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					9.000.000		0		0		0		0		9.000.000	DP3A&KB
01	02	02	20		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DP3A&KB
01	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.256.234.937		2.323.921.985		2.393.639.645		2.465.448.834		9.439.245.401	DP3A&KB
01	02	02	15		Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase Gampong Menuju Layak Anak				207.100.000		0		0		0		0		207.100.000	DP3A&KB
02	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					0		135.100.000		139.153.000		143.327.590		147.627.418		565.208.008	DP3A&KB
02	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Gampong Menuju Layak Anak	persen			0		72.000.000		74.160.000		76.384.800		78.676.344		301.221.144	DP3A&KB
01	02	02	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaa Pembangunan Responsif Gender (PPRG)				227.850.000		0		0		0		0		227.850.000	DP3A&KB
02	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Persentase SKPK yang melaksanakan Perencanaa Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	persen			0		227.850.000		234.685.500		241.726.065		248.977.847		953.239.412	DP3A&KB
01	02	02	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				58.500.000		0		0		0		0		58.500.000	DP3A&KB
02	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga					0		58.500.000		60.255.000		62.062.650		63.924.530		244.742.180	DP3A&KB
01	02	03			PANGAN																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				581.850.000		0		0		0		0		581.850.000	PANGAN
01	02	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				112.150.000		0		0		0		0		112.150.000	PANGAN
01	02	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				13.000.000		0		0		0		0		13.000.000	PANGAN
01	02	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				26.500.000		0		0		0		0		26.500.000	PANGAN
01	02	03	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					5.500.000		0		0		0		0		5.500.000	PANGAN
01	02	03	18		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				30.000.000		0		0		0		0		30.000.000	PANGAN
01	02	03	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				9.000.000		0		0		0		0		9.000.000	PANGAN
02	09	01			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		1.546.642.937		1.593.042.225		1.640.833.492		1.690.058.497		6.470.577.151	PANGAN
01	02	03	16		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Skor PPH Konsumsi	Skor			295.000.000		0		0		0		0		295.000.000	PANGAN
02	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Skor PPH Konsumsi	Skor			0		295.000.000		303.850.000		312.965.500		322.354.465		1.234.169.965	PANGAN
01	02	04			PERTANAHAN																
01	02	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				629.235.000		0		0		0		0		629.235.000	PERTANAHAN

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				54.000.000		0		0		0		0		54.000.000	PERTANAHAN
01	02	04	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				29.800.000		0		0		0		0		29.800.000	PERTANAHAN
01	02	04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				31.810.000		0		0		0		0		31.810.000	PERTANAHAN
01	02	04	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					165.000.000		0		0		0		0		165.000.000	PERTANAHAN
01	02	04	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				25.300.000		0		0		0		0		25.300.000	PERTANAHAN
02	10	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		1.983.818.710		2.043.333.271		2.104.633.269		2.167.772.268		8.299.557.518	PERTANAHAN
01	02	04	16		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk fasilitas publik dan Meningkatnya pengsertifikatan tanah masyarakat miskin				657.705.000		0		0		0		0		657.705.000	PERTANAHAN
02	10	10			Program Penata Gunaan Tanah	Cakupan Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Angka			0		657.705.000		677.436.150		697.759.235		718.692.012		2.751.592.396	PERTANAHAN
01	02	04	17		Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Sengketa dan konflik pertanahan yang diselesaikan				81.000.000		0		0		0		0		81.000.000	PERTANAHAN
02	10	04			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Kasus Pertanahan Yang tertangani	Persen			0		81.000.000		83.430.000		85.932.900		88.510.887		338.873.787	PERTANAHAN
01	02	04	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				4.661.200.000		0		0		0		0		4.661.200.000	PERTANAHAN

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Kebutuhan Tanah Untuk Pembangunan Terpenuhi	Persen			0		4.661.200.000		4.801.036.000		4.945.067.080		5.093.419.092		19.500.722.172	PERTANAHAN
01	02	05			LINGKUNGAN HIDUP																
01	02	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				723.804.940		0		0		0		0		723.804.940	DLHK
01	02	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				89.555.600		0		0		0		0		89.555.600	DLHK
01	02	05	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				8.400.000		0		0		0		0		8.400.000	DLHK
01	02	05	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					22.600.000		0		0		0		0		22.600.000	DLHK
01	02	05	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					0		0		0		0		0		0	DLHK
01	02	05	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				9.150.000		0		0		0		0		9.150.000	DLHK
01	02	05	25		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				31.936.500		0		0		0		0		31.936.500	DLHK
02	11	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.662.465.260		2.742.339.218		2.824.609.394		2.909.347.676		11.138.761.548	DLHK
01	02	05	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola				3.784.008.560		0		0		0		0		3.784.008.560	DLHK
01	02	05	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Optimalisasi kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks			70.000.000		0		0		0		0		70.000.000	DLHK

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							Kualitas Udara (IKU)														
02	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU)			0		3.854.008.560		3.969.628.817		4.088.717.681		4.211.379.212		16.123.734.270	DLHK
01	02	05	17		Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Persentase luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan				0		0		0		0		0		0	DLHK
01	02	05	19		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup					60.000.000		0		0		0		0		60.000.000	DLHK
01	02	05	21		Program pengembangan sarana dan prasarana pengamanan dan perlindungan hutan					175.000.000		0		0		0		0		175.000.000	DLHK
01	02	05	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah					11.850.000		0		0		0		0		11.850.000	DLHK
03	28	04			Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen			0		246.850.000		254.255.500		261.883.165		269.739.660		1.032.728.325	DLHK
01	02	06			ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																
01	02	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran				708.050.000		0		0		0		0		708.050.000	DUKCAPIL

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				99.900.000		0		0		0		0		99.900.000	DUKCAPIL
01	02	06	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				25.800.000		0		0		0		0		25.800.000	DUKCAPIL
01	02	06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu				52.500.000		0		0		0		0		52.500.000	DUKCAPIL
01	02	06	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	DUKCAPIL
01	02	06	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	DUKCAPIL
02	02	06			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.189.773.061		2.255.466.253		2.323.130.240		2.392.824.148		9.161.193.702	DUKCAPIL
01	02	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase terkelolanya database dan informasi, serta terfasilitasinya penguatan kapasitas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil				704.069.000		0		0		0		0		704.069.000	DUKCAPIL
02	12	03			Program Pencatatan Sipil					0		436.250.000		449.337.500		462.817.625		476.702.154		1.825.107.279	DUKCAPIL
02	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					0		255.000.000		262.650.000		270.529.500		278.645.385		1.066.824.885	DUKCAPIL
02	12	05			Program Pengelolaan Frofil Kependudukan					0		254.600.000		262.238.000		270.105.140		278.208.294		1.065.151.434	DUKCAPIL

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	07			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																
01	02	07	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Persen			655.000.000		0		0		0		0		655.000.000	DPMK
01	02	07	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen			125.200.000		0		0		0		0		125.200.000	DPMK
01	02	07	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			36.000.000		0		0		0		0		36.000.000	DPMK
01	02	07	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			18.000.000		0		0		0		0		18.000.000	DPMK
01	02	07	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen			28.500.000		0		0		0		0		28.500.000	DPMK
01	02	07	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kampung	Persen			13.500.000		0		0		0		0		13.500.000	DPMK
01	02	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Meningkatnya kualitas masyarakat kampung	Persen			877.500.000		0		0		0		0		877.500.000	DPMK
02	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				0		2.969.072.151		3.058.144.316		3.149.888.645		3.244.385.304		12.421.490.416	DPMK
01	02	07	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong yang dikembangkan	Persen			1.014.344.000		0		0		0		0		1.014.344.000	DPMK

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	07	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	Meningkatnya peran aktif perempuan dalam pembangunan kampung	Persen			54.000.000		0		0		0		0		54.000.000	DPMK
01	02	07	20		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan kampung	Persen			15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	DPMK
01	02	07	21		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	DPMK
01	02	07	23		Program Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kualitas masyarakat kampung	Persen			90.000.000		0		0		0		0		90.000.000	DPMK
02	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Tingkat Kemandirian Desa	Persen			0		1.198.344.000		1.234.294.320		1.271.323.150		1.309.462.844		5.013.424.314	DPMK
01	02	07	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kampong	Persen			966.000.000		0		0		0		0		966.000.000	DPMK
02	13	04			Program Administrasi Pemerintah Desa					0		966.000.000		994.980.000		1.024.829.400		1.055.574.282		4.041.383.682	DPMK
01	02	07	24		Program Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur kampung yang terintegrasi	Persen			180.000.000		0		0		0		0		180.000.000	DPMK
02	13	02			Program Penataan Desa					0		180.000.000		185.400.000		190.962.000		196.690.860		753.052.860	DPMK
01	02	08			PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
01	02	02	15		Program Keluarga Berencana					2.862.233.000		0		0		0		0		2.862.233.000	DP3A&KB
01	02	02	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri					85.660.000		0		0		0		0		85.660.000	DP3A&KB

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	14	02			Program Pengendalian Penduduk					0		2.947.893.000		3.036.329.790		3.127.419.684		3.221.242.274		12.332.884.748	DP3A&KB
01	02	02	20		Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR					45.800.000		0		0		0		0		45.800.000	DP3A&KB
01	02	02	25		Program keluarga sejahtera					53.100.000		0		0		0		0		53.100.000	DP3A&KB
02	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)					0		98.900.000		101.867.000		104.923.010		108.070.700		413.760.710	DP3A&KB
01	02	09			PERHUBUNGAN																
01	02	09	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			1.064.100.000		0		0		0		0		1.064.100.000	DISHUB
01	02	09	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			124.000.000		0		0		0		0		124.000.000	DISHUB
01	02	09	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			51.000.000		0		0		0		0		51.000.000	DISHUB
01	02	09	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	DISHUB
01	02	09	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Persen			19.000.000		0		0		0		0		19.000.000	DISHUB
01	02	09	15		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase peningkatan kondisi sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar	Persen			116.850.000		0		0		0		0		116.850.000	DISHUB

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	15	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.753.755.935		2.836.368.613		2.921.459.671		3.009.103.462		11.520.687.681	DISHUB
01	02	09	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Persen			129.888.000		0		0		0		0		129.888.000	DISHUB
01	02	09	17		Pogram peningkatan pelayanan angkutan	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	Persen			408.706.500		0		0		0		0		408.706.500	DISHUB
01	02	09	20		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase tingkat kendaraan bermotor yang laik operseional	Persen			31.500.000		0		0		0		0		31.500.000	DISHUB
01	02	09	20		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan					14.500.000		0		0		0		0		14.500.000	DISHUB
01	02	09	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	DISHUB
02	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	Persen			0		599.594.500		617.582.335		636.109.805		655.193.099		2.508.479.739	DISHUB
01	02	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
01	02	10	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran				622.170.900		0		0		0		0		622.170.900	DISKOMINFO
01	02	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				125.984.100		0		0		0		0		125.984.100	DISKOMINFO
01	02	10	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				19.500.000		0		0		0		0		19.500.000	DISKOMINFO

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	10	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur yang memenuhi kompetensi				54.000.000		0		0		0		0		54.000.000	DISKOMINFO
01	02	10	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laopran Wajib)				29.810.000		0		0		0		0		29.810.000	DISKOMINFO
01	02	10	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				18.500.000		0		0		0		0		18.500.000	DISKOMINFO
16	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.954.767.509		2.013.410.534		2.073.812.850		2.136.027.236		8.178.018.129	DISKOMINFO
01	02	10	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik				200.370.000		0		0		0		0		200.370.000	DISKOMINFO
01	02	10	17		Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase ASN terlatih Bidang TIK				142.480.000		0		0		0		0		142.480.000	DISKOMINFO
01	02	10	19		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik					64.350.000		0		0		0		0		64.350.000	DISKOMINFO
02	16	02			Program Informasi dan komunikasi Publik	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	Persen			0		200.370.000		206.381.100		212.572.533		218.949.709		838.273.342	DISKOMINFO
01	02	10	20		Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi Komunikasi dan Informatika	Persetase ketersediaan Aplikasi Sistem komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota				10.800.000		0		0		0		0		10.800.000	DISKOMINFO
01	02	10	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				27.000.000		0		0		0		0		27.000.000	DISKOMINFO

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persetase ketersediaan Aplikasi Sistem komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota	Persen			0		37.800.000		38.934.000		40.102.020		41.305.081		158.141.101	DISKOMINFO
01	02	11			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH																
01	02	11	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	%			819.266.667		0		0		0		0		819.266.667	INDAG& UKM
01	02	11	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	%			51.188.333		0		0		0		0		51.188.333	INDAG& UKM
01	02	11	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	%			51.650.000		0		0		0		0		51.650.000	INDAG& UKM
01	02	11	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	%			13.500.000		0		0		0		0		13.500.000	INDAG& UKM
01	02	11	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	%			17.550.000		0		0		0		0		17.550.000	INDAG& UKM
03	31	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.546.637.909		2.623.037.046		2.701.728.158		2.782.780.002		10.654.183.115	INDAG& UKM
01	02	11	15		Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Meningkatnya usaha kecil dan menengah untuk berbagai bidang usaha	%			524.000.000		0		0		0		0		524.000.000	INDAG& UKM
02	17	08			Program Pengembangan UMKM					0		524.000.000		539.720.000		555.911.600		572.588.948		2.192.220.548	INDAG& UKM

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	11	18		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya kelembagaan koperasi aktif	%			322.000.000		0		0		0		0		322.000.000	INDAG& UKM
02	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					0		322.000.000		331.660.000		341.609.800		351.858.094		1.347.127.894	INDAG& UKM
01	02	11	22		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Meningkatnya perkembangan usaha kecil menengah yang berbasis teknologi informasi	%			150.000.000		0		0		0		0		150.000.000	INDAG& UKM
02	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikri (UMKM)					0		150.000.000		154.500.000		159.135.000		163.909.050		627.544.050	INDAG& UKM
01	02	12			PENANAMAN MODAL																
01	02	12	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				578.414.583		0		0		0		0		578.414.583	DPMP2TSP
01	02	12	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				59.646.667		0		0		0		0		59.646.667	DPMP2TSP
01	02	12	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				30.600.000		0		0		0		0		30.600.000	DPMP2TSP
01	02	12	04		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				18.000.000		0		0		0		0		18.000.000	DPMP2TSP
01	02	12	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					32.805.000		0		0		0		0		32.805.000	DPMP2TSP
01	02	12	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				13.750.000		0		0		0		0		13.750.000	DPMP2TSP

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	12	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DPMP2TSP
02	18	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.975.151.319		2.034.405.859		2.095.438.034		2.158.301.175		8.263.296.387	DPMP2TSP
01	02	12	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (Milyar)	Milyar			23.985.000		0		0		0		0		23.985.000	DPMP2TSP
01	02	12	18		Program kerjasama informasi dengan mas media					4.400.000		0		0		0		0		4.400.000	DPMP2TSP
02	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya nilai investasi (PMA/PMDN) (Milyar)	Milyar			0		28.385.000		29.236.550		30.113.647		31.017.056		118.752.252	DPMP2TSP
01	02	12	18		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					8.820.000		0		0		0		0		8.820.000	DPMP2TSP
01	02	12	18		Program peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat				75.091.000		0		0		0		0		75.091.000	DPMP2TSP
02	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal					0		83.911.000		86.428.330		89.021.180		91.691.815		351.052.325	DPMP2TSP
01	02	12	19		Program pengembangan data/informasi					16.200.000		0		0		0		0		16.200.000	DPMP2TSP
02	18	06			Program Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Tingkat Ketersediaan Informasi Penanaman Modal Kota Subulussalam	Tersedia/ Tidak tersedia			0		16.200.000		16.686.000		17.186.580		17.702.177		67.774.757	DPMP2TSP
01	02	19			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																
01	02	13	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				708.150.000		0		0		0		0		708.150.000	DISPORA

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	02	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				227.000.000		0		0		0		0		227.000.000	DISPORA
01	02	13	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				24.000.000		0		0		0		0		24.000.000	DISPORA
01	02	13	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					21.000.000		0		0		0		0		21.000.000	DISPORA
01	02	13	16		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					8.000.000		0		0		0		0		8.000.000	DISPORA
01	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.150.862.484		2.215.388.359		2.281.850.009		2.350.305.510		8.998.406.361	DISPORA
01	02	13	20		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi				680.000.000		0		0		0		0		680.000.000	DISPORA
					Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	DISPORA
01	02	13	20		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan					325.000.000		0		0		0		0		325.000.000	
02	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang berprestasi	Orang			0		1.020.000.000		1.050.600.000		1.082.118.000		1.114.581.540		4.267.299.540	DISPORA
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Pembudayaan, Pembibitan dan Peningkatan Prestasi Olahraga	Cabor/ Kegiatan			540.000.000		0		0		0		0		540.000.000	DISPORA
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Prestasi Olahraga tingkat nasional dan internasional	cabor			5.710.000.000		0		0		0		0		5.710.000.000	DISPORA
01	02	13	20		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	DISPORA

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan					0		6.265.000.000		6.452.950.000		6.646.538.500		6.845.934.655		26.210.423.155	DISPORA
01	02	22			KEBUDAYAAN																
01	02	16			Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai budaya	Persen			70.000.000		0		0		0		0		70.000.000	DISDIK
02	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghargai nilai budaya	Persen			0		70.000.000		72.100.000		74.263.000		76.490.890		292.853.890	DISDIK
01	02	16			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai sejarah	Persen			848.000.000		0		0		0		0		848.000.000	DISDIK
02	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatkan pengelolaan cagar budaya dan nilai sejarah	Persen			0		848.000.000		873.440.000		899.643.200		926.632.496		3.547.715.696	DISDIK
01	02	16			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festifal/Tahun)	Persen			373.000.000		0		0		0		0		373.000.000	DISDIK
02	22	03			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festifal/Tahun)	Persen			0		373.000.000		384.190.000		395.715.700		407.587.171		1.560.492.871	DISDIK
01	02	23			PERPUSTAKAAN																
01	02	17	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				655.797.917		0		0		0		0		655.797.917	ARPUS
01	02	17	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				153.500.000		0		0		0		0		153.500.000	ARPUS
01	02	17	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan				56.075.000		0		0		0		0		56.075.000	ARPUS

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Penggunaan Atribut Pegawai															
01	02	17	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					7.550.000		0		0		0		0		7.550.000	ARPUS
01	02	17	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	ARPUS
01	02	17	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				20.000.000		0		0		0		0		20.000.000	ARPUS
02	23	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.150.223.729		2.214.730.441		2.281.172.354		2.349.607.525		8.995.734.049	ARPUS
01	02	17	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan					95.825.000		0		0		0		0		95.825.000	ARPUS
02	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah	orang			0		95.825.000		98.699.750		101.660.743		104.710.565		400.896.057	ARPUS
01	02	24			KEARSIPAN																
01	02	17	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan				50.300.000		0		0		0		0		50.300.000	ARPUS
02	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya SDM tenaga Perpustakaan dan Kearsipan				0		50.300.000		51.809.000		53.363.270		54.964.168		210.436.438	ARPUS
02					URUSAN PILIHAN																
02	03	25			KELAUTAN PERIKANAN																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	03	01	20		Program pengembangan budidaya perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton			1.191.177.000		0		0		0		0		1.191.177.000	DISTAN
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Ton			0		1.191.177.000		1.226.912.310		1.263.719.679		1.301.631.270		4.983.440.259	DISTAN
02	03	03	23		Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan					90.000.000		0		0		0		0		90.000.000	DISTAN
3	25	02			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap					0		90.000.000		92.700.000		95.481.000		98.345.430		376.526.430	
02	03	26			PARIWISATA																
01	02	13	06		Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah wunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Wisatawan			83.580.000		0		0		0		0		83.580.000	DISPORA
3	26	05			Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					0		83.580.000		86.087.400		88.670.022		91.330.123		349.667.545	DISPORA
01	02	13	17		Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah kawasan pariwisata strategis darah				430.150.000		0		0		0		0		430.150.000	DISPORA
3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					0		430.150.000		443.054.500		456.346.135		470.036.519		1.799.587.154	DISPORA
02	03	27			PERTANIAN																
02	03	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				1.259.750.000		0		0		0		0		1.259.750.000	DISTAN
02	03	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				115.500.000		0		0		0		0		115.500.000	DISTAN

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	03	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				58.500.000		0		0		0		0		58.500.000	DISTAN
02	03	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DISTAN
02	03	03	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					67.000.000		0		0		0		0		67.000.000	DISTAN
02	03	03	19		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				20.000.000		0		0		0		0		20.000.000	DISTAN
3	27	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		6.096.487.604		6.279.382.232		6.467.763.699		6.661.796.610		25.505.430.145	DISTAN
02	03	03	16		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It)				270.000.000		0		0		0		0		270.000.000	DISTAN
02	03	03	24		Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Indek yang diterima peternak (It)	Indeks			76.500.000		0		0		0		0		76.500.000	DISTAN
02	03	03	20		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Meningkatnya rasio penyuluh tersertifikasi				705.330.000		0		0		0		0		705.330.000	DISTAN
02	03	03	21		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				9.000.000		0		0		0		0		9.000.000	DISTAN
03	27	07			Program Penyuluh Pertanian	Meningkatnya indeks yang diterima petani (It)	Indeks			0		1.060.830.000		1.092.654.900		1.125.434.547		1.159.197.583		4.438.117.030	DISTAN
02	03	03	17		Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)	Ketersediaan energi dan protein perkapita (Kilo Kalori Per Hari)	Kkal/kapita/ hari			99.000.000		0		0		0		0		99.000.000	DISTAN
02	03	03	18		Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi jenis komoditi ekspor pertanian/perkebunan				22.500.000		0		0		0		0		22.500.000	DISTAN

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
01	03	03	18		Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Tingkat penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang diterapkan				2.916.600.000		0		0		0		0		2.916.600.000	DISTAN
02	03	03	24		Program peningkatan produksi peternakan					2.786.975.000		0		0		0		0		2.786.975.000	DISTAN
02	03	03	23		Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi daging dan telur				1.315.500.000		0		0		0		0		1.315.500.000	DISTAN
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengambangan Sarana Pertanian	Tingkat penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan yang diterapkan	Persen			0		26.140.575.000		26.924.792.250		27.732.536.018		28.564.512.098		109.362.415.366	DISTAN
02	03	03	15		Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					27.000.000		0		0		0		0		27.000.000	DISTAN
02	03	03	20		Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas	Ton			26.799.825.000		0		0		0		0		26.799.825.000	DISTAN
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengambangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian per komoditas Padi Jagung Kedelai Kelapa Sawit	Ton Ton Ton Ton Ton			0		31.826.825.000		40.047.052.907		49.172.474.820		60.210.583.753		181.256.936.481	DISTAN
02	03	03	22		Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Meningkatnya Status Kesehatan Hewan terhadap Agen Penyakit				58.500.000		0		0		0		0		58.500.000	DISTAN
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					0		58.500.000		60.255.000		62.062.650		63.924.530		244.742.180	DISTAN
02	03	05			ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	03	05	15		Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase pertambangan tanpa izin	persen	5		0		0		0		0		0		0	SEKDAKO
02	03	05	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	99		0		0		0		0		0		0	SEKDAKO
02	03	06			PERDAGANGAN																
01	02	11	15		Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK)	IKK (%)			120.000.000		0		0		0		0		120.000.000	INDAG&UKM
3	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting	Masyarakat mudah memenuhi kebutuhan barang pokok yang aman untuk dikonsumsi dan harga yang terjangkau	Persen			0		215.000.000		221.450.000		228.093.500		234.936.305		899.479.805	INDAG&UKM
3	30	06			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Jumlah timbangan/alat ukur yang sesuai standar	Persen			0		240.000.000		247.200.000		254.616.000		262.254.480		1.004.070.480	INDAG&UKM
01	02	11	18		Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terjaganya inflasi daerah	Persen			505.000.000		0		0		0		0		505.000.000	INDAG&UKM
3	27	04			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya persentase PDRB Perdagangan Kota Subulussalam	Persen			0		248.000.000		255.440.000		263.103.200		270.996.296		1.037.539.496	INDAG&UKM
03	30	05			Program Pengembangan Exsport	Meningkatnya kegiatan promosi produk hasil industri dan kerajinan Kota Subulussalam	Persen			0		380.000.000		391.400.000		403.142.000		415.236.260		1.589.778.260	INDAG&UKM
01	02	11	19		Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Terbinanya pedang kakilima dan asongan secara baik	Persen			492.000.000		0		0		0		0		492.000.000	INDAG&UKM
3	27	04			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya sarana perdagangan	Unit			0		814.000.000		838.420.000		863.572.600		889.479.778		3.405.472.378	INDAG&UKM

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
02	03	07			PERINDUSTRIAN																
01	02	11	16		Program pengembangan industri kecil dan menengah	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dari IKM	Orang			1.190.000.000		0		0		0		0		1.190.000.000	INDAG& UKM
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya jaringan sistem informasi IKM dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pemerintah Pusat	Persen			0		450.000.000		463.500.000		477.405.000		491.727.150		1.882.632.150	INDAG& UKM
02	03	08			TRANSMIGRASI																
01	02	01	20		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi				2.660.000.000		0		0		0		0		2.660.000.000	DISNAKER
3	32	04			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase pencapaian SPM sarana dan prasarana kawasan transmigrasi				0		2.660.000.000		2.739.800.000		2.821.994.000		2.906.653.820		11.128.447.820	DISNAKER
03					PENUNJANG URUSAN																
03	04	01			SEKRETARIAT DAERAH																
03	04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				7.956.826.334		0		0		0		0		7.956.826.334	SEKDAKO
03	04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				7.226.744.444		0		0		0		0		7.226.744.444	SEKDAKO
03	04	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				73.425.000		0		0		0		0		73.425.000	SEKDAKO

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				764.000.000		0		0		0		0		764.000.000	SEKDAKO
03	04	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu				578.170.000		0		0		0		0		578.170.000	SEKDAKO
04	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		22.877.598.885		23.563.926.852		24.270.844.657		24.998.969.997		95.711.340.390	SEKDAKO
03	04	01	18		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase produk hukum yang difasilitasi				533.955.000		0		0		0		0		533.955.000	SEKDAKO
03	04	01	18		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah					391.800.000		0		0		0		0		391.800.000	SEKDAKO
03	04	01	18		Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya kapasitas aparatur kampung				98.235.000		0		0		0		0		98.235.000	SEKDAKO
03	04	01	21		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga					150.000.000		0		0		0		0		150.000.000	SEKDAKO
03	04	01	19		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Penyerahan Aset dari Daerah Induk kepada Daerah Pemekaran				170.000.000		0		0		0		0		170.000.000	SEKDAKO
03	04	01	23		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi					689.250.000		0		0		0		0		689.250.000	SEKDAKO
03	04	01	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				158.725.000		0		0		0		0		158.725.000	SEKDAKO
03	04	01	27		Program Pelayanan Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi untuk anak Daerah	Tersedianya bea siswa pendidikan tinggi				70.000.000		0		0		0		0		70.000.000	SEKDAKO

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	01	02	00	00	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tingkat Kemiskinan Kota Subulussalam	Persen			0		2.261.965.000		2.329.823.950		2.399.718.669		2.471.710.229		9.463.217.847	SEKDAKO
03	04	01	15		Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Berkurangnya jumlah KK miskin di kawasan pesisir dan terpencil				100.000.000		0		0		0		0		100.000.000	SEKDAKO
03	04	01	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya WTP				120.654.000		0		0		0		0		120.654.000	SEKDAKO
03	04	01	17		Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan					5.000.000.000		0		0		0		0		5.000.000.000	SEKDAKO
03	04	01	16		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi				80.000.000		0		0		0		0		80.000.000	SEKDAKO
03	04	01	19		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				500.000.000		0		0		0		0		500.000.000	SEKDAKO
03	04	01	22		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunya dokumen perencanaan daerah	Dokumen			840.000.000		0		0		0		0		840.000.000	SEKDAKO
03	04	01	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan pembangunan daerah	Dokumen			416.410.000		0		0		0		0		416.410.000	SEKDAKO
03	04	01	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan				1.048.700.000		0		0		0		0		1.048.700.000	SEKDAKO
03	04	01	23		Program perencanaan pembangunan ekonomi					240.000.000		0		0		0		0		240.000.000	SEKDAKO
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam	Persen			0		8.345.764.000		8.596.136.920		8.854.021.028		9.119.641.658		34.915.563.606	SEKDAKO
03	04	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPK yang melaksanakan Perencanaa Pembangunan				99.000.000		0		0		0		0		99.000.000	SEKDAKO

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Responsif Gender (PPRG)															
03	04	01	17		Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah				1.400.000.000		0		0		0		0		1.400.000.000	SEKDAKO
03	04	01	20		Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik					140.000.000		0		0		0		0		140.000.000	SEKDAKO
03	04	01	21		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Tersedianya informasi pembangunan melalui media massa				777.000.000		0		0		0		0		777.000.000	SEKDAKO
04	01	04	00	00	Program Administrasi Umum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.416.000.000		2.488.480.000		2.563.134.400		2.640.028.432		10.107.642.832	SEKDAKO
03	04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran				247.720.000		0		0		0		0		247.720.000	KORPRI
03	04	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					29.000.000		0		0		0		0		29.000.000	KORPRI
03	04	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				18.000.000		0		0		0		0		18.000.000	KORPRI
04	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		542.372.390		558.643.562		575.402.869		592.664.955		2.269.083.775	KORPRI
03	04	01	15		Program pembinaan dan pengembangan aparatur					47.700.000		0		0		0		0		47.700.000	KORPRI
03	04	01	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga					45.000.000		0		0		0		0		45.000.000	KORPRI

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05	03	02			Program Kepegawaian Daerah					0		92.700.000		95.481.000		98.345.430		101.295.793		387.822.223	KORPRI
03	04	02			SEKRETARIAT DPRD																
03	04	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				4.665.860.150		0		0		0		0		4.665.860.150	SEKDPRK
03	04	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				661.799.516		0		0		0		0		661.799.516	SEKDPRK
03	04	02	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				290.198.000		0		0		0		0		290.198.000	SEKDPRK
03	04	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				960.300.000		0		0		0		0		960.300.000	SEKDPRK
03	04	02	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu				45.000.000		0		0		0		0		45.000.000	SEKDPRK
03	04	02	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah					0		0		0		0		0		0	SEKDPRK
03	04	02	20		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan					13.750.000		0		0		0		0		13.750.000	SEKDPRK
03	04	02	21		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				35.000.501		0		0		0		0		35.000.501	SEKDPRK
04	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		15.586.746.174		16.054.348.559		16.535.979.016		17.032.058.386		65.209.132.136	SEKDPRK

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	02	15		Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Qanun yang ditetapkan				1.989.076.000		0		0		0		0		1.989.076.000	SEKDPRK
4	02	02			Program Layanan dan Administrasi Keuangan					0		1.989.076.000		2.048.748.280		2.110.210.728		2.173.517.050		8.321.552.059	SEKDPRK
04	02	03			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Qanun yang ditetapkan				0		530.500.000		546.415.000		562.807.450		579.691.674		2.219.414.124	SEKDPRK
03	04	03			INSPEKTORAT DAERAH																
03	04	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat ketersediaan perlengkapan administrasi perkantoran	Persen			823.450.000		0		0		0		0		823.450.000	INSPEKTORAT
03	04	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			183.000.000		0		0		0		0		183.000.000	INSPEKTORAT
03	04	03	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			78.000.000		0		0		0		0		78.000.000	INSPEKTORAT
03	04	03	20		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	Persen			85.000.000		0		0		0		0		85.000.000	INSPEKTORAT
					Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persen			15.800.000		0		0		0		0		15.800.000	INSPEKTORAT
					Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	INSPEKTORAT
06	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		3.201.576.379		3.297.623.670		3.396.552.380		3.498.448.952		13.394.201.382	INSPEKTORAT

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen			1.939.950.000		0		0		0		0		1.939.950.000	INSPEKTORAT
					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Mengkatnya keterbukaan informasi kepada masyarakat	Persen			40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	INSPEKTORAT
					Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			230.000.000		0		0		0		0		230.000.000	INSPEKTORAT
06	01	02			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen			0		2.209.950.000		2.276.248.500		2.344.535.955		2.414.872.034		9.245.606.489	INSPEKTORAT
6	01	03			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pengaduan Yang ditindak lanjuti	Persen			0		215.000.000		221.450.000		228.093.500		234.936.305		899.479.805	INSPEKTORAT
03	04	04			PERENCANAAN																
03	04	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			1.227.250.000		0		0		0		0		1.227.250.000	BAPPEDA
03	04	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			233.750.000		0		0		0		0		233.750.000	BAPPEDA
03	04	04	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			13.000.000		0		0		0		0		13.000.000	BAPPEDA
03	04	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			23.000.000		0		0		0		0		23.000.000	BAPPEDA
03	04	04	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen			201.000.000		0		0		0		0		201.000.000	BAPPEDA

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	04	15		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persen			483.500.000		0		0		0		0		483.500.000	BAPPEDA
03	04	04	18		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Terhadap Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			18.500.000		0		0		0		0		18.500.000	BAPPEDA
03	04	04	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				18.500.000		0		0		0		0		18.500.000	BAPPEDA
05	10	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		4.486.281.937		4.620.870.395		4.759.496.507		4.902.281.402		18.768.930.241	BAPPEDA
03	04	04	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya perencanaan pembangunan daerah	Persen			770.000.000		0		0		0		0		770.000.000	BAPPEDA
05	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat Waktu	Persen			0		970.000.000		999.100.000		1.029.073.000		1.059.945.190		4.058.118.190	BAPPEDA
03	04	04	22		Program perencanaan pembangunan ekonomi	Persentase ketersediaan rencana pembangunan dibidang ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen			247.500.000		0		0		0		0		247.500.000	BAPPEDA
05	01	04			Program Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		347.500.000		357.925.000		368.662.750		379.722.633		1.453.810.383	BAPPEDA
03	04	04	23		Program perencanaan sosial dan budaya	Persentase ketersediaan rencana pembangunan daerah dibidang sosial dan budaya	Persen			337.500.000		0		0		0		0		337.500.000	BAPPEDA
03	04	04	29		Program perencanaan pembangunan Pemerintahan	Terlaksananya perencanaan pemerintah daerah				135.000.000		0		0		0		0		135.000.000	BAPPEDA
05	01	03			Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan rencana pembangunan Pemerintahan dan	Persen			0		572.500.000		589.675.000		607.365.250		625.586.208		2.395.126.458	BAPPEDA

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Pembangunan Manusia															
03	04	04	24		Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Persentase ketersediaan rencana pembangunan prasarana wilayah dan SDA	Persen			450.000.000		0		0		0		0		450.000.000	BAPPEDA
05	01	05			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan rencana pembangunan Infrastruktur dan Kewilyahan	Persen			0		550.000.000		566.500.000		583.495.000		600.999.850		2.300.994.850	BAPPEDA
03	04	05			KEUANGAN																
03	04	05	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			2.110.068.775		0		0		0		0		2.110.068.775	BPKD
03	04	05	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			238.500.000		0		0		0		0		238.500.000	BPKD
03	04	05	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			73.600.000		0		0		0		0		73.600.000	BPKD
03	04	05	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			90.230.000		0		0		0		0		90.230.000	BPKD
03	04	05	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Persentase kepuasan masyarkat	Persen			18.500.000		0		0		0		0		18.500.000	BPKD
03	04	05	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Persen			25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	BPKD
05	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		9.479.984.706		9.764.384.247		10.057.315.775		10.359.035.248		39.660.719.976	BPKD

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	05	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	Persen			416.000.000		0		0		0		0		416.000.000	BPKD
03	04	05	15		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya WTP Pemerintah Aceh	Persen			3.405.462.650		0		0		0		0		3.405.462.650	BPKD
03	04	05	17		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persetase tingkat capaian keuangan dan kinerja pemerintah desa	Persen			141.300.000		0		0		0		0		141.300.000	BPKD
05	02	02			Program Pengelolan Keuangan Daerah	Opini Terhadap Pemeriksaan Keuangan	WDP/WTP			0		28.088.061.660		28.930.703.510		29.798.624.615		30.692.583.354		117.509.973.138	BPKD
05	02	03			Program Pengelolan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Terkelolla Dengan Baik	Persen			0		327.260.000		337.077.800		347.190.134		357.605.838		1.369.133.772	BPKD
05	02	04			Program Pengelolan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan terhadap target pendapatan daerah	Persen			0		780.040.000		803.441.200		827.544.436		852.370.769		3.263.396.405	BPKD
03	04	06			KEPEGAWAIAN																
03	04	06	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			757.270.000		0		0		0		0		757.270.000	BKPSDM
03	04	06	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	Persen			50.000.000		0		0		0		0		50.000.000	BKPSDM
03	04	06	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai	Persen			22.014.000		0		0		0		0		22.014.000	BKPSDM
03	04	06	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Persen			604.200.000		0		0		0		0		604.200.000	BKPSDM

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	06	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					40.850.000		0		0		0		0		40.850.000	BKPSDM
03	04	06	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				30.000.000		0		0		0		0		30.000.000	BKPSDM
05	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.073.106.038		2.135.299.219		2.199.358.196		2.265.338.942		8.673.102.394	BKPSDM
03	04	06	15		Program pembinaan dan pengembangan aparatur					1.228.866.000		0		0		0		0		1.228.866.000	BKPSDM
03	04	06	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya minat investasi	Investor			10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	BKPSDM
05	03	02			Program Kepegawaian Daerah					0		1.238.866.000		1.276.031.980		1.314.312.939		1.353.742.328		5.182.953.247	BKPSDM
03	04	07			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																
05	04	02			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia					0		604.200.000		622.326.000		640.995.780		660.225.653		2.527.747.433	BKPSDM
03	04	07			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																
05	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang diterapkan dalam Pembangunan Daerah	Persen			0		535.000.000		551.050.000		567.581.500		584.608.945		2.238.240.445	BAPPEDA
03	04	08			KECAMATAN																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				399.200.000		0		0		0		0		399.200.000	KEC, LKB
03	04	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				110.000.000		0		0		0		0		110.000.000	KEC, LKB
03	04	08	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	KEC, LKB
03	04	08	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu				8.000.000		0		0		0		0		8.000.000	KEC, LKB
07	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.692.237.707		1.743.004.838		1.795.294.983		1.849.153.833		7.079.691.361	KEC, LKB
03	04	08	20		Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Terbentuknya pemerintahan kecamatan berbasis teknologi informasi				59.900.000		0		0		0		0		59.900.000	KEC, LKB
03	04	08	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				25.000.000		0		0		0		0		25.000.000	KEC, LKB
07	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					0		85.000.000		87.550.000		90.176.500		92.881.795		355.608.295	KEC, LKB
03	04	08	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				21.300.000		0		0		0		0		21.300.000	KEC, LKB
07	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0		34.500.000		35.535.000		36.601.050		37.699.082		144.335.132	KEC, LKB
03	04	08	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				30.000.000		0		0		0		0		30.000.000	KEC, LKB

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		30.000.000		30.900.000		31.827.000		32.781.810		125.508.810	KEC, LKB
03	04	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				367.500.000		0		0		0		0		367.500.000	KEC, PNG
03	04	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				77.000.000		0		0		0		0		77.000.000	KEC, PNG
03	04	08	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				17.500.000		0		0		0		0		17.500.000	KEC, PNG
03	04	08	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu				23.000.000		0		0		0		0		23.000.000	KEC, PNG
07	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.961.084.195		2.019.916.721		2.080.514.222		2.142.929.649		8.204.444.787	KEC, PNG
03	04	08	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	KEC, PNG
03	04	08	20		Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Terbentuknya pemerintahan kecamatan berbasis teknologi informasi				208.000.000		0		0		0		0		208.000.000	KEC, PNG
07	03	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					0		78.000.000		80.340.000		82.750.200		85.232.706		326.322.906	KEC, PNG
07	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0		48.000.000		49.440.000		50.923.200		52.450.896		200.814.096	KEC, PNG
03	04	08	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				77.000.000		0		0		0		0		77.000.000	KEC, PNG

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		37.000.000		38.110.000		39.253.300		40.430.899		154.794.199	KEC, PNG
03	04	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				379.200.000		0		0		0		0		379.200.000	KEC, RDG
03	04	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				51.500.000		0		0		0		0		51.500.000	KEC, RDG
03	04	08	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				46.750.000		0		0		0		0		46.750.000	KEC, RDG
03	04	08	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu				29.500.000		0		0		0		0		29.500.000	KEC, RDG
07	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.235.315.358		2.302.374.819		2.371.446.063		2.442.589.445		9.351.725.685	KEC, RDG
03	04	08	20		Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Terbentuknya pemerintahan kecamatan berbasis teknologi informasi				154.000.000		0		0		0		0		154.000.000	KEC, RDG
07	03	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					0		54.000.000		55.620.000		57.288.600		59.007.258		225.915.858	KEC, RDG
07	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0		42.000.000		43.260.000		44.557.800		45.894.534		175.712.334	KEC, RDG
03	04	08	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	KEC, RDG
07	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		40.000.000		41.200.000		42.436.000		43.709.080		167.345.080	KEC, RDG

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
03	04	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				463.500.000		0		0		0		0		463.500.000	KEC, SPK
03	04	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				41.000.000		0		0		0		0		41.000.000	KEC, SPK
03	04	08	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				37.000.000		0		0		0		0		37.000.000	KEC, SPK
03	04	08	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan tepat waktu				30.100.000		0		0		0		0		30.100.000	KEC, SPK
07	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		2.424.071.829		2.496.793.984		2.571.697.803		2.648.848.737		10.141.412.354	KEC, SPK
03	04	08	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				15.000.000		0		0		0		0		15.000.000	KEC, SPK
03	04	08	20		Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Terbentuknya pemerintahan kecamatan berbasis teknologi informasi				201.700.000		0		0		0		0		201.700.000	KEC, SPK
03	04	08	28		Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi tentang kecamatan				10.000.000		0		0		0		0		10.000.000	KEC, SPK
07	03	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					0		56.000.000		57.680.000		59.410.400		61.192.712		234.283.112	KEC, SPK
07	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0		46.000.000		47.380.000		48.801.400		50.265.442		192.446.842	KEC, SPK
03	04	08	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				75.000.000		0		0		0		0		75.000.000	KEC, SPK

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
07	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		65.000.000		66.950.000		68.958.500		71.027.255		271.935.755	KEC, SPK
03	04	08	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				413.100.000		0		0		0		0		413.100.000	KEC, STD
03	04	08	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				69.400.000		0		0		0		0		69.400.000	KEC, STD
03	04	08	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				37.500.000		0		0		0		0		37.500.000	KEC, STD
07	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.946.198.277		2.004.584.225		2.064.721.752		2.126.663.405		8.142.167.659	KEC, STD
03	04	08	18		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				40.000.000		0		0		0		0		40.000.000	KEC, STD
03	04	08	20		Program Peningkatan Sistem Pemerintahan Kecamatan	Terbentuknya pemerintahan kecamatan berbasis teknologi informasi				295.000.000		0		0		0		0		295.000.000	KEC, STD
07	03	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					0		40.000.000		41.200.000		42.436.000		43.709.080		167.345.080	KEC, STD
07	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					0		40.000.000		41.200.000		42.436.000		43.709.080		167.345.080	KEC, STD
07	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					0		33.000.000		33.990.000		35.009.700		36.059.991		138.059.691	KEC, STD
04					URUSAN KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN ACEH																
04	05	01			PENDIDIKAN ISLAM																

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				492.110.000		0		0		0		0		492.110.000	MPD
04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				412.260.000		0		0		0		0		412.260.000	MPD
04	05	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				21.600.000		0		0		0		0		21.600.000	MPD
04	05	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					16.300.000		0		0		0		0		16.300.000	MPD
04	05	01	18		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					27.000.000		0		0		0		0		27.000.000	MPD
04	05	01	22		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan				12.000.000		0		0		0		0		12.000.000	MPD
04	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.276.837.192		1.315.142.308		1.354.596.577		1.395.234.474		5.341.810.551	MPD
04	05	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan					416.006.500		428.486.695		441.341.296		454.581.535		468.218.981		2.208.635.006	MPD
04	05	01	24		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				25.000.000		25.750.000		26.522.500		27.318.175		28.137.720		132.728.395	MPD
04	05	01	24		Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Daerah					125.400.000		129.162.000		133.036.860		137.027.966		141.138.805		665.765.631	MPD
04	05	01			KEAGAMAAN																
04	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				845.000.000		0									DSI

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				96.083.333		0									DSI
04	05	01	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				9.000.000		0									DSI
04	05	01	04		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					30.000.000		0									DSI
04	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.947.703.414		2.006.134.516		2.066.318.552		2.128.308.108		8.148.464.591	DSI
04	05	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					36.000.000		37.080.000		38.192.400		39.338.172		40.518.317		191.128.889	DSI
04	05	01	18		Program Pendidikan Non Formal	Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam				7.339.481.094		9.559.665.527		9.846.455.493		10.141.849.157		10.446.104.632		47.333.555.903	DSI
04	05	01	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Jumlah tenaga keagamaan dan aparatur hukum yang memahami pelaksanaaan syari'at islam				12.627.226.524		12.922.372.785		13.310.043.969		13.709.345.288		14.120.625.647		66.689.614.212	DSI
04	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				858.747.500		0									MPU
04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				48.000.000		0									MPU
04	05	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				63.900.000		0									MPU
04	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				50.000.000		0									MPU

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	05	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu				25.500.000		0									MPU
04	05	01	16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					24.500.000		0									MPU
04	05	01	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				32.900.000		0									MPU
04	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.573.167.032		1.620.362.043		1.668.972.904		1.719.042.091		6.581.544.071	MPU
04	05	01	26		Program Peningkatan Peran dan Sumber Daya Ulama dalam Pembangunan	Persentase peran ulama dalam pembangunan aceh				808.825.000		833.089.750		858.082.443		883.824.916		910.339.663		4.294.161.772	MPU
04	05	01	27		Program Silaturahmi Umara dan Ulama	Meningkatnya Ukhwah Islamiah, Wathaniah, Insaniah dalam Beramal Ma'ruf Nahi Mungkar				187.627.500		193.256.325		199.054.015		205.025.635		211.176.404		996.139.879	MPU
04	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah				810.905.000		0									B.MAL
04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur				75.550.000		0									B.MAL
04	05	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				17.200.000		0									B.MAL
04	05	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi				4.000.000		0									B.MAL
04	05	01	06		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPK tepat waktu				25.850.000		0									B.MAL

KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMK (Tahun 2019)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Akhir RPJMK		Perengkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
04	05	01	22		Program peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat	Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPK tepat waktu				25.540.000		0									B.MAL
04	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.562.307.696		1.609.176.927		1.657.452.235		1.707.175.802		6.536.112.659	B.MAL
04	05	01	23		Program peningkatan pembinaan Syariat Islam	Persentase Pembayar ZIS				15.050.000		15.501.500		15.966.545		16.445.541		16.938.908		79.902.494	B.MAL
04	05	01	25		Program Peningkatan dan Pengembangan Pendidikan, Litbang dan Ekonomi Ummat					2.917.580.000		3.005.107.400		3.095.260.622		3.188.118.441		3.283.761.994		15.489.828.457	B.MAL
04	05	01			KEBUDAYAAN ACEH																
04	05	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				615.000.000		0									MAA
04	05	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur				75.000.000		0									MAA
04	05	01	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai				27.000.000		0									MAA
04	05	01	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					33.000.000		0									MAA
04	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	Persen			0		1.113.954.719		1.247.373.361		1.284.794.561		1.323.338.398		4.969.461.039	MAA
04	05	01	25		Program Pengelolaan Keragaman Budaya					209.000.000		215.270.000		221.728.100		228.379.943		235.231.341		1.109.609.384	MAA

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SUBULUSSALAM

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan IKU ditujukan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi SKPK. Penetapan IKU ditujukan untuk : 1) Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 2) Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diharapkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Selanjutnya, penetapan IKU dan IKD dapat dilihat pada Tabel 8.1 dan Tabel 8.2.

Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Subulussalam Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	2,5	3	3	3,5	3,5
	Jumlah Mustahiq Zakat	orang					
	Jumlah Dayah dan Balai Pengajian yang di bantu pemerintah	unit					
	Jumlah Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang di bantu pemerintah	unit	82	82	82	82	82
	Jumlah Hafiz Al-Qur'an	orang					
	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	persen					
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen					
	Persentase tindak lanjut temuan	persen	100	100	100	100	100
	Tingkat kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	2	3	3	4
	Persentase kesesuaian target perencanaan dan realisasi capaian pembangunan	persen	86,24	88,63	90,36	92,48	93,50
	Ketersediaan dokumen perencanaan daearah (RPJPD, RPJMD, RKPD, Resntra SKPD)	ada/tidak	tidak	ada	ada	ada	ada
	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	tidak	ada	ada	ada	ada
	Opini audit BPK atas laporan keuangan	TW/TMP/WDP/WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	kategori	T	T	T	T	T
	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	kategori	B	BB-	BB+	BB+	BB+
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	72,14	74,68	78,83	80,53	82,36
	Persentase penerapan PATEN pada kantor Kecamatan	persen	68,53	69,82	70,43	72,5	73,68
	Indek Pembangunan Kependudukan	Persen	0,411	0,418	0,421	0,426	0,430
	Jumlah Angka Kriminalitas	kasus					
	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan Lingkungan	persen					
	Rata-rata pendapatan perkapita pertahun	Juta Rupiah	21,21	21,86	22,34	23,14	23,92
	Persentase Penegakan Qanun dan Perbup	persen	96,28	97,13	97,84	98,22	98,50
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20
	Persentase Fakir Miskin dan anak yatim yang memperoleh bantuan sosial	persen					
	Persentase Desa terlayani PAUD	persen					
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen					
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen					
	angka melek huruf	persen	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86
	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	persen					
	Rata-rata lama sekolah	tahun	7,88	8,12	8,54	8,92	9,24
	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0	0	0	0	0

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	0	0	0	0	0
	APM SD/MI	persen	100	100	100	100	100
	APM SMP/MTs	persen	93,50	95,00	96,00	97,00	98,00
	APK SD/MI	persen	105,00	100	100	100	100
	APK SMP/MTs	persen	101,00	100	100	100	100
	Jumlah Dayah yang terakreditasi	dayah					
	persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	unit					
	Cakupan Balita Stunting	persen					
	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	63,86	63,90	63,93	63,95	64,00
	Persentase fasilitas kesehatan terakreditasi Minimal B	persen	69,12	70,46	71,12	71,98	72,58
	Luas lahan Produktif pertanian dan perkebunan	Ha					
	Produkvitas Padi atau bahan utama lainnya	Ton/Ha	3,88	3,90	3,92	3,94	3,96
	Produksi Komoditi Unggulan (Padi)	Ton	3,200	3.500	3.800	4.000	4.500
	Produksi perikanan	Ton	188,50	190,00	192,00	195,00	200,00
	Jumlah Industri pengolahan hasil Pertanian, perkebunan dan Perikanan	industri					
	Cakupan bina kelompok petani dan nelayan	persen					
	Persentase aparatur Gampong yang dibina	persen	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen					
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6,60	5,95	5,30	4,65	4,00
	Jumlah Destinasi Wisata Islami yang dikembangkan	Lokasi	1	1	1	1	1

Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
I	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	4,420	4,693	4,781	4,812	4,865	4,913	4,913
2	Pengendalian Laju inflasi	Persen	2,51	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
3	Pendapatan per kapita	Juta Rupiah	20,71	21,21	21,86	22,34	23,14	23,92	23,92
4	Indeks Gini	Indeks	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32
5	Penduduk dibawah garis kemiskinan	Persen	17,95	15,95	13,95	11,95	9,95	7,95	7,95
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	64,46	65,42	66,76	67,54	68,14	68,96	68,96
7	Angka melek huruf	Persen	96,78	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86	98,86
8	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	NA	72,14	74,68	78,83	80,53	82,36	82,36
9	Kategori Hasil Evaluasi LPPD	Kategori	T	T	T	T	T	T	T
10	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7,61	7,88	8,12	8,54	8,92	9,24	9,24
11	Angka usia harapan hidup	Tahun	63,84	63,86	63,90	63,93	63,95	64,00	64,00
12	Persentase balita gizi buruk	Persen							
13	Angka partisipasi angkatan kerja	Persen	64,25	64,63	64,90	65,23	65,25	65,50	65,50
14	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,25	6,60	5,95	5,30	4,65	4,00	4,00
15	Jumlah Pengangguran	Orang	2.289	2.100	2.000	1.900	1.800	1.700	1.700

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
16	Rasio penduduk yang bekerja	Persen	64,25	64,63	64,90	65,23	65,25	65,50	65,50
17	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persen	7,91	8,50	9,63	10,72	11,43	12,52	12,52
18	Perolehan Opini HasiL Pemeriksaan BPK	WDP/WTP/Disklamer	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Ketersediaan dan cadangan pangan Daerah	Persen							
20	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	21,54	20,89	20,27	19,66	19,07	18,50	18,50
21	Produksi Komoditi Unggulan (padi)	Ton	3.109,5	3,200	3.500	3.800	4.000	4.500	4.500
22	Produksi sektor perkebunan (Kakao)	Ton	388	400	420	450	460	500	500
23	Produksi sektor perkebunan (Sawit)	Ton	11.878	13.692	15.838	17.620	19.241	20.693	20.693
26	Produksi Daging Pertahun	Ton	55,48	57,00	58,60	60,20	61,80	63,00	63,00
27	Populasi Ternak Ruminansia Besar (sapi potong dan kerbau)	ekor	1.472	1.578	1.691	1.782	1.963	2.126	2.126
28	Populasi Ternak Ruminansia Kecil (Kambing dan domba)	ekor	7.208	7.566	8.121	8.635	8.912	9.521	9.521
29	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	19,26	19,45	19,58	19,64	19,83	20,53	20,53
30	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	Persen	13,99	20,80	20,90	21,00	21,10	21,20	21,20
31	Pertumbuhan Industri	Persen							
32	Kategori Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB-	BB+	BB+	BB+	BB+
II	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	906.431	933.624	961.633	990.482	1.020.196	1.050.802	1.050.802

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persen	45,92	46,62	47,60	48,21	48,73	49,52	49,52
3	Rata-rata Konsumsi Pangan Per Kapita	Persen	54,08	53,38	52,40	51,79	51,27	50,48	50,48
4	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,14	61,25	62,43	62,96	63,81	64,22	64,22
III	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
3.1	**Layanan Urusan Wajib Dasar**								
3.1.1	**Pendidikan**								
1	APK PAUD	persen	36,20	38,32	40,67	43,28	44,82	46,50	46,50
2	Persentase Desa terlayani PAUD	persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100
4	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen	86,23	89,13	92,70	94,68	98,14	100	100
6	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	persen	93,42	96,84	99,21	100	100	100	100
7	Angka Kelulusan SD/MI	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Angka Kelulusan SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	APK SD/MI	persen	110,70	105,00	100	100	100	100	100
10	APM SD/MI	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
11	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	persen	100	100	100	100	100	100	100
12	Angka Putus Sekolah SD/MI	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	APK SMP/MTs	persen	102,34	101,00	100	100	100	100	100
14	APM SMP/MTs	persen	92,49	93,50	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
15	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	persen	100	100	100	100	100	100	100
16	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	persen	0	0	0	0	0	0	0
17	angka melek huruf	persen	96,78	96,88	97,24	97,84	98,26	98,86	98,86
18	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SD yang memenuhi Standar Kompetensi	persen							
19	Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan jenjang SMP yang memenuhi Standar Kompetensi	persen							
20	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan dasar	Rasio							
21	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio							
22	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4	persen	100	100	100	100	100	100	100
23	Persentase Sekolah yang menjalankan MBS	persen							
24	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pendidikan	persen							
25	Persentase Asrama Mahasiswa yang memenuhi Sarana dan Prasarana	persen							
3.1.2	**Kesehatan**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan yang sesuai standar	Unit	6	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah Puskesmas yang sudah menjalankan Manajemen Puskesmas (MP)	Unit	6	6	6	6	6	6	6
3	Persentase Prevalensi Gizi Buruk	persen							
4	Persentase Prevalensi Gizi Kurang	persen							
5	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Kenyamanan Lingkungan Rumah Sakit	nyaman/ tidak nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	persen	94,00	100	100	100	100	100	100
8	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Persen	21,53	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	16,00
9	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	persen	100	100	100	100	100	100	100
10	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	/1000 Penduduk	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
11	Persentase Ketersediaan Sarana dan prasarana Rumah Sakit	persen	68,96	70,00	73,00	75,00	78,00	80,00	80,00
12	Persentase Sarana dan prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1.000 Kelahiran Hidup	11,39	10,00	8,00	7,00	6,00	5,00	5,00
14	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000 Kelahiran Hidup							
15	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	1,97	1,50	0,68	0,36	0,08	0,04	0,04
16	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000 Kelahiran Hidup	5	0	0	0	0	0	0
17	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	/100.000 Kelahiran Hidup	63,86	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.1.3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**								
1	Persentase Panjang jalan dalam kondisi Baik (> 50%)	Persen		31,17	36,5	40,25	45,75	52,35	52,35
2	Proporsi jumlah jembatan Kota dalam kondisi baik	unit		112	118	123	126	130	135
3	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen		12,20	15,30	20,50	30,50	40,20	40,20
4	Proporsi panjang jalan Kota yang direhab	km		10,63	12,42	13,98	15,66	16,31	17,50
5	Persentase embung dalam kondisi baik	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase penduduk berakses air minum	persen	8,58	8,63	8,96	9,22	9,84	10.50	10,50
7	Persentase IPLT terpelihara dan berfungsi dengan baik	persen		2,00	20,00	30,00	40,00	60,00	60,00
8	Persentase penanganan kawasan rawan banjir	persen							
9	Persentase sarana perkotaan yang dibangun	persen							
10	Persentase pembangunan infrastruktur perdesaan	persen							
11	Persentase Bangunan yang memiliki IMB	persen							
3.1.5	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**								
1	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio							
3.1.6	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Ancaman/deteksi dini Konflik yang tertangani	persen							
2	Tingkat Pencegahan Kriminalitas yang dilakukan	persen							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Persentase Penegakan Qanun dan Perwal	persen	95,14	96,28	97,13	97,84	98,22	98,50	98,50
4	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase masyarakat yang mendapat sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	persen							
6	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap politik	persen							
7	Resiko Pengurangan Bencana Daerah	Rendah/ Sedang/ Tinggi	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
8	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase pemulihan kawasan terdampak bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.1.7	**Sosial**								
1	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	persen							
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	persen	61,91	62,69	65,83	69,12	72,57	76,20	76,20
3	Persentase PMKS yang tertangani	persen							
4	Fakir Miskin (Pemberdayaan)	persen							
5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyandang Disabalitas yang memperoleh alat bantu	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
8	Jumlah Lembaga/Gampong yang memperoleh sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Gampong/Lembaga	82	82	82	82	82	82	82
3.2	**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**								
3.2.1	**Tenaga Kerja**								
1	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	persen							
2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	persen							
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	persen							
4	Rasio penduduk yang bekerja	persen							
5	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	persen							
6	Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen							
3.2.2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase Partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	persen	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK	persen	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28	14,28
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	persen	22,28	24,83	25,76	26,39	27,14	28,36	28,36
4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
5	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas bagi perempuan dan anak korban kekerasan	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Partisipasi angkatan kerja perempuan	persen	41,49	42,18	43,76	45,20	46,91	48,62	48,62
8	Tingkat ketersediaan data gender dan anak	persen	100	100	100	100	100	100	100
9	Jumlah Kecamatan Menuju Layak Anak	kecamatan	5	5	5	5	5	5	5
3.2.3	**Pangan**								
1	Ketersediaan Pangan utama	persen	14,00	20,00	26,00	32,00	38,00	42,00	42,00
2	Produktivitas Padi atau bahan pangan lainnya	Ton/Ha	3.85	3,88	3,90	3,92	3,94	3,96	3,96
3	Tingkat pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen							
3.2.4	**Pertanahan**								
1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persen							
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Penyelesaian izin lokasi	Persen							
3.2.5	**Lingkungan Hidup**								
1	Persentase sampah yang terkelola	persen		24,96	46,25	50,50	60,75	82,50	82,50
2	Cakupan penanganan Limbah Rumah Tangga dan instansi	persen		12,20	15,30	20,50	30,50	40,20	40,20

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks		62,69	65,82	67,25	69,50	71,25	71,25
4	Tersedianya dokumen RPPLH kota	Ada/ tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Tersedianya dokumen SLHD kota	Ada/ tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Persentase ruang terbuka hijau (RTH) yang ditangani	persen							
7	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	18,26	18,26	19,18	20,14	21,14	22,20	22,20
3.2.6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio							
2	Rasio bayi berakte kelahiran	rasio							
3	Ketersediaan database kependudukan	Ada/tidak ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah/belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**								
1	Jumlah Kawasan Potensi Gampong yang dikembangkan	kawasan							
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	kelompok	82	82	82	82	82	82	82
3	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	persen							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
4	Persentase aparatur Gampong yang dibina	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kelompok PKK yang dibina	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Kelompok PKK yang dibina	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase PKK aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Posyandu aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**								
1	Laju Pertumbuhan penduduk	persen	1,89	1,83	1,76	1,68	1,62	1,59	1,59
2	Rata rata Jumlah Anak Per Keluarga	orang	1,52	1,56	1,63	1,80	2,00	2,00	2,00
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan usia 15-19 Tahun (ASFR)	/1000	0	0	0	0	0	0	0
4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	persen	0,39	0,23	0,19	0	0	0	0
5	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap Desa /Kelurahan	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Rata rata Usia Kawin Pertama Wanita	usia	21	21	21	22	22	22	22
7	Persentase Remaja yang terkena Infeksi Menular (IMS)	persen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rasio Akseptor KB	Rasio	72,00	72,68	73,34	74,12	74,86	75,50	75,50
9	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	persen	72,00	72,68	73,34	74,12	74,86	75,50	75,50
10	Persentase Penggunaan Kontrasepsei Jangka Panjang (MKJP)	persen	14,00	14,35	14,89	15,12	15,46	15,80	15,80
11	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam	persen	55,60	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00	60,00

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	pembangunan daerah melalui kampung KB								
3.2.9	**Perhubungan**								
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	44.862	44.000	45.000	46.500	48.600	51.000	51.000
2	Rasio ijin trayek	Rasio	0,000332	0,000332	0,000332	0,000335	0,000335	0,000339	0,000339
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	Uji	476	482	589	642	670	800	800
4	Jumlah Terminal Bis	Unit	3	3	3	3	3	3	3
5	Persentase Layanan Angkutan darat	Persen	25,00	25,00	28,00	30,00	40,00	50,00	50,00
6	Persentase kepemilikan kir angkutan umum	persen	90,00	92,00	95,00	97,00	100,00	100,00	100,00
7	pemasangan rambu	persen	20,00	34,00	60,00	88,00	88,00	90,00	90,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Rasio	0,00025	0,00031	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042	0,00042
9	jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org/Kg	58.943	87.654	176.549	180.932	255.720	257.720	257.720
10	jumlah orang/ barang melalui terminal pertahun	Org/Kg	44.862	44.000	45.000	46.500	48.600	51.000	51.000
3.2.10	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Peningkatan akses informasi dan Pemenuhan Hak Atas Informasi Publik	persen	83,62	85,50	87,50	89,50	91,00	93,00	100
2	Jumlah ASN terlatih Bidang TIK	Orang							
3	Jumlah Berita yang di Publikasikan di Media Massa	berita							
3.2.11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase UKM aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan jumlah produk UKM yang kompetitif	produk							
3	Persentase koperasi aktif	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.2.12	**Penanaman Modal**								
1	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	persen							
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp (Milyar)							
3	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Investor							
3.2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**								
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen							
2	Persentase Wirausaha Muda	persen							
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	persen							
4	Jumlah Atlet berprestasi	Atlet							
5	Jumlah Prestasi olahraga	Prestasi							
6	Rasio jumlah Lapangan olahraga terhadap jumlah penduduk	/1.000 Penduduk							
3.2.14	**Statistik**								
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Buku ”Kota Subulussalam dalam angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.2.16	**Kebudayaan**								
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Festival							
2	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	buah							
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	buah							
4	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah							
3.2.17	**Perpustakaan**								
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	4.322	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	13.125	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	13.900
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	/1.000 Penduduk							
4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	eksemplar	13.125	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	13.900
5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	Orang							
3.2.18	**Kearsipan**								
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang							
3.3	**Layanan Urusan Pilihan**								
3.3.1	**Kelautan dan Perikanan**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	186,90	188,50	190,00	192,00	195,00	200,00	200,00
2	Konsumsi Ikan	persen							
3	Persentase ketersediaan data/informasi perikanan	persen							
3.3.2	**Pariwisata**								
1	PAD Pariwisata	persen							
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	persen							
3	Kunjungan Wisata	Wisman	45.026	48.000	50.000	51.000	52.000	53.000	53.000
3.3.3	**Pertanian**								
10	Produksi sektor pertanian (Kelapa sawit)	Ton	11.878	13.692	15.838	17.620	19.241	20.693	20.693
14	Jumlah wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) yang mendapat pembinaan	WKPP	5	5	5	5	5	5	5
15	Persentase hewan ternak terserang bakteri	persen	0	0	0	0	0	0	0
16	Persentase hewan ternak terserang Parasit	persen	0	0	0	0	0	0	0
17	Persentase hewan ternak terserang Virus	persen	0	0	0	0	0	0	0
18	Produksi Daging Ruminansia	Ton	22,8	23,50	24,30	25,10	25,90	26,50	26,50
19	Produksi Daging Non Ruminansia	Ton	32,68	33,50	34,30	35,10	35,90	36,50	36,50
21	Tingkat penerapan teknologi untuk peningkatan produksi hasil Peternakan	persen	58,14	59,50	61,00	63,00	64,00	65,00	65,00
3.3.4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Persentase pertambangan tanpa izin	persen							
2	Persentase rumah tangga pengguna listrik	persen	117	117	121	125	127	130	130
3	Rasio ketersediaan daya listrik	rasio							
3.3.5	**Perdagangan**								
1	Tingkat pengawasan terhadap perlindungan konsumen	persen							
2	Jumlah kawasan perdagangan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik	pasar							
3	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	persen							
3.3.6	**Perindustrian**								
1	Cakupan bina kelompok industri berbasis teknologi	persen							
2	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen							
3	Jumlah Sentra industri potensial yang dikembangkan	sentra industri							
3.3.7	**Transmigrasi**								
1	Persentase transmigrasi swakarsa	persen	0	0	0	0	0	0	0
3.4	**PENUNJANG URUSAN**								
3.4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**								
1	Persentase Fasilitasi Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pengaduan masyarakat yang tertangani	persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Jumlah Produk hukum yang di terbitkan	dokumen							
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	NA	72,14	74,68	78,83	80,53	82,36	82,36
3.4.2	**SEKRETARIAT DPRD**								
1	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRK	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Qanun, dan Fungsi anggaran dalam dokumen RPJMK maupun dokumen RKPK	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Qanun dan Anggaran kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran Setwan DPRK	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.4.3	**INSPEKTORAT DAERAH**								
1	Persentase tindak lanjut temuan	persen	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentas pelanggaran Pegawai	persen							
3	Jumlah Temuan BPK	kasus							
4	Jumlah Auditur yang dilatih	orang							
5	Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah	persen							
3.4.4	**Perencanaan**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMK yang telah ditetapkan dengan Qanun	Ada/ tidak	tidak	tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan Perbup	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Tersedianya sistem perencanaan secara elektronik	Ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK kedalam RKPK	persen	0	0	87,68	91,26	95,88	98,17	98,17
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPK kedalam APBK	persen	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase konsistensi perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan pelaksanaan pembangunan	persen	96,83	100	100	100	100	100	100
8	Persentase konsistensi perencanaan Pembangunan Keistimewaan, kependudukan dan SDM dengan pelaksanaan pembangunan	persen	97,52	100	100	100	100	100	100
9	Persentase konsistensi perencanaan Pembangunan Sarpras dengan pelaksanaan pembangunan	persen	96,14	100	100	100	100	100	100
10	Ketersediaan masterplan kawasan rawan bencana	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3.4.5	**Keuangan**								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP/WDP/TW/TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SiLPA terhadap APBD	persen	0,45	0,45	0,46	0,47	0,47	0,48	0,48

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	persen	20,69	20,83	21,00	21,00	22,00	23,00	23,00
4	Penetapan APBK	Tepat waktu /Tidak Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
5	Persentase pengadaan barang dan Jasa melalui ULP	persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Jumlah SKPK yang menyusun laporan keuangan tepat waktu dan baik	SKPK	43	43	43	43	43	43	43
7	Persentase Aset daerah dalam kondisi baik dan tidak bermasalah	persen	98,25	100	100	100	100	100	100
3.4.6	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**								
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen							
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural	persen							
3	Jumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) pada instansi Pemerintah yang di lelang	jabatan	0	0	43	0	0	0	43
3.4.7	**Penelitian dan pengembangan**								
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	93,62	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	98,00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	Persen	82,68	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	89,00
3.4.8	**Kecamatan**								
1	Persentase gampong dengan pertanggungjawaban keuangan baik dan tepat waktu	persen	94,30	95,00	96,00	97,00	98,00	100	100
3.5	**Keistimewaan dan Kekhususan Aceh**								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan	KINERJA AWAL RPJMK 2019	TARGET KINERJA					KINERJA AKHIR RPJMK
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
3.5.1	**Pendidikan Islam**								
1	Persentase tenaga pendidik dayah yang memenuhi standar pendidikan dayah	persen							
2	persentase dayah yang menerapkan standar manajemen dayah	persen							
3	Jumlah sarana dan prasarana Dayah/BP yang dibantu Pemeritah	Dayah/BP							
3.5.2	**Keagamaan**								
1	Jumlah sarana dan prasarana Ibadah yang dibantu Pemeritah	Mesjid/ Meunasah							
2	Persentase pembinaan dan pengembangan Syariat Islam	persen							
3	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Sadaqah	Rp (Milyar)	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	3,5
3	Jumlah Mustahiq Zakat	orang							
4	Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Syari'at Islam yang diselesaikan	persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Junlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	Kegiatan							
3.5.3	**Kebudayaan**								
1	Jumlah Adat dan Budaya Daerah yang dilestarikan	Jumlah							

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Subulussalam Tahun 2019–2024 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum, isu-isu strategis, Visi dan Misi pembangunan. Di samping itu, RPJMK Subulussalam Tahun 2019-2024 juga memuat arah kebijakan, kerangka pendanaan, indikator kinerja utama dan indikator kinerja pembangunan. RPJM ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 merupakan pedoman bagi pemerintahan dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun, serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).

Keberhasilan Pemerintahan Kota Subulussalam periode 2019-2024 dalam mewujudkan Visi "**KOTA SUBULUSSALAM SEJAHTERA DAN ISLAMI**" perlu dukungan dan komitmen dari semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam khususnya dan Aceh pada umumnya.

9.1 Pedoman Transisi

Pada masa berakhirnya periode Pemerintahan Kota Subulussalam (2019-2024) dan belum adanya dasar dokumen perencanaan tahun berikutnya, maka RPJMK ini dapat dijadikan pedoman pada masa transisi untuk menyusun program dan kegiatan prioritas sampai tersedianya dokumen RPJM Kota Subulussalam periode berikutnya. Hasil evaluasi target dan capaian program menjadi pedoman untuk penyusun dokumen perencanaan di masa transisi, terutama untuk program-program prioritas yang capaiannya belum memenuhi target. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dasar dokumen perencanaan.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJM Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif, dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam agar melaksanakan program-program dalam RPJMK Tahun 2019-2024 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK) yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas/Badan/Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam masing-masing, yang berpedoman pada RPJMK Tahun 2019-2024, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas/Badan/Bagian (Renja-SKPK) di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Dokumen RPJMK Tahun 2019-2024 ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) mulai tahun 2020 hingga 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMK Tahun 2019-2024, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Subulussalam melakukan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMK Tahun 2019-2024 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJM Gampong, maka Bappeda Kota Subulussalam berkewajiban melaksanakan fasilitasi, pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap Pemerintahan Gampong.

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

H. AFFAN ALFIAN